PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

RKPD
2026





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2026

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra RPD SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
SISTEMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD digunakan sebagai Pedoman dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tahunan Kota Tahun 2025.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana acuan dalam setiap pembangunan dan sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kota.

(3) Dokumen naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut;

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII PENUTUP

Pasal 3

RKPD merupakan penjabaran RPD Kota Tahun 2024-2026, RPD Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Pasal 4

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meletakkan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas PD dan lintas PD.

Pasal 6

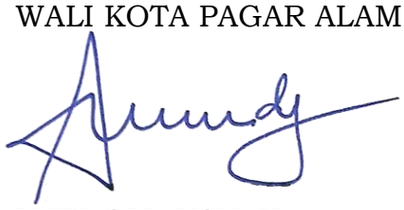
RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

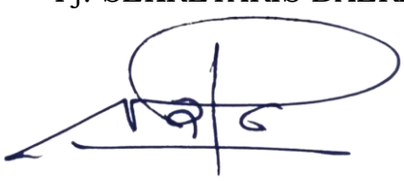
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Agustus 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,



LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,



DAHNIAL NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan berpedoman terhadap Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Bapak Ludi Oliansyah dan Ibu Hj. Bertha pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Selanjutnya, RKPD Tahun 2026 disusun juga mempedomani Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, serta berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Program Startegis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Program Strategis Nasional; dan kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2025.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

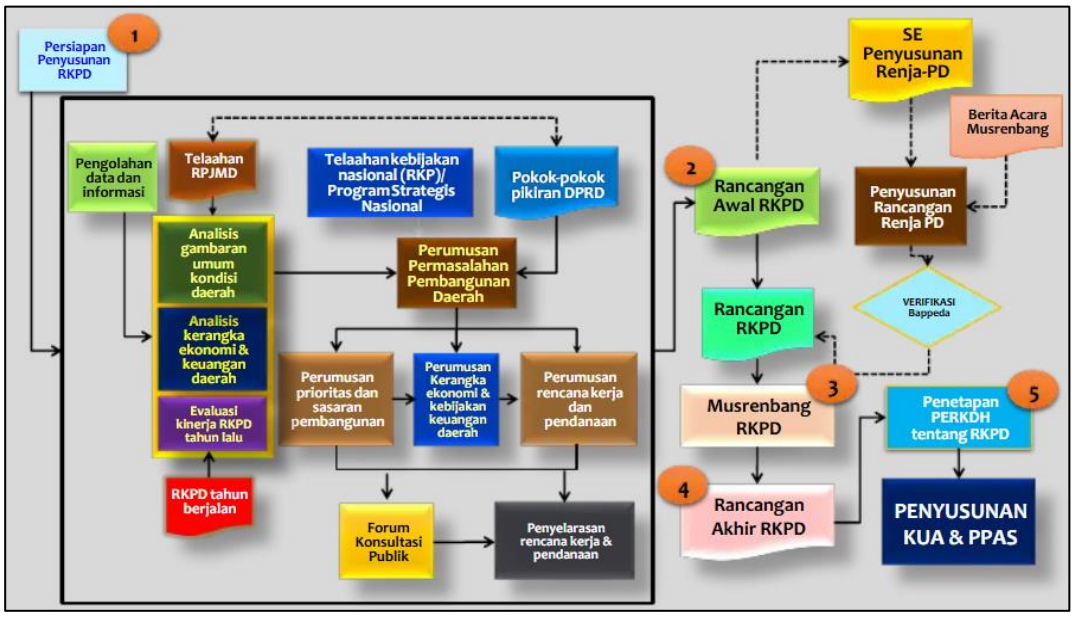
Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;

2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan RKPD Kota Kota Pagar Alam Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026



Sumber : Permendagri No. 86/2017

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 7 seri E);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Sumatera Selatan;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagaralam (Lembaran Daerah Kota Pagaralam Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 4 seri E);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

   RKPD Kota Kota Pagar Alam Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pagar Alam Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

2. RKPD dengan Rancangan RPJMD 2025-2029

   RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD mengacu pada Rancangan RPJMD dengan mempertimbangkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029.

   RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan Renja PD

   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

4. RKPD dan APBD

   RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

5. RKPD dan RTRW

   Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Pagar Alam sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

6. RKPD dan RPKD

   Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dimana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

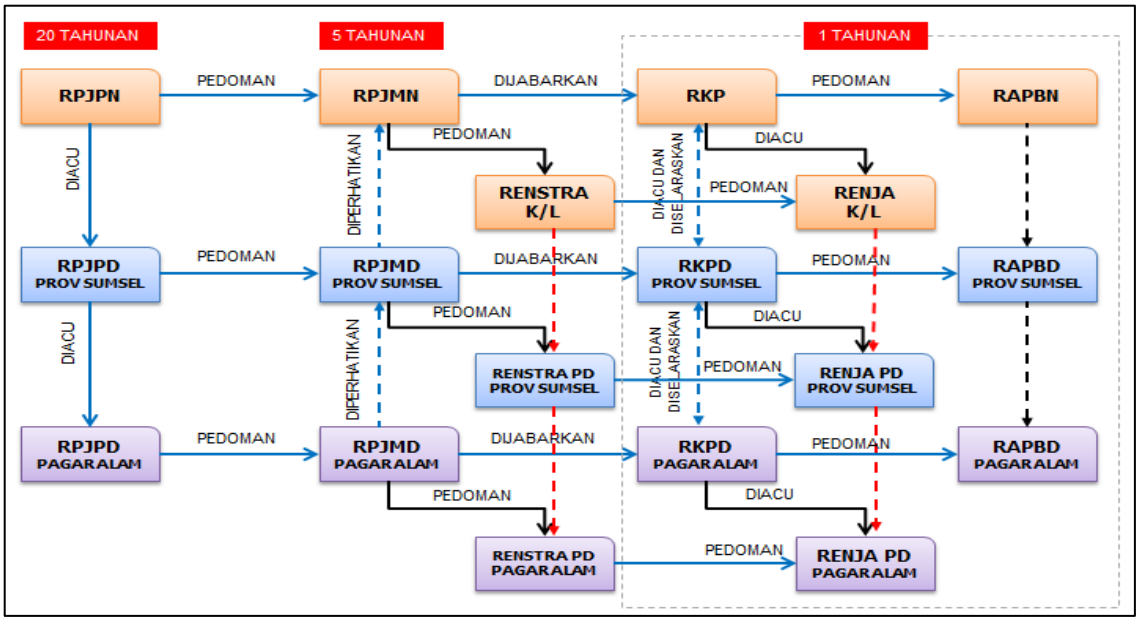
8. RKPD dan SPM

   Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

   Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Pagar Alam



1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045;
3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2026 bertujuan untuk :

1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan tetap mempertimbangkan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029;
3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026

Sistematika RKPD Kota Pagar Alam tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi RKPD sampai dengan tahun berjalan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, Arah kebijakan ekonomi daerah, serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024, keterkaitannya dengan RPJPD dan Rancangan RPJMD juga mempertimbangkan visi misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah, provinsi sumatera selatan dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang akan dicapai di tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Pagar Alam berdiri sebagai Kota Otonom dan terpisah dari Kabupaten Lahat mulai tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115). Data Sistem Informasi Profil Daerah, baik aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan publik. Aspek-aspek ini memberikan gambaran secara umum tentang kondisi daerah Kota Pagar Alam sekaligus menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan.

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Aspek Geografi menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya.

2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di bagian selatan provinsi tersebut, yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan dengan luas wilayah 633,66 Km2 atau 63.366 Ha. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

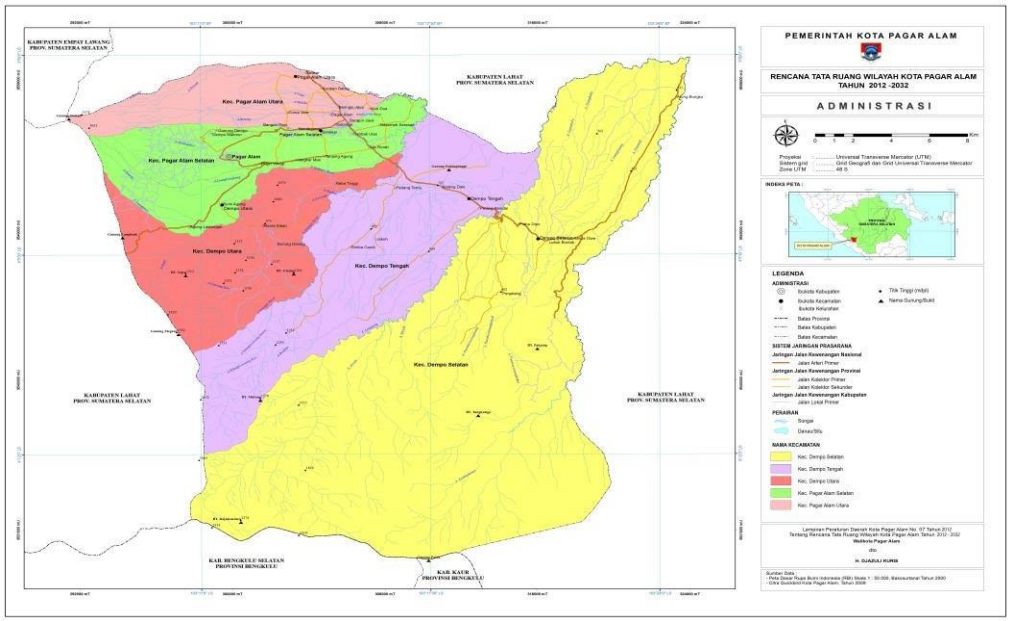
Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kota Pagar Alam

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)
1	Pagar Alam Utara	55,47	8,75
2	Pagar Alam Selatan	63,17	9,98
3	Dempo Utara	127,11	20,06
4	Dempo Tengah	144,05	22,73
5	Dempo Selatan	243,86	38,48
	Kota Pagar Alam	**633,66**	**100**

Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

Karakteristik Kota Pagar Alam memiliki ketinggian yang bervariasi dari 100 m sampai >1.000 m dari permukaan laut. Jenis tanah terdiri dari andosol dan latosol coklat dengan permukaan bergelombang sampai berbukit dimana Rata-rata curah hujan di Kota Pagar Alam berkisar antara 1.462 mm - 5.199 mm per tahun, dengan jumlah bulan basah lebih enam bulan per tahun. Suhu berkisar antara 200 - 280 C dan intensitas cahaya matahari antara 6 - 10 jam perhari.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Pagar Alam



Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

2.1.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Uraian tentang letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari: a) posisiastronomis; b) posisi geostrategik; dan c) kondisi/kawasan.

a) Posisi Astronomis

Kota Pagar Alam secara Astronomis terletak antara 3°59'11,09"LS - 4°15'30,54"LS dan 103°07'13,15"BT - 103°24'50,59"BT serta berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Lahat (Kecamatan Pajar Bulan dan Kecamatan Suka Merindu)
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
Sebelah Timur	:	Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Semendo), Kabupaten Lahat (Kecamatan Tanjung Sakti)
Sebelah Barat	:	Kabupaten Lahat (Kecamatan Kota Agung)

a) Posisi Geostrategik

Secara posisi geostrategik Kota Pagar Alam terletak di lereng Gunung Dempo sehingga memiliki letak yang sangat strategis untuk mengembangkan pariwisata bernuansa alami pegunungan. Posisi Kota Pagar Alam sebagai kota pegunungan menghubungkan berbagai daerah disekitarnya, seperti Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan konektivitas transportasi Bandara Atung Bungsu dan Terminal angkutan darat, Kota Pagar Alam dapat dijangkau dari berbagai pusat pemerintahan dan pusat-pusat produksi daerah lainnya, namun terkait moda transportasi berbasis perairan, Kota Pagar Alam tidak memiliki wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai aksesabilitas transportasi.

b) Kondisi/Kawasan

Kondisi/kawasan Kota Pagar Alam didominasi pada kawasan lindung, dilengkapi dengan kawasan budidaya yang mayoritas pemanfaatannya pada sektor pertanian perkebunan. Pemanfaatan lahan di sektor pertanian perkebunan yang membentang disekitar lereng Gunung Dempo menjadikan kondisi kawasan di Kota Pagar Alam berpotensi pula dikembangkan sebagai kawasan kepariwisataan yang berbasis pertanian. Selain itu di beberapa titik kawasan Kota Pagar Alam terdapat warisan peninggalan cagar budaya era megalitikum yang dapat pula menjadi penunjang

kepariwisataan.

2.1.1.1.1.2 Topografi

Uraian tentang kondisi topografi atau luasan permukaan bumi yang ditunjukkan dengan elevasi atau kemiringan lahan di Kota Pagar Alam, sebagian besar Kota Pagar Alam merupakan daerah berbukit dan bergunung terutama bagian barat laut serta bagian selatan dan tenggara. Bagian tengah hingga timur laut merupakan dataran landai. Daerah yang berbukit hingga bergunung berkisar diketinggian 1.250 s.d 3.195 mdpl. Sedangkan dataran yang relatif landai berkisar pada ketinggian 441 s.d 1.000 m di atas permukaan laut. Sebagai daerah pegunungan, wilayah Kota Pagar Alam meliputi 5 (Lima) morfologi bergelombang hingga dataran tinggi antara 500-1000 meter. Kondisi ini menuntut di beberapa wilayah Kota Pagar Alam difungsikan sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan upaya mitigasi pencegahan erosi yang dapat menjadi faktor kebencanaan.

2.1.1.1.1.3 Geologi

Uraian tentang Geologi, antara lain terdiri dari: a) struktur dan karakteristik; dan
b) potensi.

a. Struktur dan Karakteristik

Secara geologi daerah Pagar Alam tersusun atas formasi pasemah dan formasi bintuan. Pada bagian bawah tersusun atas formasi pasemah yang terdiri atas tuf. Diatasnya terendapkan formasi bintuan yang tersusun oleh batu pasir tufan berbatu apung, tuf pasiran, konglomerat dan tuf. Jenis tanah di daerah Pagar Alam terdiri atas: tanah latosol dan tanah andosol. Tanah latosol terjadi akibat abu vulkanik dengan pelapukan yang sudah lanjut, kandungan mineral primer dan unsur hara rendah, keasaman tinggi, kandungan bahan organik rendah. Tanah andosol berwarna abu tua, coklat tua sampai hitam dan lapisan tanah bawahnnya coklat sampai coklat kekuning-kuningan. Tanah andosol berasal dari vulkanik gunung.

b. Potensi

Kota Pagar Alam memiliki potensi yang besar sebagai pusat pengembangan perkebunan, termasuk pertanian basah di beberapa kawasan dataran yang relatif landai, sehingga Kota Pagar Alam adalah satu-satunya kota yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Nuansa

pegunungan serta keindahan alam sangat berpotensi dikembangkan sebagai daya ungkit perekonomian di sektor kepariwisataan dan kebudayaan.

2.1.1.1.1.4 Hidrologi

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, dan sebagainya.

Kualitas air sungai di Kota Pagar Alam dapat diketahui melalui pemantauan, pada 5 titik pantau di 3 (tiga) kecamatan. Pemantauan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap titik setiap tahunnya.

Tabel 2.2
Kondisi Sungai di Kota Pagar Alam Tahun 2020

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan(m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/s)	Debit Min (m^3/s)
1.	Sungai Betung	10	8,7	6,5	1,35	4,2	3
2.	Sungai Kundur	25	8,1	6,2	0,8	3,5	2
3.	Sungai Perikan	4	7,4	6,5	1,4	4	3
4.	Sungai Air Cawang	2	4	2,5	0,8	10	6
5.	Sungai Neruang	3	15	12	1,3	3	1,5
6.	Sungai Suban	4	20	15	1,4	8	6,2
7.	Sungai Besemah	58	18	13	1	10	8,5
8.	Sungai Lematang	38	6	4,5	0,75	10,6	6,32
9.	Sungai Endikat	83	8	6,5	1,2	12	10
10.	Sungai Selangis Kecil	32	12	8	1,5	20,4	18,2
11.	Sungai Jernih	21	7,4	6,5	1,4	6	4,5
12.	Sungai Merah	23	4,5	3,5	0,5	8,03	5,5
13.	Sungai Payang	2	8,2	6,5	1,2	4	3,2
14.	Sungai Selangis Besar	60	5,5	4	0,8	24,9	11
15.	Sungai Putih	3	4	3	0,5	14,5	10
16.	Sungai Luang Kering	3	7,5	5,2	1,3	2	1,5
17.	Sungai Melintang	10	6,2	4,5	1	1	0,5
18.	Sungai Lawu	8	10	8,5	1,5	5	3
19.	Sungai Bemban	6	12	5,2	1,3	4	2
20.	Sungai Salak	9	8	6,5	0,5	3	2,5
21.	Sungai Padang Tibung	2	7	4,2	0,8	9	7,2
22.	Sungai Pengiran	2	8	6	0,6	2	1,5

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan(m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/s)	Debit Min (m^3/s)
23.	Sungai Cawang Kiri	23	6	4,5	0,7	4	3,1
24.	Sungai Cawang Kanan	20	6,5	4,2	0,1	16,4	10,6
25.	Sungai Cawang	8	15	12	1,5	8	5,5
26.	Sungai Panjang	2	20	17	1,8	3	1,2
27.	Sungai Cawang Lame	4	12	9	1,1	10,2	7
28.	Sungai Air Perikan	7	6	4,2	0,5	6,5	4

Sumber: Analisa IKPLHD Kota Pagar Alam Tahun 2020

Terkait dengan sumber daya air dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah.

a. Sumber Daya Air Permukaan

Wilayah Kota Pagar Alam merupakan daerah kaya sumber daya air, karena dialiri oleh banyak sungai dan anak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Endikat, Sungai Lematang, Sungai Besemah, Sungai Selangis Besar, Sungai Cawang dan Sungai Betung. Semua sungai tersebut bermuara pada sungai Lematang di Kabupaten Lahat. Sungai yang ada berfungsi sebagai sumber daya air dan sebagai sumber pengendali banjir di wilayah Kota Pagar Alam. Adapun jaringan sungai di Kota Pagar Alam diantaranya adalah:

- Sub daerah aliran sungai di wilayah Kota Pagar Alam terdiri dari Sungai Selangis, Sungai Lematang, Sungai Endikat, Sungai Cawang, dan Sungai Selangis Besar;
- Pengendalian banjir terdiri dari waduk, kanal, kolam retensi, sungai, rawa, pintu-pintu air, dan dataran banjir. Pengendalian banjir dipadukan dengan sistem drainase yang menggunakan pendekatan DAS atau Sub DAS.

1) Jaringan Irigasi

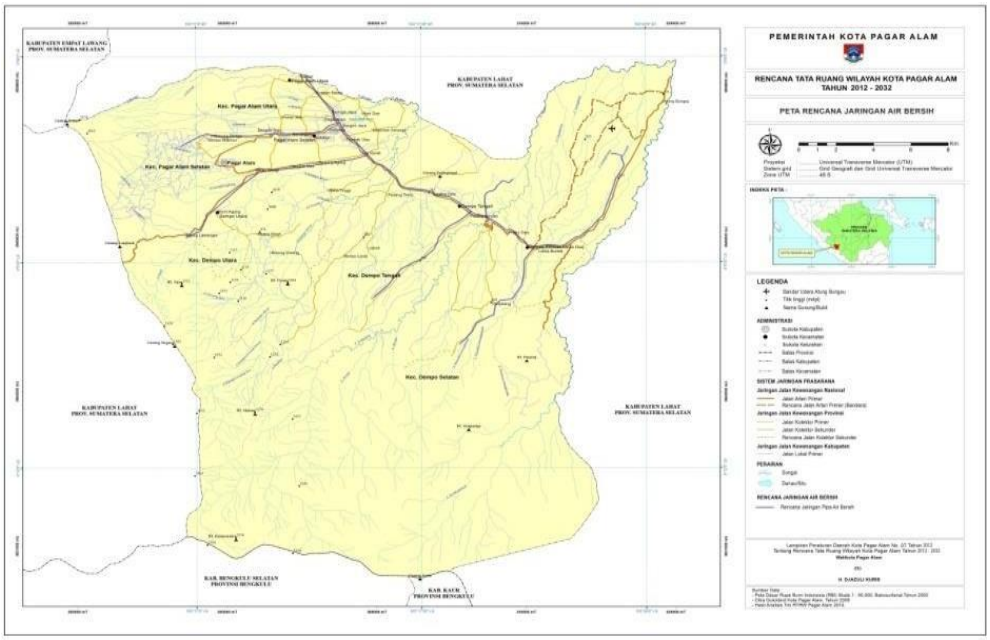
Sistem jaringan sumber daya air dan jaringan sungai yang ada di Kota Pagar Alam, terkait dengan pengembangan kawasan budidaya dalam perkotaan masih kental dengan kegiatan pertanian. Untuk itu jaringan irigasi dikembangkan dengan ketentuan diantaranya:

- Jaringan irigasi yang ada harus dipertahankan dan dipelihara;
- Jaringan irigasi yang akan dikembangkan dan diarahkan pada lahan potensial untuk lahan sawah. Jaringan irigasi dikembangkan dan diarahkan pada lahan potensi untuk lahan sawah yaitu di Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Pagar Alam Utara.

2) Jaringan Air Baku

Jaringan air baku sebagaimana bertujuan untuk memberikan akses air baku secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Jaringan air baku Kota Pagar Alam dikembangkan di lima kecamatan secara terpisah sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyediaan air baku.

Gambar 2.2
Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

b. Sumber Daya Air Tanah

Persebaran keberadaan air tanah di Kota Pagar Alam dapat dibedakan menjadi wilayah air tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan wilayah air tanah kaki gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah di wilayah Kota Pagar

Alam belum banyak dilakukan pengukuran. Penurunan kualitas air menjadi isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pagar Alam karena berkaitan erat dengan masalah pengelolaan limbah cair. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pagar Alam, tentu akan mempengaruhi kebutuhan utama masyarakat berupa air bersih. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal juga akan meningkat yang akan mengakibatkan semakin padatnya penduduk terutama di wilayah yang dijadikan pemukiman.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Pemukiman yang padat akan meningkatkan jumlah penggunaan air bersih yang berbanding lurus dengan volume limbah cair domestiknya. Kebutuhan masyarakat Kota Pagar Alam akan air bersih di daerah pemukiman mayoritas masih bergantung pada air tanah berupa sumur-sumur dangkal yang kualitas airnya memang masih baik dan belum tercemar. Sumber-sumber penggunaan air bersih, terutama untuk air minum di Kota Pagar Alam terdapat pada Tabel dibawah berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Kota Pagar Alam Tahun 2020

No	Kecamatan	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainya
1	Pagar Alam Utara	1.557	5.984	28	NA	18	2.248
2	Pagar Alam Selatan	1.689	2.666	2.758	NA	26	4.024
3	Dempo Utara	NA	472	3.802	NA	5	1.521
4	Dempo Selatan	725	1.379	NA	NA	2	1.354
5	Dempo Tengah	NA	2.026	64	NA	1	1.658
	Total	**3.971**	**12.527**	**6.652**	**NA**	**52**	**10.805**

Sumber: Analisa IKPLHD Kota Pagar Alam Tahun 2020 Keterangan: NA = Tidak terdapat sub komponen yang dimaksud

Terkait dengan hidrologi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup, air dapat diuraikan data persebaran jasa ekosistem untuk penyedia air bersih, jasa ekosistem penyedia air bersih paling luas yaitu kelas rendah dengan luasan 31.628,51 Ha (49,91%), kawasan sebaran meliputi seluruh kawasan di Kota Pagar Alam yang berada di wilayah hulu dan hilir pada setiap kecamatan. Urutan kedua yaitu kelas sangat rendah dengan luasan 23.319,53 Ha (36,80%), kawasan sebaran meliputi seluruh kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu wilayah tengah di setiap kecamatan. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem penyedia

air bersih sedang seluas 5.308,90 Ha (8,38%) terdapat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, sebelah timur dari Kota Pagar Alam. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem penyedia air bersih dapat melihat tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.4

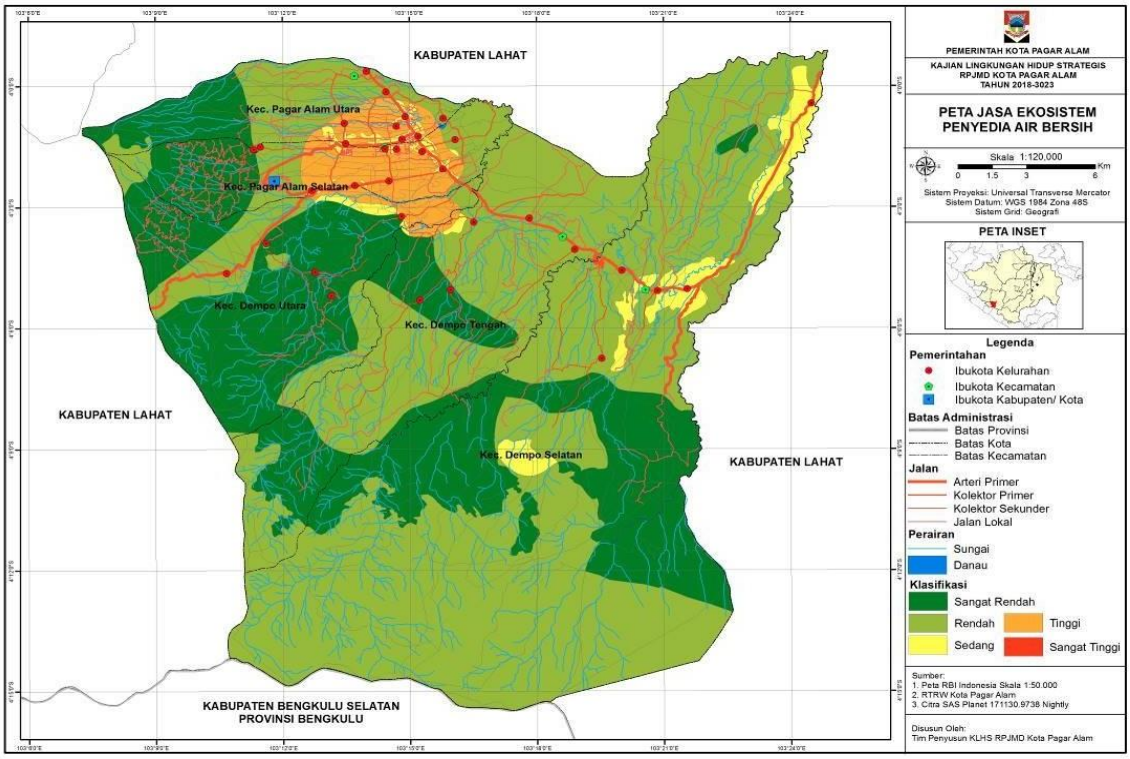
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	23.319,53	36,80
II – Rendah	31.628,51	49,91
III – Sedang	5.308,90	8,38
IV – Tinggi	3.109,05	4,91
V – Sangat Tinggi	0,00	0,00
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.3

Peta Sebaran Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih di Kota Pagar Alam



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Daya Dukung dan Daya Tampung Terkait dengan Ambang Batas Penyediaan Air dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Analisa program daya dukung air dilakukan sebagai berikut:

1) Ketersediaan (Supply) Air

Analisis Ketersediaan Air memperhitungkan ketersediaan air dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, dengan rumus sebagai berikut:

$C = \Sigma (ci \times Ai) / \Sigma Ai$ $SA = 10 \times C \times R \times A$

Keterangan :

SA : Ketersediaan Air (m3/tahun)

C : Koefisien limpasan tertimbang;

Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan i;

Ai : Luas penggunaan lahan i (Ha) dari data Badan Pertanahan Nasional;

R : Rata-rata curah hujan bulanan wilayah (mm/bulan) dari Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

A : luas wilayah (ha)

Tabel 2.5 Luas Penggunaan Lahan di Kota Pagar Alam Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km^2)	Koefisien	Luas x Koefisien
1	Hutan Lahan Kering Primer	157,71	0,18	2.838,78
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	30,81	0,18	554,58
3	Kebun Campuran	4,81	0,18	86,58
4	Lahan Terbuka	0,45	0,20	9,00
5	Pemukiman	10,93	0,70	765,10
6	Perairan Darat	0,64	0,10	6,40
7	Perkebunan	17,40	0,18	313,20
8	Pertanian Lahan Kering	370,58	0,35	12.970,30
9	Sawah	40,32	0,30	1.209,60
Luas Total		**633,66**	0,26	18.753,54

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

SA = 10 x C x R x A

SA = 10 X 0,26 X 332 X 63.366

SA = 54.697.531,2 m3 / tahun

Jumlah Potensi Ketersediaan Air Kota Pagar Alam

- Ketersediaan Air Tanah Tertekan jumlah 4.154.000.000 m3/tahun
- Ketersediaan Air Tanah Tidak Tertekan jumlah 235.000.000 m3/tahun
- Ketersediaan Air Permukaan jumlah 35.009.715 m3/tahun Sehingga total ketersediaan air sejumlah 4.424.009.715 m3/tahun

2) Kebutuhan (Demand) Air

Kebutuhan air adalah sejumlah air yang digunakan untuk berbagai peruntukkan atau kegiatan masyarakat dalam wilayah tertentu. Metode untuk menghitung kebutuhan air mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Kebutuhan (demand) Air diukur dengan rumus sebagai berikut: DA = N X KHLA

Keterangan :

DA : Total Kebutuhan air (m3/Tahun)

N : Jumlah proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2023

KHLA : Kebutuhan air untuk hidup layak (1000m3/Jiwa/tahun) untuk kebutuhan domestik dan pangan menurut WHO.

Namun jika dihitung dengan pendekatan rincian kebutuhan sesuai hasil KLHS RPJMD Kota Pagar Alam sebagai berikut:

- Kebutuhan air sesuai jumlah penduduk (157.173 jiwa) x kebutuhan air (120 lt/hari/orang) maka jumlah kebutuhan airnya sebesar 18.860.760,00 m3/tahun
- Kebutuhan Lahan Basah (4.032,00 Ha) x kebutuhan air (1 lt/ha) maka jumlah kebutuhan airnya sebesar 125.411.328,00 m3/tahun
- Kebutuhan Lahan Kering (39.279,00 Ha) x kebutuhan air (0,3 lt/ha) maka jumlah kebutuhan airnya sebesar 366.520.204,80 m3/tahun
- Kebutuhan Industri yaitu jumlah karyawan (5.187 Jiwa) x Kebutuhan air (500 lt/hari/orang) maka jumlah kebutuhan airnya sebesar 946.627,00 m3/tahun.

Total kebutuhan air mencapai 498.861.459,30 m3/tahun. Pemakaian air setiap tahun

cenderung meningkat bila diperhatikan antar kebutuhan air dengan persediaan, maka:

- Bila SA>DA, daya dukung air dinyatakan surplus;
- Bila SA<DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui

Berdasarkan pada perhitungan ternyata Kota Pagar Alam surplus air.

2.1.1.1.1.6 Klimatologi

Perubahan iklim telah mempengaruhi komunitas yang tak terbilang jumlahnya, memaparkan mereka kepada meningkatkan ancaman-ancaman dan membuat mereka semakin rentan, kita bisa memperkirakan perubahan iklim akan semakin jelas, dan bagi sebagian komunitas menjadi bencana, dalam tahun-tahun mendatang. Untuk merencanakan langkah adaptasi yang efektif, analisa perubahan iklim secara ilmiah adalah penting untuk konteks yang luas. Akan tetapi, pada tingkat lokal, informasi dan pengetahuan yang paling relevan sering telah ada atau bisa diperoleh melalui analisa stakeholder (pemangku kebijakan) sendiri. Pengetahan setempat juga memiliki otoritas terpercaya untuk memberitahu dan mempengaruhi kebijakan. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan, Angin Puting Beliung.

Dalam mendukung pembangunan tahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, telah menyiapkan berbagai perangkat baik untuk mendukung mainstreaming atau pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan, yaitu Permen LHK No. P.33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Permen LHK No. P.7/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim, Rencana Adaptasi Nasional dan SIDIK, maupun untuk mendukung aksi adaptasi di tingkat tapak yaitu Permen LHK No. P.84/2016 tentang Program Kampung Iklim dan Permen LHK No. P.72/2017 tentang Sistim Registri Nasional. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, dan upaya adaptasinya yang diawali dengan identifikasi adaptasi berbasis ekosistem dengan berpedoman Perdirjen PPI No.4/2019 tentang Pedoman Identifikasi Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem.

Perubahan iklim menciptakan hambatan tambahan untuk mengakhiri kemiskinan dan

mencapai keadilan sosial. Meningkatnya suhu, bertambahnya ketidakpastian soal musim hujan, dan banjir yang lebih sering dan parah, angin puyuh, dan kekeringan, kesemuanya memiliki dampak yang signifikan bagi ketahanan penghidupan kaum miskin. Pakar pembangunan tengah memperhatikan dampak langsung akibat perubahan iklim dalam kerja-kerja mereka di seluruh dunia untuk memastikan program pembangunan bisa mengurangi kerentanan manusia terhadap perubahan iklim, kita harus memahami siapa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim tersebut dan mengapa. Kemudian, kita harus menerapkan informasi ini dengan merancang, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan.

Pendekatan terhadap adaptasi perubahan iklim didasarkan pada pengetahuan bahwa manusia harus diberdayakan untuk mentransformasikan dan mengamankan hak dan penghidupan lingkungan mereka. Pendekatan ini juga mengenali bahwa institusi lokal dan nasional memainkan peran penting dalam kebijakan-kebijakan publik, untuk membentuk kemampuan beradaptasi manusia. Memahami konsep kerentanan terhadap iklim dan analisa kapasitas pemangku kepentingan membantu untuk memahami dampak perubahan iklim bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Dengan memadukan pengetahuan lokal dengan data ilmiah, proses ini membentuk pemahaman masyarakat soal resiko iklim dan strategi adaptasi. Penyediaan kerangka kerja untuk dialog dalam masyarakat, sebagaimana antara komunitas dan pemangku kepentingan yang lain memberikan pondasi solid bagi identifikasi strategi praktis guna memfasilitasi adaptasi berbasis komunitas terhadap perubahan iklim. Adapun di Kota Pagar Alam berdasarkan data yang tercatat dari Pos Pengamatan Gunung Api Dempo Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, curah hujan rata-rata bulanan di wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Curah Hujan Rata-rata Bulanan di Kota Pagar Alam Tahun 2021

Bulan	2016		2017		2018		2019		2021	
	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan	
	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)
Januari	493	22	138	10	50.90	18	38	12	241.00	17
Februari	391	17	320	19	113	21	234.50	19	214.00	19
Maret	585	23	254	16	104.50	25	136	16	405.00	26

Bulan	2016		2017		2018		2019		2021	
	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan		Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan	
	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hari)
April	418	22	293	16	89.40	19	183.10	18	356.00	16
Mei	302	14	264	16	63.30	10	72.60	8	305.00	17
Juni	178	13	37	4	46.80	9	58	11	167.00	18
Juli	182	14	157	11	24.90	6	32.70	10	83.00	12
Agustus	217	11	138	10	81.30	17	23.30	3	97.00	11
September	278	18	185	9	28.90	8	5.40	2	279.00	18
Oktober	368	22	207	15	57.20	15	65.20	7	272.00	20
November	313	21	220	21	121.80	25	112.10	13	247.00	17
Desember	63	7	112	11	52.50	17	170.20	13	55.00	27

Sumber : BPS Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Pos Pengamatan Gunung Api Dempo)

Pada table diatas menjelaskan bahwa curah hujan rata-rata bulanan tertinggi di Kota Pagar Alam terjadi pada bulan Maret dengan curah hujan bulanan 405 mm3 dengan jumlah hari hujan 26 hari per bulan, sedangkan curah hujan bulanan terendah terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan bulanan adalah 55 mm3 dengan jumlah hari hujan 27 hari per bulan.

Berdasarkan data Pengamatan Gunung Api Dempo Kota Pagar Alam suhu udara rata-rata tahun ini berkisar 200C sampai dengan 230C. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

Suhu Udara Rata-rata Bulanan di Kota Pagar Alam Tahun 2019-2021

Bulan	Suhu Udara di Kota Pagar Alam (Derajat Celcius)								
	Minimum			Maksimum			Rata-rata		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Januari	17.00	17.00	17.00	28.00	30.00	28.00	21.71	23.00	22.00
Februari	17.00	16.00	17.00	35.00	29.00	28.00	20.21	23.00	22.00
Maret	15.50	17.00	17.00	35.00	29.00	28.00	22.54	23.00	22.00
April	17.00	17.00	17.00	30.00	29.00	30.00	21.48	23.00	24.00
Mei	15.00	17.00	17.00	29.00	29.00	29.00	22.65	22.00	23.00
Juni	14.00	17.00	17.00	30.00	29.00	29.00	22.11	23.00	23.00
Juli	14.00	16.00	16.00	31.00	29.00	30.00	22.30	23.00	23.00
Agustus	14.00	16.00	16.00	30.00	29.00	30.00	22.68	23.00	23.00
September	14.00	17.00	17.00	31.00	29.00	29.00	22.63	23.00	23.00
Oktober	14.00	17.00	17.00	31.00	29.00	29.00	23.11	22.00	23.00

Bulan	Suhu Udara di Kota Pagar Alam (Derajat Celcius)								
	Minimum			Maksimum			Rata-rata		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
November	16.00	17.00	17.00	31.00	28.00	28.00	22.94	23.00	22.00
Desember	17.00	17.00	17.00	30.00	29.00	28.00	21.98	22.00	22.00

Sumber : BPS Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Pos Pengamatan Gunung Api Dempo)

Pada tabel 2.7 menjelaskan bahwa suhu rata-rata bulanan tertinggi di Kota Pagar Alam terjadi pada bulan oktober dengan suhu rata rata bulanan 240C pada bulan April.

Berdasarkan data persebaran jasa ekosistem untuk pengatur iklim, sebaran kelas jasa ekosistem pengatur iklim di Kota Pagar Alam tersebar sebagai berikut untuk jasa ekosistem pengatur iklim paling luas yaitu kelas sedang dengan luasan 19.123,62 Ha (30,18%), kawasan sebaran meliputi daerah selatan dari Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Utara. Urutan kedua yaitu kelas sangat tinggi dengan luasan 18.742,64 Ha (29,58%), kawasan sebaran meliputi Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Pagar Alam Utara, khususnya di Gunung Dempo. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem pengatur iklim paling sedikit yaitu kelas sangat rendah dengan luas 4.093,45 Ha (6,46%) yang meliputi bagian kecil dari Kecamatan Pagar Alam Selatan. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem pengatur iklim dapat melihat tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.8

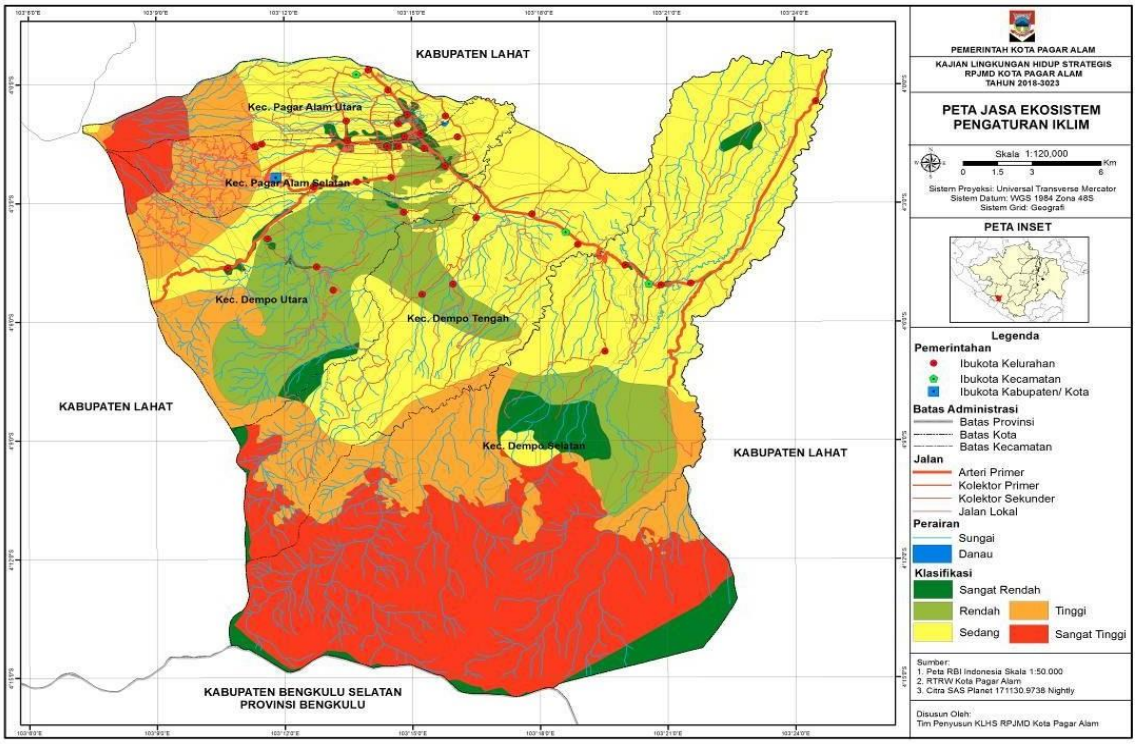
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	4.093,45	6,46
II – Rendah	6.809,28	10,75
III – Sedang	19.123,62	30,18
IV – Tinggi	14.597,00	23,04
V – Sangat Tinggi	18.742,64	29,58
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2021

Gambar 2.4

Peta Sebaran Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pagar Alam



Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2021

2.1.1.1.1.7 Peruntukan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur dan pola ruang pada kota. Penataan ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat terkait dengan ekonomi, sosial, lingkungan dan kebudayaan.

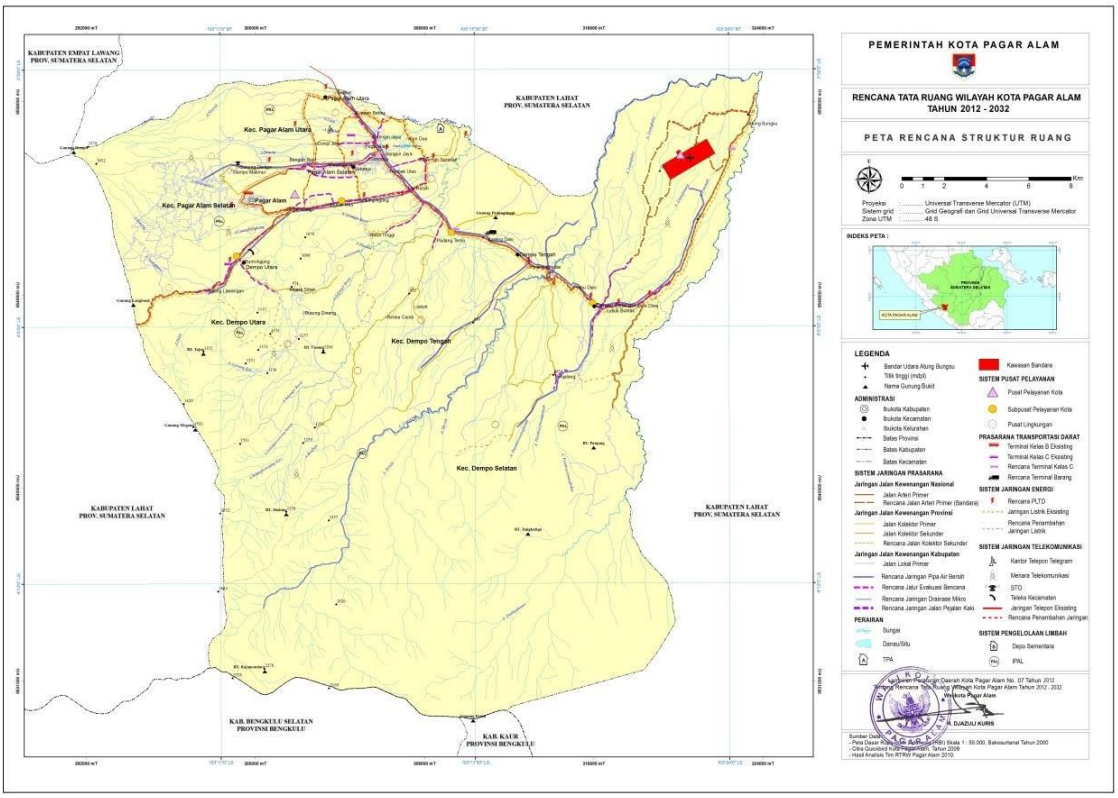
a. Struktur Ruang

Struktur ruang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi sumber daya air serta prasaran perkotaan. Struktur ruang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana perkotaan. Konsep pengembangan struktur ruang di Kota Pagar Alam disesuaikan dengan fungsi serta kegiatan di wilayah Kota

Pagar Alam dengan memperhatikan aspek-aspek pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Gambar 2.5

Peta Struktur ruang Kota Pagar Alam



Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

b. Pemanfaatan/pola ruang

Pemanfaatan ruang wilayah kota yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang tergolong dalam rencana pengelolaan pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, danau, dan jalur hijau, kawasan cagar alam dan suaka margasatwa, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam. Sedangkan yang termasuk dalam rencana kawasan budidaya perkotaan adalah kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pusat pemerintahan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata dan kawasan pemakaman umum. Berdasarkan hasil analisis rencana pola

ruang Kota Pagar Alam tahun 2012-2032 yang terbagi dalam dua pola rencana yaitu kawasan lindung (61,6 persen) dan kawasan budidaya (38,4 persen). Adapun rincian luas rencana pola ruang Kota Pagar Alam sebagai berikut.

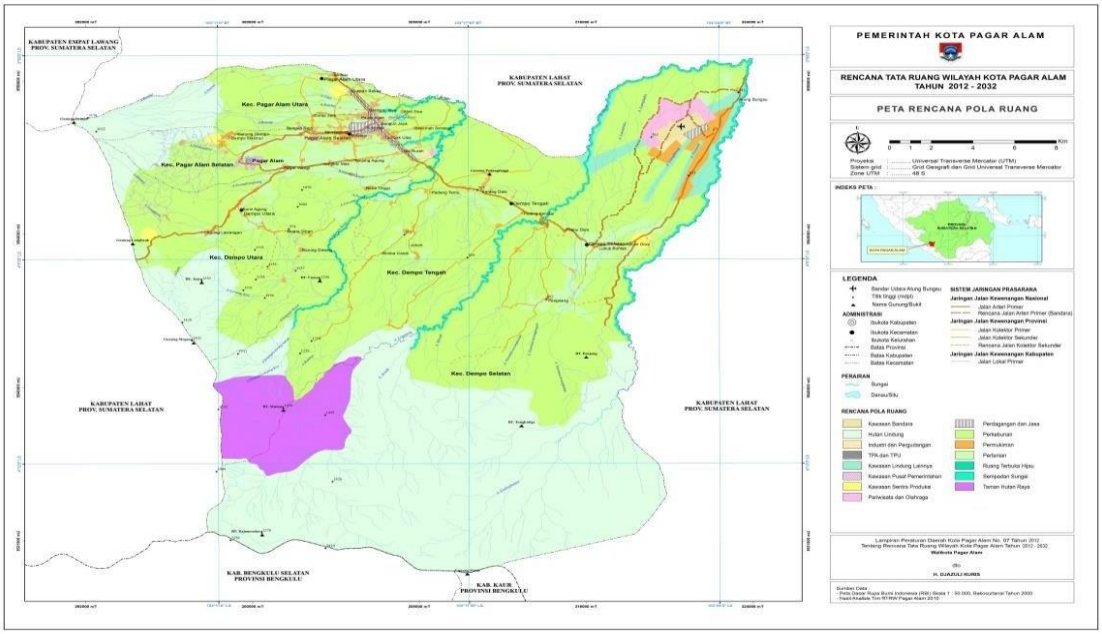
Tabel 2.9

Rencana Pola Ruang Kota Pagar Alam Tahun 2012 – 2032

No	Pola Ruang	Luasan
A.	**KAWASAN LINDUNG**	
1	Hutan Lindung	28.740 Ha
2	Kawasan Lindung di luar hutan Lindung	10.290 Ha
	Jumlah	**39.030 Ha**
B.	**KAWASAN BUDIDAYA**	
1	Tanaman Sayuran	1.700 Ha
2	Perkebunan Rakyat	7.250 Ha
3	Sawah	8.495 Ha
4	Perumahan	2.877 Ha
5	Lingkungan Industri Kecil	8 Ha
6	Kawasan Industri	170 Ha
7	PTPN VII	1.575 Ha
8	Perdagangan Jasa	100 Ha
9	Bandara	500 Ha
10	Perikanan dan Peternakan	253 Ha
11	Kawasan Pemerintahan	100 Ha
12	Kawasan Wisata	300 Ha
13	Pemakaman	100 Ha
14	Fasilitas Pendidikan	388 Ha
15	Fasilitas Ibadah	73 Ha
16	Fasilitas Kesehatan	55 Ha
17	Ruang Terbuka Hijau	343 Ha
18	Ruang Terbuka Non Hijau	49 Ha
	Jumlah	**24.336 Ha**
	TOTAL	**63.366 Ha**

Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

Gambar 2.6
Pola Ruang Kota Pagar Alam



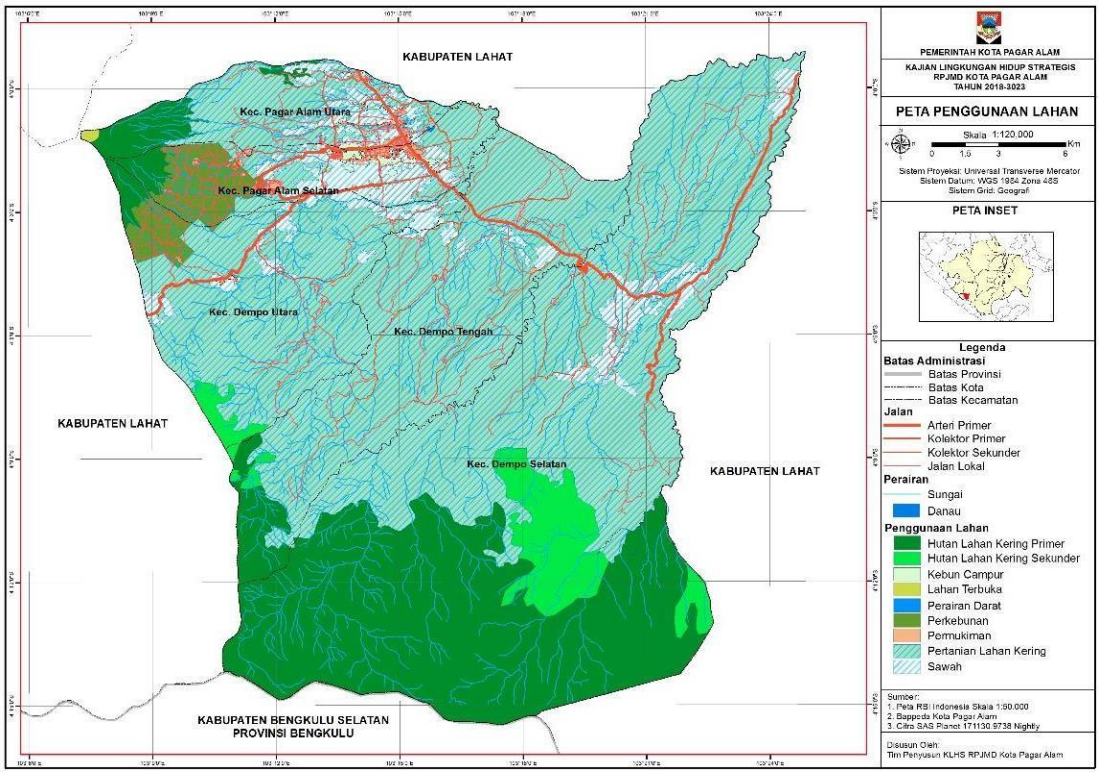
Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

1) Pemanfaatan lahan

Penggunaan lahan di Kota Pagar Alam terdiri dari 9 penggunaan lahan yaitu pemukiman, perkebunan, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, kebun campuran, lahan terbuka, perairan darat, pertanian lahan kering dan sawah. Penggunaan lahan yang terluas yaitu pertanian lahan kering dengan 370,58 Km2 (58,48%), terluas kedua yaitu penggunaan lahan hutan lahan kering primer dengan luas 157,71 Km2 (24,89%) sedangkan penggunaan lahan paling kecil yaitu lahan terbuka dengan luas 0,45 Km2 (0,07%).

Gambar 2.7

Penggunaan Lahan



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

2) Kawasan lindung

Kawasan lindung di Kota Pagar Alam meliputi Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Ruang terbuka hijau kota, Kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana alam dan Kawasan lindung geologi. Penetapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga resapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya meliputi :

- Hutan lindung
- Kawasan Hutan lindung anatara lain diatur dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2021. Kawasan hutan lindung memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya dengan kriteria kawasan hutan yang mempunyai faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan, serta kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan kawasan hutan yang mempunyai ketinggian ≥2.000 mdpl. Penetapan Kawasan hutan lindung Kota Pagar Alam dengan spesifikasi jenis hutan lindung ± 28,740 ha dan kawasan resapan air yang juga termasuk bagian dari hutan lindung tersebut serta Kawasan perlindungan setempat, dengan spesifikasi jenis sempadan sungai.

- Kawasan resapan air

  Kawasan resapan air meliputi Kawasan hutan lindung bukit dingin dan bukit jambul seluas 17.680 ha dan Kawasan yang memiliki jenis tanah regosol, litosol dan podsolik dengan struktur tanah mudah meresapkan air dan geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar.

- Kawasan Perlindungan Setempat

Merujuk pada Kriteria Penetapan Kawasan Lindung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Sempadan Sungai adalah:

- Kawasan sepanjang bantaran sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sungai;
- Tujuan perlindungan, melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
- Kriteria sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar, dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
- Sungai Selangis (Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan) dan Sungai Lematang (Kecamatan Dempo Tengah), yang diidentifikasi sebagai sungai besar, kawasan dikiri-kanannya sejauh 100 meter (buffer 100 meters) ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- Sungai Endikat Kanan dan Kiri, Sungai Kera, Sungai Putih, Sungai Cawang, dan

Sungai Selangis Besar, beserta dengan anak sungai yang lain diidentifikasi sebagai sungai kecil, yakni dengan kriteria 50 meter kiri-kanannya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Dengan demikian, masing-masing kawasan di bantaran sungai besar dan sungai kecil yang telah diutarkan sebelumnya praktis tidak dapat dikonversi menjadi jenis kegiatan budidaya, mengingat kawasan tersebut merupakan Kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana prasarana lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Luas sempadan sungai di Kota Pagar Alam yang dijadikan sebagai kawasan lindung sebesar 1.555,4 Ha. Sempadan sungai yang termasuk didalam kawasan perlindungan setempat ditetapkan di Sungai Selangis, dan Sungai Lematang, Sungai Endikat Kanan, Sungai Endikat Kiri, Sungai Kera, Sungai Putih, Sungai Cawang, dan Sungai Selangis Besar.

- Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan pada daerah yang sudah terbangun dengan intensitas bangunan cukup tinggi. Adapun fungsi dari ruang terbuka hijau ini adalah sebagai paru-paru kota. Untuk itu maka perlu disediakan satu RTH pada daerah terbangun kota. Luas kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Pagar Alam mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dengan ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan sebesar 30% dengan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau private. Dengan demikian kebutuhan ruang sebagai ruang terbuka hijau berada dalam kawasan terbangun diantaranya adalah kawasan pusat kota, kawasan sekitar bandara, kawasan pusat pemerintahan dan kawasan permukiman. Proporsi luas kebutuhan ruang RTH pada masing-masing kawasan diantaranya; 30 Ha kawasan Perkotaan, 30 Ha kawasan sekitar bandara, 30 Ha kawasan pusat pemerintahan dan 253 Ha kawasan permukiman. Dengan demikian secara keseluruhan luas kebutuhan

ruang terbuka hijau di Kota Pagar Alam adalah sebesar 343 Ha. Ruang terbuka hijau kota ditetapkan sebagai berikut:

- kawasan pusat Kota Pagar Alam, ditetapkan di Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara yaitu Dempo Park seluas kurang lebih 20 ha;
- kawasan sekitar bandara dengan luas kurang lebih 150 ha;
- kawasan pusat pemerintahan dengan luas kurang lebih 30 ha;
- Kawasan peruntukan pemakaman umum yang tersebar di 5 kecamatan dengan luas kawasan kurang lebih 100 ha lebih.

- Kawasan Cagar Budaya

Kriteria Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Pendidikan (Monumen Ordonantie Staats Blad 1931), yaitu tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penetapan kawasan cagar budaya bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik, serta mempertahankan warisan budaya. Kawasan cagar budaya di Kota Pagar Alam meliputi situs purbakala Megalith batu Bedegung di Kecamatan Dempo Selatan, batu Megalith dan Megalith Tegur Wangi di Kecamatan Dempo Tengah, Megalith Blumai di Kecamatan Dempo Utara, Megalith Tanjung Aro di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Megalith Talang Darat di Kecamatan Pagar Alam Utara, Rumah Tradisional Besemah di Kecamatan Dempo Selatan, Rumah Tradisional Besemah di Kecamatan Dempo Tengah, Rumah Tradisional Besemah di Kecamatan Dempo Utara, Rumah Tradisional di Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan Rumah Tradisional Besemah di Kecamatan Pagar Alam Utara.

2.1.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Analisis potensi pengembangan wilayah didasarkan pada :a.Isu pengembangan wilayah, b.Prospek pengembangan wilayah, c.Konsep Pengembangan Wilayah, dan d.Rencana Pengembangan Wilayah. Rencana pengembangan kawasan strategis Kota

Pagar Alam didasarkan pada penetapan kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan pengembangan ekonomi wilayah, sosial budaya dan lingkungan hidup Kota Pagar Alam. Prinsip pengembangan kawasan strategis adalah dengan upaya mempertahankan kondisi eksisting kawasan dengan seoptimal mungkin tidak terjadinya konversi kawasan, sehingga dalam strategi pengembangan kawasan lebih dititik beratkan pada potensi kawasan strategis. Dalam penetapan kawasan strategis terdapat tiga karakter sudut pandang, yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Dari ketiga aspek tersebut upaya pengembangan kawasan strategis akan berbeda dalam konsep pengembangannya. Kawasan strategis ekonomi diupayakan akan terus berkembang sehingga akan menimbulkan dinamika perekonomian kota yang signifikan. Dengan demikian strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut ekonomi adalah pengembangan dan peningkatan skala ekonomi suatu wilayah. Kemudian dua karakter kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya dan aspek lingkungan hidup dalam pengembangannya diarahkan untuk mendorong aspek-aspek sosial budaya yang sinergis dengan pengelolaan lingkungan hidup dimana segala aktivitas manusia serasi dengan makhluk hidup lainnya.

a. Isu pengembangan wilayah

Isu pengembangan wilayahKota Pagar Alam mengalami dinamika, dimana areal pertanian sebagai sektor basis di Kota Pagar Alam mulai terdesak oleh alih fungsi lahan menuju non pertanian, konsep Kasiba-Lisiba (Kavling siap bangun dan Lingkungan siap bangun) menjadi fenomena ditengah masyarakat. Arahan pemanfaatan ruang pada lokasi yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan perlu menjadi perhatian khusus. Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Pagar Alam Utara (777 jiwa/Km2) dan Kecamatan Pagar Alam Selatan (793 jiwa/Km2).

b. Prospek pengembangan wilayah

Kota Pagar Alam sebagai kota yang bernuansa pertanian memiliki prospek yang baik sebagai kota yang unik bernuansa pertanian serta keanekaragaman budaya sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi basis kepariwisataan diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.

c. Konsep Pengembangan Wilayah

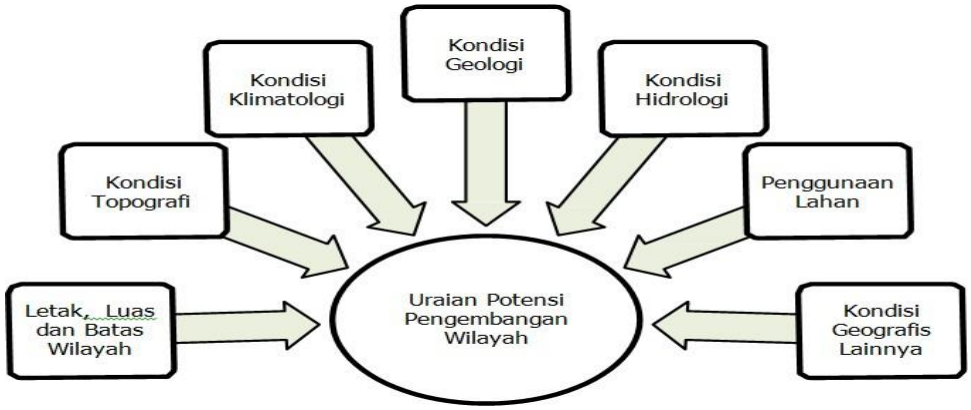
Sebagai kota yang unik,maka konsep pengembangan wilayah di Kota Pagar Alam, menggunakan konsep pengembangan wilayah yang berkelanjutan, dengan menekankan pada pertumbuhan dan pemerataan perekonomian wilayah serta, pelestarian lingkungan hidup.

d. Rencana Pengembangan Wilayah

Dalam pengembangan wilayah Kota Pagar Alam mengikuti arahan Peramendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar 2.8

Gambar 2.8

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber : Permerdagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian perkebunan, pariwasata, industri, dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

- Kawasan peruntukan perumahan

Kawasan peruntukan perumahan merupakan kawasan budidaya yang paling cepat tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Laju pertumbuhan permukiman selalu berkorelasi dengan kebutuhan lahan, yang semakin hari semakin berkurang. Perkembangan kawasan permukiman di wilayah perencanaan sebelumnya lebih cenderung dengan konsep linier, dalam

konteks perencanaan selanjutnya akan lebih dikedepankan konsep cluster sesuai dengan konsep multinucleus dengan membangun pusat-pusat permukiman yang tersebar disetiap kecamatan. Kawasan peruntukan perumahan bertujuan untuk :

- memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
- menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Ada 3 (tiga) model permukiman yang berkembang di Kota Pagar Alam, yaitu :

1) Konsep Kasiba-Lisiba

   Mengacu pada penyediaan permukiman (baru) dan pelayanan lingkungan dalam satu area, membentuk kawasan permukiman skala besar, untuk Kapling Siap Bangun (Kasiba) dengan jumlah unit rumah adalah 3.000 – 10.000, Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) dengan jumlah unit rumah adalah 1.000 – 3.000 dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) jumlah unit rumah maksimal sampai dengan 1.000 unit rumah. Lokasi yang sesuai di sekitar Kecamatan Dempo Tengah dan Selatan. Dalam Kasiba-Lisiba dilengkapi oleh pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa dalam skala permukiman.

2) Konsep Pemusatan Permukiman di Ibukota Kecamatan (IKK)

   Konsep pengembangan permukiman mengikuti perkembangan tiap-tiap ibu kota kecamatan, bersifat semi-urban dan mempunyai kepadatan sedang sampai dengan tinggi.

3) Konsep tradisional ”Talang”

   Konsep tradisional Talang adalah bagian tradisi masyarakat asli Pagar Alam, yakni membentuk sebuah permukiman-permukiman dalam skala kecil komunitas, terletak dikantong-kantong daerah pertanian maupun perkebunan

jauh dari pusat kegiatan. Konsep pengembangan Kawasan peruntukan perumahan dilakukan melalui pembangunan permukiman talang, kawasan permukiman skala kecil, menengah, sampai besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan bertahap serta dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan. Kawasan yang dimaksud adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. Kawasan ini dalam pembangunannya dapat dilaksanakan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan atau masyarakat pemilik tanah melalui konsolidasi tanah maupun secara swadaya. Sedangkan dalam skala yang lebih kecil pengembangan permukiman diarahkan pada permukiman perdesaan yang masing-masing terkonsentrasi di ibukota kecamatan (IKK).

- Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan berdasarkan kondisi eksisting dimana pusat pertumbuhan terbentuk dari perkembangan kegiatan perekonomian di suatun wilayah. Kebutuhan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota diarahkan pada kawasan pusat kota dengan lebih mengefektifkan lahan yang ada. Intensifikasi pemanfaatan ruang dikawasan pusat kota diharapkan tidak menjadikan karakter kota sebagai pusat agrobisnis menjadi hilang, tetapi perlu dilakukan suatu rancangan yang baik dimana citra atau visual kota yang tercipta dari kawasan perdagangan dan jasa mempunyai nuansa keramahan alam perdesaan. Dengan menata kawasan pusat kota dengan ciri dan karakter khusus akan menimbulkan daya tarik wisata tersendiri. Alokasi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dilakukan intensifikasi dengan mengefektifkan pemanfaatan ruang kawasan pusat kota. Penetapan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; perantara keuangan; real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya, dan jasa pariwisata. Jenis kegiatan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota

Pagar Alam meliputi:

- Usaha perdagangan besar dan eceran, merupakan kegiatan penjualan kembali dengan tanpa perubahan suatu teknis barang baru maupun bekas, yang meliputi penjualan mobil dan sepeda motor, serta penjualan eceran bahan bakar kendaraan, perdagangan besar dalam negeri, perdagangan eceran, perdagangan ekspor, dan perdagangan impor;
- Usaha perantara keuangan yang terdiri dari asuransi dan dana pensiun, serta jasa penunjang keuangan;
- Usaha real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan;
- Usaha Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya dan perorangan lainnya dan Jasa Pariwisata yang mencakup dari jasa kebersihan, kegiatan organisasi, jasa dan jasa kegiatan lainnya.
- Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan

Kawasan pusat pemerintahan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan kepemerintahan Kota Pagar Alam untuk memberikan pelayanan publik. Kegiatan pemerintahan saat ini telah memanfaatkan kawasan perkantoran pemerintah Kota Pagar Alam di Gunung Gare. Kawasan pemerintahan ini menyatu dengan kegiatan yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun pada pelaksanaan MTQ Nasional XXII. Dimana peruntukannya pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan). Adapun alokasi ruang untuk kegiatan pemerintahan kota ini lebih kurang 100 Ha. Penetapan kawasan pusat pemerintahan bertujuan untuk :

- Menyediakan ruang bagi kegiatan kepemerintahan Kota Pagar Alam;
- Terciptanya kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien;
- Terjalinnya hubungan kinerja antar dinas dalam satu kawasan.

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri yang dimaksud adalah kawasan yang peruntukannya untuk aktivitas industri baik yang menyebar maupun memusat yang terletak di zona yang telah ditetapkan. Peruntukkan kawasan ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada

Undang-undang Lingkungan Hidup, terutama untuk industri yang menimbulkan eksternalitas negatif, sedangkan industri kerajinan yang berupa industri rumah tangga berada di permukiman penduduk, dikembangkan dengan perizinan yang terbatas atau bersyarat tidak mengganggu (menimbulkan polusi, udara, air, tanah dan kebisingan). Pengembangan kegiatan industri di Kota Pagar Alam sebagai sektor pendukung kegiatan pokok Kota Pagar Alam sebagai pusat kegiatan pertanian. Industri pengolahan hasil pertanian maupun peralatan pertanian perlu dialokasikan pada satu kawasan industri dalam rangka menciptakan efisiensi kegiatan melalui aglomerasi kegiatan sebagai zona pendukung (kegiatan perbengkelan) telah ditetapkan alokasi lahan yang luasnya ± 8 Ha. Zona ini terletak di Desa Keban Agung Kelurahan Ulu Rurah. Kegiatan industri utama diarahkan pada kawasan sekitar bandara yaitu di Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan mengingat usaha kegiatan ini juga terkait dengan kegiatan transportasi regional yang berorientasi pada sektor pertanian dan pariwisata. Adapun alokasi ruang untuk kawasan industri ini seluas 170 Ha, didalamnya sudah termasuk alokasi ruang untuk pusat transportasi (cargo), pergudangan dan jasa pendukung lainnya. Penetapan Kawasan peruntukan industri ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri. Serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan. Adapun jenis industri yang akan dikembangkan di Kota Pagar Alam, adalah :

- Industri pengolahan adalah kegiatan pengubahan bahan dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin ataupun dengan tangan. Termasuk juga kegiatan jasa industri yang menghasilkan laba melalui maklon. Adapun usaha industri pengolahan yang akan dikembangkan meliputi :
  a. industri pengolahan hasil pertanian
  b. industri pengolahan hasil perkebunan
  c. industri pengolahan peralatan pertanian
  d. industri perbengkelan

- Industri pergudangan adalah kegiatan jasa untuk penyimpanan barang-barang yang siap untuk dilakukan jual beli. Industri ini meliputi kegiatan cargo yang berada di bandara.

Berdasarkan analisis, kawasan industri terkait dengan Analisis Program berdampak Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar. Persebaran jasa ekosistem untuk penyedia bahan bakar/fuel, di Kota Pagar Alam terluas yaitu kelas sedang dengan luasan 29.163,09 Ha (46,02%), kawasan sebaran meliputi seluruh kawasan di Kota Pagar Alam yang berada di wilayah tengah dan hilir pada setiap kecamatan. Urutan kedua yaitu kelas tinggi dengan luasan 17.595,81 Ha (27,77%), kawasan sebaran meliputi seluruh Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah bagian hulu. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem penyedia bahan bakar/fuel yang paling sempit yaitu kelas rendah seluas 4.203,16 Ha (6,63%). Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem penyedia bahan bakar/fuel dapat melihat tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.10

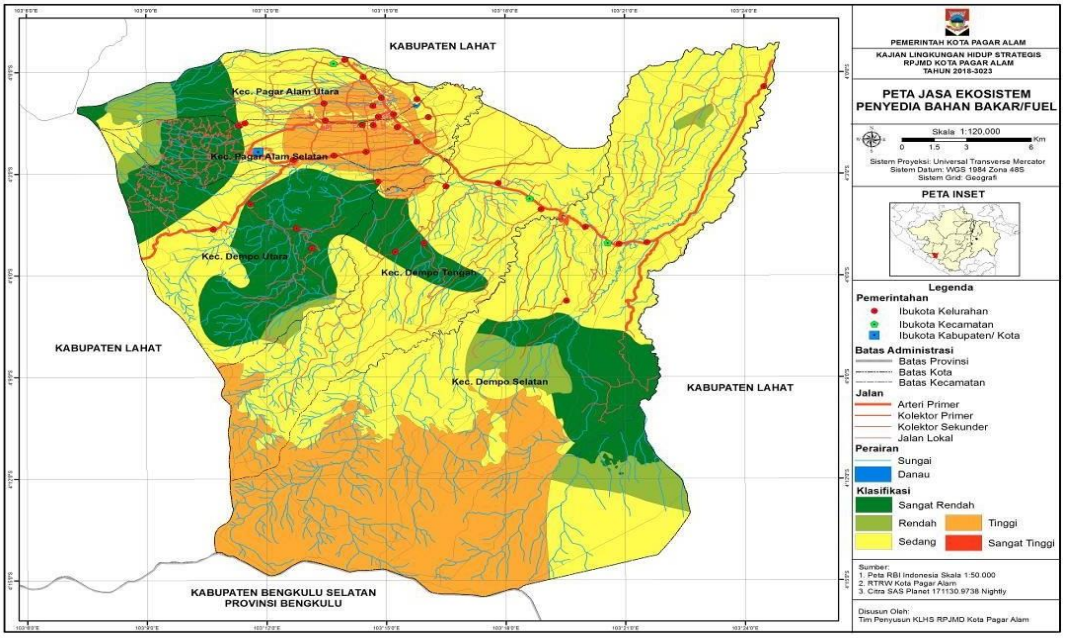
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar/Fuel

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	12.403,94	19,58
II – Rendah	4.203,16	6,63
III – Sedang	29.163,09	46,02
IV – Tinggi	17.595,81	27,77
V – Sangat Tinggi	0,00	0,00
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.9

Peta Persebaran Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar/Fuel



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

- Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan wisata di Kota Pagar Alam sangatlah bervariasi mengingat lokasi objek wisata yang tersebar dan sangat beragam jenis wisatanya. Model pengembangan kawasan wisata mempunyai visi yakni mewujudkan kawasan wisata yang berkelanjutan. Luas lahan rencana pengembangan kawasan pariwisata adalah sebesar 300 Ha. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut, dimana usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- Usaha jasa pariwisata, meliputi penyediaan jasa perencanaan, pelayanan, dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;

- Pengusahaan objek, meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek serta daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus.
- Daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata, meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana pariwisata ini dapat berupa jenis-jenis usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan di kawasan pariwisata.

Terdapat tiga model pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kota Pagar Alam yaitu :

1) Pengembangan Kawasan Wisata Alam

Kawasan wisata Gunung Dempo Kota Pagar Alam mempunyai keunggulan berupa landscape pegunungan yang masih alami. Pengembangan kawasan wisata lebih mengedepankan konsep yang mempertahankan karakter asli lingkungan yang ada. Merujuk pada konsep tersebut maka kawasan wisata terpadu Gunung Dempo terbagi menjadi dua kawasan, yakni Kawasan Wisata Utama dan Penunjang, meliputi Gunung Dempo dan Perkebunan Teh. Strategi pengembangan Kawasan Wisata Gunung Dempo adalah dengan melakukan perbaikan kondisi sarana dan prasarana untuk mengantisipasi jumlah pengunjung yang akan meningkat. Sedangkan bentuk kegiatan pada tiap kawasan sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan antara lain :

- Kawasan Utama : Hiburan, Rekreasi Alam, Berkemah, Wisata Pendidikan;
- Kawasan Wisata penunjang : Rekreasi, Hiking dan Lintas Alam, Penelitian Cagar Budaya.

2) Pengembangan Kawasan Wisata Budaya

Kawasan wisata budaya di Kota Pagar Alam berada dalam kawasan cagar budaya, yaitu situs purbakala megalit, objek wisata lain sebagai kawasan wisata budaya diantaranya adalah Cughup Cawang, Cughup Tujuh Kenangan

dan Rumah Batu talang Tinggi, Cughup Mangkok serta Cughup Tri Tunggal.

3) Kawasan Wisata Buatan Taman Hutan Raya (Tahura)

Konsep pengembangan Taman Hutan Raya adalah membuat sebuah hutan rekreasi ditengah kota dengan pendekatan alam bebas. Taman Hutan Raya (Tahura) yang telah dipersiapkan seluas 2.001 Ha yang berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Gunung Patah, Kelurahan Candi Jaya. Secara garis besar konsep pengembangan Tahura diimplementasikan pada beberapa fungsi sebagai berikut:

- Tempat koleksi vegetasi tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan asli yang ada di kawasan setempat maupun tumbuhan yang diintroduksi dari luar,
- Sumber plasma nuftah,
- Tempat belajar bagi siswa dan masyarakat umum,
- Tempat penelitian dan pengembangan IPTEK, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan tropika basah,
- Salah satu tempat peluang investor,
- Tempat yang sangat ideal untuk rekreasi, olah raga dan peningkatan rasa cinta alam,
- Tempat pembinaan generasi muda.

2.1.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, bencana gempa bumi, dan longsor. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota berkaitan dengan potensi bencana alam diantaranya:

1) Kota Pagar Alam termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung meletus, segementasi kawasan rawan bencana gunung meletus adalah sebagai berikut: 0 – 5 Km adalah daerah bahaya, tidak diperkenankan adanya pemukiman dan infrastruktur, > 5 – 8 Km adalah daerah waspada yang mempunyai dampak

lava, lahar panas, semburan belerang, awan panas dsb. Kondisi eksisting, menunjukkan bahwa pada kawasan dengan radius tersebut diatas terdapat areal permukiman. Dengan demikian kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan budidaya terbatas, dimana sangat tidak potensial untuk dikembangkan.

2) Kawasan sekitar aliran sungai yang bagian hulunya berada di Gunung Dempo, sampai pada radius 15 Km dari kawah termuda, adalah tidak potensial untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya seperti permukiman, pusat-pusat kegiatan, dsb.
3) 58,3% dari luas wilayah Kota Pagar Alam diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana longsor. Dengan demikian perlu diperhatikan kegiatan-kegiatan berpotensi alih fungsi lahan pada kawasan tersebut.

2.1.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri atas tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Selama periode tahun 2018-2021, IKLH Pagar Alam menunjukkan angka yang berfluktuasi. Tahun 2018, capaian IKLH Kota Pagar Alam sebesar 74,977, tahun 2019 sebesar 74,423, Tahun 2020 74,543 dan tahun 2021 sebesar 72,370. Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya menggalakkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

2.1.1.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Daya

dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan yang akan datang.

a) Daya Dukung Penyedia Air

Wilayah Kota Pagar Alam merupakan daerah kaya sumber daya air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Endikat, Sungai Lematang, Sungai Besemah, Sungai Selangis Besar, Sungai Cawang dan Sungai Betung. Daya Dukung Air Permukaan Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air.

Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air dapat diuraikan data persebaran jasa ekosistem untuk penyedia air bersih, jasa ekosistem penyedia air bersih paling luas yaitu kelas rendah dengan luasan 31.628,51 Ha (49,91%), kawasan sebaran meliputi seluruh kawasan di Kota Pagar Alam yang berada di wilayah hulu dan hilir pada setiap kecamatan. Urutan kedua yaitu kelas sangat rendah dengan luasan 23.319,53 Ha (36,80%), kawasan sebaran meliputi seluruh kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu wilayah tengah di setiap kecamatan. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem penyedia air bersih sedang seluas 5.308,90 Ha (8,38%) yang terdapat di Kecamatan Pagar Alam Selatan, sebelah timur dari Ibu Kota Pagar Alam. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem penyedia air bersih dapat melihat tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.11

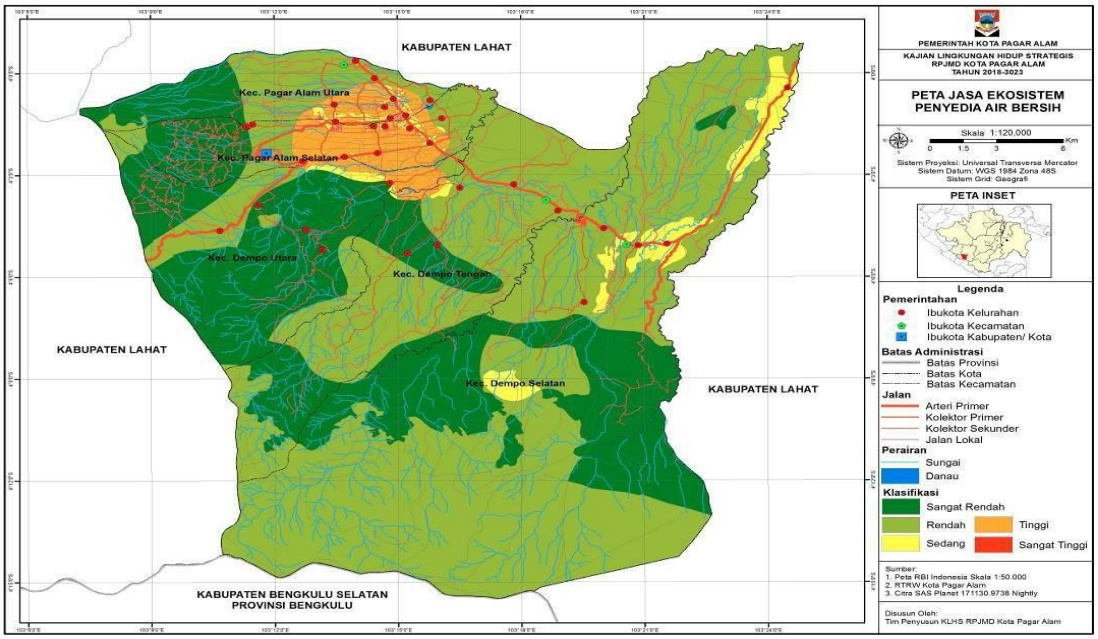
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	23.319,53	36,80
II – Rendah	31.628,51	49,91
III – Sedang	5.308,90	8,38
IV – Tinggi	3.109,05	4,91
V – Sangat Tinggi	0,00	0,00
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.10

Peta Sebaran Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Pagar Alam



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

b) Daya Dukung Penyedia Pangan

Jasa ekosistem untuk penyedia pangan, sebaran kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Pagar Alam dengan luasan yang bervariasi, dimana jasa ekosistem penyedia pangan paling luas yaitu kelas sangat rendah dengan luasan 20.614,38 Ha (32,53%), kawasan sebaran meliputi daerah selatan dari Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Utara, kawasan tersebut

merupakan kawasan hutan lindung sehingga penilaian jasa ekosistem penyedia pangan sangat rendah. Urutan kedua yaitu kelas sedang dengan luasan 19.065,33 Ha (30,09%), kawasan sebaran meliputi Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Pagar Alam Utara. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi seluas 3.383,53 Ha (5,34%) yang meliputi bagian kecil dari Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Pagar Alam Selatan, wilayah ini dominan persawahan dengan ketersediaan air yang cukup, hal ini ditandai dengan wilayah ini dilalui oleh sungai besar yang berada di Kota Pagar Alam. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem penyedia pangan dapat melihat tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.12

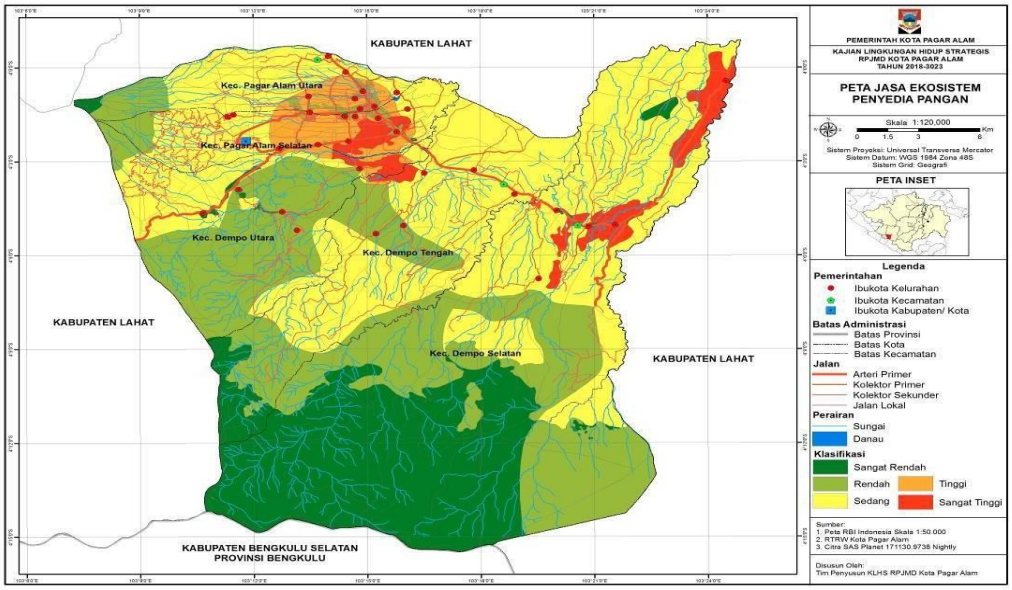
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	20.614,38	32,53
II – Rendah	18.025,70	28,45
III – Sedang	19.065,33	30,09
IV – Tinggi	2.277,06	3,59
V – Sangat Tinggi	3.383,53	5,34
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.11

Sebaran Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Pagar Alam



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

c) Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar

Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar. Berdasarkan data persebaran jasa ekosistem untuk penyedia bahan bakar/fuel, jasa ekosistem penyedia bahan bakar/fuel paling luas yaitu kelas sedang dengan luasan 29.163,09 Ha (46,02%), kawasan sebaran meliputi seluruh kawasan di Kota Pagar Alam yang berada di wilayah tengah dan hilir pada setiap kecamatan. Urutan kedua yaitu kelas tinggi dengan luasan 17.595,81 Ha (27,77%), kawasan sebaran meliputi seluruh Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah bagian hulu. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem penyedia bahan bakar/fuel yang paling sempit yaitu kelas rendah seluas 4.203,16 Ha (6,63%). Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem penyedia bahan bakar/fuel dapat melihat tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.13

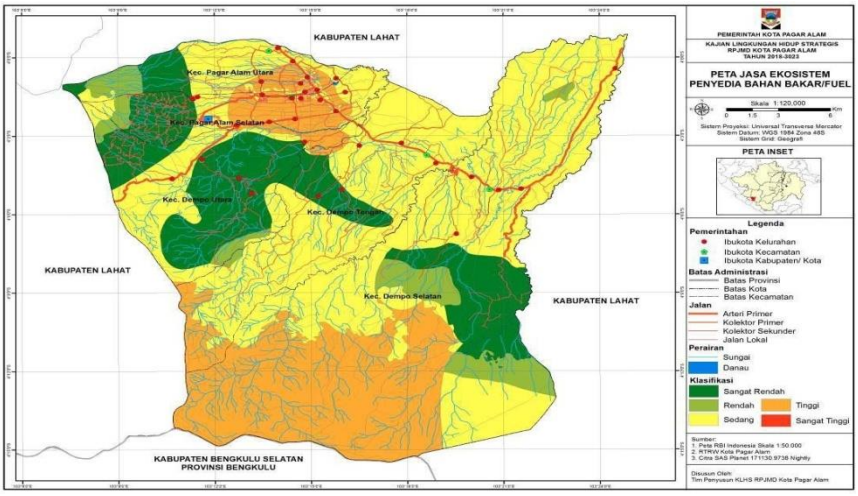
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar/Fuel

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	12.403,94	19,58
II – Rendah	4.203,16	6,63
III – Sedang	29.163,09	46,02
IV – Tinggi	17.595,81	27,77
V – Sangat Tinggi	0,00	0,00
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.12

Peta Persebaran Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar/*Fuel*



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

d) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Jasa ekosistem untuk pengatur iklim, sebaran kelas jasa ekosistem pengatur iklim di Kota Pagar Alam tersebar sebagai berikut untuk jasa ekosistem pengatur iklim paling luas yaitu kelas sedang dengan luasan 19.123,62 Ha (30,18%), kawasan sebaran meliputi daerah selatan dari Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Utara. Urutan kedua yaitu kelas sangat tinggi dengan luasan 18.742,64 Ha (29,58%), kawasan sebaran meliputi Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Pagar Alam Utara, khususnya di Gunung Dempo. Kemudian untuk sebaran jasa ekosistem pengatur iklim paling sedikit yaitu kelas sangat rendah dengan luas 4.093,45 Ha (6,46%) yang meliputi bagian kecil dari Kecamatan Pagar Alam Selatan. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem pengatur iklim dapat melihat tabel dan gambar di bawah ini.

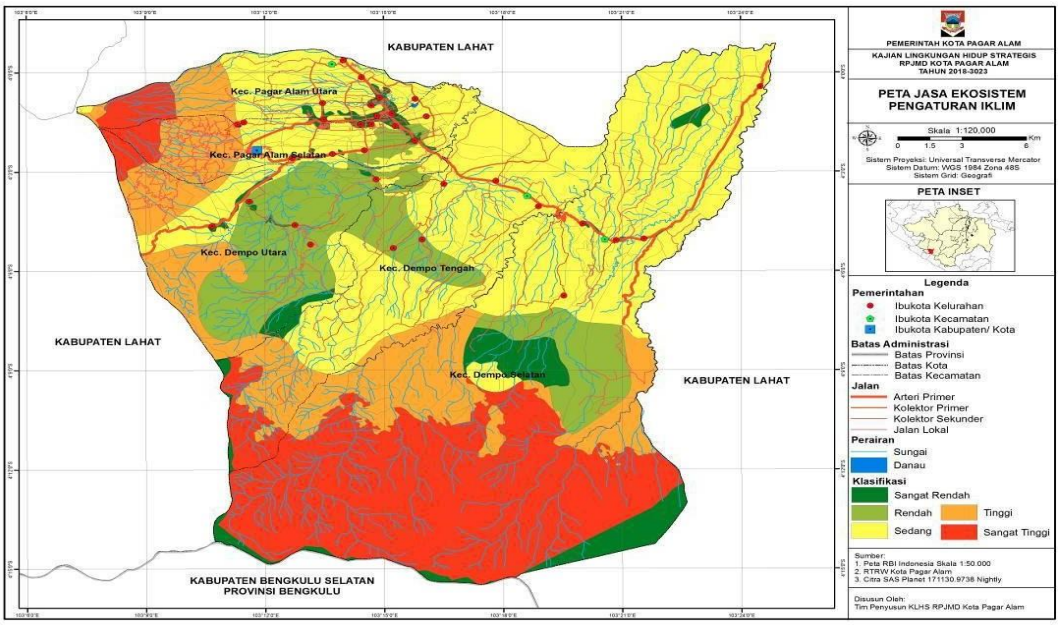
Tabel 2.14

Sebaran Luas Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	4.093,45	6,46
II – Rendah	6.809,28	10,75
III – Sedang	19.123,62	30,18
IV – Tinggi	14.597,00	23,04
V – Sangat Tinggi	18.742,64	29,58
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.13
Peta Sebaran Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pagar Alam



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

e) Jasa Ekosistem Untuk Perlindungan Pencegahan Bencana

Jasa ekosistem untuk perlindungan pencegahan bencana, sebaran kelas jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana paling luas yaitu kelas sedang dengan luasan 24.598,18 Ha (38,82%), kawasan sebaran meliputi daerah selatan dari Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Utara, kawasan tersebut merupakan kawasan yang relatif datar. Urutan kedua yaitu kelas tinggi dengan luasan 18.891,95 Ha (29,81%), kawasan sebaran meliputi Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan, pada bagian selatan kedua kecamatan tersebut, merupakan pegunungan bukit barisan. Kelas yang paling sempit yaitu kelas rendah dengan luas 3.543,77 Ha atau 5,59% dari luas total wilayah Kota Pagar Alam. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana dapat melihat tabel dan gambar di bawah ini.

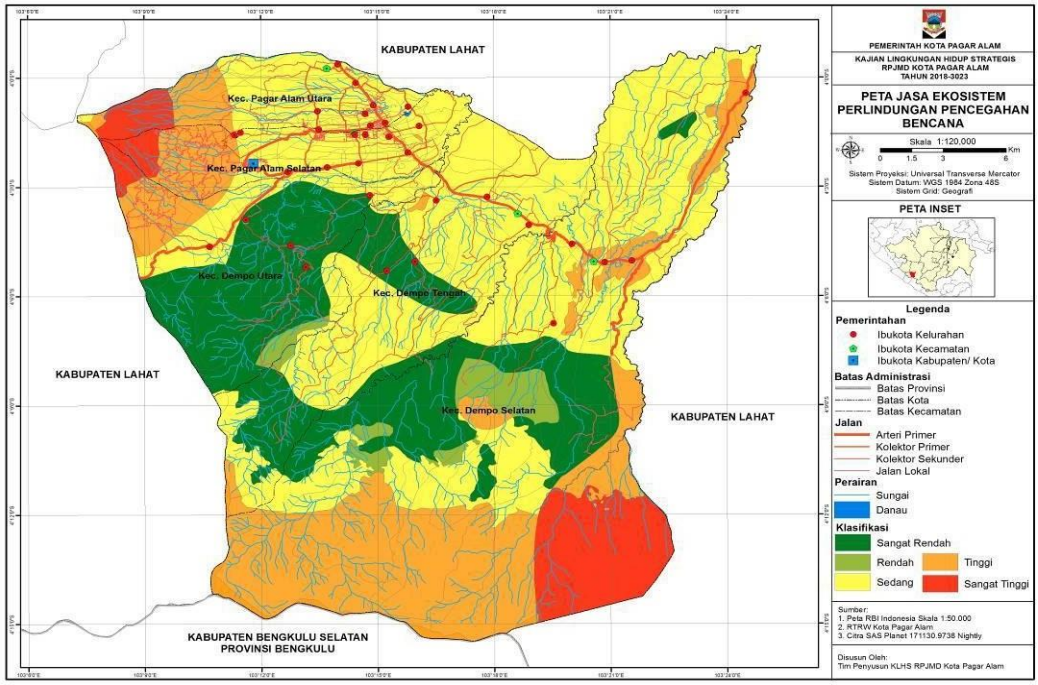
Tabel 2.15

Sebaran Luas Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	12.076,22	19,06
II – Rendah	3.543,77	5,59
III – Sedang	24.598,18	38,82
IV – Tinggi	18.891,95	29,81
V – Sangat Tinggi	4.255,88	6,72
Luas Total	**63.366,00**	**100,00**

Gambar 2.14

Peta Sebaran Luasan Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Bencana Kota Pagar Alam



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

f) Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir

Jasa ekosistem untuk pengatur tata air dan banjir, sebaran kelas jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir paling luas yaitu kelas sedang dengan luasan 25.954,99 Ha (40,96%), kawasan sebaran meliputi daerah selatan dari Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Selatan, dan Kecamatan Dempo Utara, kawasan tersebut merupakan kawasan yang relative datar, sehingga untuk pengatur tata air dan banjir untuk kawasan hilir. Urutan kedua yaitu kelas sangat rendah dengan luasan 14.027,47

Ha (22,14%), kawasan sebaran meliputi Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Tengah. Kelas yang paling sempit yaitu kelas Sangat tinggi dengan luas 4.612,08 Ha atau 7,28% dari luas total wilayah Kota Pagar Alam. Untuk luasan dan sebaran jasa ekosistem pengatur air dan banjir dapat melihat tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.16

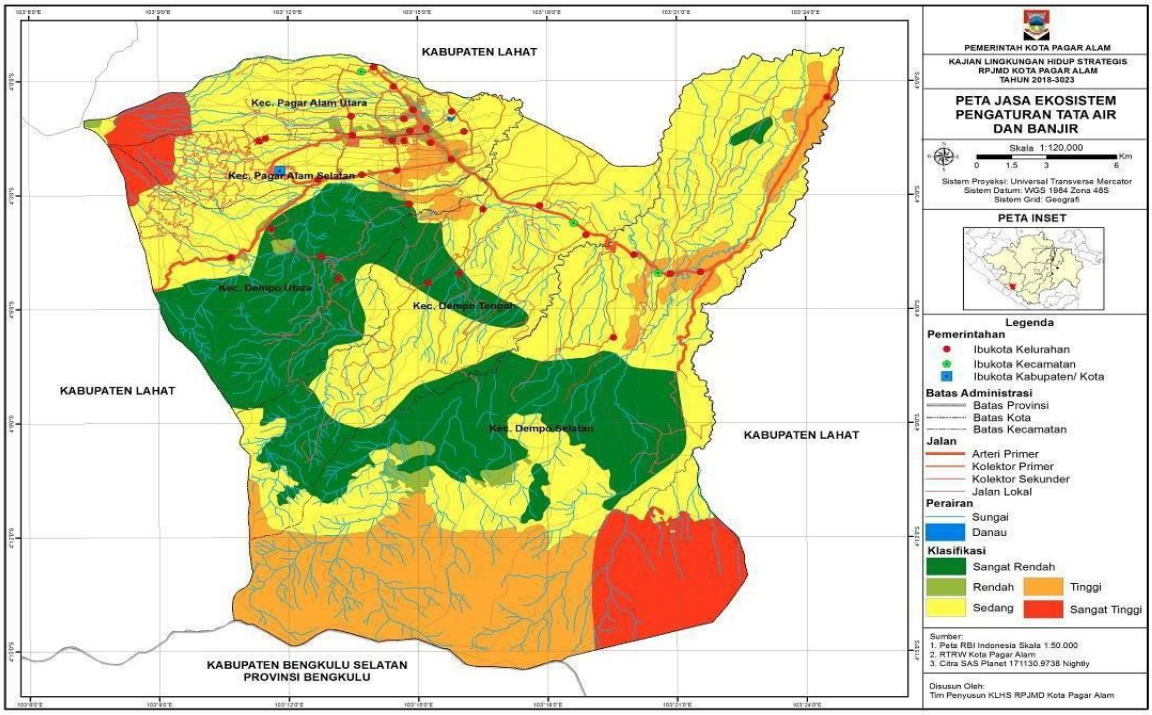
Sebaran Luas Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir Kota Pagar Alam

Kelas	Luas (Ha)	Luas (%)
I – Sangat Rendah	14.027,47	22,14
II – Rendah	5.723,64	9,03
III – Sedang	25.954,99	40,96
IV – Tinggi	13.047,82	20,59
V – Sangat Tinggi	4.612,08	7,28
Luas Total	63.366,00	100,00

Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

Gambar 2.15

Peta Persebaran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Pagar Alam



Sumber : KLHS Reviu RPJMD Kota Pagar Alam, 2021

2.1.1.2 Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

2.1.1.2.1 Struktur Penduduk

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pagar Alam tahun 2023 berjumlah 147.836 jiwa. Adapun pertumbuhan penduduk mengalami laju pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2021 laju pertumbuhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,49, namun pada tahun 2022 berhasil ditekan diangka 1,24 pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,96. Pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2018–2023 dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 2.17

Perkembangan Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024

No.	Kota	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pagar Alam	137.909	139.194	140.373	145.266	146.427	150.881	153.300
2	Pertumbuhan (%)	0,95	0,93	0,85	3,49	1,24	3,04	1,60

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam Tahun 2025

2. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024

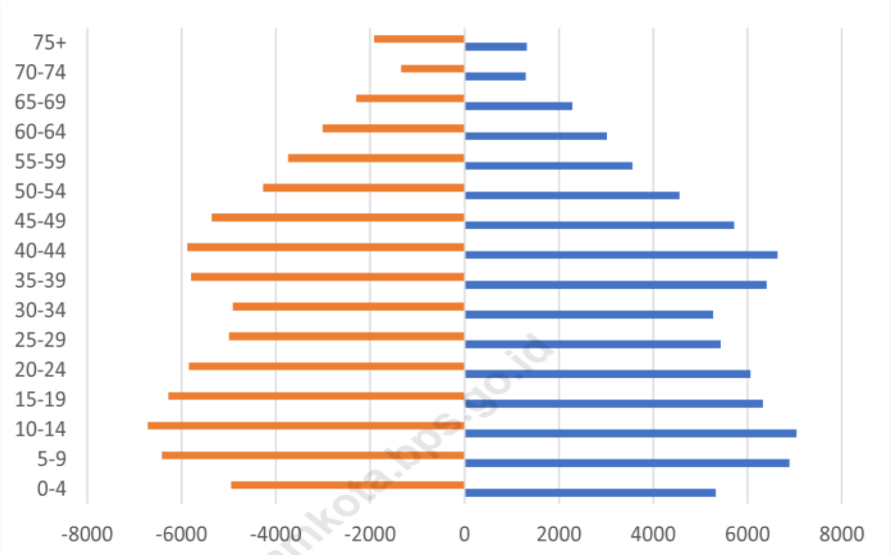
No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2018	70.612	67.297	137.909	105
2	2019	71.163	68.031	139.194	105
3	2020	73.715	70.129	143.844	105
4	2021	74.400	70.866	145.266	105
5	2022	74. 982	71.445	146.427	105
6	2023	77.147	73.743	150.881	105
7	2024	78.400	74.900	153.300	105

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

2.1.1.2.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Pagar Alam memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif yang dapat dilihat pada gambar piramida penduduk dibawah ini :

Gambar 2.16
Piramida Penduduk Kota Pagar Alam Tahun 2024



Ket : Laki-Laki (Coklat), Perempuan (biru)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

Aspek Kesejahteraan masyarakat terdiri atas:

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi,
2. Fokus Kesejahteraan Sosial dan
3. Fokus Seni budaya dan Olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk diwilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

a. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kota Pagar Alam, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kota Pagar Alam namun juga dipengaruhi oleh faktor- faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 pernah mengalami penurunan ditahun 2020. Salah satu penyebab masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam yaitu masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor primer raw material (bahan mentah) dan memiliki nilai tambah rendah. Yang menjadi perhatian pada sektor Pertanian sebagai share PDRB tertinggi (23,24%), paling banyak meyerap tenaga kerja terutama masyarakat dengan penghasilan dibawah 40% terendah, namun laju pertumbuhan pada sektor tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya setelah tahun 2020.

Pemerintah Kota Pagar Alam akan terus berupaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, beberapa hal yang dapat menjadi peluang antara lain melalui peningkatan infrastruktur konektivitas dimana akses ke Pagar Alam melewati wilayah bukit dan pegunungan, optimalisasi objek dan daya tarik wisata, peningkatan pendapatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan serta hilirisasinya, dalam rangka peningkatan pemasaran dan peluang investasi di Pagar Alam perlu optimalisasi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dan informatika.

Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam dari tahun 2018 – 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2018 PDRB tumbuh sebesar 4,18 persen dan pada tahun 2019 hingga 2020 terus mengalami penurunan dan diperparah akibat dampak pandemi Covid-19. Dan di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam Kembali mengalami kenaikan hingga mencapai angka 4,39 persen hingga di tahun 2022 sebesar 4,86 persen dan pada tahun 2023 kembali mengalami perlambatan diangka 4,35 persen yang diakibatkan badai elnino yang melumpuhkan sektor pertanian dan merupakan sector unggulan di Kota Pagar Alam. Ditahun 2024 kembali mengalami kenaikan hingga satu digit sebesar 5,05%.

Tabel 2.19

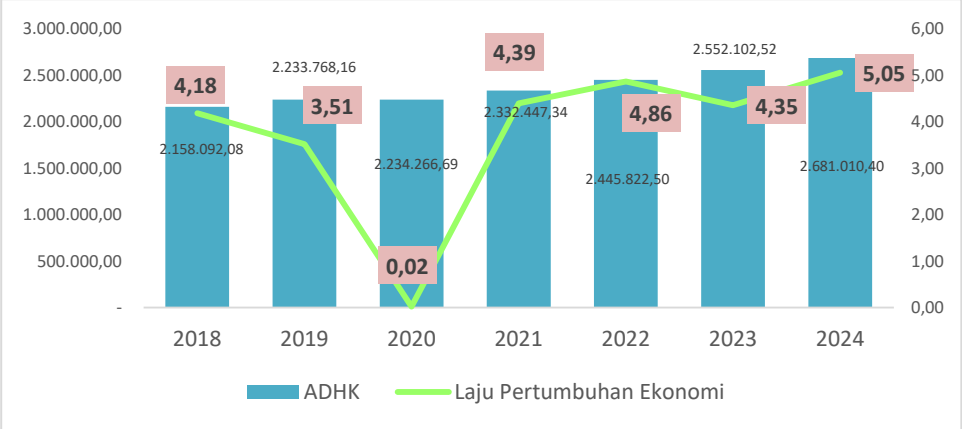
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2024 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 (dalam satuan persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan / Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pagar Alam Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,81	2,59	1,18	5,96	4,13	3,07	3,1
B. Pertambangan dan Penggalian	3,3	2,74	-4,41	2,67	2,59	2,67	4,11
C. Industri Pengolahan	6,69	7,57	0,4	2,41	4,23	4,44	2,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7	11,99	7,15	8,83	5,46	2,22	7,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	9,08	4,5	1,63	0,08	3,63	-0,18	5,56
F. Konstruksi	4,96	2,02	0,01	0,76	4,04	3,33	4,6
G. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,93	4,17	-1,11	6,64	6,90	6,91	6,98
H. Transportasi dan Pergudangan	5,26	6,74	-5,29	1,75	5,52	6,20	7,22
I. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	13,9	5	-7,2	8,91	10,78	9,72	9,88
J. Informasi dan Komunikasi	4,72	4,98	10,01	7,34	8,17	6,38	8,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,27	-2,57	0,8	2,68	0,01	4,62	6,7
L. Real Estat	4,61	4,66	1,09	2,59	4,57	4,11	6,23
M,N. Jasa Perusahaan	6,85	4,64	-2,01	2,24	2,87	2,01	5,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib	4,75	1,48	0,89	1,16	2,14	3,12	6,88
P. Jasa Pendidikan	5,53	7,74	-1,12	5,8	5,46	3,81	3,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,19	5,56	9,33	4,11	3,89	0,01	0,62
R,S,T,U. Jasa lainnya	10,22	0,84	2,43	1,56	3,63	2,36	4,83
Produk Domestik Regional Bruto	**4,18**	**3,51**	**0,02**	**4,39**	**4,86**	**4,35**	**5,05**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.17

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Pagar Alam tahun 2019-2024



Sumber : BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.20

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Pagar Alam (juta rupiah), Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	625.889,39	642.142,23	698.712,59	752 089,50	810 028,20	908 532,9
B. Pertambangan dan Penggalian	74.427,82	71.880,92	73.915,52	76.451,34	80 466,91	85 850,51
C. Industri Pengolahan	52.033,66	53.549,79	56.717,03	61.843,77	66 807,96	71 013,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.477,48	1.612,24	1.806,75	1.941,06	2 008,87	2 261,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.758,78	1.801,29	1.826,80	1.917,68	1 928,43	2 048,15
F. Konstruksi	469.171,84	470.213,61	487.711,97	524.040,52	554 620,68	5 84223
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	544.994,50	550.779,73	594.829,05	664 606,70	724 692,99	785 531,8
H. Transportasi dan Pergudangan	93.520,12	89.356,12	91.275,84	101.629,31	111 549,02	121 594,3

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110.169,33	105.586,49	115.556,36	131.137,09	145 896,32	162 714,1
J. Informasi dan Komunikasi	41.729,52	46.203,98	49.966,00	54.340,21	57 992,44	61 202,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	113.937,58	114.406,70	119.359,81	123.554,86	130 781,96	140 563,1
L. Real Estat	159.712,59	162.368,57	169.548,08	180.099,76	190 409,68	205 133,1
M,N. Jasa Perusahaan	2.859,14	2.826,23	2.898,53	3.103,87	3 274,17	3 734,48
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	95.018,24	98.516,58	99.846,55	103.751,58	108 673,69	114 917,4
P. Jasa Pendidikan	280.386,47	283.798,91	301.658,89	325.775,84	345 907,09	385 509,1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.912,48	61.707,11	64.936,30	68.767,01	70 396,29	76 090,96
R,S,T,U. Jasa lainnya	69.617,24	73.607,97	75.384,31	81.028,38	85 096,52	100 144,1
Produk Domestik Regional Bruto ADHB	2.791.616,17	2.830.358,47	3.005.950,38	3 255 928,46	3 490 531,21	3.811.064,42

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Tabel 2.21

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kota Pagar Alam (juta rupiah), Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	527.225,50	540.872,26	547.248,95	603 812,48	622 324,02	641 625,6
B. Pertambangan dan Penggalian	51.579,74	52.994,09	50.655,71	53 355,72	54 777,87	57 030,67
C. Industri Pengolahan	27.957,73	30.073,73	30.193,17	32 230,76	33 663,17	34 654,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.278,76	1.432,09	1.534,49	1 761,19	1 800,20	1940,66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.313,99	1.373,17	1.395,53	1 447,33	1 444,75	1 525,09
F. Konstruksi	384.936,43	392.713,63	392.741,52	411 747,35	425 441,89	445 010,5

Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	403.520,85	420.366,98	415.707,21	473 873,15	506 600,01	541 956,4
H. Transportasi dan Pergudangan	65.280,50	69.677,72	65.992,69	70 853,27	75 249,44	80 680,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66.331,13	69.645,32	64.630,71	77 978,48	85 558,83	94 014,06
J. Informasi dan Komunikasi	38.059,11	39.952,96	43.952,60	51 029,72	54 287,70	58 893,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	86.175,76	83.962,62	84.631,78	86 907,89	90 926,46	97 020,3
L. Real Estat	127.616,75	133.565,14	135.018,92	144 856,33	150 806,20	160 200,3
M,N. Jasa Perusahaan	2.028,13	2.122,33	2.079,67	2 187,20	2 231,18	2 351,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.221,89	69.229,67	69.842,55	72 164,25	74 412,24	79 533,91
P. Jasa Pendidikan	212.483,27	228.928,35	226.364,35	252 560,16	262 185,73	271 066,5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.124,13	44.464,81	48.612,92	52 577,16	52 580,33	52 904,19
R,S,T,U. Jasa lainnya	51.958,41	52.393,27	53.663,91	56 480,07	57 812,49	60 602,57
Produk Domestik Regional Bruto ADHK	2.158.092,08	2.233.768,16	2.234.266,69	2.445.822,50	2.552.102,52	2.681.010,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

c. Potensi Unggulan Daerah

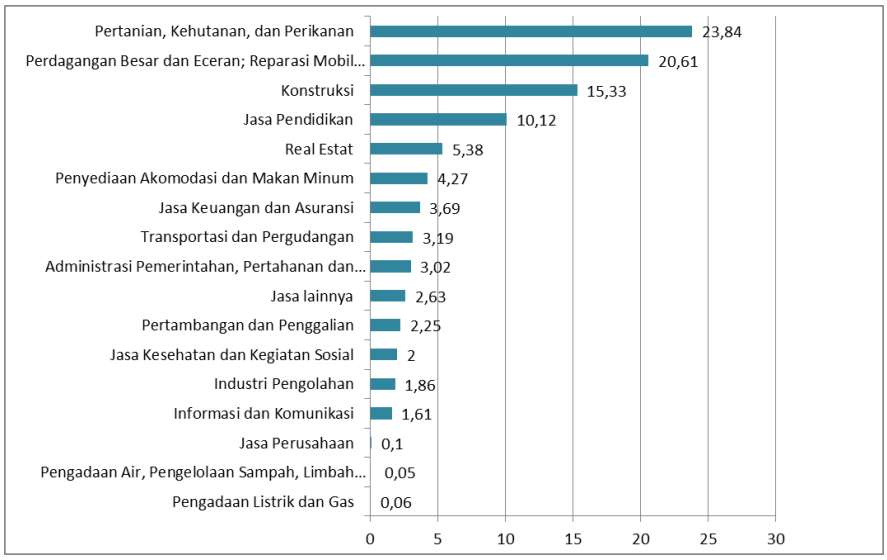
Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berkembang pesatnya pariwisata di Kota Pagar Alam mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2024 adalah: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,84%; 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,61%; 3)

Konstruksi sebesar 15,33%; 4) Jasa
Pendidikan sebesar 10,12%; dan 5) Real Estate sebesar 5,38%.

Pada Gambar 2.18 menunjukan bahwa dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Pagar Alam belum tergoyahkan dalam hal kontribusinya terhadap PDRB Kota Pagar Alam disusul dengan sector perdagangan besar dan eceran. Kondisi ini sebenarnya memiliki potensi negatif karena ekonomi Kota Pagar Alam bisa dikatakan terlalu bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jika kedua sektor ini mengalami hal yang tidak diinginkan, maka dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian Kota Pagar Alam. Sehingga perlu upaya dari pemerintah Kota Pagar Alam agar terjadi diversifikasi kontributor lapangan usaha di Kota Pagar Alam sehingga jika terjadi hal yang buruk terhadap sektor pertanian kehutanan dan perikanan serta sector perdagangan besar dan eceran, sektor lainnya bisa membackup pereonomian Kota Pagar Alam.

Gambar 2.18

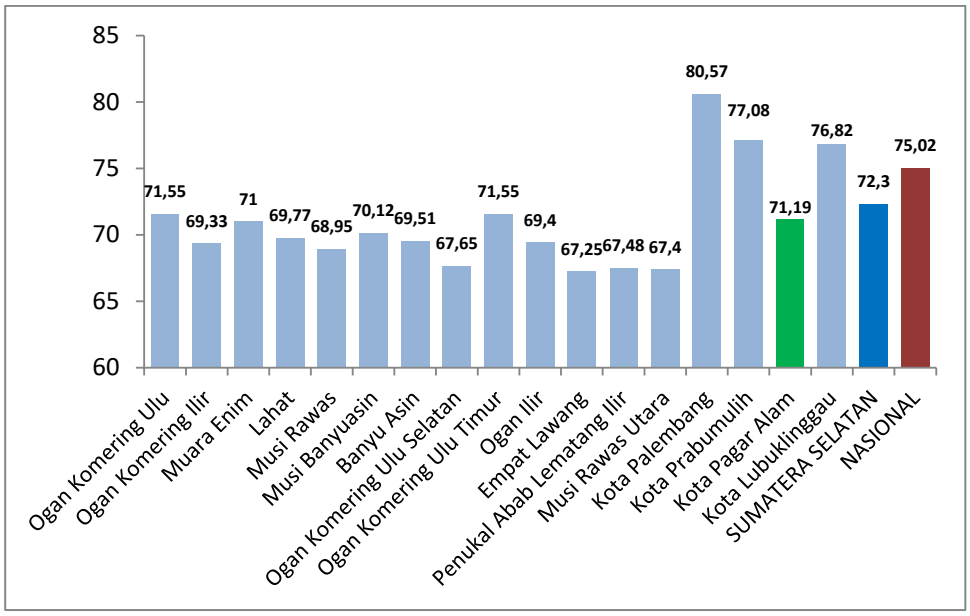
Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Pagar Alam Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.19

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi 17 kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

d. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai kelompok komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, listrik, gas, dan kelompok bahan bakar, kelompok sandang, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi. Laju inflasi Kota Pagar Alam mengacu pada laju inflasi Kota Lubuk Linggau.

e. Indeks Gini

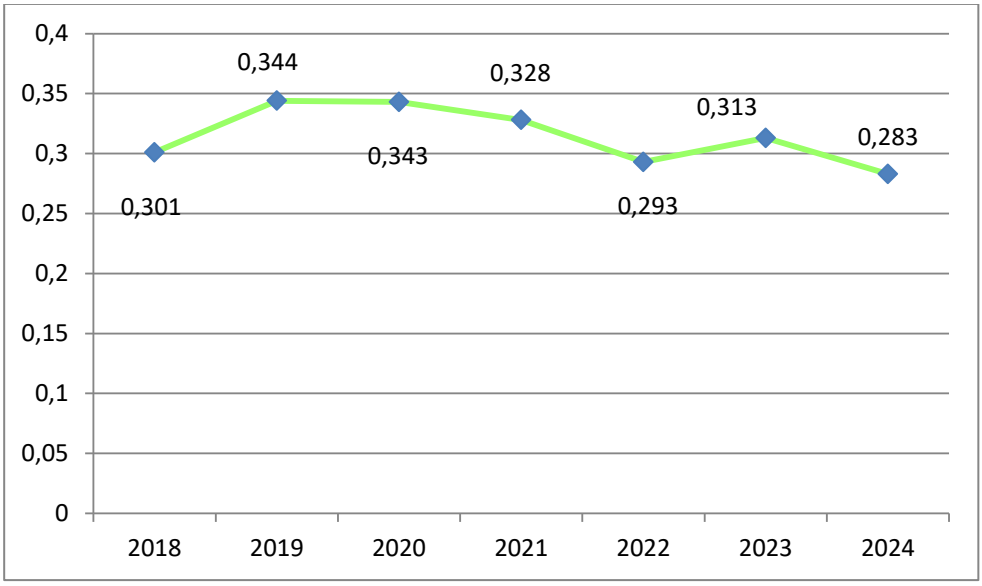
Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks atau rasio ini digunakan untuk

melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara yang lainnya tidak memiliki apa- apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2021 rasio gini Kota Pagar Alam berkisar antara 0,30-0,32 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,293 dan pada tahun 2023 kembali naik diangka 0,313 poin dan ditahun 2024 kembali turun secara significant sebesar 0,283. Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya untuk menekan angka rasio gini sehingga dalam beberapa tahun ke depan.

Gambar 2.20

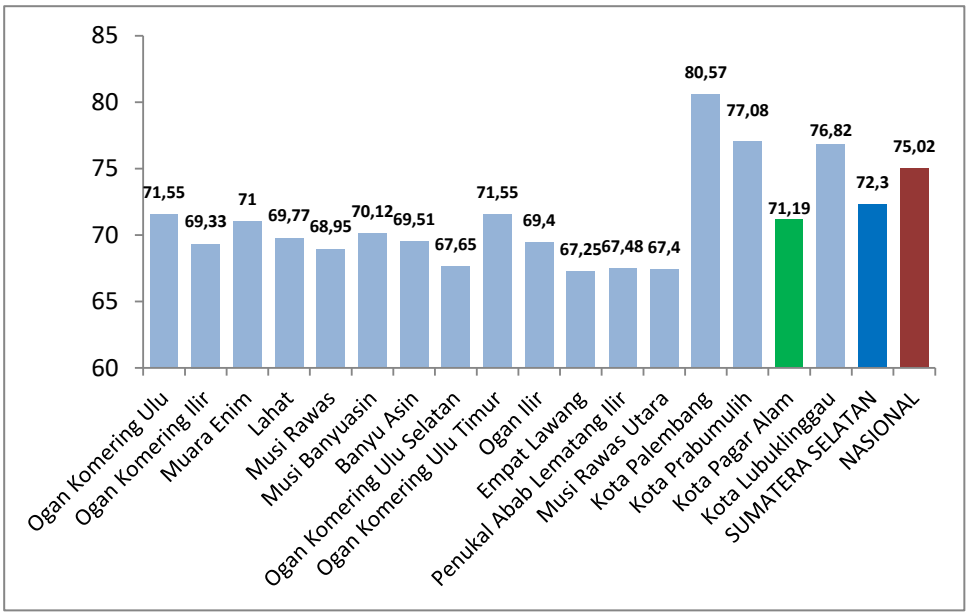
Rasio Gini Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.21

Grafik Perbandingan Rasio Gini 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2024



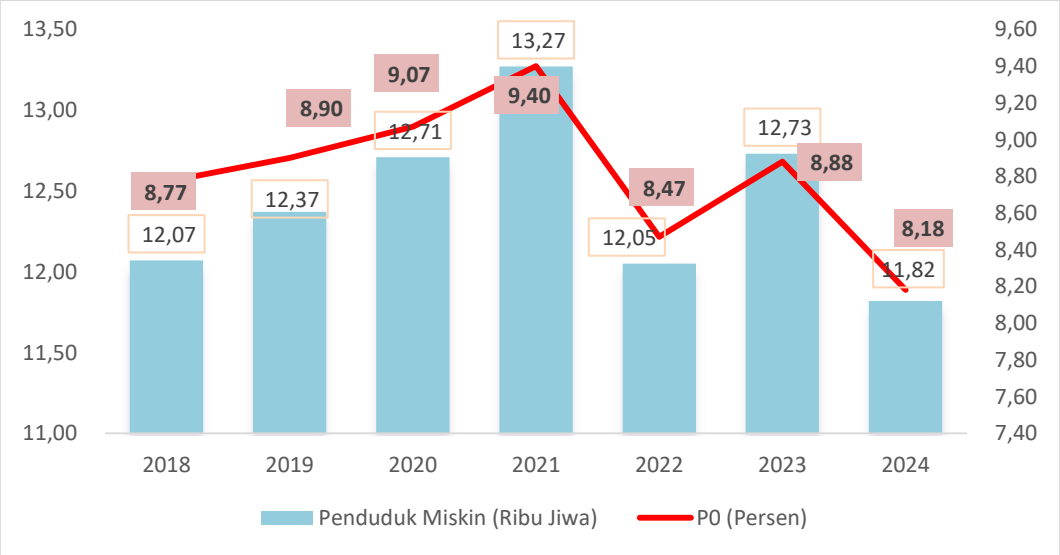
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

f. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. jumlah penduduk miskin di Kota Pagar Alam sebanyak 11,82 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 8,18 persen. Angka kemiskinan Kota Pagar Alam terendah di Provinsi Sumatera Selatan dan Masih dibawah Angka Kemiskinan Nasional.

Gambar 2.22

Grafik Persentase Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Tabel 2.22

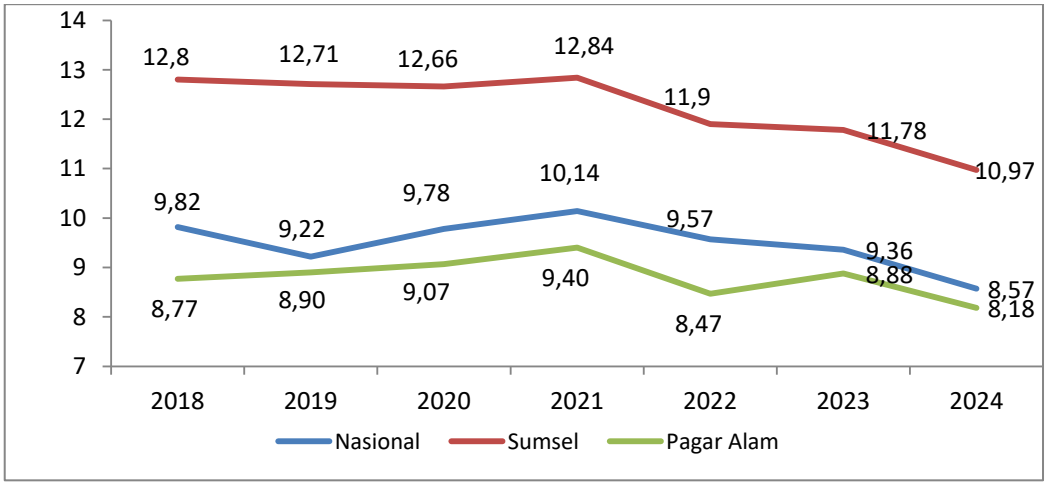
Persentase Kemiskinan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024

WILAYAH	TAHUN						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	9,82	9,22	9,78	10,14	9,57	9,36	8,57
Sumsel	12,86	12,71	12,66	12,84	11,90	11,78	10,97
Pagar Alam	8,77	8,90	9,07	9,40	8,47	8,88	8,18

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.23

Grafik Persentase Kemiskinan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024

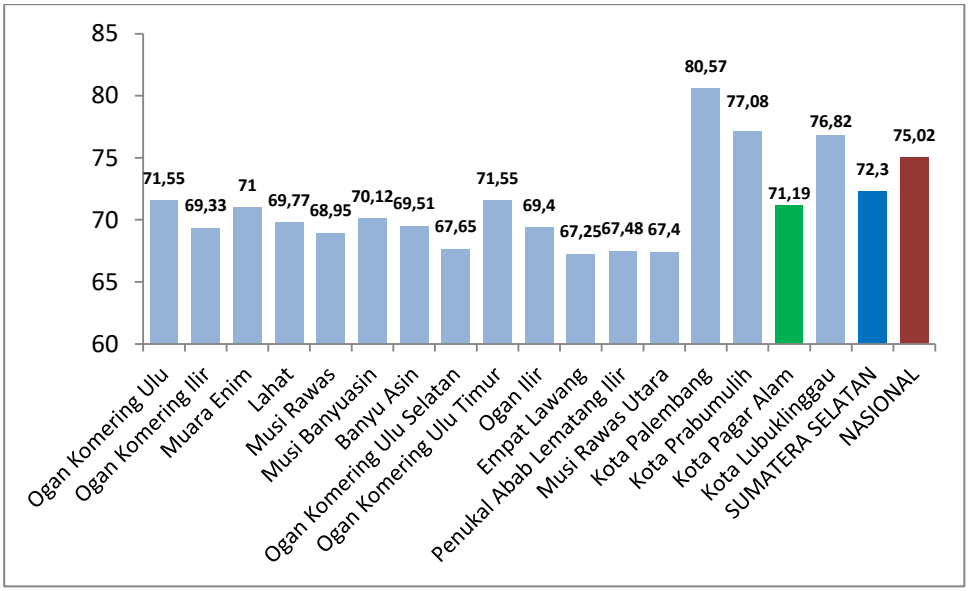


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 2.24

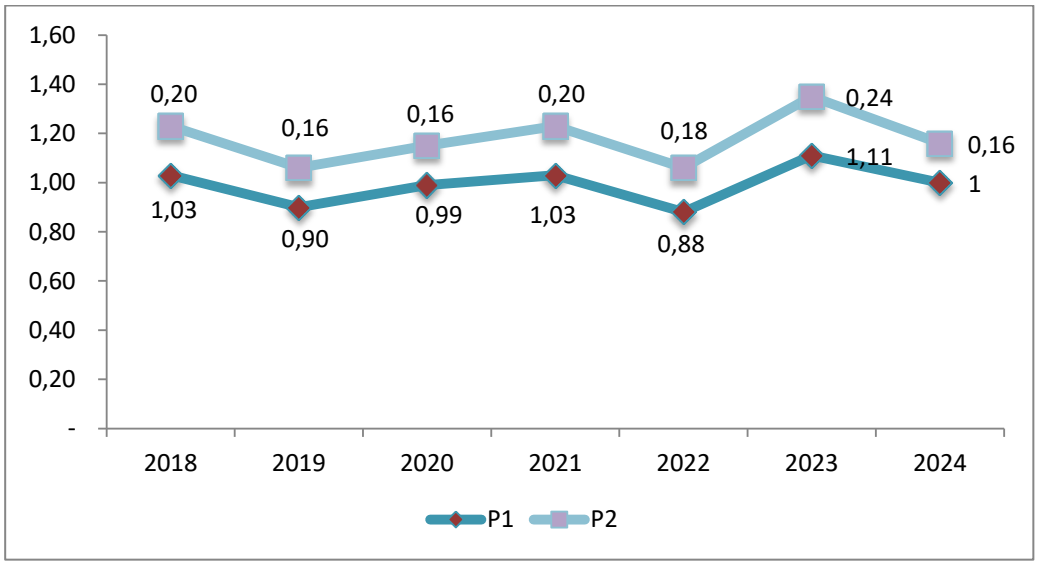
Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatandan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.25

Grafik indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024

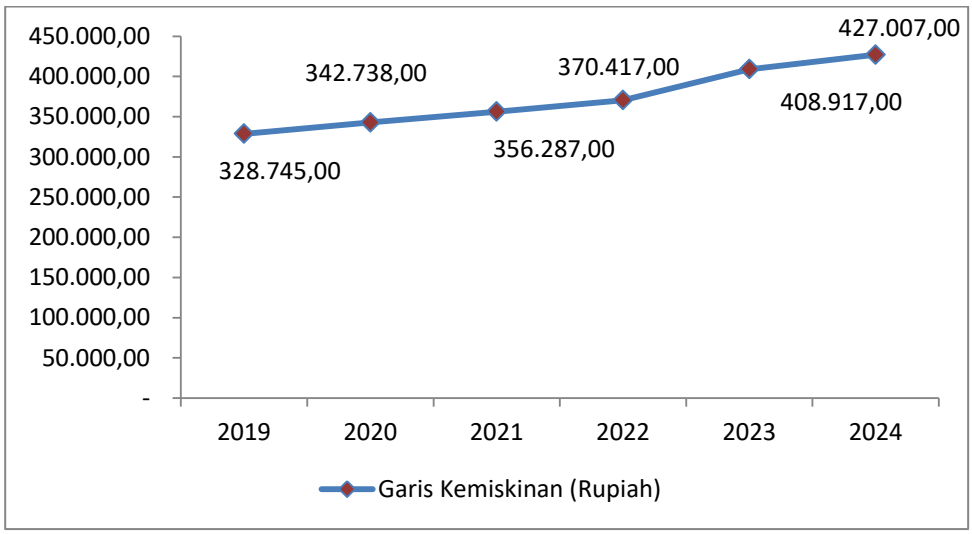


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.25 menunjukan bahwa dari waktu ke waktu GK terus meningkat seiring dengan meningkatknya berbagai kebutuhan baik makanan ataupun non makanan. Usaha untuk menekan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mendapatkan tantangan yang cukup berat karena harus berusaha untuk menaikan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang terus meningkat. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjaga agar penduduk yang hanya berada sedikit di atas GK untuk tidak jatuh ke bawah GK. Garis Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 427.007.

Gambar 2.26

Grafik Garis Kemiskinan (GK) Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

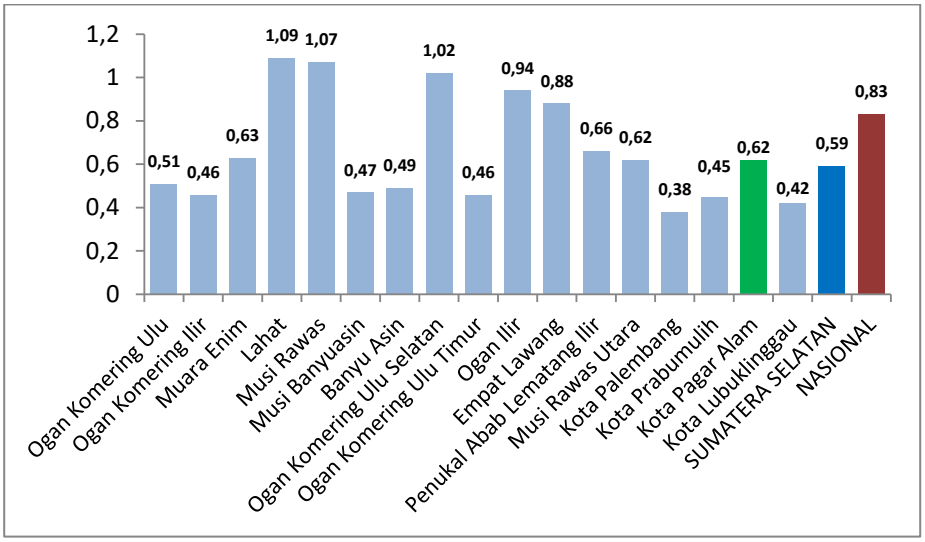
g. Kemiskinan Ekstrim

Definisi Kemiskinan ekstrim sendiri mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Jika dikonversikan dengan rupiah 1,9 US dollar PPP pada tahun 2024 setara sekitar 11.941 rupiah. Artinya penduduk yang penghasilan sehari tidak mencapai 12.000 rupiah termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Misalkan dalam satu rumah tangga terdiri dari empat anggota rumah tangga, maka rumah tangga

tersebut termasuk ke dalam miskin ekstrim jika pendapatan sehari rumah tangga tersebut tidak mencapai 48.000 rupiah.

Gambar 2.27

Grafik Perbandingan Kemiskinan Ekstrim 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

h. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pagar Alam pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,64 persen dan pada Tahun 2022 TPT naik menjadi 3,62 persen, namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 kondisi TPT Kota Pagar Alam kembali mengalami penurunan ke angka 2,71 dan 2,34. Dan berdasarkan hasil survey sakernas pada bulan agustus, seperti yang diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Pagar Alam mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan 2 (dua) kategori yaitu pekerja keluarga dan pekerja bebas sehingga pada saat surver sakernas pada bulan Agustus TPT Kota Pagar Alam kembali mengalami penurunan mencapai angka 2,34 persen.

Tabel 2.23

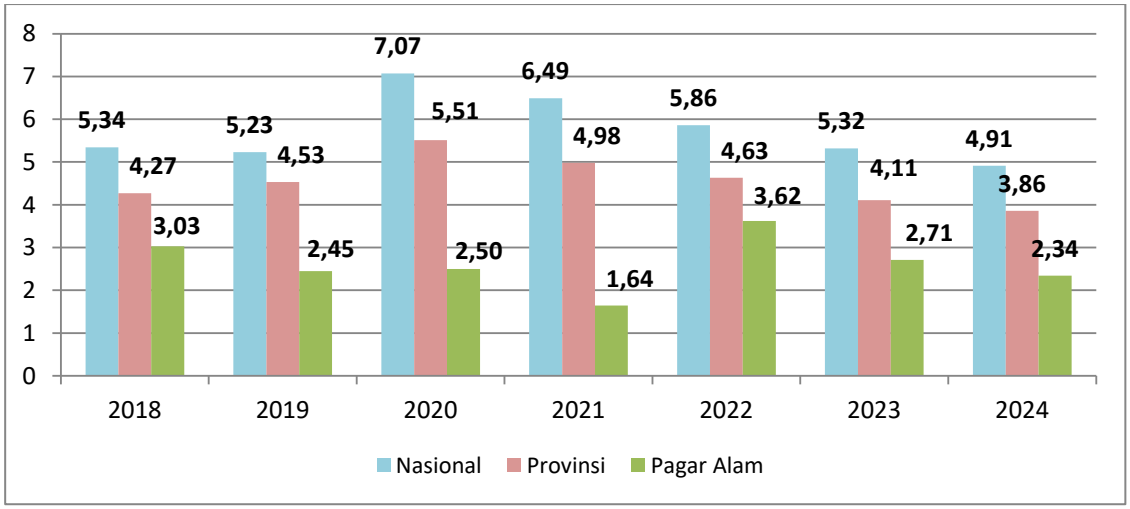
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Jenis Kegiatan Tahun 2022-2024

Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu	Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu Penduduk Kota Pagar Alam Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.Angkatan Kerja	47.504	49.063	50.441	30.726	32.326	36.694	78.230	81.389	87.135
a. Bekerja	45.932	47.627	49.342	29.465	31.560	35.758	75.397	79.187	85.100
b. Pengangguran	1.572	1.436	1.099	1.261	766	936	2.883	2.202	2.035
2. Bukan Angkatan Kerja	7.290	7.352	6.649	21.493	21.386	17.727	78.783	28.738	24.376
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**	55.992	55.877	57.090	53.210	55.649	54.421	109.202	113.541	111.511
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	86,70	86,97	88,35	58,84	60,18	67,43	73.10	73,90	78,14
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,31	2,93	2,18	4,10	2,37	2,55	3,62	2,71	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.28

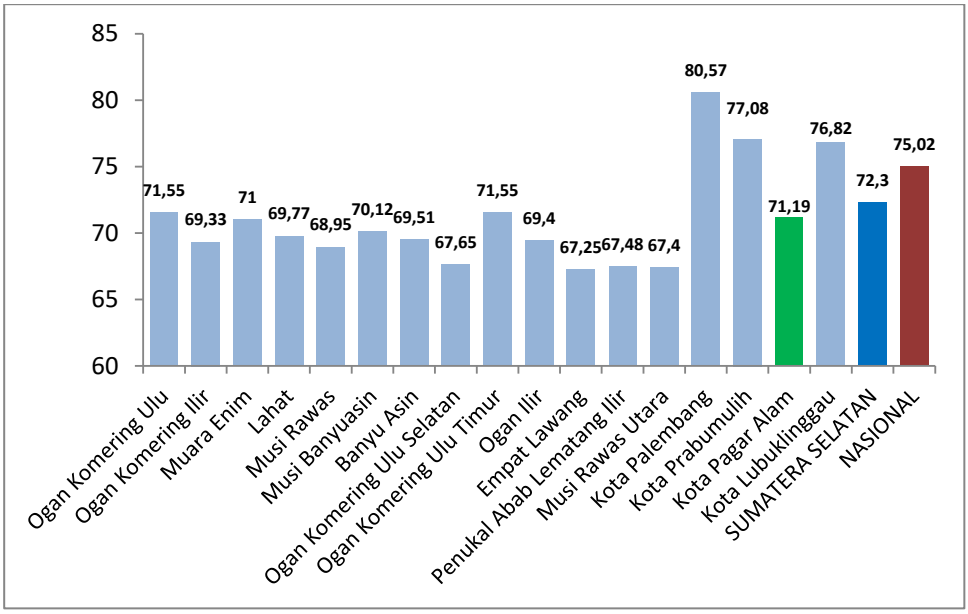
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.29

Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pendidikan suatu daerah adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. RLS Kota Pagar Alam pada Tahun 2024 mencapai 9.42 tahun. Ini artinya Kota Pagar Alam telah mencapai wajib belajar 9 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan

Lama Sekolah (HLS) Kota Pagar Alam Tahun 2024 adalah sebesar 13.3 artinya bahwa diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 Tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,3 tahun.

Tabel 2.25

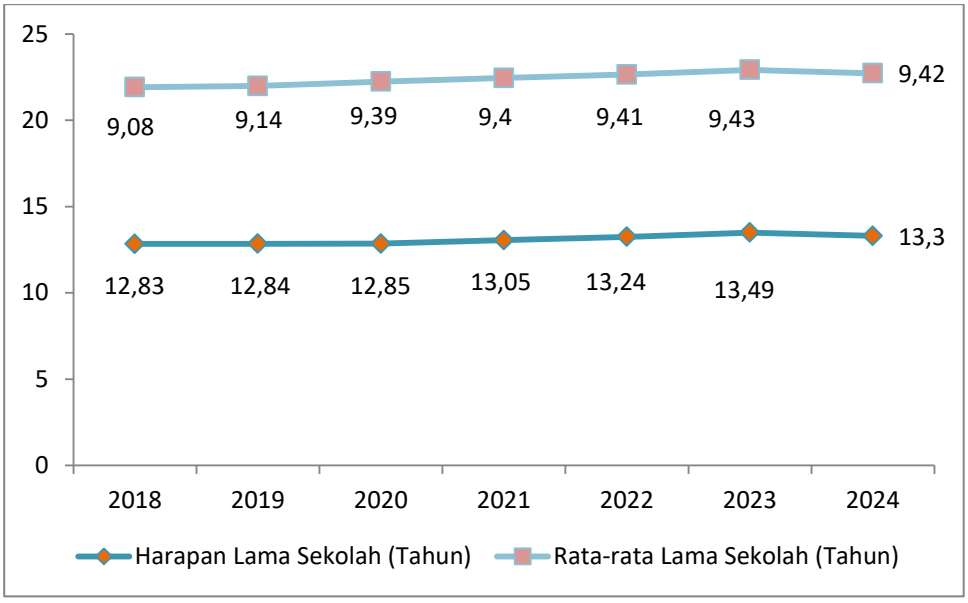
Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2024

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah(Tahun)	12.83	12.84	12.84	13.05	13.24	13,49	13,3
2	Rata – Rata Lama Sekolah(Tahun)	9.08	9.14	9.39	9.40	9.41	9,43	9,42

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.30

Grafik Perkembangan Dimensi IPM Pendidikan Kota Pagar Alam yang diukur dengan Rata- rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2018-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

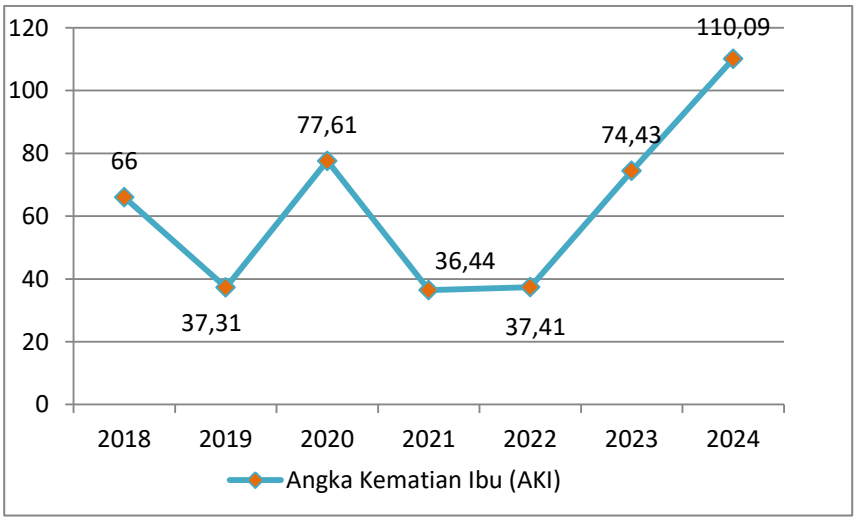
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka kematian Ibu di Kota Pagar Alam masih berfluktuasi, Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan belum optimal.

Gambar 2.31

Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pagar Alam per 100.000 Kelahiran Hidup

Tahun 2018–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat

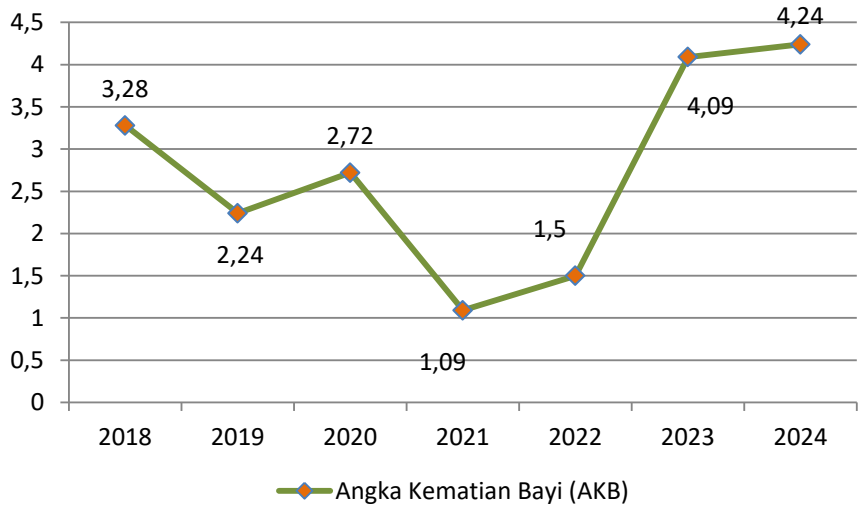
menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kota Pagar Alam sejak tahun 2018 sampai dengan tahun dan pada tahun 2024 menjadi 4,24 per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 2.32

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Pagar Alam per 1000 Kelahiran Hidup

Tahun 2018–2024



Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

e. Angka Harapan Hidup

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi AHH adalah pola makan, penyakit bawaan dari lahir/penyakit degneratif, lingkungan tempat tinggal, stress atau tekanan. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik,

pendapatan dan keamanan lingkungan. Apabia kesehatan fisik tidak mendukung akan memberikan faktor timbulnya penyakit yang memicu pada kematian. Berikut AHH Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Beberapa faktor yang perlu didorong antara lain kemajuan teknologi di bidang pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Tabel 2.26

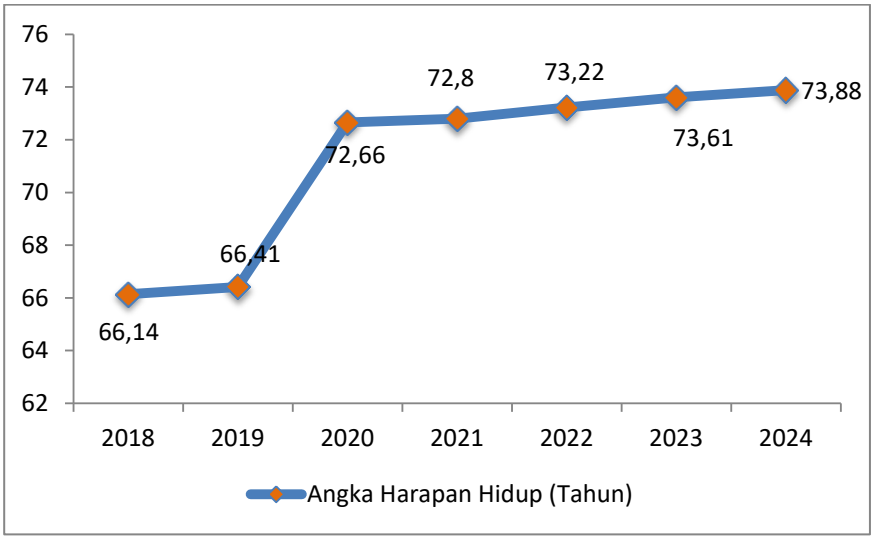
Angka Harapan Hidup Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.41	72,66	72,80	73,22	73,61	73,88

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.33

Grafik Perkembangan Dimensi IPM Kesehatan Kota Pagar Alam yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (Tahun) 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

f. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua

anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran ini dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita Kota Pagar Alam terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 sebesar 9.683 (ribu rupiah)

Tabel 2.27

Pengeluaran per Kapita Setahun yang disesuaikan Kota Pagar Alam

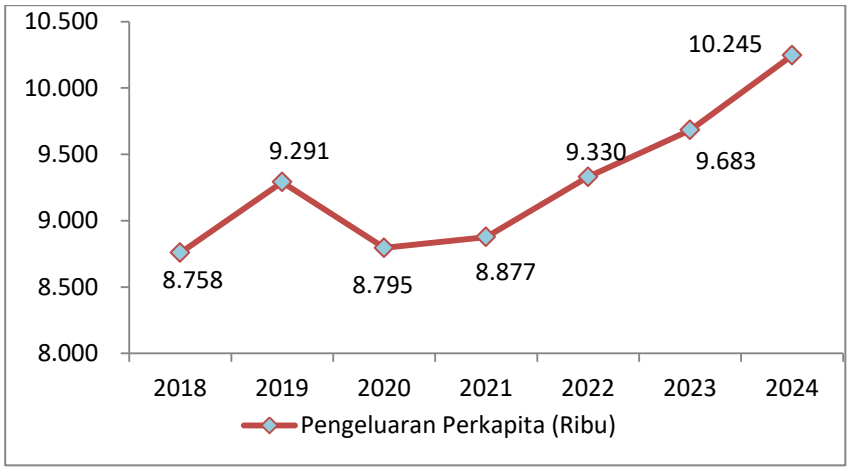
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Per Kapita Setahunyang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	8758	9291	8795	8877	9330	9683	10245

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.34

Perkembangan Dimensi IPM Standar Hidup Layak Kota Pagar Alam yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribu Rp), 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Secara umum kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar

wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalamupaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).

Tabel 2.28

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam dan Komponen Indikatornya

Tahun 2018 – 2024

Komponen Penyusun Indeks	Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	66.14	66.41	66.71	66.85	67.29	67,7	73,88
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9.08	9.14	9.39	9.40	9.41	9,43	9,42
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.83	12.84	12.85	13.05	13.24	13,49	13,3
Pengeluaran per Kapita Setahunyang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	8758	9291	8795	8877	9330	9683	10245
Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	67.62	68.44	68.31	68.68	69.60	70,45	74
Pertumbuhan IPM (persen)	1.21	1.21	-0.19	0.54	1.34	1,2	5,04

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Tabel 2.29

Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Sumatera Selatan dan Kota Pagar Alam

Tahun 2019-2024

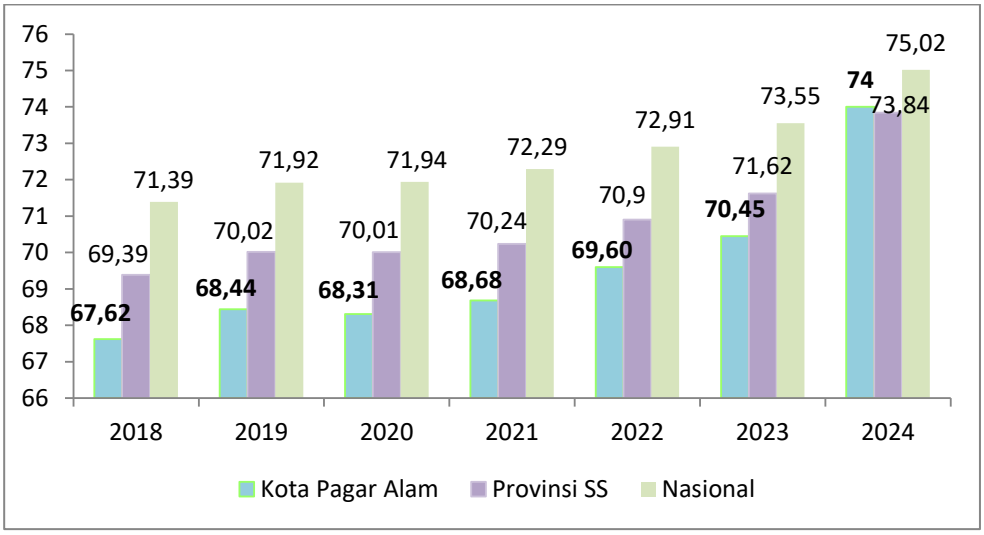
TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55	75,02
Angka Sumsel	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90	71,62	73,84
Angka Pagar Alam	67,62	68,44	68,31	68,68	69,60	70,45	74,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Trend dari tahun 2018 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di Kota Pagar Alam, provinsi Sumatera Selatan maupun nasional cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 2.35

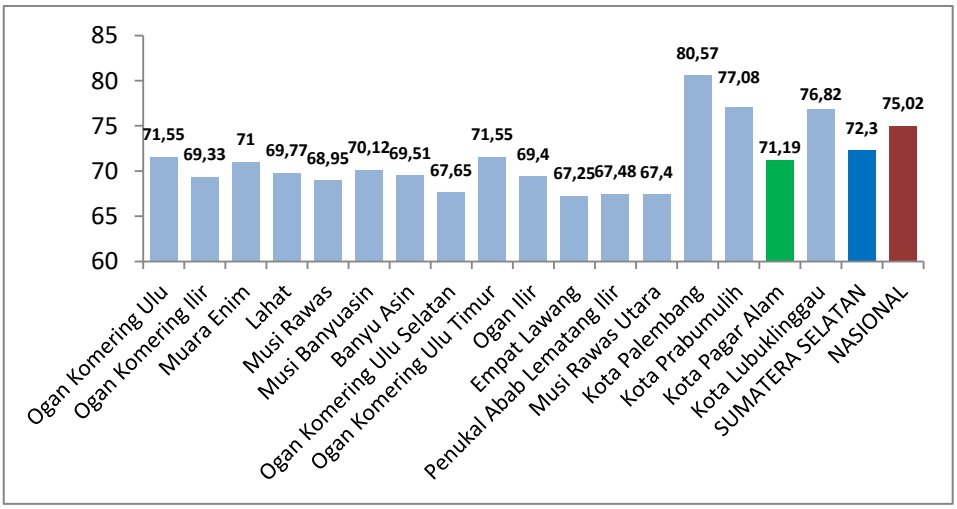
Grafik IPM Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Pagar Alam Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Gambar 2.36

Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Faktor penyebab rendahnya IPM di Kota Pagar Alam berkaitan dengan kesejahteraan penduduk yang diukur dengan pengeluaran per kapita dan indikator Kesehatan terkait Umur Harapan Hidup.

Nilai IPM Kota Pagar Alam lebih rendah dengan kota – kota yang ada di provinsi sumatera selatan. Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM, nilai pengeluaran perkapita Kota Pagar Alam masih rendah dibandingkan kota-kota lain di sumatera selatan. Karena kota lebih dominan bergerak di sektor perindustrian dan jasa, sedangkan Kota Pagar Alam bergerak di sektor pertanian dan mayoritas penduduk nya bermatapencarian sebagai petani dan buruh tani (kerja serabutan), sehingga dari komponen pengeluaran per kapita hanya sebesar Rp. 10,245,000 di tahun 2024

Berbagai program pemerintah telah diupayakan untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Selain itu keberhasilan program tersebut ditentukan oleh pola pikir masyarakat Kota Pagar Alam dalam memanfaatkan sarana yang ada. Pembangunan manusia yang dipotret melalui angka IPM hasilnya tidak langsung berdampak pada tahun berikutnya melainkan beberapa tahun kemudian.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kepemudaan saat ini masih memperlihatkan perlunya peningkatan semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah baik dalam pengembangan jati diri maupun berorganisasi yang telah terjalin kondusif dan sinergi. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun Kota Pagar Alam.

Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Generasi muda yang memiliki kualitas, dedikasi,

kapabilitas dan kredibilitas merupakan faktor dominan bagi pembangunan di Kota Pagar Alam, sebaliknya kualitas yang rendah dan tidak memiliki kreativitas, dan daya saing akan menjadi beban bagi pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka diperlukan usaha– usaha dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk di dalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi kepemudaan.

Kepeloporan di bidang kepemudaan adalah suatu karya nyata bagi unsur pemuda untuk mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi, metodologi, dan manajerial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi sebagai upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda itu sendiri dan negaranya.

Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Kota Pagar Alam dalam bidang olahraga saat ini masih belum optimal dalam hal prestasi olahraga namun sudah ada beberapa upaya yakti peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana untuk kemajuan prestasi dan penghargaan. Untuk itu revitalisasi kelembagaan/organisasi kepemudaan haruslah ditingkatkan untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Profesional dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional.

Pemerintah Kota Pagar Alam akan segra melakukan pengembangan olah raga, pengaktifan even olah raga di tingkat regional, meningkatkan sarana dan prasarana olah raga, pemberian bantuan untuk atlit yang berprestasi, pengembangan fasilitas gedung olah raga (sport center) di Kota Pagar Alam dan gedung kesenian yang bisa dimanfaatkan oleh para seniman untuk berbagai kegiatan pameran yang meliputi inventarisasi dan pengkayaan obyek-obyek pariwisata seni ukir dan yang berkaitan dengan seni yang ada di Kota Pagar Alam, pengembangan seni budaya daerah akan

menjadi daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana seni budaya, serta pengembangan even wisata budaya.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan ekonomi daerah dalam lima tahun terakhir daya saing Kota Pagar Alam menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh Indikator: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; 2). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT).

Tabel 2.30

Kemampuan Ekonomi Daerah

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran KonsumsiRumah Tangga	Rp.	887291	894536	1373538	1450011	1520926	161964
2	Pengeluaran KonsumsiRumah Tangga Non Pangan Per Kapita	%	36.946	414.089	423.794	424.940	442.231	438.469

Sumber : BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.3.2 Fokus Kewilayahan/Infrastruktur

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, oleh karena itu perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tabel 2.31

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PanjangJalan per Persentase Kendaraan	31:1	28:1	30:1	31:1	31:1	31:1
2	Persentase Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	Terminal : 2628 Bandara : 7394	Terminal : 2321 Bandara :76	Terminal : 1388 Bandara : 333	Terminal : 1350 Bandara : 479	Terminal : 695 Bandara : 197	Terminal : 5748 Bandara : 934

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukan oleh Lama Proses Perizinan.

Tabel 2.32

Fokus Iklim Berinvestasi

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama Proses Perizinan	hari	7	7	7	3	7	7
2	Pertumbuhan Investasi	%	17,28	82,85	2,86	63,28	15,35	75,16

Sumber : SPMPTSPTK Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kota Pagar Alam pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan pubik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisa kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah.

2.1.4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Bidang Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Pagar Alam. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), Data Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Pagar Alam 2018-2023 sebagai berikut:

a) Angka Partisipasi Kasar

APK mengukur tingkat partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Meskipun APK merupakan angka kasar dan cenderung lebih tinggi dibanding APM, ukuran ini masih sering dipakai untuk melihat banyaknya anak yang masuk sekolah tidak tepat waktu. Sebagaimana APM dan APK di Kota Pagar Alam cenderung

mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2023 APK PAUD 57,35, APK SD/sederajat 125,51 dan APK SMP 78,44.

b) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat mengakses pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Perhitungan APM diperoleh dari proporsi partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat. Namun indikator APM memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5-6 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah di SD/sederajat.

Tabel 2.33

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut

Jenjang Pendidikan di Kota Pagar Alam Tahun 2019 – 2024

Kelompok Umur	APK					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	46,33	52,2	61,3	66,60	57,35	128,516
SD/Sederajat	113.01	111.27	112,43	111,43	125,51	106,34
SMP/Sederajat	93.45	95.06	99,49	99.49	78,44	108,44

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut

Jenjang Pendidikan di Kota Pagar Alam Tahun 2019 – 2024

Kelompok Umur	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	-	-	-	-	-	-
SD/Sederajat	99.33	98.89	98,81	98,81	118	82,97
SMP/Sederajat	88.34	88.34	88,13	99,13	82	74,41

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek tujuan diadakannya indikator kinerja urusan. Diantaranya adalah indikator yang digunakan untuk melihat tingkatan partisipasi pendidikan, melihat sejauh mana tingkat buta huruf masyarakat, melihat ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan melihat ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal. Capaian Kinerja Urusan Wajib Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dalam urusan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,661	0,681	0,676	0,681	0,689	0,690
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.14	9,39	9,40	9,41	9,43	9,42
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.84	12,85	13,05	13,24	13,49	13,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.35

Jumlah Siswa SD Negeri Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Nama Satuan Pendidikan	T1 L	T1 P	T2 L	T2 P	T3 L	T3 P	T4 L	T4 P	T5 L	T5 P	T6 L	T6 P	Jumlah
1.	SD Negeri 1 PAGAR ALAM	68	69	58	68	51	56	60	69	71	67	66	75	778
2.	SDN 3 PAGAR ALAM	74	82	82	76	79	80	72	84	70	85	77	71	932
3.	SDN 5 PAGAR ALAM	62	59	62	62	61	52	64	65	97	88	81	84	837
4.	SDN 6 PAGAR ALAM	18	15	12	16	10	23	16	10	17	13	13	15	178
5.	SDN 7 PAGAR ALAM	57	42	46	31	50	54	44	46	49	35	60	55	569
6.	SDN 9 PAGAR ALAM	29	16	26	26	24	23	27	28	15	22	40	28	304
7.	SDN 10 PAGAR ALAM	11	8	16	10	12	10	12	6	10	6	16	14	131
8.	SDN 13 PAGAR ALAM	28	20	16	31	18	24	21	18	22	20	14	9	241
9.	SDN 14 PAGAR ALAM	10	9	9	7	6	7	13	7	10	15	10	8	111

10.	SDN 15 PAGAR ALAM	25	21	16	10	16	12	18	11	13	16	19	14	191
11.	SDN 16 PAGAR ALAM	11	18	16	17	9	12	15	17	22	12	16	15	180
12.	SDN 17 PAGAR ALAM	2	1	2	3	3	0	1	0	2	0	3	2	19
13.	SDN 18 PAGAR ALAM	9	5	5	6	2	1	3	7	7	3	4	6	58
14.	SDN 19 PAGAR ALAM	8	5	6	2	7	6	2	2	5	6	8	10	67
15.	SDN 20 PAGAR ALAM	19	12	11	10	19	16	8	9	12	12	12	13	153
16.	SDN 21 PAGAR ALAM	18	15	8	12	17	17	8	7	8	16	14	10	150
17.	SDN 22 PAGAR ALAM	13	14	11	10	17	13	13	6	14	14	14	12	151
18.	SDN 23 PAGAR ALAM	8	14	12	13	13	6	10	6	15	20	18	14	149
19.	SDN 24 PAGAR ALAM	6	8	9	8	6	11	19	6	12	13	4	7	109
20.	SDN 25 PAGAR ALAM	19	25	20	22	21	21	26	16	19	18	23	23	253
21.	SDN 26 PAGAR ALAM	9	1	9	10	6	6	9	9	9	10	9	6	93
22.	SDN 27 PAGAR ALAM	8	2	6	8	6	12	8	8	9	7	11	7	92
23.	SDN 28 PAGAR ALAM	6	6	4	4	8	10	2	7	4	4	6	7	68
24.	SDN 29 PAGAR ALAM	40	38	32	32	36	25	35	29	30	35	47	40	419
25.	SDN 30 PAGAR ALAM	20	19	21	11	12	25	23	19	18	16	18	17	219
26.	SD NEGERI 31 PAGAR ALAM	11	10	18	14	10	11	11	7	6	10	6	13	127
27.	SDN 32 PAGAR ALAM	13	6	6	7	8	7	4	3	5	3	12	6	80
28.	SDN 33 PAGAR ALAM	13	11	17	9	11	15	19	7	10	14	14	11	151
29.	SDN 34 PAGAR ALAM	7	5	12	12	6	5	8	9	8	7	12	14	105
30.	SDN 35 PAGAR ALAM	10	9	10	10	8	4	8	5	3	5	13	5	90
31.	SDN 36 PAGAR ALAM	8	3	10	3	7	6	7	3	6	7	7	4	71
32.	SD NEGERI 37 PAGARALAM	25	27	13	15	23	22	14	10	17	26	25	16	233
33.	SDN 38 PAGAR ALAM	6	11	5	10	8	4	6	7	8	5	9	3	82
34.	SDN 39 PAGAR ALAM	2	3	2	3	6	4	2	4	1	0	2	3	32
35.	SDN 40 PAGAR ALAM	12	15	9	18	18	17	8	15	10	5	7	15	149
36.	SDN 41 PAGAR ALAM	14	15	11	9	11	15	19	19	8	10	13	11	155
37.	SDN 42 PAGAR ALAM	1	1	2	2	1	3	1	3	0	4	4	3	25
38.	SDN 43 PAGAR ALAM	16	11	7	14	24	13	13	8	15	17	10	9	157
39.	SDN 45 PAGAR ALAM	11	3	7	9	8	11	7	11	3	2	7	7	86
40.	SDN 46 PAGAR ALAM	13	4	9	12	11	16	14	10	22	12	27	16	166
41.	SD NEGERI 47 PAGAR ALAM	8	5	8	8	13	12	6	9	7	5	10	9	100
42.	SDN 48 PAGAR ALAM	10	10	13	11	12	8	7	11	14	5	12	6	119
43.	SDN 49 PAGAR ALAM	23	19	24	25	24	19	30	37	19	17	27	38	302
44.	SDN 50 PAGAR ALAM	7	12	9	8	7	9	2	6	10	9	6	5	90
45.	SDN 51 PAGAR ALAM	9	7	8	9	17	12	4	9	8	6	14	6	109

46.	SDN 52 PAGAR ALAM	4	2	3	1	1	1	3	2	1	3	2	2	25
47.	SDN 53 PAGAR ALAM	5	3	5	2	2	3	4	5	1	4	3	5	42
48.	SDN 61 PAGAR ALAM	1	6	5	8	2	1	8	3	5	3	3	1	46
49.	SD NEGERI 62 PAGAR ALAM	3	1	2	1	5	3	2	2	1	1	2	2	25
50.	SD NEGERI 63 PAGAR ALAM	4	3	1	3	2	4	4	2	1	0	3	2	29
51.	SD Negeri 64 PAGAR ALAM	15	9	17	6	9	15	16	6	9	9	11	14	136
52.	SDN 65 PAGAR ALAM	8	4	7	7	5	5	2	8	6	2	7	5	66
53.	SDN 71 PAGAR ALAM	2	2	1	2	2	0	3	2	1	0	2	3	20
54.	SD NEGERI 72 PAGAR ALAM	35	28	21	15	28	24	20	20	29	27	31	26	304
55.	SDN 73 PAGAR ALAM	7	7	10	7	5	7	4	2	5	11	5	6	76
56.	SD NEGERI 74 PAGAR ALAM	26	24	29	19	36	31	30	28	19	21	20	40	323
57.	SD NEGERI 75 PAGAR ALAM	5	3	4	3	4	5	3	3	4	2	5	2	43
Jumlah SD Negeri		**912**	**803**	**820**	**787**	**843**	**834**	**818**	**768**	**822**	**805**	**934**	**870**	**10.016**
1.	SD NU 1 PAGAR ALAM	14	8	16	10	12	10	19	7	10	10	15	8	139
2.	SD NU 2 PAGAR ALAM	9	11	8	9	14	9	12	14	16	5	19	19	145
3.	SD XAVERIUS PAGAR ALAM	16	13	13	22	16	10	10	14	15	12	13	17	171
4.	SD TAMAN SISWA PAGAR ALAM	2	1	8	5	7	5	2	5	12	3	12	5	67
5.	SD MUHAMMADIYAH GUNUNG AGUNG PAGAR ALAM	10	11	11	13	13	7	12	12	12	14	17	10	142
6.	SD MUHAMMADIYAH 3 PAGAR ALAM	17	21	19	20	17	20	16	16	20	10	32	21	229
7.	SD MUHAMMADIYAH 1 PAGAR ALAM	63	53	67	57	41	62	48	42	48	59	59	55	654
8.	SD METHODIST 5 PAGARALAM	4	3	6	4	4	2	3	2	4	3	6	1	42
9.	SD IT LANTABUR	39	34	45	43	37	42	38	43	48	29	35	41	474
10.	SD IT IBNU ABBAS PAGAR ALAM	22	21	9	14	12	20	16	5	10	7	0	0	136
11.	SD IT BAABUSSALAM PAGAR ALAM	24	23	14	4	3	3	9	5	0	0	0	0	85
12.	SD IT AR -RAIHAN PAGARALAM	34	20	33	26	27	19	16	14	17	11	11	14	242
13.	SD ISLAM RACHMAN RENATIN PAGAR ALAM	8	13	16	20	6	14	11	9	3	6	0	0	106
14.	SD ISLAM BUNAYYA PAGARALAM	23	26	23	21	18	19	19	17	16	17	18	17	234
15.	SD ISLAM AL-AZHAR CAIROPAGAR ALAM	14	11	12	7	18	12	13	9	12	3	3	5	119
16.	SD FLUENCY KIDS	3	3	3	7	7	2	3	7	12	9	8	5	69
17.	SD AL WILDAN ISLAMICSCHOOL	5	4	11	8	14	10	13	5	0	0	0	0	70

	PAGAR ALAM													
18.	SD AISYIYAH 1 KAUMAN	30	46	27	17	44	25	47	58	49	37	42	52	474
19.	SD ABABIL	19	7	14	9	12	15	14	8	19	12	13	13	155
Jumlah SD Swasta		**356**	**329**	**355**	**316**	**322**	**306**	**321**	**292**	**323**	**247**	**303**	**283**	**3.753**
Total SD N + S		**1.268**	**1.132**	**1.175**	**1.103**	**1.165**	**1.140**	**1.139**	**1.060**	**1.145**	**1.052**	**1.237**	**1.153**	**13.769**

Tabel 2.36

Rekap Jumlah Siswa SD Negeri-Swasta Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD Negeri	5.149	4.867	**10.016**
2.	SD Swasta	1.980	1.773	**3.753**
Jumlah		**7.129**	**6.640**	**13.769**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Jumlah siswa jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam pada Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah 13.769 orang siswa terdiri dari 7.129 siswa laki-laki dan 6.640 siswa perempuan dengan rincian :

No	Nama Satuan Pendidikan	T1 L	T1 P	T2 L	T2 P	T3 L	T3 P	Jumlah
1.	SMP NEGERI 1 PAGAR ALAM	160	153	122	161	131	150	877
2.	SMPN 2 PAGAR ALAM	138	145	126	153	125	153	840
3.	SMPN 3 PAGAR ALAM	98	93	93	90	94	103	571
4.	SMPN 4 PAGAR ALAM	31	22	41	45	42	32	213
5.	SMPN 5 PAGAR ALAM	67	59	45	45	47	60	323
6.	SMPN 6 PAGAR ALAM	49	37	44	36	53	46	265
7.	SMP NEGERI 7 PAGAR ALAM	28	31	43	40	20	32	194
8.	SMPN 8 PAGAR ALAM	73	82	81	79	96	90	501
9.	SMPN 9 PAGAR ALAM	31	31	40	33	29	24	188
10.	SMP NEGERI 10 PAGAR ALAM	15	15	15	19	16	14	94

Jumlah SMP Negeri		**690**	**668**	**650**	**701**	**653**	**704**	**4.066**
11.	SMP AISYIYAH TERPADU	14	3	5	2	14	11	49
12.	SMP BP IBNU SINA	12	12	10	8	6	7	55
13.	SMP IT AL QUDS	4	0	5	0	7	4	20
14.	SMP IT AR RAIHAN PAGAR ALAM	17	26	26	25	0	0	94
15.	SMP IT DARUL IKHLAS	22	11	16	14	12	10	85
16.	SMP IT MIFTAHUL JANNAH PAGAR ALAM	13	4	3	6	12	8	46
17.	SMP MANZILUL BARAKAH	33	30	38	11	0	0	112
18.	SMP METHODIST PAGAR ALAM	3	2	5	5	5	2	22
19.	SMP MUHAMMADIYAH PAGAR ALAM	162	179	155	147	205	156	1004
20.	SMP NU PAGAR ALAM	29	2	28	1	17	6	83
21.	SMP PGRI PAGAR ALAM	88	53	100	76	96	79	492
22.	SMP TAHFIDZ ABABIL PAGAR ALAM	5	3	5	5	11	6	35
23.	SMP TAMAN SISWA KOTA PAGARALAM	23	11	18	4	45	13	114
24.	SMP XAVERIUS PAGAR ALAM	19	21	26	22	19	28	135
Jumlah SMP Swasta		444	357	440	326	449	330	2.346
Total SMP N + S		**1.134**	**1.025**	**1.090**	**1.027**	**1.102**	**1.034**	**6.412**

- Siswa yang bersekolah di SD Negeri se-kota Pagar Alam untuk tahun pelajaran 2023/2024 berjumlah 10.016 orang, yang terdiri dari 5.149 siswa laki-laki dan 4.867 siswa perempuan;
- Siswa yang bersekolah di SD Swasta se-kota Pagar Alam berjumlah 3.753 orang, yang terdiri dari 1.980 siswa laki-laki dan 1.773 siswa perempuan;

Tabel 2.37

Jumlah Siswa SMP Negeri - Swasta Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Nama Satuan Pendidikan	T1 L	T1 P	T2 L	T2 P	T3 L	T3 P	Jumlah
1.	SMP NEGERI 1 PAGAR ALAM	160	153	122	161	131	150	877
2.	SMPN 2 PAGAR ALAM	138	145	126	153	125	153	840
3.	SMPN 3 PAGAR ALAM	98	93	93	90	94	103	571
4.	SMPN 4 PAGAR ALAM	31	22	41	45	42	32	213
5.	SMPN 5 PAGAR ALAM	67	59	45	45	47	60	323
6.	SMPN 6 PAGAR ALAM	49	37	44	36	53	46	265
7.	SMP NEGERI 7 PAGAR ALAM	28	31	43	40	20	32	194

8.	SMPN 8 PAGAR ALAM	73	82	81	79	96	90	501
9.	SMPN 9 PAGAR ALAM	31	31	40	33	29	24	188
10.	SMP NEGERI 10 PAGAR ALAM	15	15	15	19	16	14	94
Jumlah SMP Negeri		**690**	**668**	**650**	**701**	**653**	**704**	**4.066**
11.	SMP AISYIYAH TERPADU	14	3	5	2	14	11	49
12.	SMP BP IBNU SINA	12	12	10	8	6	7	55
13.	SMP IT AL QUDS	4	0	5	0	7	4	20
14.	SMP IT AR RAIHAN PAGAR ALAM	17	26	26	25	0	0	94
15.	SMP IT DARUL IKHLAS	22	11	16	14	12	10	85
16.	SMP IT MIFTAHUL JANNAH PAGAR ALAM	13	4	3	6	12	8	46
17.	SMP MANZILUL BARAKAH	33	30	38	11	0	0	112
18.	SMP METHODIST PAGAR ALAM	3	2	5	5	5	2	22
19.	SMP MUHAMMADIYAH PAGAR ALAM	162	179	155	147	205	156	1004
20.	SMP NU PAGAR ALAM	29	2	28	1	17	6	83
21.	SMP PGRI PAGAR ALAM	88	53	100	76	96	79	492
22.	SMP TAHFIDZ ABABIL PAGAR ALAM	5	3	5	5	11	6	35
23.	SMP TAMAN SISWA KOTA PAGARALAM	23	11	18	4	45	13	114
24.	SMP XAVERIUS PAGAR ALAM	19	21	26	22	19	28	135
Jumlah SMP Swasta		444	357	440	326	449	330	2.346
Total SMP N + S		**1.134**	**1.025**	**1.090**	**1.027**	**1.102**	**1.034**	**6.412**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.38

Rekap Jumlah Siswa SMP Negeri-Swasta Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SMP Negeri	1.993	2.073	**4.066**
2.	SMP Swasta	1.333	1.013	**2.346**
Jumlah		**3.326**	**3.086**	**6.412**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Jumlah siswa jenjang Pendidikan Menengah di Kota Pagar Alam pada Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah 6.412 orang siswa terdiri dari 3.326 siswa laki-laki dan 3.086 siswa perempuan dengan rincian :

- Siswa yang bersekolah di SMP Negeri se-kota Pagar Alam untuk tahun

pelajaran 2024/2025 berjumlah 4.066 orang, yang terdiri dari 1.993 siswa laki-laki dan 2.075 siswa perempuan;

- Siswa yang bersekolah di SMP Swasta se-kota Pagar Alam berjumlah 2.346 orang, yang terdiri dari 1.333 siswa laki-laki dan 1.013 siswa perempuan;

Tabel 2.39

Jumlah Siswa Kesetaraan Paket A Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SPNF SKB	-	-	-
2.	PKBM Mentari	-	-	-
3.	PKBM Lematang Indah	10	-	10
4.	PKBM Serunting	-	-	-
5.	PKBM Dempo Jaya	-	-	-
	Total	**10**	**-**	**10**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.40

Jumlah Siswa Kesetaraan Paket B Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SPNF SKB	18	7	25
2.	PKBM Mentari	52	14	66
3.	PKBM Lematang Indah	48	4	52
4.	PKBM Serunting	-	-	-
5.	PKBM Dempo Jaya	36	5	41
	Total	**154**	**30**	**184**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.41

Jumlah Siswa Kesetaraan Paket C Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SPNF SKB	47	27	74
2.	PKBM Mentari	83	19	102

3.	PKBM Lematang Indah	174	49	223
4.	PKBM Serunting	45	16	61
5.	PKBM Dempo Jaya	54	37	91
	Total	**403**	**148**	**551**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan di Kota Pagar Alam pada Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah 745 orang siswa terdiri dari 567 siswa laki-laki dan 178 siswa perempuan dengan rincian :

- Siswa yang bersekolah di Paket A se-kota Pagar Alam untuk tahun pelajaran 2022/2023 berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 0 siswa perempuan;
- Siswa yang bersekolah di Paket B se-kota Pagar Alam berjumlah 184 orang, yang terdiri dari 154 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan;
- Siswa yang bersekolah di Paket C se-kota Pagar Alam berjumlah 551 orang, yang terdiri dari 403 siswa laki-laki dan 148 siswa perempuan

Dengan meningkatkan partisipasi penduduk berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal dalam pendidikan kesetaraan melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C). Maka dapat disimpulkan bahwa angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan kualitas yang pada tahun 2018 sebesar 9,08 % menjadi 9,41 % pada tahun 2022. Artinya rata-rata lama sekolah mengurangi angka DO.

Salah satu program yang mendukung angka rata-rata lama sekolah adalah Pelajaran tambahan yang merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing. Berikut Nama dan Alamat Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tahun 2022 dibawah Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Binaan Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam

No	Nama LKP	Alamat	Nama Penyelenggara	Program Yang Dilaksanakan
1	Busana Anita	Jln. Mayor Ruslan	Ninik Anita	Kursus Menjahit
2	My english Language Center	Jln. Mayor Ruslan	Megian	Bimbingan Belajar
3	Susi Salon	Jln. Kombes H.Umar	Susinilawati	Kursus Kecantikan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Capaian SPM bidang pendidikan dapat diuraikan dalam jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang meliputi : a) Pendidikan Dasar, b) Pendidikan Kesetaraan dan c) Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai berikut :

Tabel 2.43

Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PENDIDIKAN DASAR																
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15Tahun yang berpartisipasi dalampendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	23.875	100	23.649	99,05	23.954	100	22.433	93,65	23.020	100	24.571	93,69	20.389	100	24.593	82.90
2	PENDIDIKAN KESETARAAN																
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasardan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	83	100	83	100,00	650	100	650	100	169	100	12.754	1,33	924	100	12.754	7,24
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI																
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalampendidikan PAUD	5.250	100	4.514	85,98	5.250	100	5.155	98,19	4.047	100	7.527	53,77	2.924	100	4.953	59,03

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Pagar Alam. Penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di lain pihak, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya Promosi Kesehatan, Budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang terampil dan profesional di bidangnya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Tabel 2.44

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	66,71	66,85	67,29	73,61	73,88
2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,05	0,07	0,31	0,05	0,05
3	Angka Kematian Bayi	%	2,72	1,09	1,50	4,09	4,24
4	Angka Kematian Ibu	%	77,61	36,44	37,41	74,43	110,09
5	Stunting	%	N/A	15,50	11,60	23,13	n/a

No	Indikator	Sat	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	64,06	60,89	69,26	91,90	91,90
7	PHBS Masyarakat	%	75,60	78,37	79,25	81,10	74,12
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah Kelurahan STBM	Kel	0	0	6	74,29	74,29
11	Persentase Akses Sanitasi layak	%	93,84	90,96	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Capaian kinerja urusan kesehatan dari 11 indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2023 yang mendapatkan catatan kurang baik yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan stunting.

Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya seperti melakukan intervensi penurunan stunting yang dilaksanakan dengan baik mulai dari pemberian asupan bagi ibu hamil dan balita melalui penyaluran pemberian makanan tambahan yang merata untuk ibu hamil dan balita, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), peningkatan kampanye PHBS / Keluarga sehat atau melaksanakan kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai macam media, namun diharapkan selain sektor kesehatan perlu adanya peran serta dari berbagai sektor terkait agar supaya prevalensi stunting dan masalah kesehatan lainnya dapat menurun dan teratasi dengan baik. Sumber Daya Manusia kesehatan yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan kordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan guna peningkatan kinerja urusan kesehatan dimasa yang akan datang.

Tabel 2.45 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL																
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2.941	100	2.799	95,17	2.796	100	2.956	94,59	2,948	100	2,748	93,22	2,855	100	2, 667	93,42
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN																
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.807	100	2.750	97,97	2.591	100	2.822	91,81	2,829	100	2,665	94,20	2,725	100	2,685	98,53
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR																
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2.673	100	2.748	102,81	2.476	100	2.673	92,63	2,590	100	2,442	94,29	2,596	100	2,576	99,23
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA																
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	14.035	100	13.821	98,48	9.216	100	12.080	76,29	12,080	100	11,090	91,80	10,284	100	9, 887	96,14
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR																
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	13.050	100	12.590	96,48	7.014	100	8.126	86,32	8.216	100	7.921	96,41	8.216	100	8,078	98,32
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF																

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2025

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditentukan oleh Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Urusan pemerintahan bidang PUPR dibagi menjadi Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA), Sub Urusan Keciptakaryaan (meliputi Air Minum, Persampahan, Air limbah, Drainase, Permukiman dan Bangunan Gedung), Sub Urusan Tata Ruang dan Sub Urusan Bina Marga.

Capaian Kinerja Urusan Wajib Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi panjang jalan dalamkondisi baik	%	59.66	57.10	59.18	60.89	62.19	66,29
2	Proporsi irigasi kota dalamkondisi baik	%	31.24	45.00	65.07	71.00	71,34	71,54
3	Luasan RTH Publik sebesar 20%dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan	%	24.98	24.98	24.98	68.03	71.08	68,03
4	Persentase Akses Rumah Tanggaterhadap Air Minum Layak (%)	%	57.82	61.53	69.31	71.08	24,98	71,89
5	Persentase Akses Pendudukterhadap Sanitasi Layak	%	42.01	51.06	43,94	69.20	69,75	70,65

Sumber : Dinas PUPR Kota Pagar Alam Tahun 2022 dan BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025

Indikator sasaran Urusan Pekerjaan Umum tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan yang mendukungnya pada tahun 2024. indikator proporsi jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 66,29 persen, dari 548.25 km jalan di Kota Pagar Alam, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat jalan sepanjang 333.85 km dalam kondisi mantap, sepanjang 248.65

km jalan baik, dan sepanjang 45.30 km jalan rusak serta sepanjang 169.10 km jalan rusak berat.

Indikator proporsi irigasi kota dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 71,54% hingga 2O24 ini. Hingga saat ini, dari 5025 Ha kawasan irigasi, 3568 Ha dalam kondisi baik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2018 tentang SPM PUPR, Pemerintah Kota Pagar Alam telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan menurut jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi : a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan b) Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.47
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI- HARI	51,08		61,53	120,46	100	100	71,08	71,08	100	100	69,88	69,88	100	100	71,89	71,89
	Jumlah Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	146128	100	89911	61,53	146.128	146.128	103.871	71,08	146.128	146.128	102.111	69,88	146.128	146.128	105.046	71,89
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	100		50,71	50,71	100	100	69	69,20	100	100	69,75	69,75	100	100	70,65	70,65
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	146128	100	73963	50,62	146.128	146.128	101.120	69,20	146.128	146.128	101.923	69,75	146.128	146.128	103.233	70,65

Sumber : Dinas PUPR Kota Pagar Alam Tahun 2025

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan Kawasan pemukiman di Kota Pagar Alam menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 96,13 persen menjadi 97,53 persen pada tahun 2024.

Capaian Kinerja Urusan Wajib Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.48

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95.17	97.06	97.26	97.28	97,33	97,53
2	Persentase lingkungan kawasan pemukiman kumuh	%	0.024	n/a	0.79	0.18	0,052	0,37

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan dalam jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi : a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kota Pagar Alam, b) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagai berikut :

Tabel 2.49

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM.																
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100	0	0	0	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.																
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alam yangmemperoleh faslitasi penyediaan rumah laya huni	0	100	0	0	0	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun 2025

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menekankan pada peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, terjaganya ketenteraman umum dan terbinanya ketertiban umum sebagai antisipasi terjadinya konflik yang berbasis SARA, anarkis, separatisme atau lainnya. Untuk itu dari tahun ke tahun telah dilaksanakan penertiban PKL, operasi gelandangan, pengemis dan tuna susila.

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi harus diciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipasif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabillitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah di Kota Pagar Alam yang dinamis.

Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pagar Alam dapat dikatakan cukup kondusif, selama tahun 2024 tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang berkaitan atau menjurus ke arah SARA, anarkhisme, separatisme.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diukur dengan indikator Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/ kel dan jumlah bangunan pos jaga/ roda di desa/ kelurahan, Jumlah Cakupan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Jumlah Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

Tabel 2.50

Capaian Kinerja Urusan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Daerah	%	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan unjuk	Kali	100	100	100	100	100	100
4	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	27,30	26,41	26,15	25,85	23,00	23,00
5	Jumlah pengamanan dalam setahun	Kali	8	8	8	8	8	8
6	Rasio Jumlah linmas per 10.000 Penduduk	Rasio	3.4	3.4	2.1	3	25,85	25,85

Sumber : Sat Pol PP Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.51

Jumlah Peraturan Daerah yang di Tegakkan SAT POL PP Kota Pagar Alam

No	Peraturan Daerah
1	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 4 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan PenertibanPedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam
2	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Menjemur Kopi, Padi danMenumpuk Benda-Benda Lainnya di Jalan Umum dalam Daerah Kota Pagar Alam
4	Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah KotaPagar Alam Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Dalam Kota Pagar Alam
5	Peraturan Walikota Pagar Alam No 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan WalikotaNo 30 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perayaan Yang Menggunakan Alat Musik Elektronik
6	Peraturan Walikota Pagar Alam No 30 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru MenujuMasyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease 2019 di Kota Pagar Alam

Sumber : Sat Pol PP Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.52

Jumlah Pelanggaran dan Satlinmas Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggar Perdadan Perkada	32 Pelanggar	83 Pelanggar	39 Pelanggar	25 Pelanggar	23 Pelanggar	23 Pelanggar
2	Jumlah Pelanggar K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	5 Pelanggar	3 Pelanggar	8 Pelanggar	6 Pelanggar	3 Pelanggar	3 Pelanggar
3	Jumlah Satlinmas	380 Orang	380 Orang	380 Orang	380 Orang	380 Orang	380 Orang

Sumber : Sat Pol PP Kota Pagar Alam Tahun 2025

Capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diuraikan dalam jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi : a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, d) Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana, e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, sebagai berikut :

Tabel 2.53

Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat daripenegakan hukum Perda dan perkada	2 Perda	100	2 Perda	100	2 Perda	100	2 Perda	100	2 Perda	100	2 Perda	100	2 Perda	100	2 Perda	100
2	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA																
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasirawan bencana	5 Kec	100	3 Kec	60	2500 Orang	100	2000 Orang	80	250 Orang	100	300 Orang	80	147.710	100	60.089	40
3	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA																
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahandan kesiapsiagaan terhadap bencana	5 Kec	100	5 Kec	100	2500 Orang	100	2000 Orang	80	300 Orang	100	200 Orang	80	147.78	100	134.21	90
4	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA																

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasikorban bencana	5 Kec	100	3 Kec	60	2000 Orang	100	2000 Orang	100	60 Orang	100	16 Orang	26	147.836	100	1027	14

Sumber : Sat Pol PP Kota Pagar Alam Tahun 2025

6. Urusan Sosial

Sebagai pengampu urusan pemerintahan di bidang sosial, Dinas Sosial Kota Pagar Alam dihadapkan dengan tugas upaya pencapaian penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan merupakan bentuk pelayanan sosial secara komprehensif yang harus ditangani secara terintegrasi.

Di Kota Pagar Alam pelayanan sosial masih belum optimal dan hanya bersifat administratif. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur sistem layanan sosial mengakibatkan seluruh pelayanan sosial tertumpu pada Dinas Sosial. data PMKS tahun 2020- 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.54

Data PMKS Dalam Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024

No.	Jenis PMKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak dengan disabilitas	0	27	3	9	3
2	Anak balita terlantar	0	7	0	0	0
3	Anak terlantar	9	4	0	0	0
4	Anak yang berhadapan dengan hukum	7	13	2	12	21
5	Anak jalanan	0	6	0	0	0
6	Anak yang menjadi tindak kekerasan	0	0	1	9	21
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	3	3	1
8	Lanjut usia terlantar	8	28	0	1	0
9	Penyandang disabilitas	131	13	38	125	147
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0
11	Pengemis	0	0	0	0	0
12	Gelandangan	0	0	1	1	0
13	Pemulung	8	4	0	12	0
14	Kelompok minoritas	0	33	0	0	0
15	Bekas warga binaan LP	31	15	0	33	0
16	Korban penyalahunaan NAPZA	0	13	0	6	25
17	Orang dengan HIV/AIDS	2	0	2	4	0
18	Korban trafficking	0	0	0	0	0
19	Korban tindak kekerasan	0	0	1	5	0

No.	Jenis PMKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
20	Pekerja migran bermasalah	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	0	0	0	0	43
22	Korban bencana social	0	27	64	0	0
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	95	128	0	234	1
24	Keluarga fakir miskin	365	401	0	0	0
25	Keluarga bermasalah sosial psikolog	35	29	0	0	0
26	Komunitas adat terpencil	0	0	0	0	0
	Jumlah	**691**	**748**	**115**	**462**	**262**

Sumber : PMKS Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Tahun 2025

Dalam penanganan permasalahan sosial, pemerintah daerah tidak hanya menangani langsung terhadap penyandang masalahnya tetapi juga mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembangunan urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dengan bekerja seoptimal mungkin agar pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan.

Dalam kerangka kesejahteraan sosial, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan terhadap Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan

mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesajahteraan Sosial (UKS). Dorongan seoptimal mungkin pada pelayanan kepada PMKS ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan hidup bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh pelayanan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

1. DTKS berjumlah 19.377 KK (50.516 jiwa);
2. BSP berjumlah 6.063 KPM;
3. PBI APBN berjumlah 44.373.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase PMKS yang tertangani, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis

Tabel 2.55

Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	86	86	89	92	92,25	100
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	88	88	89	92	92,25	100
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	86	86	89	92	92,25	100
4	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis	%	0	0	0,33	0,33	0,00	0,00

Sumber : Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2025

Capaian SPM bidang Sosial dapat diuraikan dalam jenis pelayanan dasar bidang Sosial yang meliputi : a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandand Disabilitas Terlantar di Luar Panti, b) Rehabilitasi Anak Terlantar di Luar Panti, c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, d) Rehabiltasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti, e) Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Di Kota Pagar Alam , sebagai berikut :

Tabel 2.56

Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI																
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	26 Orang	100	26 Orang	100	26 Orang	100	26 Orang	100	26 Orang	100	26 Orang	100	40 Orang	100	40 Orang	100
2	REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI																
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	28 Orang	100	28 Orang	100	28 Orang	100	28 Orang	100	28 Orang	100	28 Orang	100	0 Orang	100	0 Orang	100
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI																
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	12 Orang	100	12 Orang	100	12 Orang	100	12 Orang	100	12 Orang	100	12 Orang	100	10 Orang	100	10 Orang	100

No	Indikator	2021				2022				2023				2024			
		Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%	Sasaran Dalam Tahun	Target Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMISDI LUAR PANTI																

Sumber : Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.4.1.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Kualitas perekonomian daerah terkait erat dengan aspek ketenagakerjaan dan kemiskinan. Peningkatan kualitas perekonomian daerah seyogyanya dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan menyerap angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang, karena ketersediaan kesempatan kerja yang menjamin perolehan pendapatan.

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) di Kota Pagar Alam pada Tahun 2023 terdapat sekitar 113.541 jiwa. Namun dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja adalah sebanyak 81.389 jiwa. Selebihnya merupakan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, yakni penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dikarenakan sejumlah alasan seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Sehingga secara keseluruhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pagar Alam pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,90 persen dari jumlah seluruh angkatan kerja.

Tabel 2.57

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik Jenis Kegiatan Tahun 2022-2024

Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu	Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu Penduduk Kota Pagar Alam Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.Angkatan Kerja	47.504	49.063	50.441	30.726	32.326	36.694	78.230	81.389	87.135

Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu	Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu Penduduk Kota Pagar Alam Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
a. Bekerja	45.932	47.627	49.342	29.465	31.560	35.758	75.397	79.187	85.100
b. Pengangguran	1.572	1.436	1.099	1.261	766	936	2.883	2.202	2.035
2. Bukan Angkatan Kerja	7.290	7.352	6.649	21.493	21.386	17.727	78.783	28.738	24.376
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**	55.992	55.877	57.090	53.210	55.649	54.421	109.202	113.541	111.511
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	86,70	86,97	88,35	58,84	60,18	67,43	73.10	73,90	78,14
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,31	2,93	2,18	4,10	2,37	2,55	3,62	2,71	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Tabel 2.58

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Tiga Lapangan Pekerjaan Utama (Orang) 2021-2024

Tiga Lapangan Kerja Utama	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Tiga Lapangan Pekerjaan Utama (Orang)			
	2021	2022	2023	2024
Pertanian (Primer)	35.977	36.390	34780	39.821
Manufaktur (Sekunder)	6.327	6.207	8200	6.697
Jasa (Tersier)	34.963	32.800	36210	38.582
Jumlah	77.267	75.397	79190	85.100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam, 2025

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian pada tahun 2023 mencapai 34.780 orang. Sedangkan sektor manufaktur sebanyak 8.200 orang dan di Sektor Jasa sebanyak 36.210 orang. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya terjadi pergeseran serapan tenaga kerja yang sebelumnya Sektor pertanian mendominasi jenis lapangan usaha yang banyak dikerjakan oleh tenaga kerja di Kota Pagar Alam beralih ke sector jasa dan sector manufaktur

Tabel 2.59

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	%	72	72	64	80	58,62	58,62
2	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrialis	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: DISPMPTSPTK Kota Pagar Alam Tahun 2025

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan menuntut suatu negara untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Agar pembangunan yang berkelanjutan terwujud dibutuhkan langkah-langkah konkret. Salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya program pemberdayaan sering kali mengalami permasalahan, salah satunya adalah tidak meratanya program pemberdayaan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perbedaan jenis kelamin yang sering kali menghambat masyarakat dengan jenis kelamin tertentu (misal perempuan) untuk berpartisi aktif dalam program pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan urusan Perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan kepada anak (mulai dari masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun) sehingga proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak.

Tabel 2.60

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indek Pembangunan Gender	Indek	94,33	94,46	93,93	93,95	92,35	95,02
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,75	18,75	56,61	58,14	58,14	38,39
3.	Rasio KDRT	Rasio	0.03	0.03	0,02	0,02	0,02	0,02
4.	Partisipasi angkatankerja perempuan	%	55.51	61,26	58,92	59,23	60,18	67,43
5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anakdari tindakan kekerasan	Kasus	8 kasus	29 Kasus	36 Kasus	37 Kasus	37 Kasus	37 Kasus

Sumber: DKBPP Kota Pagar Alam Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,44% dimana laki-laki masih lebih mendominan untuk bekerja begitu juga pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut ada beberapa Indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Gender yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat,

sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidak adilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Memberikan akses yang setara terhadap perempuan dan anak perempuan baik dibidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat bermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender Menurun sebesar 95,02% karna bisa dilihat dari Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada Tahun 2018 sebesar 55,00% Wanita sudah bekerja, tapi pada saat pandemi di tahun 2019 dan 2020 menurun drastis dikarenakan lapangan kerja bagi perempuan maupun laki2 berkurang sehingga partisipasi perempuan pun menurun hingga 18,75%. Sedangkan tahun 2024 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 38,39%.

Partisipasi Wanita bekerja mengurangi Rasio kekerasan rumah tangga karena Wanita lebih banyak diluar membantu meringankan beban keuangan suami dan keluarga terlihat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,3 dan ditahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,1. Tapi sejak terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam pada Tahun 2024 secara langsung UPTD melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, ibu-ibu kader tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menjelaskan pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang dilindungi negara. Oleh sebab itu setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat mengerti dan berani memberikan pernyataan ataupun pelaporan tindak kekerasan yang terjadi pada mereka secara terbuka di UPTD PPA maupun pihak kepolisian sehingga di tahun 2018 dan 2019 hanya 10 Kasus yang terlaporkan tapi tidak ada penyelesaian sehingga dengan adanya UPTD PPA kasus yang terlaporkan di tahun 2020 sampai dengan 2024 bisa diselesaikan dan ditangani. Dari banyaknya kasus yang ditangani dan terlaporkan sehingga partisipasi Wanita bekerjapun semakin meningkat untuk mengurangi resiko kekerasan terhadap rumah tangga.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang cukup strategis dalam pembangunan Nasional maupun Daerah, terlebih lagi Negara Indonesia yang jumlah penduduknya cukup besar. Perhatian ketahanan pangan (food security) diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security), ketahanan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (nasional security). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan berimbang serta tersebar merata diseluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pemerintah Kota Pagar Alam dalam upaya mempertahankan swasembada beras dan untuk dapat tercapainya swasembada pangan telah mengambil langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan perkembangan Struktur Pemerintah Daerah. Langkah strategis tersebut tentunya tetap mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu : Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan.

Ketersediaan pangan diupayakan dengan tetap menjaga ketersediaan komoditi pangan strategis seperti : beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur ungags, daging ruminansia, daging ungags, cabai, disamping itu pula juga tetap menekankan pemanfaatan pangan lokal. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan. Produksi tanaman pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan Pemanfaatan lahan, air, dan energi untuk menumbuhkan bahan pangan sering kali berkompetisi dengan kebutuhan lain. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dapat berubah menjadi pemukiman atau hilang akibat desertifikasi, salinisasi, dan erosi tanah karena praktik pertanian yang tidak lestari. Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan pangan.

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. PBB menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan malagizi sering kali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan. Kemampuan akses bergantung pada besarnya pendapatan suatu rumah tangga untuk membeli bahan pangan, atau kepemilikan lahan untuk menumbuhkan makanan untuk dirinya sendiri. Rumah tangga dengan sumber daya yang cukup dapat mengatasi ketidakstabilan panen dan kelangkaan pangan setempat serta mampu mempertahankan akses kepada bahan pangan.

Ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Akses kepada fasilitas kesehatan juga mempengaruhi pemanfaatan pangan karena kesehatan suatu individu mempengaruhi bagaimana suatu makanan dicerna. Misal keberadaan parasit di dalam usus dapat mengurangi kemampuan tubuh mendapatkan nutrisi tertentu sehingga mengurangi kualitas pemanfaatan pangan oleh individu. Kualitas sanitasi juga mempengaruhi keberadaan dan persebaran penyakit yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pangan sehingga edukasi mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan.

Tabel 2.61

Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019-2024

No	Indikator kinerja	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Terhadap Kebutuhan PanganUtama	%	103,02	111,84	149,84	180,27	200,60	98,00
2	Persentase Ketersediaan Energi per Kapita dan Ketersediaan Protein perKapita	%	112,5	101,83	105,81	107,91	100,49	100,49
3	Persentase Pangan yang Aman diKonsumsi terhadap jumlah pangan yang diperdagangkan	%	60,00	72,50	81,25	90,00	97,5	100
4	Pencapaian Skor PPH Konsumsi	Skor	85,40	93,77	90,73	95,41	93,23	97,58
5	Persentase Stabilisasi Harga danPasokan Pangan	%	81,55	110,01	72,93	71,49	72,00	72,00
6	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	%	15,04	32,74	44,24	56,63	95,55	2600

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2024 untuk urusan pangan terdiri dari 6 indikator yaitu : Persentase Ketersediaan pangan utama terhadap kebutuhan pangan utama, Persentase Ketersediaan energi per kapita dan Ketersediaan protein per kapita, Persentase pangan yang aman dikonsumsi terhadap jumlah pangan yang diperdagangkan, Pencapaian Skor PPH Konsumsi, Persentase Stabilisasi harga dan pasokan pangan dan Persentase Penguatan cadangan pangan pemerintah.

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Persentase Ketersediaan pangan utama terhadap kebutuhan pangan utama pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Jika dilihat dari segi kecukupam pangan utama, ketersediaan pangan utama sudah memenuhi kebutuhan masyakat kota Pagar Alam.

Kemudian Indikator Persentase Ketersediaan energi per kapita dan Persentase Ketersediaan protein per kapita pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

Selanjutnya Indikator Persentase pangan yang aman dikonsumsi terhadap jumlah pangan yang diperdagangkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sudah

mencapai target Hal ini menunjukkan pangan yang ada di Kota Pagar Alam tergolong aman untuk dikonsumsi. Pada Indikator Pencapaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pola Pangan Harapan Kota Pagar Alam sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Pada Indikator Persentase Stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 terjadi kenaikan dan penurunan tingkat capaian target yang telah ditentukan Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga dan pasokan pangan yang ada di Kota Pagar Alam bervariasi setiap tahunnya.

4. Urusan Pertanahan

Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum Agraria di Indonesia, kewenangan bidang pertanahan pada asasnya merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya di daerah menggunakan asas medebewind. Setelah keluarnya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

Setelah keluarnya UU tersebut telah terjadi penafsiran yang berbeda tentang kewenangan bidang pertanahan. Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 telah menjawab tentang kewenangan bidang pertanahan, adalah sebagai urusan-urusan lain yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang bersifat wajib.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indicator persentase luas lahan Pemerintah Kota Pagar Alam yang bersertifikat.

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	38	51	67,14	73,59	97,78	99,68

Sumber :Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Berdasarkan data yang ada, luas lahan pemkot yang bersertifikat di Kota Pagar Alam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Luas Lahan Pemkot Bersertifikat pada Tahun 2024 sebesar 99.68%. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Pagar Alam sedang mendata aset tanah pemkot yang belum bersertifikat supaya segera di sertifikasi untuk kejelasan aset pemkot.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Air, udara dan tanah/lahan merupakan sumberdaya yang diperlukan oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Namun disisi lain ketiga sumberdaya ini cenderung terus mengalami pencemaran/kerusakan akibat dampak negatif dari aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Status kualitas air, udara dan lahan mempengaruhi derajad kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kualitas air terutama air sungai terpengaruh oleh aktifitas manusia diantaranya:

1. Pembuangan limbah cair dan sampah ke sungai secara ilegal baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
2. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih tinggi.
3. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
4. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan

kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi

menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.

Secara umum kualitas udara di Kota Pagar Alam masih dalam kategori sehat, sumber pencemar udara di Kota Pagar Alam didominasi dari sumber pencemar dari aktifitas transportasi dan pembakaran sampah dan aktifitas rumah tangga dan sumber pencemar alami.

Lahan atau tanah sebagai tempat kehidupan bagi manusia serta berbagai flora dan fauna mempunyai kapasitas daya dukung dan daya tampung tertentu. Apabila daya dukung dan daya tampungnya terlampaui akan menyebabkan penurunan derajad kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Tabel 2.63

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	74.423	74.543	72.37	69,42	70,58	72,17
	- Indeks Kualitas Air	indeks	70,000	70,000	68,18	59,09	59,09	60,00
	- Indeks Kulitas Udara	indeks	91,213	91,611	90,74	91,74	91,17	93,72
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	65,149	65,149	45,49	45,89	52,23	53,21

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Tahun 20235

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam melaksanakan urusan Pelayanan di bidang Pelayanan Administrasi

Kependudukan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, Sumber Daya, kinerja Pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tugas sebagai berikut :

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2016 memiliki tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Pagar Alam adalah "Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil".

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan, dan pemerintah menetapkan kebjiakan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan,

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator Rasio Kependudukan ber KTP persatuan Penduduk, Rasio Bayi berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.64

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil Tahun 2018-2023

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Kependudukan ber KTP persatuan Penduduk	%	94,99	94.99	95,49	96,66	96,5	97,72
2.	Rasio Bayi berakte Kelahiran	%	94,12	82.98	90,10	91,67	94,53	96,87
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	9,09	18.45	32,58	40,27	100	47,09
4.	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	Akte	464,41	465.68	492,54	758,65	527	527
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2025

Melalui data dan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil telah melakukkan kinerjanya dengan baik, terbukti dari realisasi dan capaian yang kesemuanya melebihi target yang telah ditentukan. Namun ada satu pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi atau capaian dari tahun sebelumnya pada indikator Rasio Bayi Berakte Kelahiran, hal ini disebabkan oleh:

a) Perubahan dan pergerakan dari pertumbuhan penduduk yang tidak menentu

b) Kelangkaan blanko dokumen kependudukan

c) Adanya pandemi Covid-19 mengakibakan Disdukcapil harus melakukan pembatasan warga yang datang untuk melakukan pemngurusan dokumen kependudukan terutama pada Akte Kelahiran yang pembuatannya tidak dapat diwakilkan melalui pelayanan online.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

Tabel 2.65

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	35	-	23	35	35	35	35
2	Jumlah kelompok binaan PKK	41	41	41	41	41	41	41

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan di Kota Pagar Alam selama ini meliputi berbagai aspek kehidupan berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk. Upaya peningkatan kualitas penduduk meliputi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agama, kesejahteraan sosial, kepemudaan, olahraga dan lain-lain, sedangkan upaya pengendalian kuantitas penduduk meliputi : keadaan jumlah, struktur, kepadatan dan pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui program keluarga berencana. Laju pertumbuhan penduduk akan dapat dikendalikan melalui program Keluarga Berencana.

Capaian Kinerja Urusan Wajib non Layanan Dasar tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah : 1) Laju Pertumbuhan Penduduk, 2) Rata–Rata Jumlah Anak Per Keluarga, 3) Rasio akseptor KB, 4) Cakupan Peserta KB Aktif.

Tabel 2.66

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.93	0,85	3,49	1,24	1,77	1,58
2.	Rata-rata jumlah anak perKeluarga	Rata	1,46	1,45	1,42	1,41	1,41	1,41
3.	Rasio akseptor KB	Rasio	79,39	72,69	72,75	72,98	76,41	76,41
4.	Cakupan peserta KB aktif	%	74,26	75,52	75,14	81,80	81,80	81,80

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sebesar 0,95% terus mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 0,93% dan ditahun 2020 sebesar 0,85%, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 3,49% hal ini disebabkan dampak pandemi covid-19 terjadi peningkatan pindah datang penduduk dari luar daerah, namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali terjadi penurunan diangka 1,77% dan 1,58% yang didukung dengan peningkatan rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif yang tersu meningkat.

Menurut undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan melakukan difusi inovasi program keluarga berencana (KB) khususnya penggunaan metode kontrasepsi. Dalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

Program Bangga Kencana adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB (Keluarga Berencana). Yang merupakan program dari BKKBN, yang berfokus untuk

mewujudkan keluarga yang berkualitas di Indonesia salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, merencanakan mengatur jarak kelahiran, pendidikan dan sebagainya sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas.

Pelaksanaan program "Bangga Kencana" ini dilaksanakan adalah untuk mengurangi jumlah pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 20 tahun. Program "Bangga Kencana" tidak hanya mengajak para akseptor untuk memasang alat kontrasepsi, namun juga upaya peningkatan pendapatan yang bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah berjalan bersama. Pembangunan gerakan keluarga berencana nasional ditunjukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah melakukan beberapa strategi diantaranya adalah penerapan model kampung keluarga berencana. Kampung keluarga berencana merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampong keluarga berencana) diseluruh kabupaten dan kota.

9. Urusan Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda

(multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Transportasi darat sebagai salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, oleh karena itu perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan

pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana transportasi antara lain infrastruktur jalan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan berlalu lintas.

Tabel 2.67

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Konektivitas	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	2628	2321	1721	1829	892	6682
3	Rasio Ijin Trayek (Buah)	1	1	1:4	1:4	1:4	1:4
4	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kali)	489	350	172	190	104	230
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam Tahun 2025

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Di era otonomi daerah (OTDA) dan Globalisasi informasi yang semakin pesat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam terus berusaha dan berupaya melakukan terobosan untuk lebih meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat melalui media yang dimiliki. Guna menjalankan tugas dan fungsinya, dalam upaya menumbuhkan motivasi masyarakat, maka pemerintah bersama lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada memberikan pelayanan informasi atau sosialisasi tentang kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal.

Hal- hal mendasar yang menjadi tuntutan masyarakat dari segi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat melalui dialog-dialog publik yang difasilitasi pemerintah maupun lembaga- lembaga masyarakat lainnya. Dengan demikian langkah-langkah untuk menuju penerapan Electronik Government (E-Gov) merupakan langkah strategis dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan sistim informasi, manajemen terpadu diantara unit kerja pemerintah. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.68

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	60	80	70	70	70	70
2	Persentase OPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	28,57	35	80	80	80	80
3	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	70	80	82	82	82	82
4	Persentase Dokumen/Buku Statistik Yang dipublikasikan	%	100	40	100	100	100	100

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Interkoneksi jaringan internet OPD di Kota Pagar Alam	%	76	100	70	70	70	70
6	Persentase Kelurahan yang tercover jaringan dan layanan Telekomunikasi	%	70	80	82	82	82	82

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun 2025

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM, serta meningkatkan kemandirian UMKM. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UMKM yang kompeten dan berdaya saing; meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM.

Tabel 2.69

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	50,4	44,8	45,38	45,38	29,07	31,97
2.	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil	%	96,89	96,91	96,91	96,91	99,1	99,1

Sumber : Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan UMKM Kota Pagar Alam Tahun 2025

12. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakatakan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Melalui kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka

akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kota Pagar Alam dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang penanaman modal memiliki potensi daerah yang beragam yang dapat menjadi peluang bagi penanaman modal terutama sector pariwisata, konstruksi, pertanian organik, industry olahan makanan dan ekonomi kreatif pendukung sector jasa dan pariwisata.

Tabel 2.70

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan	%	85	79,9	78,05	77,05	89,32	81,97

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam tahun 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah akumulasi Peresentase kepuasan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang dalam Urusan Perizinan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DISPMPTSPTK) Kota Pagar Alam. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dari beberapa indikator yaitu : (1) Persyaratan Pelayanan, (2) Prosedur Pelayanan, (3) Waktu Pelayanan, (4) Tarif/Biaya, (5) Jenis Produk Perizinan yang Dilayani, (6) Kompetensi Aparatur yang Melayani, (7) Maklumat Pelayanan, dan (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

13. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Pemuda dan olahraga diposisikan dan diberdayakan sebagai instrumen dan pilar pembangunan bangsa atas dasar hal tersebut pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam arti pemuda dan olahraga memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa

untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peran aktif dari pemuda diperlukan sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan (agent of change) dalam segala bentuk aspek pembangunan. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda. Kualitas pemuda yang baik akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup juga membaik, karena pemuda merupakan penggerak, di tinjau dari segi ekonomi apabila kualitas pemuda membaik maka tingkat produktifitas juga akan bertambah, dengan demikian apabila produktifitas bertambah terjaminnya institusi juga akan bertambah.

Di bidang keolahragaan Kota Pagar Alam memiliki Potensi dalam penyelenggaraan even-even olahraga bertaraf internasional. Kondisi Alam yang mendukung beberapa even olahraga antara lain Paralayang, Offroad dan lainnya.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaaan berfungsi melakasanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat juang, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dan dinamis.

Olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda yang ikut Pelatihan	100	0	100	100	100	100
2	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	97,40	93,75	100	100	100	61,9

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Atlet yang Berprestasi	20%	0	24	24	24	24

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam Tahun 2025

14. Urusan Statistik

Data yang dikumpulkan secara sistematik dan diolah sesuai dengan kaidah umum statistika akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat. Di sinilah peran statistik menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat dan serampangan, serta diolah tanpa mengindahkan kaidah-kaidah statistika, maka kebijakan yang dirumuskan tidak efektif, bahkan bisa kontra produktif. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku "Pagar Alam dalam Angka" dan Buku "PDRB Kota".

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku "Pagar Alam Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun 2025

15. Urusan Persandian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Persandian diukur dengan indikator: Persentase Berita Sandi yang diamankan.

Tabel 2.73

Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019-2024

NO	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berita sandi yang diamankan	%	80	90	85	85	80	85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun 2025

16. Urusan Kebudayaan

Kota Pagar Alam mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kota Pagar Alam, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi adat Besemah.Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Jumlah kawasan Situs Budaya yang terdata, Persentase Kawasan Situs/Cagar budaya yang dikaji, Persentase Kawsan situs/ cagar budaya yang dipublikasikan, Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya.

Tabel 2.74

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2025

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kawasan Situs Budaya yang terdata	Buah	67	67	67	67	68	60
2	Persentase Kawasan Situs/Cagar budaya dikaji	%	1,49	3,8	3,8	8,7	20,15	60
3	Persentase Kawasan situs/ cagar budaya yang dipublikasikan	%	13,43	23	23	100	100	60
4	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	2	2	0	4	7	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025

17. Urusan Perpustakaan

Amanat Undang-Udang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan maka pembangunan Perpustakaan di Pusat Kota Pagar Alam hingga ke kelurahan sangat dibutuhkan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perpustakaan merupakan Urusan Wajib non Layanan dasar yang menjadi urusan Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kerasipan juga merupakan Urusan Wajib non Layanan dasar yang menjadi urusan Kabupaten/Kota. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia perlu adanya suatu media, salah satu media yang bisa dipergunakan adalah perpustakaan, perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, pengetahuan, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya. Perpustakaan bisa juga disebut sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan karena mempunyai peranan penting sebagai wahana mencerdaskan bangsa guna tercapainya masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas.

Guna tercapainya tujuan tersebut perlu adanya kebijakan di bidang perpustakaan melalui penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pembinaan teknis perpustakaan, pengembangan jabatan fungsional perpustakaan, dan pelestarian koleksi daerah/nasional serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indicator jumlah pengujung pertahun, dan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah.

Tabel 2.75

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2024

No	Indikator	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	22,17	4,05	7,87	18,7	24,16	24,16
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	46,2	45,18	44,76	44,89	44,89	44,89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Pengelolaan Arsip Daerah yang meliputi Arsip Kota, Arsip Perangkat Daerah, Arsip Kecamatan termasuk Arsip Kelurahan sangat penting. Pengelolaan Arsip yang baik bertujuan

untuk menemukan Arsip secara cepat. Arsip dipilih mejadi Arsip Aktif dan Arsip Inaktif. Kota Pagar Alam telah memiliki Depo Arsip untuk menyimpan Arsip. Peningkatan kinerja Pengelolaan Arsip Daerah sangat mendukung kinerja Kota. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.

Tabel 2.76

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019-2024

No	Indikator	TAHUN						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	82,05	87,18	87,18	58,06	38,71	54,84	54,84
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	30,3	44,4	98	84	226	115	115

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisa kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan kota Pagar Alam diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan dan meningkatkan konsumsi hasil perikanan. Urusan Perikanan terdiri dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program-program tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap antara lain kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya antara lain kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaa Ikan yang Usahanya dalam

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidaya Ikan, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan antara lain kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kelautan dan Perikanan diukur dengan indikator Persentase Produksi Ikan terhadap target daerah dan Angka konsumsi ikan.

Tabel 2.77

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Produksi Perikanan terhadap target daerah	%	77,33	83,87	87,88	92,46	93,50	96,03
2	Angka konsumsi Ikan	Kg/Kap /Th	110,46	88,85	125,72	125,25	127,33	41,069

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019-2024 untuk urusan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 indikator yaitu : Persentase Produksi Perikanan terhadap target daerah dan Angka konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) terhadap target daerah.

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Persentase Produksi Perikanan terhadap target daerah pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 hal ini menjelaskan bahwa jumlah produksi ikan di Kota Pagar Alam Mengalami peningkatan produksi walaupun belum mencapai target. Jumlah produksi ikan belum bisa memenuhi kebutuhan ikan

masyarakat Kota Pagar Alam, karena jumlah pembudidaya ikan di kota Pagar Alam masih relatif sedikit, pembudidaya ikan di Kota Pagar Alam masih banyak yang mengunakan cara budidaya ikan tradisional, serta jumlah dan luas kolam ikan belum terlalu banyak. Produksi ikan yang ditargetkan belum bisa sebesar kebutuhan ikan masyarakat dikarenakan keterbatasan dana, namun demikan kebutuhan ikan masyarakat kota Pagar Alam masih bisa dipenuhi dari import produk perikanan dari daerah lain.

Sedangkan untuk Indikator Persentase Angka konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) terhadap target daerah yang menjelaskan Jumlah rata-rata konsumsi ikan atau yang lebih dikenal dengan angka konsumsi ikan merupakan cerminan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Namun demikian ketersediaan ikan dari produksi budidaya ikan belum bisa mencukupi kebutuhan ikan masyarakat kota Pagar alam. Pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat kota Pagar Alam sebagian besar masih impor dari daerah lain.

2. Urusan Pariwisata

Pembangunan Bidang Kepariwisataan dengan upaya membangun Citra dan image yang positif sekaligus menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek-obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Pembangunan menuju kondisi masa depan disesuaikan dengan keunggulan yang dimiliki oleh Kota Pagar Alam, yaitu keunggulan pariwisata. Pariwisata Kota Pagar Alam diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan investasi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaaan pariwisata yang lebih menarik diharapkan mampu mendukung pembangunan sektor pertanian organik dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, karena wisatawan yang berkunjung dapat menjadi segmen pasar dari hasil produk pertanian organik; Serta dapat mengatasi isu kerusakan lingkungan, karena keunggulan wisata alam akan mendorong upaya pemeliharaan secara optimal.

Capaian kinerja urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Kunjungan wisatawan, Objek Wisata yang menjadi destinasi wisata Nasional, dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan.

Tabel 2.78

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kunjungan Wisata	302.216	275.117	314.489	343.207	381.456	403.195
2	Objek Wisata yang menjadi destinasi wisata Nasional	1	1	1	1	1	1
3	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	10	40	40	100	135	135

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam Tahun 2025

3. Urusan Pertanian

Dalam rangka peningkatan produksi komoditas tanaman pertanian termasuk hortikultura dilaksanakan melalui pengolahan lahan yang baik, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit serta penanganan panen dan pasca panen. Peningkatan produktifitas perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Capaian kinerja urusan Pertanian diukur dengan indikator Produktivitas Tanaman Perkebunan Kopi (ton/hektar), Rata – Rata Produktivitas Tanaman Hortikulutra (ton/hektar), dan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) (ton/ha) .

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas Tanaman Perkebunan Kopi (ton/hektar)	1,7	2,7	2,75	2.4	2,27	2,43
2	Rata – Rata Produktivitas Tanaman Hortikulutra (ton/hektar)	37,72	34,95	34,95	35,5	11,13	13,8
3	Produktivitas Tanaman Pangan(Padi) (ton/ha)	5,19	5,19	5,21	5,22	5,225	5,29

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2025

4. Urusan Perdagangan

Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan berdasarkan kondisi eksisting dimana perkembangan kegiatan perekonomian berada di Desa Nendagung, sehingga dalam rencananya memanfaatkan ruang kosong pada area terbangun. Luas kawasan ini sekitar 100 Ha. Kebutuhan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota diarahkan pada kawasan pusat kota dengan lebih mengefektifkan lahan yang ada. Intensifikasi pemanfaatan ruang dikawasan pusat kota diharapkan tidak menjadikan karakter kota sebagai pusat agrobisnis menjadi hilang, tetapi perlu dilakukan suatu rancangan yang baik dimana kesan yang tercipta dari kawasan perdagangan dan jasa mempunyai nuansa keramahan alam perdesaan. Dengan menata kawasan pusat kota dengan ciri dan karakter khusus akan menimbulkan daya tarik wisata tersendiri. Alokasi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dilakukan intensifikasi dengan mengefektifkan pemanfaatan ruang kawasan pusat kota. Penetapan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; perantara keuangan; real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya, dan jasa pariwisata. Capaian kinerja urusan Perdagangan diukur dengan indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Rasio Jumlah pasar per 10.000 penduduk dan Cakupan Bina Kelompok Perdagangan.

Tabel 2.80

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Sektor Perdaganganterhadap PDRB (%)	%	19,43	19,52	19,46	19,43	20,42	19.43
2	Rasio jumlah pasar per 10.000penduduk	Rasio	0,51	0,57	0,57	0,57	0,57	0,7
3	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan	Kelompok	3	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam Tahun 2025

5. Urusan Perindustrian

Pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kota Pagar Alam diarahkan untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam struktur industri. Adapun sasaran kebijakan adalah meningkatkan jumlah klaster-klaster industri. Pembangunan industri di Kota Pagar Alam memacu pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian.

Tabel 2.81

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Industriterhadap PDRB	1,86	1,89	1,89	1,90	1,89	1,86

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam 2025

2.1.4.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah tidak lagi termasuk Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Sekretariat Daerah menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat daerah adalah : Kategori Nilai LPPD, Persentase Produk Hukum yang diterbitkan, Persentase Layanan PBJP, Kategori Indeks SPBE, Laporan RB yang disampaikan tepat waktu, Laporan AKIP yang disampaikan tepat waktu, Persentase SKPD yang memiliki IKM Kategori baik, Persentase Layanan Kedinasan yang dilaksanakan.

Tabel 2.82

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kategori Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SangatTinggi
2.	Persentase Produk hukumdaerah yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Layanan PBJP	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks SPBE	n/a	2,39	2,39	1,06	2,01	2,14
5.	Laporan RB yang disampaikantepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
6.	Laporan AKIP yang disampaikan tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
7.	Persentase SKPD yang memiliki IKM Kategori baik	88	73	80,1	77	90	82,41
8.	Persentase Layanan Kedinasan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025

2. Sekretariat DPRD

Sama halnya dengan Sekretariat Daerah; semenjak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, maka Sekretariat DPRD tidak lagi termasuk Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Sekretariat DPRD menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Hal utama yang perlu mendapat perhatian, bahwa kinerja Sekretariat DPRD, bukan saja menunjukan kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, tetapi juga menunjukan kinerja DPRD, karena Sekretariat DPRD juga pelayan administrasi DPRD.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD adalah Persentase Bahan Penetapan Peraturan Daerah, Persentase Program Pengawasan DPRD dan Persentase Bahan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Tabel 2.83

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Bahan Penetapan Peraturan Daerah	100	88,8	100	100	100	100
2.	Persentase Program Pengawasan DPRD	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Bahan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.4.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dari sebuah proses kegiatan agar sebuah program dan kegiatan yang dilakukan dapat terwujud dengan maksimal. Sesuai dengan amanat undang-undang tentang keuangan negara dan sistem perencanaan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan yang menjadi acuan dan pedoman bagian satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun

kegiatan dan anggaran. Proses perencanaan pembangunan daerah di Kota Pagar Alam tentunya melalui berbagai proses dan mekanisme. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya sebagai berikut : 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan pada bulan Januari s/d Februari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana dan kondisi kelurahan difasilitasi oleh Bappeda untuk menghasilkan usulan Kelurahan disampaikan pada Musrenbang tingkat Kecamatan. 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan pada bulan Februari setiap tahunnya. Difasilitasi oleh Bappeda untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan usulan ke Musrenbang tingkat Kota. 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota bulan Maret setiap tahun. Dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya. Untuk menghasilkan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dibentuk Forum satuan kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. 4)Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 5) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam dan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan April tiap tahun. 6) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei dan 7) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada bulan Mei-Juni setiap tahun.

Kegiatan pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang akan timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sasaran kegiatan monitoring, evaluasi adalan Kegiatan APBD Kota Pagar Alam dan Kegiatan Tugas Pembantuan (Dana APBN) jumlah kegiatan di masing-masing OPD tiap tahun bervariasi dan sesuai dengan jumlah OPD yang ada yaitu Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dilaksanakan secara

berkala yaitu setiap bulan, tiap triwulan dan akhir tahun.

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dilaksanakan secara berkala yaitu setiap bulan, triwulan dan akhir tahun. Lokasi kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan dimasing-masing OPD dan Bagian di wilayah Kota Pagar Alam. Sasaran kegiatan monitoring, evaluasi adalan Kegiatan APBD Kota Pagar Alam dan Kegiatan Tugas Pembantuan (Dana APBN).

Berdasarkan UU 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga amanat ini sudah dipenuhi dan dijabarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD kurun waktu 2018-2025.

Tabel 2.84

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Pagar Alam

No	Dokumen	Status	Keterangan
1	2	3	4
1	RPJPD 2025-2045	Ada	Perda Kota Pagar Alam No 04 Tahun 2024 TentangRPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045
2	RPD 2024-2026	Ada	Perda Kota Pagar Alam No 11 Tahun 2023 Tentang RPD Kota Pagar Alam Tahun 2024 - 2026
3	RKPD :		
	Tahun 2017	Ada	Perwako No 18 Tahun 2017 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2018
	Tahun 2018	Ada	Perwako No 16 Tahun 2018 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2019
	Tahun 2019	Ada	Perwako No 12 Tahun 2019 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2020
	Tahun 2020	Ada	Perwako No 15 Tahun 2020 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2021
	Tahun 2021	Ada	Perwako No 23 Tahun 2021 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2022
	Tahun 2022	Ada	Perwako No 19 Tahun 2022 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2023
	Tahun 2023	Ada	Perwako No 30 Tahun 2022 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2024

No	Dokumen	Status	Keterangan
1	2	3	4
	Tahun 2024	Ada	Perwako No 15 Tahun 2024 tentang Penetapan RKPDKota Pagar Alam Tahun 2025

Sumber : Bappeda Kota Pagar AlamTahun 2025

Tabel 2.85

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018-2025

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penjabaran Konsitensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	74	85	90	90	95,83	96,79
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100	87,85
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	21,6	21,8	24	26,5	35,6	60,85

Sumber : Bappeda Kota Pagar AlamTahun 2025

2. Urusan Keuangan

Pemerintah Kota Pagar alam terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a). Memperluas basis penerimaan, b) Memperkuat proses pemungutan, c) Meningkatkan pengawasan, d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Kinerja Keuangan dihitung dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.86

Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
2	Rasio PAD terhadap APBD	n/a	n/a	n/a	1,89	0,61	8
3	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja utama pada Badan Keuangan Daerah pada tahun 2022 Opini BPK terhadap laporan keuangan mendapat predikat WDP namun di tahun 2023 opini BPK terhadap laporan keuangan kembali mendapatkan predikat WTP. Rasio PAD terhadap APBD tahun 2023 sebesar 8% dan tahun 2024 sebesar 7,8%, Ketepatan Penetapan APBD sampai saat ini masih Tepat Waktu.

3. Urusan Kepegawaian

Pengelolaan Kepegawaian sangat penting dalam menggerakan birokrasi Kota Pagar Alam. Secara umum Kota Pagar Alam masih mengalami kelemahan bila dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM. Oleh sebab itu, maka peningkatan kinerja pengelolaan SDM .

Sebagaimana diketahui masalah Kepegawaian sebelumnya merupakan bagian dari Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, maka Kepegawaian tidak lagi termasuk Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kepegawaian menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Hal utama yang perlu mendapat perhatian, bahwa kinerja mengelola kepegawaian

merupakan manajemen khusus. Keberhasilan pengelolaan kepegawaian sangat menentukan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Pagar Alam. Capaian kinerja Kepegawaiandan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Sat	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	6,96	9,39	9,53	10,26	11,36	9,38
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,85	3,80	7,29	7,28	17,72	46,95
3	Persentase Pejabat ASN yangtelah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	35,62	34,96	39,83	40,95	47,06	56,72
4	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	65,63	65,63	74,19	75,00	96,88	93,55
5	Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah	%	45,45	44,73	42,75	37,00	45,49	35,30
6	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	%	97,38	65,88	70,36	79,60	74,62	54,84

Sumber : BKPSDM Kota Pagar Alam Tahun 2025

Tabel 2.88

Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pejabat ASN yangtelah mengikuti diklat struktural	270,00	265,00	284,00	199,00	240	287
2	Total jabatan Struktural	758,00	758,00	713,00	486,00	510	506
3	Persentase Pejabat ASN	35,62	34,96	39,83	40,95	47,06	56,72

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	yang telah mengikuti diklat (%)						

Sumber Data : BKPSDM (diolah,2025)

Tabel 2.89

Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Esselon II yang terisi/ Total kebutuhan jabatan Esselon II x 100	21	21	23	24	31	29
2	Total kebutuhan jabatan Esselon II x 100	32	32	31	32	32	31
3	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (%)	65,63	65,625	74,19	75,00	96,88	93,55

Sumber Data : BKPSDM (diolah,2025)

Tabel 2.90

Persentase Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Administrasi yang terisi	1484	1617	1448	1173	1442	1339
2	/ Total kebutuhan jabatan Administrasi x 100	3265	3615	3387	3170	3170	3793
3	Persentase Jabatan Administrasi pada Instansipemerintah (%)	45,45	44,73	42,75	37,00	45,49	35,30

Sumber Data : BKPSDM (diolah,2025)

Tabel 2.91

Persentase Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang terisi	2378	1373	1277	1455	1364	1614
2	Total kebutuhan jabatan Fungsional	2442	2084	1815	1828	1828	2943

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentupada instansi pemerintah (%)	97,38	65,88	70,36	79,60	74,62	54,84

Sumber Data : BKPSDM (diolah,2025)

2.1.4.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Pengawasan Internal melalui Inspektorat semakin penting, sehingga Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam semakin meningkat. Sebagaimana kita ketahui Inspektorat semula tergabung dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Semenjak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, maka Inspektorat tidak lagi termasuk Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Inspektorat menjadi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja urusan penunjang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam adalah :

a. Kapabilitas APIP
b. Evaluasi SPIP Kota

Tabel 2.92

Capaian Kinerja Urusan Inspektorat Tahun 2019-2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapabilitas APIP	Level 2+	Level 2+	Level 2+	Level 2+	Level 2+	Level 3+
2	Evaluasi SPIP Kota	3.000	3.000	3.000	2.816	2,999	2,87

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.4.6 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Capaian kinerja unsur Kewilayahan Kecamatan diukur dengan indikator : Persentase Capaian Kinerja Kecamatan yang dikoodinasikan, dan Persentase Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 2.93

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan yang dikoodinasikan	75,88	80,9	82,07	84,4	86,9	84,06
2	Persentase Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,6	80,86	81,85	84,6	87,3	84,40

Sumber : Kecamatan Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.1.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan diukur dengan indikator : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Politik yang aktif, Angka Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan Persentase Konflik Sosial Politik Daerah.

Tabel 2.94

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Politik yang aktif	90	50	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi masyarakat	87	-	-	-	91,32	100

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Konflik Sosial dalam Pemilu Daerah	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun 2025

2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)*

Isu internasional yang menjadi telah sukses menjadi perhatian seluruh dunia dideklarasikan sebagai Millenium Development Goal's (MDG's) pada pertemuan KTT Millenium di New York tahun 2000. Sebanyak 189 negara di dunia berkumpul untuk mendiskusikan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Latar belakang yang mereka temukan saat itu masih banyaknya keadaan yang mengerikan, masyarakat kelaparan sekitar 800 juta orang di dunia, daerah kekeringan, negara yang berperang, banyak malapetaka hingga tingginya angka kemiskinan dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, derajat kesehatan yang masih rendah yaitu hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita dalam setahun Berdasarkan hal tersebut, MDG's dengan 8 tujuan menggambarkan untuk kehidupan yang lebih baik selama 15 tahun kedepan salah satunya lebih utama dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Akan tetapi hingga tahun 2015, tujuan ini dirasa belum mencapai target yang diinginkan. Masalah kelaparan menurun setengah dan masalah kemiskinan ekstrim turun hampir setengah. Telah banyak anak-anak yang bersekolah and hanya beberapa yang mati. Maka deklarasi ini dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDG's). SDG's ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 dan masih banyak lagi tujuannya, yaitu:

1. Tidak ada kemiskinan
2. Tidak ada kelaparan
3. Kesehatan dan kesejahteraan
4. Pendidikan yang berkualitas
5. Kesetaraan gender

6. Akses air bersih dan sanitasi layak
7. Energy yang terjangkau dna bersih
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Aksi terhadap iklim
14. Kehidupan bawah laut
15. Kehidupan di darat
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, maka Kota Pagar Alam melakukan Studi Baseline Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) di Kota Pagar Alam. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menjabarkan Tujuan Global, Target global, Target Nasional dan instansi pelaksana yang menjadi penanggung jawab.

Pada penilaian capaian SDGs ini, diukur dengan tiga kategori dengan simbol warna sebagai berikut;

Tabel 2.95 Kategori Penilaian SDGs

Simbol	Keterangan
●	Tercapai
▶	Akan Tercapai/ Membaik
▼	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus

Gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Pagar Alam per Pilar berdasarkan Laporan RAD SDG's tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tujuan 1.

Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan untuk Mencapai Tujuan yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.96 Capaian per Indikator TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Capaian	Target	Target	
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	IKU Kota	Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim	1,1	1	0,62	0	0	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Dinsos /SIGERTAK+	Persentase	60	65	77	80	85	●
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok	Dinas Sosial	Persentase	70	75	100	100	100	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Capaian	Target	Target	
	miskin dan rentan								
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS	Persentase peserta aktif (Tenaga Kerja Sektor Sekunder dan Jasa)	4,38	5,92	-	-	-	-
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi									
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Badan Keuangan Daerah	Persentase Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial	18,68%;16,27%;0,015%	8,81%; 18,23%;0,058 %	19,17%; 15,84%; 1,16%	23,55 %, 19,54%, 0,70%	13,61%; 6,96%; 0,86%	▼
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	TKPK Kota Pagar Alam	Rp/Tahun	447.839.715,00	525.246.055,00	1.346.777.585,00	1.400.000.000,00	1.450.000.000,00	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 6 indikator yang dilaksankan, sebanyak 4

indikator yang dilaksanakan tercapai (●), 1 indikator yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau perubahan negative atau memburuk (▼), dan 1 indikator yang belum terdapat data capaian.

Tabel 2.97 Capaian TPB Tanpa Kemiskinan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus / Belum ada Data / Rilis
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	6	4	0	2

Tujuan 2.

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 2 Tanpa Kelaparan yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.98 Capaian Per Indikator TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1*	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Kesehatan	Persentase	13,29	-	-	-	-	-
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Dinas Kesehatan	Persentase	11	9	0,82	9	7	●
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang									
2.a.1*	Indeks Orientasi Pertanian	Pertanian	Persentase	-	35,05	-	35,05	35,05	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
	(IOP) untuk pengeluaran Pemerintah								
2.a.2*	Total Bantuan Pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Pertanian	Total Bantuan (Kegiatan)	34	41	41	50	50	●
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian									
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Pertanian	Persentase	20,025	86,5	86,5	40,07	40,07	●
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan									
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Pertanian	Persentase Lahan Pertanian berkelanjutan	52,97	52,97	52,97	52,97	52,97	●
2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional									
2.5.1.*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun	Pertanian	Persentase Sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SGGPP)	50	50	50	100	50	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
	jangka panjang								
2.5.2.*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Pertanian	Kategori dalam Global Databank for Animal Genetic Resources-FAO/ Domestic Animal Information System (DAD-IS) / Keputusan Mentan RI No. 117/Permentan SR.120/10/2014	N/A	24,237	275	260	285	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 2 Tanpa Kelaparan di atas, semua indikator sudah tercapai dan diatas target Provinsi. Dari 8 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 6 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), sedangkan 2 indikator perlu perhatian khusus (▼) karena tidak ada data capaian.

Tabel 2.99 Capaian TPB Tanpa Kelaparan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus / Belum ada Data / Rilis
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik	8	6	0	2

Tujuan 3.
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 3 Kehidupan sehat dan Sejahtera yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.100 Capaian Per Indikator TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Capaian	Target	Target	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Rasio	171	137	110,09	103	103	●
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase	100	100	72,8	100	100	▼
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000									
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Rasio	2,72	<6,15	0,11	<6,1	0,75	●
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per	Dinas Kesehatan	Rasio	165 per 100.000 penduduk	90	71 per 100.000 penduduk	95	46 per 100.000 pendudu	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Capaian	Target	Target	
	100.000 penduduk							k	
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Dinas Kesehatan	Rasio	0,05	0,7	0,027	0,08	0,027	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Rasio	0	<1	0	<1	0	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Dinas Kesehatan	Rasio	0	0	0	0	0	●
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	Persentase	6,84	6,5	13,18	6	17,24	●
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	DPPKB3A	Persentase dan Orang	-	590 dan 100	418 dan 71	645 dan 100	462 dan 71,6	●
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	DPPKB3A	TFR	2,36	2,19	0,74	2,18	2,24	●
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persentase	64,06	46	60,89	48	62,22	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Capaian	Target	Target	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan	Persentase	100	100	-	100	-	●
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Rasio	5,39	100	4,47	100	4,84	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 14 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 12 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), dan 1 yang perlu perhatian khusus karena tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼), sedang terdapat 1 indikator yang tidak tersedia datanya.

Tabel 2.101 Capaian TPB Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/belum ada data
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	14	12	0	2

Tujuan 4.

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayati

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.102
Capaian Per Indikator TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Orang	20	40	45	50	60	●
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase SD dan SMP	100 dan 92,49	100	100	100	100	●
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir,	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	100	100	100	100	100	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	menurut jenis kelamin								
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	BPS	Persentase SD dan SMP	99,33 dan 93,45	100 dan 92,3	98,81 dan 99,49	100 dan 92,4	99,30 dan 99,98	●
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase SD dan SMP	100 dan 100	100 dan 100	96 dan 100	100 dan 100	100 dan 100	▼

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)								
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan memenuhi kualifikasi sertfikat pendidik	80.25; 10; 86.5; dan 37, 95,85. 46.5	85.25, 87.3, 95.9, dan 10.5; 37.3; 47.5;	81.45; 88.62; 74.40; dan 65.57; 38.03; 51.32	87.35; 88.35 ; 95,95; dan 10.8; 37.6; 48.5;	88.25; 89.4; 100 dan 10.9; 37.8; 49.5;	▼

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 6 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), dan 2 indikator yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼).

Tabel 2.103 Capaian TPB Pendidikan Berkualitas Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayati	6	4	0	2

Tujuan 5

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Secara umum capaian indikator TPB untuk tujuan ke-5 Kesetaraan Gender yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.104 Capaian Per Indikator TPB Kesetaraan Gender Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun									
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	DPPKB3A	Persentase "IYA" pada 4 bidang (38 "IYA" dari 45)	25	1	1	1	2	●
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	UPTD PPA	Persentase Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	20 Kasus	12 Kasus	14 Kasus	12 Kasus	14 Kasus	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	UPTD PPA	Persentase Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh orang lain selain pasangan 12 bulan terakhir	9 Kasus	6 Kasus	11 Kasus	8 Kasus	9 Kasus	●
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b pemerintah daerah	DPPKB3A	Orang	16	16	16	16	16	●
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontro	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Tingkatan kerangka hukum	1	-	-	-	-	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan									
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	UPTD PPA	Kategori (Skala Kemungkinan "A" s.d "H")	F	-	F	-	-	-

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB tujuan kelima Kesetaraan Gender di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 6 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 4 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), dan terdapat 2 indikator yang belum tersedia data capaian.

Tabel 2.105 Capaian TPB Kesetaraan Gender Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/ belum ada data
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	6	4	0	2

Tujuan 6.

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.106 Capaian Per Indikator TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PUPR	Persentase	42,76	64,68	69,31	69,97	71,08	●
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	PUPR	Persentase	42,01	52,2	43,94	55,7	69,2	●
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global									
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	IKPLHD	Nilai	-	32	32	9	9	●
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	IKPLHD	Nilai	-	60	60	60	60	●
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	IKPLHD	Nilai	68	70	70	72	74	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak di atas, semua indikator sudah tercapai sesuai target. Dari 5 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 5 indikator yang dilaksanakan tercapai (●).

Tabel 2.107 Capaian TPB Air Bersih dan Sanitasi Layak Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	5	5	0	0

Tujuan 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Pada Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, tidak terdapat Indikator TPB yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pagar Alam, hal ini berkaitan dengan kewenangan kabupaten/kota.

Tujuan 8.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108 Capaian Per Indikator TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	IKU Kota	Persentase	2,75	5,26	-	-	-	-
8.1.1.(a)	PDB per kapita	IKU Kota	Juta perkapita	16,050	16,100	-	-	-	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya									
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persentase	5,47	5,26	-	-	-	-
8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan									
8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persentase	76,42	-	96.15	-	-	-
8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persentase	2,45	2,50	1.64	2.25	-	-
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	Persentase	23,10	-	19,32	-	-	-
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Perusahaan	40	40	25	45	50	▼
		PUPR	Persentase	80,21	91,18	-	95,59	-	-
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local									
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan	BPS	Persentase	6,44 dan 3,17	-	6,44 dan 4,00	-	-	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
	kontribusi pariwisata terhadap PDB								
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Orang	97	-	110	-	-	-
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS	Orang	302.119	-	302.517	-	-	-
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua									
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase	80	90	73,9	95	94,6	►

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di atas, masih terdapat indikator yang belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 11 indikator yang dilaksankan, sebanyak 1 indikator yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 1 indikator yang dilaksanakan perlu perhatian khusus atau tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai (▼), sedangkan 9 Indikator belum ada data capaian.

Tabel 2.109 Capaian TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/belum ada data
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	11	0	1	10

Tujuan 9.

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.110 Capaian TPB Per Indikator Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	PUPR	Persentase	59,66	61,83	59,18	62,37	60,89	▲
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Dinas Perhubungan	Orang (Terminal dan Bandara)	800	850	892	900	920	●
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	●
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase	0,78	-	0,86	-	-	-
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasa									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase	0,78	-	0,86	-	-	-
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	Rp/Tahun	915.556.000	911.714.831	894.892.500	890.597.495	1.471.900.536	▲

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target Kota Pagar Alam. Dari 6 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 2 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), 2 indikator yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 2 indikator belum ada data capaian.

Tabel 2.111 Capaian TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/belum ada data
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi	6	2	2	2

Tujuan 10.

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.112 Capaian Per Indikator TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1*	Rasio Gini	IKU Kota, BPS	Indeks Gini	0,336	0,283	0,283	-	-	●
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	UPTD PPA	Jumlah Penanganan	29 Kasus	23 Kasus	25 Kasus	23 Kasus	25 Kasus	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik									
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Orang	25	30	58	35	40	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan di atas, semua indikator sudah tercapai dibandingkan dengan target. Dari 3 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 3 indikator yang dilaksanakan tercapai (●)

Tabel 2.113 Capaian TPB Mengurangi Kesenjangan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara	3	3	0	0

Tujuan 11.

Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.114 Capaian Per Indikator TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase	96,13	97,81	97,28	97,86	97,28	▶
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua									
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Dinas Perhubungan	Persentase	40%	42%	42%	46%	48%	●
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia									
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rupiah Perkapita	86.976	92.976	28399,76	97.976	101.976	●
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal									
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	PUPR	Persentase	80,21	91,18	83,33	95,59	96,08	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan di atas ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 4 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 3 indikator yang dilaksanakan Tercapai (●), dan 1 indikator yang dilaksanakan Akan Tercapai/Membaik (▶).

Tabel 2.115 Capaian TPB Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
11	Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	3	1	0

Tujuan 12.

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.116 Capaian TPB Per Indikator Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	TPS 3R	M3/hari	22,6	30	28	34	-	
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional									
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota	Dokumen Pengadaan	44	-	-	-	-	-
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota	Dokumen Label	44	-	-	-	-	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam									
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah Berbudaya Lingkungan	Penghargaan	9	9	-	9	-	-
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Sekretariat Daerah Kota / Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Publik (9 sekolah dan 3 Keluraha n)	12	-	-	-	-	-
12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal									
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dinas Pariwisata	Objek	9	10	24	10	28	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 6 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 1 indikator yang dilaksanakan Tercapai (●), dan 1 indikator yang dilaksanakan Akan Tercapai/Membaik (►), sedangkan 4 indikator belum terdapat data capaian.

Tabel 2.117 Capaian TPB Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/belum ada data
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	6	1	1	4

Tujuan 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.118 Capaian Per Indikator TPB Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015– 2030	BPBD	Persentase	100	100	100	100	100	●
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	Persentase	100	100	100	100	100	●
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim									
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah Berbudaya Lingkungan	Penghargaan	9	9	3	10	11	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim di atas, semua indikator yang sudah tercapai dibandingkan dengan target. Dari 3 indikator semuanya telah dilaksanakan dan mencapai target, artinya

Pemerintah Kota Pagar Alam telah melaksanakan Komitmennya dalam berkontribusi dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Penanganan Perubahan Iklim.

Tabel 2.119 Capaian TPB Per Indikator Penanganan Perubahan Iklim Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3	3	0	0

Tujuan 14.

Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kota Pagar Alam Pada Tujuan 14 Ekosistem Lautan, tidak terdapat Indikator TPB yang dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan kondisi geografis daerah yang tidak memiliki wilayah perairan laut.

Tujuan 15.

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan, tidak terdapat Indikator TPB yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, hal ini berkaitan dengan kewenangan kabupaten/kota.

Tujuan 16.

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120 Capaian Per Indikator TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun									
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase	82	88	88	92	92	●
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak									
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	UPTD PPA	Persentase proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh	0	0	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	●
16.2.1. (b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	UPTD PPA	Prevelensi Anak yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	37 Kasus	15 Kasus	18 Kasus	25 Kasus	35 Kasus	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	UPTD PPA	Persentase Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	2 Kasus	5 Kasus	18 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	●
			Persentase Proporsi Perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual	2 Kasus	5 Kasus	18 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	●
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua									
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	UPTD PPA	Orang	55 Kasus	30 Kasus	32 Kasus	45 Kasus	47 Kasus	●
		Badan Kesbangpol (DPPKB3A dan Polres Kota Pagar Alam)	Persentase	100	100	-	-	-	-
16.3.1. (b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Perkara yang ditangani	12	15	6	5	5	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
16.3.1. (c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Perkara yang ditangani	12	15	6	5	5	●
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat dan BPKP	Level	3 dan 2	3 dan 3	3 dan 3	-	-	-
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Badan Keuangan Daerah	Persentase	92,43	64,12	64,12	64,12	64,12	●
16.6.1. (a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	Badan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	●
16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	Kategori Nilai	B	BB	B	BB	B	●
16.6.1. (c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Inspektorat	Skala A-D	C	CC	C	CC	C	●
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	Skala A-D	C	CC	C	CC	C	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
16.6.2. (a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota	OPD	16	15	7	20	18	▲
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	Persentase	16	16	16	16	16	●
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKPSDM	Persentase	15,00	16	18,00	16,00	16,67	●
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Disdukcapil	Dokumen Akta Kelahiran	3.308	3.396	2.857 (Data Per 31 Oktober 2024)	3.300	3.300	●
16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	Dokumen Akta Kelahiran	85%	85%	96,87% (Data DKB Bersih Semester 1)	85%	85%	●
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
16.10.2 *	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Dinas Kominfo	Persentase	40	65	-	70	-	-
16.10.1 .(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Polres Kota Pagar Alam	Kasus	0	0	0	1	1	●
16.10.1 .(C)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Polres Kota Pagar Alam	Kasus	0	0	0	1	1	●
16.10.2 .(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Badan Kesbangpol	Ormas dan LSM	26	26	26	-	-	●
		Dinas Kominfo	Persentase	60	80	70	70	75	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 21 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 18 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), 1 indikator yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►), dan 2 indikator belum ada data capaian.

Tabel 2.121 Capaian TPB Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/belum ada data
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	18	1	2

Tujuan 17.

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum capaian indikator TPB untuk Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yang telah dilaksanakan oleh Kota Pagar Alam tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.122 Capaian Per Indikator TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Badan Keuangan Daerah dan Bappeda	Persentase	-	2,54	2,91	-	-	●
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Badan Keuangan Daerah	Persentase	0,31%	0.35%	0,28%	0,35%,	0,35%	▶
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global									

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Dinas Kominfo	Persentase	75	80	78	80	85	●
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan									
17.13.1 *	Tersedianya DashboarMakroekonomi	Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1	●
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama									
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota	Dokumen	N/A	20	-	-	-	-
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional									
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Bappeda	Persentase	100	100	100	100	100	●
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang									
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital	Disdukcapil	Dokumen Akta Kelahiran	3.000 dan 997	3.396 dan 1.000	2.857 dan 670 (Data Per 31 Oktober 2024)	3.396 dan 1.000	3.396 dan 1.000	▶

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar *Baseline*	2024		2025	2026	Status
					Target	Realisasi	Target	Target	
	Statistics Register).								
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Dinas Kominfo	Persentase	75	85	85	85	90	●

Dari hasil pencapaian indikator-indikator TPB Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan di atas, ada beberapa indikator yang sudah tercapai dan beberapa lagi belum tercapai yang dibandingkan dengan target. Dari 8 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 5 indikator yang dilaksanakan tercapai (●), 2 indikator yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik (►) dan 1 indikator tidak ada data capaian.

Tabel 2.123 Capaian TPB Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tahun 2024

No.	Tujuan	Jumlah Indikator SDGs	Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perubahan Negatif/ Memburuk/ Perlu Perhatian Khusus/belum ada data
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	5	2	1

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.124 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	97	100.514.058.992	100	103.788.286.000	100	129.054.804.731	100	115.275.645.817	100	89,32	100,00	219.063.931.817			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	76.410.500	81	210.056.400	14	668.412.770	14	503.825.950	100	75,38	47,51	713.882.350			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersusun (Dokumen)	4	21.422.000	2	4.116.000	3	21.786.000	3	21.686.000	100	99,54	5	25.802.000	kolom ini di ignore dulu		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen PKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	6.945.000	2	10.678.000	2	21.686.000	100	203,09	3	28.631.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan PKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	9.945.000	1	27.776.000	1	25.136.000	100	90,50	2	35.081.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	6.945.000	2	11.058.000	2	11.058.000	100	100,00	3	18.003.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	7.161.000	1	9.945.000	1	29.308.000	1	26.536.000	100	90,54	2	36.481.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	4	26.344.500	7	172.160.400	5	567.806.770	5	408.731.950	100	71,98	12	580.892.350			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	97.558.638.793	100	98.217.768.573	27	123.664.648.337	27	110.471.241.112	100	89,33	63,50	208.689.009.685			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia (Bulan)	12	97.457.879.643	14	97.961.914.073	14	123.266.599.337	14	110.159.182.112	100	89,37	28	208.121.096.185			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksana Tugas ASN yang tersedia (Bulan)	22	95.760.000	4	252.480.000	12	393.370.000	12	307.480.000	100	78,17	16	559.960.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan yang tersusun (Dokumen)	1	4.999.150	1	3.374.500	1	4.679.000	1	4.579.000	100	97,86	2	7.953.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	166.860.000	87	379.914.850	6	631.632.290	6	365.225.298	100	57,82	46,52	745.140.148			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian barang milik Daerah pada SKPD yang diselenggarakan (Kali)			2	83.242.800	2	435.462.290	2	257.225.301	100	59,07	4	340.468.101			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang Milik Daerah pada SKPD yang diselenggarakan (Kali)	2	166.860.000	5	296.672.050	4	196.170.000	4	107.999.997	100	55,05	9	404.672.047			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	38.500.000	100	120.090.000	2	110.900.000	1	110.770.000	50	99,88	50,50	230.860.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut yang tersedia (paket)	70	38.500.000	2	120.090.000	1	110.900.000	1	110.770.000	100	99,88	3	230.860.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	834.955.724	100	791.784.259	107	1.028.205.840	96	1.013.420.336	89,72	98,56	98,00	1.805.204.595			DINAS PENDIDIKAN DAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																KEBUDAYAAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia (item)	16	24.055.350	14	22.448.500	16	18.250.800	14	14.501.459	87,5	79,46	28	36.949.959			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (paket)	37	110.316.810	44	122.377.950	57	156.342.800	57	156.242.800	100	99,94	101	278.620.750			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia (paket)	32	32.499.210	31	19.212.400	34	20.283.240	25	14.046.016	73,53	69,25	56	33.258.416			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia (paket)	1.000	22.000.000	2	32.452.500	2	30.550.000	2	28.306.000	100	92,65	4	60.758.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (paket)	132.145	94.376.700	6		7	110.903.000	7	109.903.000	100	99,10	13	109.903.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan yang tersedia (Eks)	640	30.400.000	120	37.800.000	200	48.000.000	200	48.000.000	100	100,00	320	85.800.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara	50	521.307.654	1.073	557.492.909	1127	643.876.000	1127	642.421.061	100	99,77	2.200	1.199.913.970			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	555.464.781	10	2.579.142.300	67	1.413.284.494	67	1.355.830.000	100	95,93	38,50	3.934.972.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)			73	1.989.400.000	3	100.692.000	3	99.390.000	100	98,71	76	2.088.790.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gudung Kantor yang tersedia (unit)			171	589.742.300	1	1.064.957.960	1	1.054.130.000	100	98,98	172	1.643.872.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gudung Kantor yang tersedia (unit)	63	555.464.781			63	247.634.534	63	202.310.000	100	81,70	63	202.310.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	698.614.394	100	825.517.081	174	1.086.000.000	100	1.054.590.163	57,4712644	97,11	100,00	1.880.107.244			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1.500	15.000.000	1.000	10.000.000	150	15.000.000	150	15.000.000	100	100,00	1.150	25.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia (Bulan)	12	35.614.394	12	41.517.081	12	66.000.000	12	34.590.163	100	52,41	24	76.107.244			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum kantor yang tersedia (Bulan)	12	648.000.000	12	774.000.000	12	1.005.000.000	12	1.005.000.000	100	100,00	24	1.779.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76	584.614.800	59	664.012.537	58	451.721.000	44	400.742.958	75,86	88,71	51,50	1.064.755.495			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang tersedia (unit)	12	193.048.800	20	114.727.537	28	231.620.000	22	190.742.958	78,57	82,35	42	305.470.495			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang terpelihara	35	27.445.000	36	27.750.000	28	20.040.000	20	11.450.000	71,43	57,14	56	39.200.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (Unit)	2	364.121.000	3	521.535.000	2	200.061.000	2	198.550.000	100	99,24	5	720.085.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Sekolah	89	42.820.526.830	100	58.479.309.609	100	74.457.806.325	100	69.264.917.112	100	93,03	100	127.744.226.721			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya kegiatan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90	24.862.755.377	82	32.517.694.014	125	32.654.667.117	125	30.919.546.971	100	94,69	104	63.437.240.985			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penambahan Ruang Kelas Baru				1	207.760.000							1	207.760.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun (Sekolah)	4	937.524.500	2	537.234.700	4	822.180.100	4	814.994.100	100	99,13	6	1.352.228.800			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3	261.016.000	2	236.037.500							2	236.037.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		2	443.645.000	1	271.540.000							1	271.540.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun (Sekolah)	29	5.183.926.707	15	6.392.007.000	19	6.429.556.649	19	6.041.900.100	100	93,97	34	12.433.907.100			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab (Sekolah)	5	672.706.000	4	3.917.319.200	2	573.400.400	2	549.852.000	100	95,89	6	4.467.171.200			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		1	51.304.000										-			
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab (Sekolah)	2	270.510.000	2	691.862.000	1	190.801.400	1	184.848.000	100	96,88	3	876.710.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah direhab (Sekolah)			0	2.860.000	4	1.009.330.400	4	979.459.600	100	97,04	4	982.319.600			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Mebeluer Sekolah	Mebeluer Sekolah yang tersedia (Sekolah)	3	598.950.000	-	-	6	1.603.100.000	6	1.600.225.000	100	99,82	6	1.600.225.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang tersedia (Sekolah)	2	477.500.000	1	170.100.000	7	316.250.000	7	316.246.304	100	100,00	8	486.346.304			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang tersedia (Bulan)	3	11.464.392.120	3	1.980.988.100	2	15.036.444.108	2	14.342.460.000	100	95,38	5	16.323.448.100			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (Sekolah)	3	1.375.134.000	2	13.487.813.874	49	2.017.154.810	49	1.790.797.192	100	88,78	51	15.278.611.066			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		87	34.185.550										-			
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		3	215.352.500										-			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kegiatan)	1	86.918.000	3	2.383.265.000	5	879.130.050	5	683.849.875	100	77,79	8	3.067.114.875			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1	56.062.500										-			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7	481.743.500	2	173.395.160	8	721.163.000	8	690.426.500	100	95,74	10	863.821.660			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		12	135.450.000										-			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS (Kegiatan)	25	15.000.000	3	222.638.200	1	42.476.000	1	41.576.000	100	97,88	4	264.214.200			DINAS PENDIDIKAN DAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																KEBUDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		20	7.200.000										-			
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium yang dibangun (Sekolah)			-	-	1	328.606.000	1	325.746.000	100	99,13	1	325.746.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)			12	1.069.996.280	6	592.800.000	6	568.319.800	100	95,87	18	1.638.316.080			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Kegiatan)			12	150.865.000	3	191.900.500	3	149.531.500	100	77,92	15	300.396.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang terbangun (Sekolah)			12	45.457.000	1	385.761.500	1	382.387.300	100	99,13	13	427.844.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi (Sekolah)	4	359.136.000	2	485.850.000	1	149.775.500	1	142.339.200	100	95,04	3	628.189.200			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Kegiatan)			-	-	4	516.185.000	4	474.596.000	100	91,94	4	474.596.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)	5	1.735.099.000	3	90.705.000	1	848.651.700	1	839.992.500	100	98,98	4	930.697.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96	12.457.873.794		15.686.281.810	104	27.832.362.621	104	25.756.419.847	100	92,54	104	41.442.701.657			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penambahan Ruang Kelas Baru				1	502.274.200							1	502.274.200			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang bangun (Sekolah)	1	306.675.000	-	-	3	424.485.000	3	414.347.000	100	97,61	3	414.347.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah				1	287.784.500							1	287.784.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun (Sekolah)	3	1.886.587.000	1	1.437.631.600	3	958.452.000	3	911.985.800	100	95,15	4	2.349.617.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi (Sekolah)	9	2.693.370.000	7	2.923.134.600	7	4.150.442.320	7	4.060.088.241	100	97,82	14	6.983.222.841			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		3	6.475.769.494	2	8.380.936.310							2	8.380.936.310			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		-	-	1	81.545.000							1	81.545.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		23	72.246.800	1	84.510.000							1	84.510.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		5	422.545.000	2	370.087.000							2	370.087.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)					5	4.987.411.457	5	4.817.603.800	100	96,60	5	4.817.603.800			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab (Sekolah)					2	169.793.880	2	167.709.000	100	98,77	2	167.709.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab					1	242.164.180	1	236.916.200	100	97,83	1	236.916.200			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab (Sekolah)					2	593.220.100	2	583.671.300	100	98,39	2	583.671.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi (Sekolah)			1	499.192.700	2	326.182.800	2	324.904.300	100	99,61	3	824.097.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (Paket)	148	199.430.000			4	192.000.000	4	192.000.000	100	100,00	4	192.000.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia (Paket)					5	284.625.000	5	284.125.000	100	99,82	5	284.125.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang tersedia (Tahap)					2	11.048.155.954	2	10.075.926.000	100	91,20	2	10.075.926.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (Paket)					39	477.465.530	39	468.965.400	100	98,22	39	468.965.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kegiatan)	1	86.948.000	4	438.712.500	7	900.634.900	7	431.663.156	100	47,93	11	870.375.656			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (kegiatan)	8	290.072.500	7	465.282.400	9	730.012.000	9	642.685.250	100	88,04	16	1.107.967.650			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan)	6	13.200.000	6	28.825.000	1	30.210.000	1	30.210.000	100	100,00	7	59.035.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1	11.030.000										-			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)			-	-	6	463.465.000	6	431.494.000	100	93,10	6	431.494.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Kegiatan)			4	186.366.000	6	368.886.500	6	240.201.500	100	65,12	10	426.567.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)					2	1.253.606.000	2	1.221.756.400	100	97,46	2	1.221.756.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Kegiatan)					3	231.150.000	3	220.167.500	100	95,25	3	220.167.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	97	2.773.959.759	89	4.983.742.285	38	8.970.041.366	38	8.529.644.394	100	95,09	63,69	13.513.386.679			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2	361.163.000	6	1.145.513.000							6	1.145.513.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasara dan Utilitas PAUD yang terbangun (Sekolah)			3	772.919.000	3	1.107.184.418	3	1.095.466.189	100	98,94	6	1.868.385.189			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang kelas Sekolah yang direhab (Sekolah)			1	326.615.000	2	346.727.468	2	344.360.000	100	99,32	3	670.975.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (Paket)	1	103.893.800	1	89.775.000	1	155.930.000	1	155.250.000	100	99,56	2	245.025.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				1	28.678.000							1	28.678.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik PAUD yang tersedia (Tahap)	12	1.373.912.000	2	1.645.900.000	2	1.623.600.000	2	1.579.152.000	100	97,26	4	3.225.052.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia (Paket)	5	364.442.209	1	21.116.085	4	458.260.000	4	441.875.000	100	96,42	5	462.991.085			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan penyelenggara Proses Belajar PAUD (Kegiatan)	5	361.574.750	1.400	631.735.500	15	2.665.747.500	15	2.384.434.705	100	89,45	1.415	3.016.170.205			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		1	29.494.000	1	42.746.300							1	42.746.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD (Kegiatan)					1	960.000.000	1	940.500.000	100	97,97	1	940.500.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (kegiatan)	4	179.480.000	5	278.744.400	3	314.240.000	3	298.456.000	100	94,98	8	577.200.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)					2	144.470.000	2	135.624.500	100	93,88	2	135.624.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang terbangun (Sekolah)					2	962.731.980	2	930.668.500	100	96,67	2	930.668.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (kegiatan)					3	231.150.000	3	223.857.500	100	96,85	3	223.857.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	86	2.725.937.900	90	5.291.591.500	16	5.000.735.221	16	4.059.305.900	100	81,17	52,99	9.350.897.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung Nonformal/Kesetaraan yang terbangun (Sekolah)	1	626.104.000	1	525.553.000	3	793.157.168	3	777.033.000	100	97,97	4	1.302.586.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		6	329.939.800	4	2.393.879.000							4	2.393.879.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1	28.795.800							1	28.795.800			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang tersedia (Tahap)	12	370.650.000	2	504.400.000	2	582.600.000	2	545.700.000	100	93,67	4	1.050.100.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan)	9	1.176.000.000	12	1.274.947.500	2	2.025.605.000	2	1.371.105.000	100	67,69	14	2.646.052.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (kegiatan)					1	28.890.000	1	26.490.000	100	91,69	1	26.490.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan				1	254.795.000							1	254.795.000			DINAS PENDIDIKAN DAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																KEBUDAYAAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Kegiatan)	2	196.156.950	3	309.221.200	1	1.157.883.053	1	927.677.900	100	80,12	4	1.236.899.100			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	27.087.150										-			
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia (Paket)					7	412.600.000	7	411.300.000	100	99,68	7	411.300.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	100	229.360.000	100	406.584.600	1	983.906.988	6	961.456.842	600	97,72	53,00	1.368.041.442			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	229.360.000	100	406.584.600	6	983.906.988	6	961.456.842	100	97,72	53,00	1.368.041.442			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				1	151.284.400							1	151.284.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (kegiatan)	2	229.360.000	50	255.300.200	6	983.906.988	6	961.456.842	100	97,72	56	1.216.757.042			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan					2	121.025.000	2	88.340.000	100	72,99	2,00	88.340.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					2	121.025.000	2	88.340.000	100	72,99	2,00	88.340.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan)					1	26.975.000		-	0	0,00	-	-			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (kegiatan)					1	94.050.000	1	88.340.000	100	93,93	1	88.340.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Budaya Lokal yang diangkat menjadi Budaya Nasional	100	1.635.663.100	100	2.547.442.728	5	1.958.783.840	5	1.626.462.032	100	83,03	52,50	4.173.904.760			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	1.455.659.360	100	1.777.908.628	5	978.603.100	5	793.548.000	100	81,09	52,50	2.571.456.628			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Perlindungan, Penegmbangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	1	1.455.659.360	6	1.503.505.628	4	423.152.500	4	370.595.000	100	87,58	10	1.874.100.628			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia ,Lembaga dan Pranata Kebudayaan (kegiatan)			1	274.403.000	1	555.450.600	1	422.953.000	100	76,15	2	697.356.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	645.402.100	1	99.733.200	1	95.685.200	100	95,94	51	741.087.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Kegiatan Perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Kegiatan)			3	645.402.100	1	99.733.200	1	95.685.200	100	95,94	4	741.087.300			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	180.003.740	100	124.132.000	3	880.447.540	3	737.228.832	100	83,73	52	861.360.832			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat (Kegiatan)	12	180.003.740	12	124.132.000	3	880.447.540	3	737.228.832	100	83,73	15	861.360.832			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kawasan Budaya yang dikembangkan					1	366.713.920	3	308.228.042	300	84,05	3	308.228.042			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					3	366.713.920	3	308.228.042	100	84,05	3	308.228.042			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (Kegiatan)					3	366.713.920	3	308.228.042	100	84,05	3	308.228.042			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	167.650.300	100	267.608.400	2	1.873.009.380	2	1.570.840.000	100	83,87	51	1.838.448.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya (Kegiatan)	100	43.922.500	100	112.104.400	2	603.844.960	2	452.875.500	100	75,00	51	564.979.900			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Kegiatan)					1	470.131.850	1	335.445.000	100	71,35	1	335.445.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya (Kegiatan)	12	43.922.500	1	112.104.400	1	133.713.110	1	117.430.500	100	87,82	2	229.534.900			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya (Kegiatan)	100	123.727.800	100	155.504.000	4	1.269.164.420	4	1.117.964.500	100	88,09	52	1.273.468.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya (Kegiatan)	12	62.872.800	1	155.504.000	4	1.269.164.420	4	1.117.964.500	100	88,09	5	1.273.468.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemanfaatan Cagar Budaya		1	60.855.000										-			
DINAS KESEHATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	27.395.628.311	100	26.677.102.856	100	37.404.584.543	86,58	30.512.649.128	86,58	81,57	93	57.189.751.984			DINAS KESEHATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	155.393.600	100	155.694.740	100	222.278.189	100	206.549.545	100	92,92	100	362.244.285			DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	32.219.300	24	24.238.715	4	41.090.589	4	34.082.313	100	82,94	28	58.321.028			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.110.750	1	14.700.775	1	18.310.000	1	18.310.000	100	100,00	2	33.010.775			DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9.936.500	1	14.367.225	1	17.952.500	1	17.952.500	100	100,00	2	32.319.725			DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.891.750	1	15.430.000	1	17.050.000	1	17.015.000	100	99,79	2	32.445.000			DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	10.155.500	1	15.876.975	1	19.502.500	1	19.502.500	100	100,00	2	35.379.475			DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	3.620.000	10	7.064.000	1	11.284.000	1	11.258.052	100	99,77	11	18.322.052			DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98	81.459.800	29	64.017.050	8	97.088.600	8	88.429.180	100	91,08	37	152.446.230			DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	20.913.495.522	100	23.271.268.588	100	34.613.243.085	85,80	27.920.486.578	85,80	80,66	93	51.191.755.166			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	20.711.805.522	3.708	23.035.640.194	5.824	34.320.043.085	4.992	27.667.741.578	85,71	80,62	8.700	50.703.381.772			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	194.290.000	12	226.130.000	12	269.760.000	12	234.850.000	100	87,06	24	460.980.000			DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			1	9.498.394	1	11.440.000	1	9.030.000	100	78,93	2	18.528.394			DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	7.400.000			2	12.000.000	2	8.865.000	100	73,88	2	8.865.000			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	11.989.860	100	13.200.000	100	12.900.000	100	97,73	100	24.889.860			DINAS KESEHATAN
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	11.989.860	2	13.200.000	2	12.900.000	100	97,73	4	24.889.860			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67	69.405.347	93	227.345.493	100	126.106.000	100	125.276.984	100	99,34	97	352.622.477			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89	48.060.000	125	62.375.000	86	64.500.000	86	64.500.000	100	100	211	126.875.000			DINAS KESEHATAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	21.345.347	18	147.703.493	6	51.606.000	6	50.936.984	100	98,70	24	198.640.477			DINAS KESEHATAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			30	17.267.000	27	10.000.000	27	9.840.000	100	98,4	57	27.107.000			DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	886.706.660	100	789.746.131	100	781.278.100	89,26	743.596.114	89,26	95,18	95	1.533.342.245			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150	14.135.000	1	12.580.000	1	17.500.000	1	17.500.000	100	100	2	30.080.000			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27	373.308.810	3	87.499.000	9	148.916.000	8	116.438.152	88,89	78,19	11	203.937.152			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	507	25.856.000	12	64.445.000	2	15.250.000	2	15.250.000	100	100	14	79.695.000			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	60.751.850	1	69.577.800	2	41.309.000	2	36.231.800	100	87,71	3	105.809.600			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.104	8.304.000	6	8.304.000	6	8.304.000	6	8.304.000	100	100	12	16.608.000			DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109	404.351.000	94	547.340.331	144	549.999.100	144	549.872.162	100	99,98	238	1.097.212.493			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	123.205.000	47	917.982.600	100	173.388.000	100	170.180.000	100	98,15	73	1.088.162.600			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1	472.500.000							1	472.500.000			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12	123.205.000	280	151.882.600	26	106.760.000	26	106.760.000	100	100	306	258.642.600			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				293.600.000	5	66.628.000	5	63.420.000	100	95,19	5	357.020.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	907.761.101	100	1.142.208.069	100	1.254.571.169	100	1.158.006.903	100	92,30	100	2.300.214.972			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	119	1.190.000	1	2.000.000	4	2.482.000	4	2.050.000	100	82,59	5	4.050.000			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	111.571.101	12	130.208.069	12	232.212.000	12	192.206.903	100	82,77	24	322.414.972			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	795.000.000	12	1.010.000.000	12	1.019.877.169	12	963.750.000	100	94,50	24	1.973.750.000			DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	4.339.661.081	92	160.867.375	100	220.520.000	84,57	175.653.004	84,57	79,65	88	336.520.379			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49	201.799.561	40	146.267.375	18	204.130.000	15	159.263.004	83,33	78,02	55	305.530.379			DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	14.200.000	20	14.600.000	23	16.390.000	23	16.390.000	100	100	43	30.990.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19	4.123.661.520										-			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96	39.753.696.801	97	46.215.051.367	100	49.717.102.389	98,12	43.576.955.577	98,12	87,65	98	89.792.006.944			DINAS KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	96	19.338.763.216	96	22.186.846.452	100	10.184.612.195	55,46	9.200.865.055	55,46	90,34	76	31.387.711.507			DINAS KESEHATAN
Pengembangan Puskesmas		192	5.465.723.500										-			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	80	5.550.472.540	33	6.901.202.000	5	1.090.280.150	5	829.874.500	95,40	76,12	38	7.731.076.500			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus)				2	760.000.000							2	760.000.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6	5.843.274.619	2.456	10.320.231.215	78	4.899.168.745	72	4.509.518.250	92,31	92,05	2.528	14.829.749.465			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat Vaksin		1	2.479.292.557	1	1.507.956.385							1	1.507.956.385			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Bahan Habis Pakai				1	2.638.018.102							1	2.638.018.102			DINAS KESEHATAN
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			168	59.438.750	1	40.004.000	1	39.429.500	100	98,56	169	98.868.250			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2	4.135.962.300	1	3.803.146.805	50	91,95	1	3.803.146.805			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					70	19.197.000	70	18.896.000	100	98,43	70	18.896.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	96	20.311.936.478		22.097.644.959	100	39.366.921.322	98,77	34.263.434.945		87,036	99	56.361.079.905			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	18.740.000	2	96.475.000	3.053	2.092.317.800	2.783	1.906.993.431	91,14	91,14	2.784	2.003.468.431			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12	1.131.600.000	2.767	1.080.600.000	2.767	1.023.800.000	2.550	942.930.400	92,16	92,10	5.317	2.023.530.400			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	20.000.000	83	51.940.500	2.495	234.731.000	2.466	232.031.777	98,85	98,85	2.549	283.972.277			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	12.956.000	1	94.891.200	9.177	189.278.000	8.954	184.678.753	97,57	97,57	8.955	279.569.953			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1	34.542.000	2	46.755.000	8.216	40.000.000	8.216	39.635.000	100	99,09	8.218	86.390.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1	22.000.000	50	7.500.000	100	36.897.000	83	30.377.000	83	82,33	133	37.877.000			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	17.770.000	1	37.907.000	35.380	20.985.000	35.380	20.852.500	100	99,37	35.381	58.759.500			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	19.580.000	3	66.348.500	800	49.250.000	800	47.544.800	100	96,54	803	113.893.300			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	17.550.000	4	69.750.000	400	55.000.000	400	53.113.146	100	96,57	404	122.863.146			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					800	35.750.000	800	34.401.000	100	96,23	800	34.401.000			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					25	43.680.000	6	9.000.000	24	20,60	6	9.000.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	1	25.410.000	4	66.950.000	1.200	54.998.000	1.200	54.187.770	100	98,53	1.204	121.137.770			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			2.172	445.987.415	4	92.026.428	4	91.935.400	100	99,90	2.176	537.922.815			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	23.901.300	3	73.541.491	4	4.000.000	4	4.000.000	100	100	7	77.541.491			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	2.397.179.412	3.982	948.736.150	13	4.863.462.460	13	4.591.605.265	100	94,41	3.995	5.540.341.415			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	113	10.000.000	750	68.457.250	1	27.180.000	1	26.453.900	100	97,33	751	94.911.150			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	638.920.170	5	756.483.900	2	624.484.000	2	539.066.300	100	86,32	7	1.295.550.200			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	71.186.000	2.800	243.141.200	7	586.801.900	7	583.171.655	100	99,38	2.807	826.312.855			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					-	-	-	-			-	-			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Surveilance Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilance Kesehatan	1	144.645.021	900	225.172.221	4	78.062.000	4	77.931.200	100	99,83	904	303.103.421			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	27.000.000			1.500	19.000.000	1.500	18.991.000	100	99,95	1.500	18.991.000			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					50	263.110.000	45	237.014.400	90,08	90,08	45	237.014.400			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		12	795.374.300										-			
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78	25.200.000			13	379.142.000	8	203.117.128	61,54	53,57	8	203.117.128			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	7.952.766.710			12	21.891.181.834	12	19.193.416.780	100	87,68	12	19.193.416.780			DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Terlaksananya Pengelolaan Kabupaten/ Kota Sehat	1	288.721.000			1	45.000.000	1	41.658.600	100	92,57	1	41.658.600			DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas	13	6.518.689.565			12	5.571.109.000	12	4.195.199.792	100	75,30	12	4.195.199.792			DINAS KESEHATAN
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					12	1.045.674.900	12	904.127.948	100	86,46	12	904.127.948			DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	102.997.107	100	1.548.262.706	100	109.773.500	75,00	58.494.177	75	53,29	88	1.606.756.883			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		1	80.275.107	1	25.868.350							1	25.868.350			DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12	93.214.356	4	109.773.500	3	58.494.177	75	53,29	15	151.708.533			DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				11	1.429.180.000							11	1.429.180.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			83	382.297.250	100	55.795.372	100	54.161.400	100	97,07	92	436.458.650			DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			5	382.297.250	8	55.795.372	8	54.161.400	100	97,07	13	436.458.650			DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT KESEHATAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT KESEHATAN	100	39.920.000	100	682.859.625	100	890.547.000	96,08	836.808.515	96,08	93,97	98	1.519.668.140			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	100	15.000.000	100	31.880.000	100	15.700.000	100	15.610.000	100	99,43	100	47.490.000			DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	19	15.000.000	1	31.880.000	2	15.700.000	2	15.610.000	100	99,43	3	47.490.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	100	20.040.000	100	197.676.000	100	248.512.000	100	244.564.422	100	98,41	100	442.240.422			DINAS KESEHATAN
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9	10.000.000	9	38.700.000	40	20.000.000	40	19.846.500	100	99,23	49	58.546.500			DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	10.040.000	3	158.976.000	1	228.512.000	1	224.717.922	100	98,34	4	383.693.922			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	4.880.000	56	453.303.625	100	626.335.000	94,43	576.634.093	94,43	92,06	75	1.029.937.718			DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1	4.880.000	170	453.303.625	413	626.335.000	390	576.634.093	94,43	92,06	560	1.029.937.718			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	100	433.989.000	84	404.154.100	100	357.496.000	81,97	288.598.550	81,966 17585	80,73	83	692.752.650			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	15.000.000	100	14.977.500	100	15.000.000	100,00	14.779.000	100	98,53	100	29.756.500			DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13	15.000.000	21	14.977.500	21	15.000.000	21	14.779.000	100	98,53	42	29.756.500			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah	100	16.000.000	76	68.840.000	100	16.500.000	83,33	13.270.000	83,33	80,42	80	82.110.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tangga															
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	1	16.000.000	100	68.840.000	36	16.500.000	30	13.270.000	83,33	80,42	130	82.110.000			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	100	15.000.000	76	20.481.000	100	17.395.000	100	17.210.000	100	98,94	88	37.691.000			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	1	15.000.000	5	20.481.000	1	17.395.000	1	17.210.000	100	98,94	6	37.691.000			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	387.989.000	85	299.855.600	100	308.601.000	80	243.339.550	80	78,85	82	543.195.150			DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	200	387.989.000	115	299.855.600	100	308.601.000	80	243.339.550	80	78,85	195	543.195.150			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	967.803.000	100	1.809.780.154	100	1.149.973.000	92,23	1.034.295.750	92,23	89,94	96	2.844.075.904			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	100	961.990.000	100	1.384.412.600	100	759.930.000	100,00	751.462.000	100	98,89	100	2.135.874.600			DINAS KESEHATAN
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	242	961.990.000	12	1.384.412.600	3	759.930.000	3	751.462.000	100	98,89	15	2.135.874.600			DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	100	5.813.000	100	48.000.000	100	32.800.000	100	32.731.250	100	99,79	100	80.731.250			DINAS KESEHATAN
Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penyelenggraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	5.813.000	7	48.000.000	1	32.800.000	1	32.731.250	100	99,79	8	80.731.250			DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	TerlaksananyaPengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota			100	377.367.554	100	357.243.000	75	250.102.500	75	70,01	88	627.470.054			DINAS KESEHATAN
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6	377.367.554	4	357.243.000	3	250.102.500	75	70,01	9	627.470.054			DINAS KESEHATAN
													0			
RSUD BESEMAH													0			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		96	23.129.959.094	89	26.522.400.213	100	37.303.630.139	80	29.860.958.784	80,19	80,05	84,42	56383358997			RSUD BESEMAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97	21.213.756.972	89	24.922.523.681	100	35.929.493.489	80	28.569.693.145	79,65	79,52	84,50	53492216826			RSUD BESEMAH
Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan kerja ASN	2.759	20.901.786.972	2.910	24.453.983.681	3.248	35.445.293.489	2.578	28.128.813.145	79,37	79,36	5.488	52.582.796.826			RSUD BESEMAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan administrasi pelaksana tugas asn	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	311.970.000	9	468.540.000	12	484.200.000	12	440.880.000	100,00	91,05	21	909.420.000			RSUD BESEMAH
Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	5.901.725	100	7.766.700	100	20.362.950	100	16.284.303	100,00	79,97	100	24.051.003			RSUD BESEMAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5.901.725	1	4.607.350	1	20.362.950	1	16.284.303	100,00	79,97	2	20.891.653			RSUD BESEMAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah		88	477.654.673		245.835.832	4.525	23.553.700	4.481	23.326.336	99,03	99,03	4.481	269.162.168			RSUD BESEMAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor RS		508	5.080.000	400	4.000.000							400	4.000.000			RSUD BESEMAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	508	110.474.000			3.362	3.185.700	3.166	3.000.000	94,17	94,17	3.166	3.000.000			RSUD BESEMAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		145.942	136.748.100										-			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran/Majalah	96	8.670.000	833	9.000.000	833	1.000.000	833	1.000.000	100,00	100,00	1.666	10.000.000			RSUD BESEMAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan pelatihan	22	216.682.573	23	232.835.832	330	19.368.000	329	19.326.336	99,78	99,78	352	252.162.168			RSUD BESEMAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92	1.151.395.000	83	1.212.000.000	100	1.330.220.000	100	1.251.655.000	100,00	94,09	91	2.463.655.000			RSUD BESEMAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	4	145.000			2	1.220.000	2	1.030.000	84,43	84,43	2	1.030.000			RSUD BESEMAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Sopir,CS,IPRS,Loundry,P.Jenazah , Gizi dan Portir.	1.497	1.151.250.000	1.568	1.206.000.000	1.728	1.329.000.000	1.624	1.250.625.000	93,98	94,10	3.192	2.456.625.000			RSUD BESEMAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan				3	6.000.000							3	6.000.000			RSUD BESEMAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	50.380.000	100	134.274.000	2	1.231.941.930	2	1.205.800.000	100,00	97,88	51	1.340.074.000			RSUD BESEMAH
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan operasional kantor					2	1.231.941.930	2	1.205.800.000	100,00	97,88	2	1.205.800.000			RSUD BESEMAH
Belanja Modal Mebel				1	49.274.000							1	49.274.000			RSUD BESEMAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat				1	85.000.000							1	85.000.000			RSUD BESEMAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	50.380.000										-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		62	83.697.724										-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		61	66.672.724										-			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		18	17.025.000										-			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		99	34.985.050.465		51.603.193.630	100	54.558.710.647	96,08	51.466.226.022	96,08	94,33	96	103.069.419.652			RSUD BESEMAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		91	907.455.000		10.991.043.594	100	7.517.884.166	100	51.466.226.022	100,00	684,58	100	62.457.269.616			RSUD BESEMAH
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		2.987.378	907.455.000	8.746	1.364.213.800							8.746	1.364.213.800			RSUD BESEMAH
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit				4.885	228.803.700							4.885	228.803.700			RSUD BESEMAH
Pengadaan Obat,Vaksin				270.661	9.288.050.094							270.661	9.288.050.094			RSUD BESEMAH
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faslitas Kesehatan	tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faslitas Kesehatan					4	7.517.884.166	4	7.423.880.687	100,00	98,75	4	7.423.880.687			RSUD BESEMAH
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				241	27.006.436.897	9	2.499.444.126	9	2.395.740.854	100,00	95,85	250	29.402.177.751			RSUD BESEMAH
pemeliharaan Rutin dan berkala alatnkesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				1	109.976.000							1	109.976.000			RSUD BESEMAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		99	34.077.595.465	97	40.612.150.036	100	49.480.592.588	95,46	46.010.326.790	95,46	92,99	96	86.622.476.826			RSUD BESEMAH
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	terbayarnya belanja pegawai	5.911	34.047.784.975	5.737	40.097.813.686	5.934	47.040.826.481	5.556	44.042.345.335	93,63	93,63	11.293	84.140.159.021			RSUD BESEMAH
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		254	29.810.490	74	14.385.000							74	14.385.000			RSUD BESEMAH
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD						1	2.439.766.107	1	1.967.981.455	100,00	80,66	1	1.967.981.455			RSUD BESEMAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	8.923.693.550	100	11.541.442.575	100	24.107.978.268	100	20.276.695.887	100,00	84,11	100	31818138462			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	36.260.950	100	111.651.555	100	94.645.000	100	93.435.000	100,00	98,72	100	205086555			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.441	4.988.650	7.580	9.550.000	7.580	9.620.500	7.580	9.620.500	100,00	100,00	15.160	19.170.500			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.267	4.954.400	24.530	13.617.000	24.530	13.773.000	24.530	13.773.000	100,00	100,00	49.060	27.390.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.709	4.902.000	28.961	15.053.000	28.961	15.153.000	28.961	15.153.000	100,00	100,00	57.922	30.206.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.074	4.895.500	27.363	15.058.000	27.363	15.165.500	27.363	15.165.500	100,00	100,00	54.726	30.223.500			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.816	4.991.400	27.363	15.058.000	27.363	15.173.000	27.363	15.173.000	100,00	100,00	54.726	30.231.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.739	4.965.000	21.532	22.545.555	21.532	13.690.000	21.532	12.480.000	100,00	91,16	43.064	35.025.555			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.307	6.564.000	6.154	20.770.000	6.154	12.070.000	6.154	12.070.000	100,00	100,00	12.308	32.840.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.633.094.660	100	5.167.280.229	100	9.040.070.714	95	7.637.526.368	95,00	84,49	98	12.804.806.597			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	672	4.395.924.660	1.050	4.548.010.229	1.050	8.370.310.714	950	7.168.686.368	90,48	85,64	2.000	11.716.696.597			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium ASN Kegiatan Sekretariat PUPR	219	237.170.000	581	619.270.000	581	669.760.000	520	468.840.000	89,50	70,00	1.101	1.088.110.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100	55.626.000		-	-	-		-			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					6	55.626.000			-	-	-	-			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	53.900.000	100	325.183.000	100	508.297.300	100	394.978.884	100,00	77,71	100	720.161.884			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	98	53.900.000	378	173.173.000	378	309.612.500	320	214.978.884	84,66	69,43	698	388.151.884			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160	133.360.000	160	198.684.800	160	180.000.000	100,00	90,60	320	313.360.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.316.467.235	100	1.273.782.290	100	3.339.402.331	85	2.728.879.986	85,00	81,72	93	4.002.662.276			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen dan Bahan Alat Listrik	329	13.533.000	1.326	44.488.228	1.326	74.355.130	1.326	73.957.103	100,00	99,46	2.652	118.445.331			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Tulis Kantor	1.185	57.768.500	1.841	177.969.347	1.841	334.589.000	1.800	298.221.650	97,77	89,13	3.641	476.190.997			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Modal Mebel	Tersedianya belanja modal mebel			32	77.133.000	184	447.046.000	183	399.250.000	99,46	89,31	215	476.383.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	437	9.520.600	1.071	41.443.000	1.071	28.409.805	1.000	20.193.100	93,37	71,08	2.071	61.636.100			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Belanja Modal Alat Pertanian dan Rumah Tangga	Tersedianya Belanja Modal Alat Pertanian dan Rumah Tangga			35	19.408.044	21	28.406.396			-	-	35	19.408.044			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.523	56.335.500	133.342	92.654.000	133.342	193.850.000			-	-	133.342	92.654.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	5.100	47.250.000	5.832	106.050.000	5.832	121.140.000	5.832	120.550.000	100,00	99,51	11.664	226.600.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	928	1.132.059.635	1.805	714.636.671	1.805	2.111.606.000	1.800	1.816.708.133	99,72	86,03	3.605	2.531.344.804			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintah Daerah	100	45.650.000	100	1.464.000.000	100	6.301.094.929	100	5.248.420.950	100,00	83,29	100	6.712.420.950			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					5	2.510.033.580	4	1.925.593.258	80,00	76,72	4	1.925.593.258			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Belanja Alat Beras Grace					1	1.772.342.643	1	1.765.000.000	100,00	99,59	1	1.765.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedinya Belanja suku cadang besar ALKAL	3	45.650.000	4	1.464.000.000	599	31.325.500	500	14.400.000	83,47	45,97	504	1.478.400.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Belanja Peralatan dan Mesin	Tersedianya Belanja Peralatan dan mesin					44	1.987.393.206	43	1.543.427.692	97,73	77,66	43	1.543.427.692			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.102.753.556	100	2.443.946.221	100	3.505.374.500	100	3.132.120.455	100,00	89,35	100	5.576.066.676			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 10000	936	10.294.000	12.600	23.470.000	12600	30.500.000	12000	18.840.000	95,24	61,77	24.600	42.310.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (4 Rekening x 4 Keg x 12 bln)	528	131.059.556	192	133.276.221	192	299.024.500	189	155.330.455	98,44	51,95	381	288.606.676			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga Kerja Non ASN yang dibayarkan	2.460	1.961.400.000	2.419	2.287.200.000	2.419	3.175.850.000	2.300	2.957.950.000	95,08	93,14	4.719	5.245.150.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	735.567.149	100	755.599.280	100	1.263.467.494	98	1.041.334.244	98,00	82,42	99	1.796.933.524			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	180.129.473	93	528.611.930	93	737.657.950	90	665.584.276	96,77	90,23	183	1.194.196.206			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	17	12.400.000	1.853	226.987.350	1.853	524.909.544	1.800	375.749.968	97,14	71,58	3.653	602.737.318			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		45	100.241.100										-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		185	258.137.684										-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		45	50.880.000										-			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100	32.131.844.198	104	30.729.994.397	100	22.662.783.135	92	22.520.024.857	91,80	99,37	98	53.250.019.254			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	3.308.018.900	158	2.565.379.500	100	22.616.595.535	100	22.475.724.857	100,00	99,38	129	25.041.104.357			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya Belanja Modal Pembangunan Tembok Penahan Siring Perkotaan	539	3.039.077.000	247	2.146.879.500	2.570	3.400.000.000	2.570	3.397.710.000	100,00	99,93	2.817	5.544.589.500			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					6.572	9.699.994.555	6.572	9.688.300.000	100,00	99,88	6.572	9.688.300.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					3.808	7.772.205.600	3.487	7.681.151.900	91,59	98,83	3.487	7.681.151.900			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					17.373	1.744.395.380	8.786	1.708.562.957	50,57	97,95	8.786	1.708.562.957			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		608	268.941.900	955	418.500.000							955	418.500.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	28.823.825.298	100	28.164.614.897	100	46.187.600	64	44.300.000	64,19	95,91	82	28.208.914.897			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3.339	152.015.198	5.357	43.613.000	5.920	46.187.600	3.800	44.300.000	64,19	95,91	9.157	87.913.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		1.408	6.388.565.000	439	8.215.620.000							439	8.215.620.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		225	1.182.447.000										-			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		5.600	20.573.742.100	491	18.125.796.000							491	18.125.796.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		4.306	468.686.000	4.306	1.779.585.897							4.306	1.779.585.897			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		12	58.370.000										-			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100	7.819.845.300	100	21.677.338.192	100	4.483.456.895	100	4.164.822.831	100,00	92,89	100	25.842.161.023			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Distribusi Air Minum (SPAM)	100	7.819.845.300	100	11.385.486.094	100	4.483.456.895	100	4.164.822.831	100,00	92,89	100	15.550.308.925			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	33.874	6.489.467.600	3.509	992.840.000	7.957	2.491.550.750	7.930	2.370.562.900	99,66	95,14	11.438	3.363.402.900			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM	5.749	941.600.000	8.584	9.858.520.460	632	1.400.000.000	14	1.383.106.000	2,26	98,79	8.599	11.241.626.460			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	6.481	388.777.700	8.417	433.331.638	8.418	591.906.145	4.210	411.153.931	50,01	69,46	12.627	844.485.569			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100	4.260.044.550	100	1.735.487.314	100	54.702.000	93	16.108.600	93,33	29,45	97	1.751.595.914			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	4.253.156.450	100	1.735.487.314	100	54.702.000	90	16.108.600	90,00	29,45	95	1.751.595.914			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat				1.332	1.543.225.000							1.332	1.543.225.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik		11.094	4.253.156.450	10.880	124.739.364							10.880	124.739.364			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	94	6.888.100	1.500	67.522.950	1.500	54.702.000	1.400	16.108.600	93,33	29,45	2.900	83.631.550			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	57,33	1.385.434.000	100	4.079.172.000	100	10.028.532.009	89	8.300.803.250	89,21	82,77	95	12.379.975.250			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	57,33	1.385.434.000	100	4.079.172.000	100	10.028.532.009	89	8.300.803.250	89,21	82,77	95	12.379.975.250			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Paket Rehabilitasi Drainase yang di Bangun	501	1.385.434.000	242	4.079.172.000	13.726	10.028.532.009	7.157	8.300.803.250	52,15	82,77	7.399	12.379.975.250			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	99,73	19.851.691.000	100	21.192.877.800	100	2.730.743.200	49	2.685.385.000	49,00	98,34	75	23.878.262.800			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota	99,73	19.851.691.000	100	21.192.877.800	100	2.730.743.200	49	2.685.385.000	48,76	98,34	74	23.878.262.800			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		4.356	19.237.331.000	1.647	20.050.290.800							1.647	20.050.290.800			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		1.250	560.360.000	6.393	897.695.000							6.393	897.695.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		72	54.000.000	264	244.892.000							264	244.892.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					2.368	2.730.743.200	49	2.685.385.000	2,06	98,34	49	2.685.385.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100	16.901.100.100	100	22.753.303.420	100	39.978.049.365	56	38.893.767.469	55,66	97,29	78	61.647.070.889			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	16.901.100.100	100	22.753.303.420	100	39.978.049.365	56	38.893.767.469	55,66	97,29	78	61.647.070.889			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota		10.499	16.901.100.100	337.351	22.753.303.420							337.351	22.753.303.420			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1.121	999.999.799	100	995.260.000	8,92	99,53	100	995.260.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terbangunnnya Bangunan Gedung Daerah Kota Pagar Alam					75.864	13.597.490.656	38.929	13.018.074.303	51,31	95,74	38.929	13.018.074.303			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1.159	24.494.659.620	1.159	24.161.653.100	100,00	98,64	1.159	24.161.653.100			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung					264	536.050.000	150	451.645.500	56,82	84,25	150	451.645.500			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					349	349.849.290	86	267.134.566	24,63	76,36	86	267.134.566			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100	1.393.619.248	100	1.701.814.289	100	2.345.575.735	72	1.649.268.731	72,37	70,31	86	3.351.083.020			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100	1.393.619.248	100	1.701.814.289	100	2.345.575.735	72	1.649.268.731	72,37	70,31	86	3.351.083.020			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1.283	1.393.619.248	37.039	1.701.814.289							37.039	1.701.814.289			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan					37.964	2.345.575.735	37.557	1.649.268.731	98,93	70,31	37.557	1.649.268.731			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	90,85	97.821.420.681	74	82.119.834.040	100	76.047.694.172	87	70.873.377.573	87,36	93,20	81	152.993.211.613			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	90,85	97.821.420.681	74	82.119.834.040	100	76.047.694.172	87	70.873.377.573	87,36	93,20	81	152.993.211.613			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksannay Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			1	532.822.200	73	2.509.600.000	71	2.377.143.185	96,58	94,72	72	2.909.965.385			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan	119.758	87.227.295.813	216.983	77.911.523.290	43.322	62.295.372.200	37.236	58.460.193.209	85,95	93,84	254.219	136.371.716.499			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	13.546	7.470.242.000	2.614	399.369.000	13.103	7.066.569.000	2	6.820.253.000	0,01	96,51	2.616	7.219.622.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	39	442.565.668	15	198.585.000	23	200.000.000	50	198.604.000	216,36	99,30	65	397.189.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	1.633	1.662.337.200	865	3.276.119.550	8.812	3.976.152.972	900	3.017.184.179	10,21	75,88	1.765	6.293.303.729			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		5	1.018.980.000										-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		871.126.900	89	2.110.211.664	100	3.366.695.900	31,24	2.939.639.619	31,24	87,32	60	5.049.851.283			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			100	366.477.858	100	504.707.000	28,81	393.440.443	28,81	77,95	64	759.918.301			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					527	71.829.500	527	71.697.738	100,00	99,82	527	71.697.738			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terlakananya Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			14.759	237.988.679	14.759	290.858.000	50	252.014.598	0,34	86,65	14.809	490.003.277			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Terlakananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang			153	128.489.179	153	142.019.500	-	141.425.845	-	99,58	153	269.915.024			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penataan Ruang															
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100	224.359.450	100	257.793.500	98	239.666.500	98,30	92,97	99	464.025.950			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			1	364.984.400	16.553	257.793.500	66	239.666.500	0,40	92,97	67	604.650.900			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100	364.984.400	100	310.771.000	49	268.889.950	49,00	86,52	75	633.874.350			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				108	161.786.000							108	161.786.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			59	203.198.400	53	310.771.000	26	268.889.950	49,84	86,52	85	472.088.350			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		871.126.900	81,99	1.154.389.956	100	2.293.424.400	86	2.037.642.726	86,00	88,85	84	3.192.032.682			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disisentif Bidang Penataan Ruang	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disisentif Bidang Penataan Ruang	1.451	7.345.000	1.858	250.571.956	1846	83.033.500	700	48.105.932	37,92	57,94	2.558	298.677.888			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaskananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	540	863.781.900	315	903.818.000	330	2.035.489.900	1	1.882.420.794	0,39	92,48	316	2.786.238.794			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah					108	174.901.000	23	107.116.000	21,43	61,24	23	107.116.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Prangkat Daerah	97,65	4.409.958.170	115	5.164.597.729	100	6.266.523.199	92	5.565.878.002	92,02	88,82	104	10.730.475.731			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	45.541.625	100	37.365.045	100	56.330.680	50	34.613.750	50,12	61,45	75	71.978.795			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	4.509.900	1	4.999.095	1	7.000.000	1	6.622.500	100,00	94,61	2	11.621.595			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	10.713.060	1	4.999.095	1	7.000.000	1	4.000.000	100,00	57,14	2	8.999.095			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	4.509.900	1	4.999.095	1	7.000.000	1	6.622.500	100,00	94,61	2	11.621.595			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD/ dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan doumen RKA-SKPD	1	10.085.160	1	4.999.095	1	7.000.000	1	4.000.000	100,00	57,14	2	8.999.095			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah/Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah/ Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	5	15.723.605	6	17.368.665	6	28.330.680	3	13.368.750	50,00	47,19	9	30.737.415			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,52	2.163.669.143	95	2.518.536.963	100	3.179.015.619	93	2.852.263.239	93,32	89,72	94	5.370.800.202			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN/Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	470	1.774.712.663	470	2.003.890.188	378	2.648.196.619	350	2.345.313.289	92,59	88,56	820	4.349.203.477			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Adiminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	154	383.160.000	300	502.880.000	330	514.260.000	325	499.130.000	98,48	97,06	625	1.002.010.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD / Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	5.796.480	12	11.766.775	12	16.559.000	6	7.819.950	50,00	47,22	18	19.586.725			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	55.760.000	100	39.600.000	100	77.922.000	100	77.695.200	100,00	99,71	100	117.295.200			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	55.760.000	72	39.600.000	72	77.922.000	72	77.695.200	100,00	99,71	144	117.295.200			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	784.420.156	100	841.851.874	100	985.621.079	93	902.225.119	93,48	91,54		1.744.076.993			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	13.153.250	1	21.143.054	1	29.613.829	1	19.222.215	70,00	64,91	2	40.365.269			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	2	133.428.115	2	125.850.690	2	171.224.781	2	170.125.500	100,00	99,36	4	295.976.190			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tanggar/Jumlah paketPeralatan Rumah Tangga yang di sediakan	59	19.022.032	68	24.760.722	70	36.074.419	69	34.175.638	98,57	94,74	137	58.936.360			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Barang dan Cetak Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan/Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	92.752.830	2	95.292.785	2	133.406.050	2	132.933.930	100,00	99,65	4	228.226.715			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan/Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	53.214.000	4	63.550.000	1.124	95.540.000	700	56.220.000	62,28	58,84	704	119.770.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96	472.849.929	83	511.254.623	83	519.762.000	80	489.547.836	96,39	94,19	163	1.000.802.459			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	693.415.000	100	951.914.000	100	1.020.695.569	100	964.025.000	100,00	94,45	100	1.915.939.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Kantor Double Gardan (PERPRES 53 TAHUN 2023)	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional Kantor (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)			1	472.500.000	1	516.336.000	1	467.300.000	100,00	90,50	2	939.800.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Empat (doubel Gardan)	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional Kantor (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)					1	516.336.000	1	467.300.000	100,00	90,50	1	467.300.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)			1	164.626.000	3	111.768.120	3	111.600.000	100,00	99,85	4	276.226.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan)					3	111.768.120	3	111.600.000	100,00	99,85	3	111.600.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya/Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	37	693.415.000	27	314.788.000	30	392.591.449	30	385.125.000	100,00	98,10	57	699.913.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,69	467.304.462	98	490.229.442	100	524.502.000	100	490.475.655	100,00	93,51	99	980.705.097			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.300.000	5	14.100.000	5	19.740.000	5	19.740.000	100,00	100,00	10	33.840.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/Jumlah Laporan enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12	61.254.462	10	59.129.442	12	68.262.000	11	60.485.655	91,67	88,61	21	119.615.097			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor/Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	12	393.750.000	540	417.000.000	12	436.500.000	12	410.250.000	95,83	93,99	552	827.250.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	199.847.784	97	285.100.405	100	422.436.252	59	244.580.039	59,30	57,90	78	529.680.444			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	4	97.216.884	5	127.404.405	24	193.295.400	6	45.908.039	25,00	23,75	11	173.312.444			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya/ Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7	6.997.900	8	12.848.000	22	28.926.600	2	1.490.000	6,82	5,15	10	14.338.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya/Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	95.633.000	1	144.848.000	1	200.214.252	1	197.182.000	100,00	98,49	2	342.030.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Persentase Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak HuniBagi Korban Bencana			100	25.077.810	100	440.000.065	44	316.026.785	43,75	71,82	72	341.104.595			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ kota	Persantase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana			100	25.077.810	100	39.999.480	44	19.332.928	43,75	48,33	72	44.410.738			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Identifikasi lahan-Lahan Potensi sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan Yang Berpotensi Sebagai Lokasi Relokasi perumahan					2	14.999.730	0	2.510.000	20,00	16,73	0	2.510.000			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen data Rumah Dilokasi Yang Berpotensi Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota			1	25.077.810	1	24.999.750	1	16.822.928	70,00	67,29	2	41.900.738			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembangunan dan Rehabilitas Rmuah Korban bencana Atau Relokasi Program Kabupaten\Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana						-		-				-			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Rehabiliasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terabilitasi					-	-						-			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembanguna Rumah Bagi korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tebangun					-	-						-			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbit Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana					100	400.000.585	80	296.693.857	80,00	74,17	80	296.693.857			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan singkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian pembangunanan dan Pengembangan Perumahan					1	400.000.585	1	296.693.857	80,00	74,17	1	296.693.857			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Persentase KawasanPermukiman Kumuh Dibawa 10 Ha Yang Ditangani	98,98	804.533.095		945.947.518	100	2.305.822.195	60	2.096.110.394	59,63	90,91	60	3.042.057.912			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	100	340.870.915		304.240.310	100	399.913.830	70	309.156.402	70,00	77,31	70	613.396.712			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkornisasi Penyelengaraan kawasan Pemukiman	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penyelengaraan Kawasan permukiman	2	340.870.915	2	304.240.310	2	399.913.830	1	309.156.402	70,00	77,31	3	613.396.712			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Persentase Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	96,68	272.935.550	71	383.905.540	100	1.212.790.305	90	1.093.835.932	90,29	90,19	81	1.477.741.472			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyadaran Publik Pencegahan dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegah Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2	56.503.960			2	211.235.755	2	173.766.818	75,00	82,26	2	173.766.818			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1	116.202.710	1	340.819.150							1	340.819.150			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan/Review/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1	30.869.010	1	11.754.180	1	162.246.250	1	86.745.298	100,00	53,47	2	98.499.478			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Klompok Swadaya Masyarakat Permukiman Kumuh Yang Dibentuk /Dibina	3,5	69.359.870	4	31.332.210		-	-	-			4	31.332.210			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Suervei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					1	491.466.550	1	488.180.350	100,00	99,33	1	488.180.350			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan ruma Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan rumah	Jumlah Rumah Tangga Yang Terpasilitasi Peningkatan Kesadaran Dalam Mewujutkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah					1	347.841.750	1	345.143.466	100,00	99,22	1	345.143.466			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kualitas Kawasan Prmukiman kumuh Dengan Luas di Bawa 10 (sepulu) Ha	Persentase Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Prmukiman kumuh Dengan Luas di Bawa 10 (sepulu) Ha	100	190.726.630	70	257.801.668	100	693.118.060	100	693.118.060	100,00	100,00	85	950.919.728			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Sinkornisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		41	190.726.630	1	257.801.668							1	257.801.668			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	jumlah Rumah Tidak layak Huni Yang Diperbaiki					100	693.118.060	100	693.118.060	100,00	100,00	100	693.118.060			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTLITAS UMUM(PSU)	Terlaksananya Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	98,90	50.464.191.720	100	55.283.969.172	100	55.716.540.603	100	55.386.418.041	99,95	99,41	100	110.670.387.213			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	98,90	50.464.191.720	100	55.283.969.172	100	55.716.540.603	100	55.386.418.041	99,95	99,41	100	110.670.387.213			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian / Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	170	1.029.794.000	180	1.113.770.500	5	101.650.000	5	101.650.000	100,00	100,00	185	1.215.420.500			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasidan Singkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	terlaksananya Verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang /Jumlah laporan hasil Serah terima PSU Perumahan Yng terferifikasi dari Pengembangan	2	124.376.720	337	154.367.672	330	149.999.460	305	105.499.561	92,42	70,33	642	259.867.233			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	100	185.179.300	98	268.198.340	100	345.777.775	76	237.288.240	76,42	68,62	87	505.486.580			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Terselesaikannya Sengketa Pertanahan Pemerintah Kota Pagar Alam	100	185.179.300	98	268.198.340	100	345.777.775	76	237.288.240	76,42	68,62	87	505.486.580			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Inventaris Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	60.982.400	6	91.079.760	6	143.480.300	4	83.259.903	66,67	58,03	10	174.339.663			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	124.196.900	6	177.118.580	6	202.297.475	5	154.028.337	83,33	76,14	11	331.146.917			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanaha Untuk Pembangunan	96,39	646.215.313	88	417.173.350	100	472.883.300	48	214.499.275	48,02	45,36	68	631.672.625			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96,39	646.215.313	88	417.173.350	100	472.883.300	48	214.499.275	48,02	45,36	68	631.672.625			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah / Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	196.736.953	2	159.097.340	3	234.089.650	1	46.505.560	23,33	19,87	3	205.602.900			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	449.478.360	19	258.076.010	18	238.793.650	13	167.993.715	72,22	70,35	32	426.069.725			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kosong Pemerintah	100	96.716.810	60	53.286.635	100	143.867.100	90	128.719.186	90,00	89,47	75	182.005.821			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Inventaris dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Inventaris Tanah kosong Milik Pemerintah	100	96.716.810	60	53.286.635	100	143.867.100	90	128.719.186	90,00	89,47	75	182.005.821			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Pelaksanaan Inventaris Tanah Kosong	Jumlah Laporan tanah kosong Dalam1 (satu) Kabupaten Kota Yang Diinventariskan	1	96.716.810	1	53.286.635	1	143.867.100	1	128.719.186	100,00	89,47	2	182.005.821			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Persentase Penataguna Tanah Pemerintah	100	72.735.200	50	41.144.390	100	140.620.800	70	97.460.072	70,00	69,31		138.604.462			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penggunaan tanah yang hamparanya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota	100	72.735.200	50	41.144.390	100	140.620.800	70	97.460.072	70,00	69,31		138.604.462			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Koordinasi Dan Singkronisasi Prencanaan Pengggunaan Tanah	Jumlah laporan Koordinasi Dan Singkronisasi Precanaan Penggunaan Tanah Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1	72.735.200	3	41.144.390	1	140.620.800	1	97.460.072	70,00	69,31	3	138.604.462			DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
													0			
SAT POL PP													0			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97,89	7.627.521.466	93	7.387.650.960	100	8.392.349.695	97	8.172.629.338	97,40	97,38	95	15.560.280.298			SAT POL PP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	48.000.000	100	53.730.000	100	55.606.000	100	55.606.000	100,00	100,00	100	109.336.000			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	6.000.000	2	11.940.000	2	11.940.000	2	11.940.000	100,00	100,00	4	23.880.000			SAT POL PP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.940.000			SAT POL PP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	6.908.000	1	6.908.000	100,00	100,00	2	12.878.000			SAT POL PP
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.940.000			SAT POL PP
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Digandakan Menjadi 40 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	6.908.000	1	6.908.000	100,00	100,00	2	12.878.000			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	6.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.940.000			SAT POL PP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	12.000.000	2	11.940.000	2	11.940.000	2	11.940.000	100,00	100,00	4	23.880.000			SAT POL PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	95	2.138.792.554	94	2.293.179.452	100	2.599.135.902	95	2.430.906.977	94,84	93,53	94	4.724.086.429			SAT POL PP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang(Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan)	402	2.085.482.554	373	2.143.079.452	406	2.376.745.902	382	2.238.206.977	94,09	94,17	755	4.381.286.429			SAT POL PP
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Satuan Polisi Pamong Praja	14 0rang(3 orang bendahara,9 orang PPTK,1 orang PPK SKPD,1 orang PPKD/KPA)	1	41.310.000	7	139.060.000	14	210.450.000	12	180.760.000	85,71	85,89	19	319.820.000			SAT POL PP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Digandakan Menjadi 30 Dokumen	1	12.000.000	1	5.520.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.490.000			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	1 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Digandakan Menjadi 30 Dokumen			1	5.520.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100,00	100,00	2	11.490.000			SAT POL PP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	5.677.650										-			
Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta atribut Kelengkapan (Satuan polisi Pamong Praja)		1	5.677.650										-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	99,99	558.470.591	99	633.469.049	100	773.623.293	100	748.447.162	100,00	96,75	100	1.381.916.211			SAT POL PP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110	3.176.800	55	2.888.000	83	5.000.000	83	5.000.000	100,00	100,00	138	7.888.000			SAT POL PP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor	813	40.218.200	699	36.554.000	894	40.747.000	692	31.529.500	77,40	77,38	1.391	68.083.500			SAT POL PP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26 Item Peralatan Rumah Tangga	139	35.613.100	196	9.178.000	633	18.167.200	390	11.197.000	61,61	61,63	586	20.375.000			SAT POL PP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Item Barang Cetakan dan Penggandaan	134.618	33.654.500	20.352	18.188.600	48.889	28.563.093	36.089	21.085.700	73,82	73,82	56.441	39.274.300			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Tahun (12 Media Surat Kabar/Majalah)	180	18.020.000	159	18.000.000	212	18.020.000	212	18.000.000	100,00	99,89	371	36.000.000			SAT POL PP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (SPPD)	818 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337	427.787.991	145	548.660.449	818	663.126.000	816	661.634.962	99,76	99,78	961	1.210.295.411			SAT POL PP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	83,04	44.820.800			100	128.296.500	100	127.955.000	100,00	99,73	100	127.955.000			SAT POL PP
Pengadaan Mebel	1 Unit Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2	5.550.000			1	40.348.500	1	40.340.000	100,00	99,98	1	40.340.000			SAT POL PP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit Peralatan dan mesin lainnya	3	39.270.800			13	87.948.000	13	87.615.000	100,00	99,62	13	87.615.000			SAT POL PP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,81	4.609.799.346	91	4.213.438.239	100	4.622.608.000	100	4.600.359.559	99,53	99,52	95	8.813.797.798			SAT POL PP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	880 Buah Materai 10.000	500	5.000.000	800	8.000.000	880	8.800.000	320	3.200.000	36,36	36,36	1.120	11.200.000			SAT POL PP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening (12 Rek Listrik, 12 Rek Air dan 12 Rek Internet)	51	18.399.346	25	19.438.239	36	25.008.000	28	19.159.559	77,78	76,61	53	38.597.798			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319 Orang(317 orang tenaga non ASN ,2 Orang Cleaning servis)	3.826	4.586.400.000	3.178	4.186.000.000	3.828	4.588.800.000	3.819	4.578.000.000	99,76	99,76	6.997	8.764.000.000			SAT POL PP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	75,58	221.960.525	91	193.834.220	100	213.080.000	100	209.354.640	100,00	98,25	95	403.188.860			SAT POL PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan BBM,Service,Suku Cadang dan Pembayaran Pajak (5 Unit Kendaraan Roda 4 dan 9 Unit Kendaraan Roda 2)	12	171.960.525	6	193.834.220	14	213.080.000	14	209.354.640	100,00	98,25	20	403.188.860			SAT POL PP
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)		1	50.000.000										-			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		97,50	1.305.357.328		825.917.640	100	1.499.422.000	100	1.443.608.630	100,00	96,28	100	2.269.526.270			SAT POL PP
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah	98,02	988.862.600		683.693.000	100	1.499.422.000	100	1.443.608.630	100,00	96,28	100	2.127.301.630			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan kapasitas SDM satpol pp dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalampelaksanaan tugas termasuk bernuansa hak asasi manusia	1 Kegiatan	5	724.833.400	3	540.989.500	1	156.646.000	1	149.350.000	100,00	95,34	4	690.339.500			SAT POL PP
Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan					1	600.000.000	1	600.000.000	100,00	100,00	1	600.000.000			SAT POL PP
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pembinaan Patroli,Pengaman,dan Pengawalan	1 Kegiatan					6	742.776.000	6	694.258.630	100,00	93,47	6	694.258.630			SAT POL PP
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan keteripan umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota satpol pp	4 Kegiatan Pengamanan	4	197.375.000	2	99.400.000							2	99.400.000			SAT POL PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum satpol pp	1 Kegiatan	1	66.654.200	1	43.303.500							1	43.303.500			SAT POL PP
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah	95,91	316.494.728	56	85.779.640							56	85.779.640			SAT POL PP
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)	1 Kegiatan	2	316.494.728	1	85.779.640							1	85.779.640			SAT POL PP
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah			96	56.445.000							96	56.445.000			SAT POL PP
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan polisi Pamong praja)	1 Kegiatan			1	56.445.000							1	56.445.000			SAT POL PP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95,08	2.626.427.663	77	3.135.031.885	100	7.498.522.798	77	5.162.163.557	77	69	77	8.297.195.442			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	19.269.800	82	28.918.500	100	39.606.100	72	36.095.000	72	91	77	65.013.500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan RESNTRA yang tersusun (dokumen)	2	4.934.900	2	5.163.500	2	5.912.500	2	5.015.000	100	85	4	10.178.500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.600.000	1	5.284.200	1	5.040.000	100	95	2	9.640.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.475.000	1	5.088.250	1	4.695.000	100	92	2	9.170.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.645.000	1	6.127.200	1	5.520.000	100	90	2	10.165.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.350.000	1	4.915.000	1	6.265.950	1	5.645.000	100	90	2	10.560.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)					1	5.134.200	1	4.670.000	100	91	1	4.670.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP dan LPPD yang tersusun (dokumen)	2	4.934.900	2	5.120.000	2	5.793.800	2	5.510.000	100	95	4	10.630.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Perangkat Daerah		92,94	2.134.184.023	98	1.932.363.371	100	3.063.725.278	88	1.585.092.880	88	52	93	3.517.456.251			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	13	2.109.269.023	14	1.932.363.371	14	2.905.145.278	13	1.429.932.880	93	49	27	3.362.296.251			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honor Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (OB)	3	21.120.000	3	47.060.000	12	151.080.000	12	147.660.000	100	98	15	194.720.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.795.000	1	4.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	100	100	2	11.500.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	197.700.000			100	127.723.000	100	121.323.000	100	95	100	121.323.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	3	197.700.000			5	127.723.000	5	121.323.000	100	95	5	121.323.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	259.995.400		276.856.870	100	533.022.980	62	451.852.456	62	85	62	728.709.326			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor (Alat Tulis Kantor)	tersedianya ATK (PCS)	1.106	27.840.500	1.106	54.270.000	1.106	144.430.000	1.100	143.868.500	99	100	2.206	198.138.500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga (PCS)	465	13.698.000	440	63.244.700	465	94.372.980	350	73.007.600	75	77	790	136.252.300			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor (Kali)					60	103.008.000	30	49.444.000	50	48	30	49.444.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan (lembar)	25.140	18.743.900	20.000	10.800.000	25.140	13.280.000	24.000	13.280.000	95	100	44.000	24.080.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bacaan dan Perundang-undangan	6	6.204.000			12	5.640.000	-	-	-	-	-	-			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	terlaksananya korrdinasi dan konsultasi (OK)	12	193.509.000	12	148.542.170	12	172.292.000	12	172.252.356	100	100	24	320.794.526			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99	163.158.440	99	164.854.149	100	1.818.255.000	98	1.775.694.185	98	98	98	1.940.548.334			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi 10.000 (lembar)	500	5.500.000	500	5.000.000	500	7.500.000	500	7.500.000	100	100	1.000	12.500.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya instalsi listrik dan SDA (Slip)	33	22.658.440	33	24.854.149	36	53.280.000	36	27.235.185	100	51	69	52.089.334			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)					36	34.875.000	36	34.859.000	100	100	36	34.859.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor TKS, Penjaga Kantor, CS (OB)	12	135.000.000	12	135.000.000	12	1.722.600.000	12	1.706.100.000	100	99	24	1.841.100.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	319.033.136	100	688.100.000	100	581.660.000	100	575.924.000	100	99	100	1.264.024.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)			1	294.000.000	1	472.230.000	1	467.300.000	100	99	2	761.300.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Mebel	tersedianya Mebel (Unit)	6	92.030.000	8	197.420.000	5	109.430.000	5	108.624.000	100	99	13	306.044.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6	160.206.636	10	196.680.000							10	196.680.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	66.796.500										-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Punjang Urusan Pemerintah Daerah		95,70	49.820.000	100	43.938.995	100	1.334.530.440	98	1.313.429.036	98	98	99	1.357.368.031			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	terlaksananya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	5	49.820.000			6	74.500.800	5	61.039.536	83	82	5	61.039.536			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	terlaksananya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6	43.938.995	8	881.445.225	8	879.671.500	100	100	14	923.610.495			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1	171.497.800	2	194.359.000	1	194.559.750	1	192.182.000	100	99	3	386.541.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lainnya															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4	184.024.665	4	180.536.000	100	98	4	180.536.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Penanggulangan Bencana		100	481.943.000	100	408.403.750	100	1.463.879.360	100	1.380.763.886	100	94	100	1.789.167.636			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	97.215.000									#DIV/0!	-			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		5	97.215.000										-			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100	239.128.000	100	206.328.750							100	206.328.750			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		3	154.188.000	5	190.400.000							5	190.400.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				12	15.928.750							12	15.928.750			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		3	84.940.000										-			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	145.600.000	100	202.075.000	100	786.574.100	100	757.908.000	100	96	100	959.983.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6	145.600.000	12	202.075.000	12	347.459.000	12	319.687.000	100	92	24	521.762.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota					40	257.309.000	40	257.309.000	100	100	40	257.309.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					25	181.806.100	25	180.912.000	100	100	25	180.912.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						100	677.305.260	100	622.855.886	100	92	100	622.855.886			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					12	624.271.260	6	611.027.486	50	98	6	611.027.486			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					3	53.034.000	3	11.828.400	100	22	3	11.828.400			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	2.234.322.300	83	2.673.584.000	100	2.276.781.800	79	2.192.806.500	79	96	81	4.866.390.500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	2.038.522.300	83	2.479.984.000	100	2.276.781.800	79	2.192.806.500	79	96	81	4.672.790.500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	1.938.682.300	11	1.897.284.000	12	1.962.281.800	11	1.880.656.500	92	96	22	3.777.940.500			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Telaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100	99.840.000			10	150.000.000	10	150.000.000	100	100	10	150.000.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			5	195.500.000	8	164.500.000	8	162.150.000	100	99	13	357.650.000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		100	195.800.000										-			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		8	195.800.000										-			
DINAS SOSIAL																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		94,87	3.102.217.647	93	3.731.659.511	100	4.403.126.991	95	3.299.845.383	95	75	94	7.031.504.894			DINAS SOSIAL
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Konerja Perangkat Daerah		100	32.244.500	100	27.834.000	100	28.195.000	65	27.961.000	65	99	82	55.795.000			DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	4.065.000	1	4.065.000	1	4.038.000	100	99	2	8.103.000			DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.510.000	1	3.510.000	100	100	2	7.010.000			DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.946.000	1	3.410.000	1	3.410.000	1	3.387.000	100	99	2	6.797.000			DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.999.000	1	3.553.000	1	3.890.000	1	3.890.000	100	100	2	7.443.000			DINAS SOSIAL
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (dokumen)	4	18.299.500	4	13.306.000	4	13.320.000	1	13.136.000	25	99	5	26.442.000			DINAS SOSIAL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		91	1.620.901.218	100	1.864.314.306	100	2.324.754.731	97	1.797.007.056	97	77	98	3.661.321.362			DINAS SOSIAL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	325	1.491.813.218	350	1.735.919.306	266	2.195.959.731	260	1.678.702.056	98	76	610	3.414.621.362			DINAS SOSIAL
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN (OB)	88	124.100.000	112	122.830.000	120	123.230.000	108	112.740.000	90	91	220	235.570.000			DINAS SOSIAL
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (dok)	1	4.988.000	1	5.565.000	1	5.565.000	1	5.565.000	100	100	2	11.130.000			DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah				100	75.000.000	100	75.000.000	100	74.500.000	100	99	100	149.500.000			DINAS SOSIAL
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			150	75.000.000	150	75.000.000	150	74.500.000	100	99	300	149.500.000			DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daearah		98,02	255.696.834	100	471.823.914	100	855.390.260	96	537.449.672	96	63	98	1.009.273.586			DINAS SOSIAL
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik (Pcs)	168	4.676.500	402	14.495.310	402	14.499.260	200	8.721.000	50	60	602	23.216.310			DINAS SOSIAL
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor (Pcs)	300	46.830.670	322	36.435.497	322	54.716.000	255	40.969.000	79	75	577	77.404.497			DINAS SOSIAL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat rumah tangga (Pcs)	233	8.969.664	263	16.481.784	263	11.264.000	105	5.827.000	40	52	368	22.308.784			DINAS SOSIAL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan (lembar)	22.255	14.600.000	28.800	15.953.000	28.802	19.900.000	21.000	10.900.000	73	55	49.800	26.853.000			DINAS SOSIAL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya bahan bacaan dan perundang-undangan	1.570	13.620.000	12	12.950.000	12	146.076.000	12	7.775.000	100	5	24	20.725.000			DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi (OK)	35	167.000.000	55	375.508.323	55	608.935.000	55	463.257.672	100	76	110	838.765.995			DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	199.857.000			100	259.052.493	100	258.876.493	100	100	100	258.876.493			DINAS SOSIAL
Pengadaan Mebel	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	104	60.417.000			80	62.964.000	80	62.964.000	100	100	80	62.964.000			DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jaringan instalasi listrik (slip)					48	196.088.493	48	195.912.493	100	100	48	195.912.493			DINAS SOSIAL
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		13	139.440.000										-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.029.283.876	87	1.152.862.922	100	935.537.000	87	764.143.870	87	82	87	1.917.006.792			DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	350	3.675.000	100	800.000	380	3.800.000	170	1.700.000	45	45	270	2.500.000			DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jaringan instalasi listrik (slip)	24	5.608.876	35	7.812.922	48	10.737.000	48	9.443.870	100	88	83	17.256.792			DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji honorarium TKS, CS, Penjaga Kantor, Sopir	1.452	1.020.000.000	1.500	1.144.250.000	1.728	921.000.000	1.500	753.000.000	87	82	3.000	1.897.250.000			DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang milik Daearh Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	164.091.219	100	139.824.369	100	184.250.000	100	98.900.785	100	54	100	238.725.154			DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya,	11	159.273.219	22	135.444.369	22	172.570.000	22	94.420.785	100	55	44	229.865.154			DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin kantor (unit)	6	4.818.000	10	4.380.000	10	11.680.000	5	4.480.000	50	38	15	8.860.000			DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100	173.126.500	100	200.000.000							100	200.000.000			DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100	173.126.500										-			
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT (Dinas Sosial)		240	173.126.500										-			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				100	200.000.000							100	200.000.000			DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			1	200.000.000							1	200.000.000			DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	49.800.000	70	206.557.278							70	206.557.278			DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Anak Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100	49.800.000	70	206.557.278							70	206.557.278			DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			483	140.611.880							483	140.611.880			DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	49.800.000	1	65.945.398							1	65.945.398			DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100	126.190.950	100	41.413.750	100	186.634.000	39	70.906.943	39	38	69	112.320.693			DINAS SOSIAL
Pengelolaan data fakir miskin cangkupan daerah Kabupaten/Kota		100	126.190.950	100	41.413.750	100	186.634.000	39	127.245.543	39	68	69	168.659.293			DINAS SOSIAL
Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	40	49.114.000	160.888	32.424.750	160.888	72.513.500	160.000	70.906.943	99	98	320.888	103.331.693			DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan data fakir miskin cangkupan daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang terverifikasi dan validasi (jiwa)	16.088	77.076.950	41.735	8.989.000	41.735	114.120.500	29	56.338.600	0	49	41.764	65.327.600			DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100	705.011.500	100	123.851.702	100	271.362.000	50	20.628.000	50	8	75	144.479.702			DINAS SOSIAL
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100	705.011.500	100	123.851.702	100	271.362.000	50	20.628.000	50	8	75	144.479.702			DINAS SOSIAL
Penyediaan Makanan	Tersedianya Penyediaan Makanan untuk tim anggota pasca bencana dan korban bencana (kejadian)	2	432.476.000	12	123.851.702	12	271.362.000	6	20.628.000	50	8	18	144.479.702			DINAS SOSIAL
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		1	272.535.500										-			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100	237.765.900	100	50.000.357	100	67.250.055	100	53.755.000	100	80	100	103.755.357			DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100	237.765.900	100	50.000.357	100	67.250.055	100	53.755.000	100	80	100	103.755.357			DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		1	189.466.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	7	48.299.900	12	50.000.357	12	67.250.055	12	53.755.000	100	80	24	103.755.357			DINAS SOSIAL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		99	3.989.824.113	94	3.930.022.860	100	4.484.066.616	100	4.170.412.513	100	93	97	8.100.435.373			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	309.431.251	100	209.907.900	100	223.943.500	96	215.177.152	96	96	98	425.085.052			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesesuaian antara dokumen penganggaran dan evaluasi knerja peragkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	5	149.520.400	3	20.645.400	4	38.688.000	3	38.492.327	75	99	6	59.137.727			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.991.400	1	8.000.000	1	10.000.000	1	9.936.715	100	99	2	17.936.715			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.999.500	1	8.000.000	1	10.000.000	1	9.885.500	100	99	2	17.885.500			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.903.000	1	4.999.500	1	8.000.000	1	7.893.370	100	99	2	12.892.870			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Dokumen Perubahan DPA yang selesai disusun	1	5.003.500	1	4.999.500	1	8.247.000	1	-	100	-	2	4.999.500			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlakananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3	11.124.500	3	15.000.000	3	14.960.740	100	100	6	26.085.240			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Lakip, LPPD, Monev, SPIP Selesai disusun.	5	140.013.451	3	152.139.000	3	134.008.500	3	134.008.500	100	100	6	286.147.500			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		98	2.551.794.740	96	2.469.043.073	100	2.949.513.264	100	2.678.392.221	100	91	98	5.147.435.294			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DKPP Kota Pagar Alam	762	2.445.407.200	873	2.348.915.353	14	2.272.396.236	14	2.001.275.193	100	88	887	4.350.190.546			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9	67.690.000	210	82.930.000	1	633.428.808	1	633.428.808	100	100	211	716.358.808			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verivikasi keuangan	93	29.710.000	50	26.637.720	1	38.637.720	1	38.637.720	100	100	51	65.275.440			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya laporan akhir tahun SKPD Dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	8.987.540	1	10.560.000	1	5.050.500	1	5.050.500	100	100	2	15.610.500			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	40.717.500	100	75.310.000	100	31.900.000	94	31.795.495	94	100	97	107.105.495			
Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (BELANJA MODAL)	Terlaksananya Pengadaan mesin absensi					1	1.900.000	1	1.900.000	100	100	1	1.900.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	75	40.717.500	185	75.310.000	40	30.000.000	40	29.895.495	100	100	225	105.205.495			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	493.167.403	100	424.232.180	100	361.136.252	100	349.993.080	100	97	100	774.225.260			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik/Penerangan Gedung kantor yang Tersedia	10	4.384.533	5	4.312.211	7	6.015.752	7	6.015.752	100	100	12	10.327.963			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	40	143.591.955	6	66.658.000	3	39.204.000	3	28.186.000	100	72	9	94.844.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	18	7.174.500	17	8.069.500	20	7.543.500	20	7.543.200	100	100	37	15.612.700			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5	24.099.915	6	21.516.500	8	25.251.000	8	25.251.000	100	100	14	46.767.500			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	14.250.000	4	20.150.000	6	20.160.000	6	20.150.000	100	100	10	40.300.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Laporan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah	55	299.666.500	57	303.525.969	58	262.962.000	58	262.847.128	100	100	115	566.373.097			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	81.917.568	100	248.444.000	100	236.198.415	100	95	100	318.115.983			
Pengadaan Mebel (BELANJA MODAL)	Terlakasananya Pengadaan Mebel					20	62.490.000	20	61.714.415	100	99	20	61.714.415			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BELANJA MODAL)	Terlakasananya Pengadaan Peralatn Komputer			16	81.917.568	2	185.954.000	2	174.484.000	100	94	18	256.401.568			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98,20	183.356.275	94	400.605.887	100	440.232.000	100	429.958.550	100	98	97	830.564.437			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat	1	139.557.275	10	1.500.000	150	1.500.000	150	1.500.000	100	100	160	3.000.000			
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelaksananya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12	13.879.500	12	31.355.887	12	40.332.000	12	30.058.550	100	75	24	61.414.437			
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Tenaga KerjaJasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	494	29.919.500	480	367.750.000	516	398.400.000	516	398.400.000	100	100	996	766.150.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	183.356.275	56	269.006.252	100	228.897.600	100	228.897.600	100	100	78	497.903.852			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17	139.557.275	18	129.866.252	17	135.180.000	17	135.180.000	100	100	35	265.046.252			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Tersedianya Komputer/Laptop/Printer yang diperbaiki	15	13.879.500	25	18.400.000	25	93.717.600	25	93.717.600	100	100	50	112.117.600			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	29.919.500	3	120.740.000							3	120.740.000			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN							-		-				-			
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandiraian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							-	-				-	-			
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur							-	-					-			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		100	875.784.300	91	1.161.650.340	100	550.158.007	81	521.379.394	81	95	86	1.683.029.734			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainya sesuai dengan kebutuhan Daerah / Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100	113.861.000	100	101.358.800	100	208.781.000	83	185.583.048	83	89	92	286.941.848			
Pemantau harga dan pasokan pangan	Tersusunya Dokumen Neraca Bahan Makanan	12	53.976.000	12	57.910.000	1	126.761.000	1	126.761.000	100	100	13	184.671.000			
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (BELANJA OPERASIONAL)	Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Pokok	1	59.885.000	4	43.448.800	12	46.906.000	12	45.708.048	100	97	16	89.156.848			
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100	101.735.800	100	347.149.942	100	224.770.000	100	221.554.069	100	99	100	568.704.011			
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengadaan Cadangan Pangan Beras Kota Pagar Alam	7.000	101.735.800	5.700	347.149.942	5.700	224.770.000	5.700	221.554.069	100	99	11.400	568.704.011			
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi		100	660.187.500	100	713.141.598	100	116.607.007	100	114.242.277	100	98	100	827.383.875			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersediaan Penerima Pemanfaatan P2L dan Lomba B2SA	35	621.104.900	28	674.827.198	5	76.591.007	5	74.228.577	100	97	33	749.055.775			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun	1	39.082.600	3	38.314.400	1	40.016.000	1	40.013.700	100	100	4	78.328.100			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		100	107.155.020	100	79.175.128	100	101.832.000	100	96.492.408	100	95	100	175.667.536			
Pelakasanaan Pengawasan Keamanan Panagan segar daerah Kabupaten/Kota		100	107.155.020	100	79.175.128	100	101.832.000	100	96.492.408	100	95	100	175.667.536			
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlakasananya rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	25	107.155.020	26	79.175.128	1	101.832.000	1	96.492.408	100	95	27	175.667.536			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				100	179.331.000		-		-			100	179.331.000			
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	179.331.000		-		-			100	179.331.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				17	179.331.000	-	-		-			17	179.331.000			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		100	2.893.461.629	100	2.997.515.030	100	4.596.970.700	67	2.628.360.213	67	57	84	5.625.875.243			
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		100	68.838.400	100	37.699.900	100	44.144.000	100	44.144.000	100	100	100	81.843.900			
Pelakasanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Pembuatan Lembaga Perikanan yang mepunyai legalitas hukum	35	68.838.400	12	37.699.900	12	44.144.000	12	44.144.000	100	100	24	81.843.900			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100	2.824.623.229	100	2.959.815.130	100	4.552.826.700	67	2.584.216.213	67	57	84	5.544.031.343			
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Monev Perikanan)	Terlaksananya Monitoring Produksi Perikanan	1	58.905.300	12	52.430.800	1	61.300.000	1	61.084.000	100	100	13	113.514.800			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		33	1.259.058.500	21	1.405.248.600	1	2.993.562.100	1	1.224.531.900	100	41	22	2.629.780.500			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudiayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	17	1.454.721.387	20	1.403.944.730	16	1.239.255.600	16	1.050.304.405	100	85	36	2.454.249.135			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	51.938.042	4	48.208.000	1	58.709.000	1	55.801.428	100	95	5	104.009.428			
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Pendampingan/Sosialisasi sertifikasi CBIB dan CPIB	10	252.786.400	30	49.983.000	30	200.000.000	30	192.494.480	100	96	60	242.477.480			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		100	150.112.835	36	49.983.000	100	384.890.500	48	383.015.200	48	100	42	432.998.200			
Penerbitan tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Dearah Kabupaten/Kota	100	55.387.600	100	884.382.860	100	78.065.000	100	76.831.200	100	98	100	961.214.060			
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya Dokumen AKI	1	55.387.600	35	56.775.400	35	78.065.000	35	76.831.200	100	98	70	133.606.600			
Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100	94.725.235	31	56.775.400	100	306.825.500	35	306.184.000	35	100	33	362.959.400			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penigkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tesrsedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan Dalam 1 (satu) darah kabupaten / kota	35	94.725.235	2	827.607.460	1	106.825.500	1	106.825.500	100	100	3	934.432.960			
Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Bantuan Untuk Kelompok Perikanan	14	584.058.700	21	256.691.300	1	200.000.000	1	199.358.500	100	100	22	456.049.800			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94	8.267.494.909	82	8.670.423.608	100	15.173.432.183	100	14.201.580.099	100	94	91	22.872.003.707			
Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		97	58.231.600	99	74.785.400	100	111.516.000	100	110.207.157	100	99	99	184.992.557			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	33.298.100	2	27.954.600	3	39.480.000	3	39.132.417	100	99	5	67.087.017			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	5.536.000	1	4.913.500	1	8.790.000	1	8.790.000	100	100	2	13.703.500			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4.892.000	1	4.923.500	1	8.445.000	1	8.001.600	100	95	2	12.925.100			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2.866.000	1	4.928.000	1	5.025.000	1	4.955.000	100	99	2	9.883.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2.791.000	1	4.942.500	1	7.903.000	1	7.782.340	100	98	2	12.724.840			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Junlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2	8.848.500	2	27.123.300	2	41.873.000	2	41.545.800	100	99	4	68.669.100			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		82,97	2.196.599.226	100	2.678.754.292	100	3.029.679.480	100	2.560.290.599	100	85	100	5.239.044.891			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Junlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	792	2.048.532.226	546	2.569.235.292	39	2.877.682.480	39	2.448.850.299	100	85	585	5.018.085.591			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujiaan/Verifikasi Keuangan SKPD	12	142.320.000	1	97.880.000	1	135.680.000	1	95.210.000	100	70	2	193.090.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD (Dokumen)	2	2.676.000	1	8.017.000	1	10.292.000	1	10.292.000	100	100	2	18.309.000			
koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)	4	3.071.000	1	3.622.000	1	6.025.000	1	5.938.300	100	99	2	9.560.300			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	4.800.000	100	4.800.000	100	4.800.000	100	100	100	9.600.000			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	100	100	2	9.600.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	189.000.000	100	85.320.000	100	85.320.000	100	100		274.320.000			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1	189.000.000	1	85.320.000	1	85.320.000	100	100	2	274.320.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		99,57	436.908.897	95	567.856.614	100	708.707.763	100	692.526.824	100	98	98	1.260.383.438			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	124	11.000.000	1	10.049.000	1	9.503.452	1	9.491.416	100	100	2	19.540.416			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1.250	51.067.500	1	78.321.650	1	76.625.000	1	76.477.000	100	100	2	154.798.650			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	865	22.000.000	1	27.427.988	1	49.451.311	1	49.006.150	100	99	2	76.434.138			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1	39.196.500							1	39.196.500			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18.056	12.080.000	4	36.972.520	4	28.495.000	4	28.471.250	100	100	8	65.443.770			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3.280	18.000.000	2	22.000.000	2	47.000.000	2	31.800.000	100	68	4	53.800.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia (Laporan)	348	322.761.397	68	353.888.956	1	497.633.000	1	497.281.008	100	100	69	851.169.964			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99,85	396.388.000	100	198.987.700	100	5.282.913.940	100	5.166.830.000	100	98	100	5.365.817.700			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan			1	68.667.700	6	3.339.772.000	6	3.231.000.000	100	97	7	3.299.667.700			
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan					1	1.800.000.000	1	1.793.760.000	100	100	1	1.793.760.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin		3	108.000.000										-			
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (Unit)	14	14.980.000	3	30.000.000	3	21.475.000	3	21.150.000	100	98	6	51.150.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	6	29.350.000	3	100.320.000	15	121.666.940	15	120.920.000	100	99	18	221.240.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	176.029.000										-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99	3.713.635.012	98	3.722.971.202	100	3.801.200.000	100	3.748.902.353	100	99	99	7.471.873.555			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	840	8.400.000	1	6.638.000	1	7.400.000	1	7.169.400	100	97	2	13.807.400			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang harus dibayar (Laporan)	26	23.635.012	1	29.793.202	1	36.300.000	1	26.482.953	100	73	2	56.276.155			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	3.280	3.681.600.000	1	3.686.540.000	1	3.757.500.000	1	3.715.250.000	100	99	2	7.401.790.000			
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		98,50	1.465.732.174	84	1.427.068.400	100	2.149.295.000	89	1.832.703.166	89	85	86	3.259.771.566			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	39	1.465.732.174	31	1.412.872.900	41	1.933.811.000	36	1.685.743.882	88	87	67	3.098.616.782			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)			20	14.195.500	1	201.894.000	1	137.970.284	100	68	21	152.165.784			
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi(Unit)			1	10.850.000	19	13.590.000	13	8.989.000	68	66	14	19.839.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				56	682.918.198	100	301.707.000	100	290.205.950	100	96	78	973.124.148			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				56	392.908.800							56	392.908.800			
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				1	392.908.800							1	392.908.800			
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)					290.009.398	100	301.707.000	100	290.205.950	100	96	100	580.215.348			
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJMD	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2	290.009.398	1	301.707.000	1	290.205.950	100	96	3	580.215.348			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		93,66	298.182.801	35	330.115.868	100	241.101.984	100	184.732.682	100	77	67	514.848.550			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		91,93	231.083.001	110	261.250.868	100	191.161.984	100	142.105.982	100	74	105	403.356.850			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	8	84.061.081	1	81.114.398	1	81.147.000	1	42.361.182	100	52	2	123.475.580			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Tersusunya Dokumen Pencegahan Pencemaraan dan/atau Kerusan Lingkungan Hidup	1	51.769.300	1	74.295.070	1	19.337.500	1	9.313.000	100	48	2	83.608.070			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Tersusunnya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59	95.252.620	1	93.441.400	1	90.677.484	1	90.431.800	100	100	2	183.873.200			
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100	67.099.800	98	68.865.000	100	49.940.000	100	42.626.700	100	85	99	111.491.700			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Tersusunnya Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2	67.099.800	2	68.865.000	2	49.940.000	2	42.626.700	100	85	4	111.491.700			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota															
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100	15.000.000	100	24.730.000	100	36.418.000	100	32.978.900	100	91	100	57.708.900			
Penyimpanan Sementara Limbah B3		100	15.000.000	100	24.730.000	100	36.418.000	100	32.978.900	100	91	100	57.708.900			
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	1	15.000.000	1	24.730.000	1	36.418.000	1	32.978.900	100	91	2	57.708.900			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		98	49.737.200	90	47.606.744	100	46.350.000	100	46.080.000	100	99	95	93.686.744			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/Atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		98	49.737.200	90	47.606.744	100	46.350.000	100	46.080.000	100	99	95	93.686.744			
Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	4	49.737.200	4	47.606.744	4	46.350.000	4	46.080.000	100	99	8	93.686.744			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100	12.181.000	49	38.717.800							49	38.717.800			
pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100,00	12.181.000	49	38.717.800							49	38.717.800			
Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		9	12.181.000	6	38.717.800							6	38.717.800			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						100	29.490.000		-	-	-		-			
Penyelenggaraan Pendidkan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/Kota						100	29.490.000		-	-	-		-			
Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan					1	29.490.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		82,12	74.812.200	72	260.668.720	100	972.616.000	100	950.159.115	100	98	86	1.210.827.835			
Pengelolaan Sampah		82,12	74.812.200	72	260.668.720	100	972.616.000	100	950.159.115	100	98	86	1.210.827.835			
Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan pemanfaatan Kembali		1	27.983.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan Sampah Dengan melakukan Pemilahan,Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		85	4.830.000	21.732	256.168.720							21.732	256.168.720			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengeloalaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Oara Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat	11	41.999.200			9	191.014.000	9	182.539.115	100	96	9	182.539.115			
Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah					6	760.980.000	6	747.000.000	100	98	6	747.000.000			
Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan					20.800	20.622.000	20.800	20.620.000	100	100	20.800	20.620.000			
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah				9	4.500.000							9	4.500.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		99,75	3.236.321.242	93	4.427.532.848	100	6.197.760.602	95	5.862.879.682	95	95	94	10.290.412.530			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	25.293.500	100	20.000.000	100	31.000.000	100	29.849.150	100	96	100	49.849.150			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1	5.000.000	1	4.935.100	100	99	1	4.935.100			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	6.289.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.209.800	100	95	2	10.209.800			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.434.500	1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.005.000	100	91	2	6.005.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	727.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.001.000	100	91	2	2.001.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	511.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.098.000	100	100	2	2.098.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	15.332.000	4	10.000.000	4	15.000.000	4	14.600.250	100	97	8	24.600.250			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.863.119.221	85	2.079.851.874	100	3.009.321.081	90	2.776.561.503	90	92	87	4.856.413.377			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	575	1.773.477.721	547	1.956.660.874	650	2.867.741.081	580	2.635.051.503	89	92	1.127	4.591.712.377			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76	84.720.000	92	118.210.000	1.141	136.080.000	1.141	136.080.000	100	100	1.233	254.290.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	4.921.500	1	4.981.000	1	5.500.000	1	5.430.000	100	99	2	10.411.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	148.500.000	100	79.950.000	100	79.522.555	100	99	100	228.022.555			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			300	148.500.000	60	79.950.000	60	79.522.555	100	99	360	228.022.555			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	810.029.439	100	1.241.673.000	100	1.039.276.058	100	1.026.522.474	100	99	100	2.268.195.474			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	65	1.996.000	328	9.994.000	319	7.450.840	319	7.283.000	100	98	647	17.277.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.660	304.409.840	2.903	470.967.000	1.381	411.600.218	1.381	409.390.200	100	99	4.284	880.357.200			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	222	5.275.380	516	12.207.000	300	9.694.000	300	9.693.000	100	100	816	21.900.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	46.317	101.780.140	72.211	143.119.000	57.774	103.495.000	57.774	97.170.274	100	94	129.985	240.289.274			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.390	15.156.000	3.078	19.980.000	3.710	24.980.000	3.710	20.980.000	100	84	6.788	40.960.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	550	381.412.079	980	585.406.000	220	482.056.000	220	482.006.000	100	100	1.200	1.067.412.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SKPD															
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	105.954.000	100	412.038.500	100	1.527.715.463	100	1.481.933.000	100	97	100	1.893.971.500			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1	400.000.000	1	386.000.000	100	97	1	386.000.000			
Pengadaan Mebel	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			19	386.488.500	3	69.595.335	3	68.360.000	100	98	22	454.848.500			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	105.954.000			30	1.058.120.128	30	1.027.573.000	100	97	30	1.027.573.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya				4	25.550.000							4	25.550.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98,83	312.186.382	97	321.959.865	100	385.658.000	99	358.120.708	99	93	98	680.080.573			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan' Jasa Surat Menyurat	355	5.189.000	555	7.150.000	800	8.450.000	800	7.673.000	100	91	1.355	14.823.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37	48.497.382	36	57.059.865	36	77.208.000	36	54.947.708	100	71	72	112.007.573			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	325	258.500.000	329	257.750.000	372	300.000.000	368	295.500.000	99	99	697	553.250.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	119.738.700	98	203.509.609	100	124.840.000		110.370.292	-	88	98	313.879.901			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104	119.738.700	105	119.797.609	192	124.840.000	192	110.370.292	100	88	297	230.167.901			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1	83.712.000							1	83.712.000			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		100	34.134.600	116	74.950.350	100	125.000.000	75	121.225.323	75	97	95	196.175.673			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100	34.134.600	116	74.950.350	100	75.000.000	58	74.958.000	58	100	87	149.908.350			
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	35.344	34.134.600	39.328	74.950.350	81.447	75.000.000	47.006	74.958.000	58	100	86.334	149.908.350			
Penataan Pendaftaran Penduduk																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						100	50.000.000	100	46.267.323	100	93	100	46.267.323			
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk					2.916	50.000.000	2.916	46.267.323	100	93	2.916	46.267.323			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100	34.443.400	109	74.950.600	100	125.000.000	105	124.785.048	105	100	107	199.735.648			
Pelayanan Pencatatan Sipil		100	34.443.400	109	74.950.600	100	75.000.000	108	74.877.400	108	100	109	149.828.000			
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.125	34.443.400	4.377	74.950.600	4.400	75.000.000	4.764	74.877.400	108	100	9.141	149.828.000			
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						100	50.000.000	100	49.907.648	100	100	100	49.907.648			
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					2.922	50.000.000	2.922	49.907.648	100	100	2.922	49.907.648			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				100	49.062.000	100	150.000.000	100	142.018.184	100	95	100	191.080.184			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100	49.062.000	100	150.000.000	100	142.018.184	100	95	100	191.080.184			
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1	49.062.000	1	150.000.000	1	142.018.184	100	95	2	191.080.184			
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100	49.310.450	100	74.942.500	100	75.000.000	100	72.311.000	100	96	100	147.253.500			
Penyusunan Profil Kependudukan		100	49.310.450	100	74.942.500	100	75.000.000	100	72.311.000	100	96	100	147.253.500			
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kab / Kota	140	20.900.000	2.878	28.394.000	267	36.480.000	267	35.527.000	100	97	3.145	63.921.000			
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	80	28.410.450	19.646	46.548.500	4.069	38.520.000	4.069	36.784.000	100	95	23.715	83.332.500			
DINAS DPPKBP3A																
I. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase Program Pengarustamaan Gender dan Anak	99,74	527.103.084	72	794.479.284	100	1.129.830.500	100	1.108.872.485	100	98	86	1.903.351.769			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		90,63	12.270.600	72	585.541.383	100	1.129.830.500	100	1.108.872.485	100	98	86	1.694.413.868			
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		29	12.270.600	190	305.949.922	300	694.262.500	300	677.823.600	100	98	490	983.773.522			
i. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenanangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	100,00	514.832.484	72	585.541.383	100	1.129.830.500	100	1.108.872.485	100	98	86	1.694.413.868			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Penguatan dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Orang)	200	296.185.131	190	305.949.922	300	694.262.500	300	677.823.600	100	98	490	983.773.522			
Pengembangan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	TerlaksananyaPengembangan Komunikasi informasi dan Edukasi/KIE (Triwulan)	1	218.647.353	5	279.591.461	3	435.568.000	3	431.048.885	100	99	8	710.640.346			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaa n perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota				9	208.937.901							9	208.937.901			
II. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PERLINDUNGAN PEREMPUAN	47,21	135.208.251	75	350.413.000	100	191.612.000	100	74.580.000	100	39	88	424.993.000			
ii. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	91,91	96.363.251	100	321.091.000	100	65.000.000	100	57.150.000	100	88	100	378.241.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah (Orang)	108	76.867.000	240	73.434.000	1	65.000.000	1	57.150.000	100	88	241	130.584.000			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25	19.496.251										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota				20	247.657.000							20	247.657.000			
iv. Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	20	38.845.000	27	29.322.000	100	126.612.000	55	17.430.000	55	14	41	46.752.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Orang)	4	38.845.000	8	29.322.000	56	126.612.000	26	17.430.000	46	14	34	46.752.000			
III. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100,00	880.339.804	95	656.456.482	100	1.387.224.000	100	1.281.596.153	100	92	97	1.938.052.635			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	880.339.804	95	656.456.482	100	1.387.224.000	100	1.281.596.153	100	92	97	1.938.052.635			
pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga					1	348.139.000	1	334.409.000	100	96	1	334.409.000			
advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkjatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota		33	83.828.462	250	98.549.215							250	98.549.215			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatankualitas keluarga yg mendapat peningkatan kapasitas keluarga keewenangan kabupaten/kota	12	750.288.442	15	557.907.267	200	1.039.085.000	200	947.187.153	100	91	215	1.505.094.420			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Dearah Kabupaten/Kota		5	46.222.900										-			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				93	510.317.682	100	80.000.000	100	79.997.200	100	100	96	590.314.882			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				93	510.317.682							93	510.317.682			
Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)				222	74.323.682							222	74.323.682			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kab/kota	Tersedianya data gender dan anak					1	80.000.000	1	79.997.200	100	100	1	79.997.200			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					435.994.000								435.994.000			
penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota				28	435.994.000							28	435.994.000			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		56,47	174.566.500	57	218.750.300	100	328.388.000	100	207.819.464	100	63	78	426.569.764			
pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota		89,00	58.012.000	100	74.750.000	100	239.988.000	100	119.419.464	100	50	100	194.169.464			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		89	58.012.000	12	74.750.000							12	74.750.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program/kegiatan pencegahan KTA	jumlah SDM yg memeperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program kegiatan pencegahan KTA					1	65.000.000	1	65.000.000	100	100	1	65.000.000			
Koordinasi pelayanan Layanan AMPK	jumlah AMPK yg mendapat layanan					54	174.988.000	54	54.419.464	100	31	54	54.419.464			
Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25	26.660.000	33	62.612.000							33	62.612.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		5	26.660.000	10	62.612.000							10	62.612.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		90	89.894.500	67	81.388.300	100	88.400.000	100	88.400.000	100	100	83	169.788.300			
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		27	89.894.500	4	81.388.300							4	81.388.300			
peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat daerah Kab/kota	jumlah SDM penyedia layanan yg terlatih dan mendapatakan sertifikat penanganan AMPK					1	88.400.000	1	88.400.000	100	100	1	88.400.000			
VII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100	83.388.000	83	78.644.754	100	1.129.708.000	100	1.122.580.000	100	99	92	1.201.224.754			
pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota		100	83.388.000	83	78.644.754	100	1.129.708.000	100	1.122.580.000	100	99	92	1.201.224.754			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen pengelolaan dan pelaporan data dan pengendalian lapangan dan pelayanan kb	12	83.388.000	10	78.644.754	12	186.000.000	12	185.535.000	100	100	22	264.179.754			
Pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di kampung berkualitas	Jumlah Program bangga kencana di kampung KB					12	943.708.000	12	937.045.000	100	99	12	937.045.000			
VIII. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		91,77	1.000.906.800		1.664.818.200	100	1.801.209.000	100	1.740.080.655	100	97	100	3.404.898.855			
pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB Sesuai kearifan budaya lokal		100	420.042.500		718.751.200	100	1.801.209.000	100	1.740.080.655	100	97	100	2.458.831.855			
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	12	39.600.000	11	79.431.400	5	80.000.000	5	80.000.000	100	100	16	159.431.400			
Pengelolaan Operasional dan sarana dibalai penyuluhan bangga kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	60	202.500.000	2	230.100.500	5	308.000.000	5	281.962.655	100	92	7	512.063.155			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Loka Karya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana	60	78.000.000	4	169.562.500	5	75.000.000	5	70.850.000	100	94	9	240.412.500			
Promosi dan KIE Program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen promosi KIE program bangga kencana	5	70.632.500	8	150.000.000	12	150.000.000	12	143.750.000	100	96	20	293.750.000			
Advokasi Program KKBPK kepada Satkeholder dan Mitra Kerja		100	4.360.000	4	89.656.800							4	89.656.800			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		3	24.950.000										-			
advokasi program bangga kencana oleh Pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah organisasi yg mendapatkan advokasi program bangga kencana kepada stakeholders					11	200.000.000	11	199.960.000	100	100	11	199.960.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke faskes					56	37.800.000	56	36.100.000	100	96	56	36.100.000			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah org yg mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang(MKJP)					2.100	633.942.000	2.100	624.058.000	100	98	2.100	624.058.000			
Pembinaan Pelayanann Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kespro					4	17.100.000	4	17.100.000	100	100	4	17.100.000			
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sarana Penunjang pelayanan KB					1	299.367.000	1	286.300.000	100	96	1	286.300.000			
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB?	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB?	100	168.000.000									#DIV/0!	-			
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Program KKBPK oleh Masyarakat (Ok)	148	168.000.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengedalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengedalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	74	227.514.300										-			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdapatnya Faskes yang Divisitasi, Diregistrasi dan Dibina (Faskes)	46	20.700.000										-			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pengelola dan Petugas Logistik Alokon di Fasilitas Kesehatan yang Mengikuti Bimtek (Akseptor)	1.800	147.279.300										-			
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlayaninya Peserta Akseptor MKJP yang Dilayani (Akseptor)	3	13.000.000										-			
Pembinaan Pelayanann Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terdapatnya Faskes yang Menerima Alokon (Kegiatan)	1	16.800.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlakananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Faskes (Orang)	79	29.735.000										-			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	93	185.350.000										-			
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Tercapainya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Kampung KB)	14	185.350.000										-			
IX. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		67,72	781.904.199	94	2.037.305.449	100	2.134.354.100	100	2.030.267.450	100	95	97	4.067.572.899			
Pelaksanaan Pembangunan Keluaga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		54,22	523.100.000	97	2.037.305.449	100	2.134.354.100	100	2.030.267.450	100	95	98	4.067.572.899			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi					1.229.930.449							-	1.229.930.449			
pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraaan keluarga		-			20	833.950.000	20	767.520.150	100	92	20	767.520.150			
Orientasi dan Pelatihan Tehnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		5	10.000.000	100	807.375.000							100	807.375.000			
Orientasi dan Pelatihan Tehnis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		11	10.000.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penyediaan biaya operasional bagi pengelolah dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R) dan Usaha Peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)	jumlah kader pengelola da pelaksana ,ketahanan dan kesejahteraan keluarga	161	493.100.000			309	764.950.000	309	746.710.000	100	98	309	746.710.000			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi, Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		25	10.000.000										-			
pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R) dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS)	Jumlah organisasi yg mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program kesejahteraan keluarga					3	480.454.100	3	463.357.300	100	96	3	463.357.300			
Pembentukan Dan Operasional Sekolah Lansia di kelompok BKL	Jumlah Sekolah Lansia di kelompok BKL					1	55.000.000	1	52.680.000	100	96	1	52.680.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	98	258.804.199	86	285.206.940							86	285.206.940			
Pendayaangunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Kelompok Pembinaan Tribina (BKB, BKL dan BKR) (Kelompok)	17	164.385.399	30	285.206.940							30	285.206.940			
Promosi dan Sosialisasi Promosi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Kader PKK yang Mengikuti Pelatihan LP3PKK dan Dasawisma (Orang)	76	94.418.800										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94,75	3.388.316.150	97	3.373.308.839	100	3.805.472.918	100	3.490.639.925	100	92	99	6.863.948.764			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	34.984.950	100	59.790.000	100	54.625.000	100	54.625.000	100	100	100	114.415.000			
Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Dokumen Renja yang direvisi (Dokumen)	2	4.999.500	6	10.680.000	6	11.140.000	6	11.140.000	100	100	12	21.820.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.700.000	1	6.700.000	100	100	2	12.700.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.700.000	1	6.700.000	100	100	2	12.700.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Dokumen DPA yang disusun (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.700.000	1	6.700.000	100	100	2	12.700.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun (Dokumen)	1	4.999.500	1	6.000.000	1	6.660.000	1	6.660.000	100	100	2	12.660.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dua kali/ok)	1	4.987.950	1	11.825.000	1	7.460.000	1	7.460.000	100	100	2	19.285.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Dokumen LPPD (Laporan)	1	4.999.500	1	13.285.000	1	9.265.000	1	9.265.000	100	100	2	22.550.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,22	2.180.784.428	99	2.415.846.150	100	2.609.311.080	100	2.451.255.793	100	94	99	4.867.101.943			
Penyediaan Gaji dan Tungjangan ASN	Terbayarnya Gaji,Tunjangan,beban kerja ASN (OB)	675	2.141.077.428	720	2.283.566.150	362	2.485.681.080	362	2.336.625.793	100	94	1.082	4.620.191.943			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya ASN yang diberi Tunjangan (OB)	24	34.710.000	24	132.280.000	100	117.630.000	100	108.630.000	100	92	124	240.910.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	1	4.997.000	1	5.802.500	1	6.000.000	1	6.000.000	100	100	2	11.802.500			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Adminstrasi Perangkat Daerah	100	29.150.000	100	29.699.970	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100	100	59.699.970			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut beserta Kelengkapannya (Stel)	53	29.150.000	100	29.699.970	53	30.000.000	53	30.000.000	100	100	153	59.699.970			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,18	580.445.638	97	414.133.691	100	624.712.838	100	519.154.127	100	83	98	933.287.818			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		14	8.829.700										-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	900	114.533.064	55	35.932.800	67	206.469.338	67	122.888.000	100	60	122	158.820.800			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)	288	19.310.039	365	9.998.800	365	9.995.500	365	8.963.100	100	90	730	18.961.900			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)	758	18.828.900	790	18.690.000	46	18.894.000	46	11.240.000	100	59	836	29.930.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket/lembar)	103	33.550.118	30.300	27.052.500	860	26.800.000	860	26.113.500	100	97	31.160	53.166.000			
Penyelenggaraan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	250	6.350.000	400	1.800.000	8	1.800.000	8	1.800.000	100	100	408	3.600.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	77	379.043.817	48	320.659.591	49	360.754.000	49	348.149.527	100	97	97	668.809.118			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	350.488.538	90	359.517.552	100	349.694.000	100	327.586.774	100	94	95	687.104.326			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Materai (Buah)	400	10.000.000	400	6.000.000	400	5.000.000	400	4.750.000	100	95	800	10.750.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terbayarnya Rekening Air,Listrik dan Speedy (Rekening)	36	16.488.538	16	16.017.552	36	35.694.000	36	16.836.774	100	47	52	32.854.326			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor (OB)	372	324.000.000	420	337.500.000	372	309.000.000	372	306.000.000	100	99	792	643.500.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	212.462.596	86	94.321.476	100	137.130.000	100	108.018.231	100	79	93	202.339.707			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang Layak Pakai (Unit)	43	112.662.596	42	94.321.476	46	137.130.000	46	108.018.231	100	79	88	202.339.707			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya		1	99.800.000	2	12.600.000							2	12.600.000			
DINAS PERHUBUNGAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97,07	7.797.936.684	100	5903479324	100	7.274.854.270	100	6.437.563.714	100,00	88,49	100	12.341.043.038			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	53.573.280	100	38990000	100	51.483.500	100	51.483.500	100,00	100,00	100	90.473.500			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20	4650000	20	7.675.000	20	7.675.000	100,00	100,00	40	12.325.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	5.000.000	20	4165000	20	5.625.000	20	5.625.000	100,00	100,00	40	9.790.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	6.990.000	25	6675000	25	5.180.000	25	5.180.000	100,00	100,00	50	11.855.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.005.000	15	5065000	15	7.634.500	15	7.634.500	100,00	100,00	30	12.699.500			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.000.000	16	5520000	16	7.176.000	16	7.176.000	100,00	100,00	32	12.696.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	10.158.720	15	5105000	15	8.040.000	15	8.040.000	100,00	100,00	30	13.145.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	20.419.560	23	7810000	23	10.153.000	23	10.153.000	100,00	100,00	46	17.963.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.511.344.565	100	3634696572	100	4.056.991.786	100	3.564.646.684	100,00	87,86	100	7.199.343.256			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.180.769.105	672	3315328572	644	3.696.676.786	644	3.320.126.684	100,00	89,81	1316	6.635.455.256			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108	206.760.000	132	180110000	132	203.160.000	132	139.135.000	100,00	68,49	264	319.245.000			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84	113.730.000	120	131200000	120	147.720.000	120	95.950.000	100,00	64,95	240	227.150.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	10.085.460	15	4683000	15	6.060.000	15	6.060.000	100,00	100,00	30	10.743.000			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1	3375000	1	3.375.000	1	3.375.000	100,00	100,00	2	6.750.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	218.363.000	100	352800742	100	114.353.900	100	114.108.000	100,00	99,78	100	466.908.742			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	199.320.000	97	277280442	2	114.353.900	2	114.108.000	100,00	99,78	99	391.388.442			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		75	19.043.000										-			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75	75520300							75	75.520.300			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1.318.383.243	100	817431109	100	1.084.806.740	100	1.016.855.020	100,00	93,74	100	1.834.286.129			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	41.514.700	12	41300618	12	47.552.000	12	47.545.176	100,00	99,99	24	88.845.794			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	391.025.555	12	310304180	12	411.888.740	12	411.221.192	100,00	99,84	24	721.525.372			
Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	41	106.172.788	12	21036944	12	24.264.000	12	24.129.760	100,00	99,45	24	45.166.704			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	50.391.200			12	49.950.000	12	49.727.500	100,00	99,55	12	49.727.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.000	116.440.500	12	128420613	12	80.530.000	12	80.530.000	100,00	100,00	24	208.950.613			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	49.827.000	1	43800000	1	30.000.000	1	20.000.000	100,00	66,67	2	63.800.000			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	533.041.500			12	49.994.000	12	49.907.125	100,00	99,83	12	49.907.125			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	29.970.000	55	272568754	55	390.628.000	55	333.794.267	100,00	85,45	110	606.363.021			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjung Urusan Pemerintah Daerah		100	1.098.408.000			100	217.972.000	100	180.500.000	100,00	82,81	100	180.500.000			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-			1	217.972.000	1	180.500.000	100,00	82,81	1	180.500.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - belanja personal computer		1	1.098.408.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.047.549.404	100	764320571	100	1.118.500.000	100	927.476.006	100,00	82,92	100	1.691.796.577			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	33.274.000	350	3500000	350	2.500.000	350	2.500.000	100,00	100,00	700	6.000.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	41.775.404	12	37570571	12	102.000.000	12	38.476.006	100,00	37,72	24	76.046.577			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	12	972.500.000	1200	723250000	1.200	1.014.000.000	1.200	886.500.000	100,00	87,43	2400	1.609.750.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	550.315.192	100	295240330	100	630.746.344	100	582.494.504	100,00	92,35	100	877.734.834			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	277.955.192	26	270923330	26	286.950.000	26	239.286.286	100,00	83,39	52	510.209.616			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	49.430.000	34	24317000	34	24.340.000	34	24.190.000	100,00	99,38	68	48.507.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	222.930.000			1	319.456.344	1	319.018.218	100,00	99,86	1	319.018.218			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	99	7.025.433.524	89,28	6419246603	100	8.374.617.828	100	7.739.668.109	100,00	92,42	94,64	14.158.914.712			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100	1.576.683.698	92,79	959078500							92,79	959.078.500			
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-		12	55441500							12	55.441.500			
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		50	116.998.700										-			
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		12	1.459.684.998	12	903637000							12	903.637.000			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100	4.780.541.998	100	4623536091	100	5.899.341.164	100	5.607.274.148	100,00	95,05	100	10.230.810.239			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	253	4.271.376.678	12	3831604164	12	5.306.903.352	12	5.162.387.057	100,00	97,28	24	8.993.991.221			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedia															
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2	509.165.320	12	791931927	12	592.437.812	12	444.887.091	100,00	75,09	24	1.236.819.018			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100	212.315.410	100	112525380	100	92.668.244	100	92.447.938	100,00	99,76	100	204.973.318			
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					12	92.668.244	12	92.447.938	100,00	99,76	12	92.447.938			
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		12	212.315.410	12	112525380							12	112.525.380			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100	49.996.701	100	34500700	100	49.357.200	100	49.184.738	100,00	99,65	100	83.685.438			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	49.996.701	12	34500700	12	49.357.200	12	49.184.738	100,00	99,65	24	83.685.438			
Pengujian Berkala Kendaraan				100	380758553					100,00	93,36	100				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bermotor		72,38	127.654.800			100	686.532.070	100	640.914.150				1.021.672.703			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			1	196841000	7	669.315.570	7	639.654.150	100,00	95,57	8	836.495.150			
Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor				1960	59990303							1960	59.990.303			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			1	101657250	1	17.216.500	1	1.260.000	100,00	7,32	2	102.917.250			
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	24.908.400	1	22270000							1	22.270.000			
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		30	21.727.900										-			
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		100	5.798.500										-			
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3	8.400.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	66.820.000										-			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100	58.125.750			100	1.350.952.000	100	1.181.011.985	100,00	87,42	100	1.181.011.985			
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					12	1.350.952.000	12	1.181.011.985	100,00	87,42	12	1.181.011.985			
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1	58.125.750										-			
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				100	122466029	100	105.939.500	100	67.561.500	100,00	63,77	100	190.027.529			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				1	40317000							1	40.317.000			
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi			1	36712000	1	47.718.000	1	22.316.000	100,00	46,77	2	59.028.000			
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			1	45437029	1,00	Rp58.221.500	1,00	Rp 45.245.500	100,00	77,71	2	90.682.529			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	46.799.192	100	39520850							100	39.520.850			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		12	46.799.192	12	39520850							12	39.520.850			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100	173.315.975	100	146860500	100,00	Rp 189.827.650	100,00	Rp 101.273.650	100,00	53,35	100	248.134.150			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	41.714.025	12	42645500	12,00	Rp 55.427.650	12,00	Rp 55.427.650	100,00	100,00	24	98.073.150			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	75	53.489.250	12	45302500	12,00	Rp57.871.000	12,00	Rp 10.835.000	100,00	18,72	24	56.137.500			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan SistemManajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	78.112.700	12	58912500	12,00	Rp76.529.000	12,00	Rp 35.011.000	100,00	45,75	24	93.923.500			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97,41	3.400.221.250	97	4.201.910.262	100	5.082.572.213	93	4.842.652.821	93	95	95	9.044.563.083			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase	100	34.981.500	100	30.387.050	100	34.569.000	100	32.988.050	100	95	100	63.375.100			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pernagkat Dearah /dokumen renja tersusun (Dokumen) 1 Dokumen	1	4.996.000	1	4.397.000	1	5.010.000	1	4.633.000	100	92	2	9.030.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.992.500	1	5.021.000	1	5.300.000	1	5.050.500	100	95	2	10.071.500			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	4.472.300	1	5.344.000	1	5.034.000	100	94	2	9.506.300			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	3.147.400	1	3.960.000	1	3.536.000	100	89	2	6.683.400			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.006.200	1	5.730.000	1	5.569.000	100	97	2	10.575.200			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen LKJIP yang tersusun (dokumen)	1	4.998.000	1	4.952.650	1	5.085.000	1	5.075.750	100	100	2	10.028.400			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	dokumen LPPD,SPIP (dokumen)	1	4.995.000	1	3.390.500	1	4.140.000	1	4.089.800	100	99	2	7.480.300			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95,66	1.667.581.955	100	1.802.820.596	100	2.055.485.005	99	1.954.798.304	99	95	99	3.757.618.900			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN (OB)	483	1.600.504.955	572	1.695.810.896	546	1.921.430.005	540	1.828.385.704	99	95	1.112	3.524.196.600			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terbayarnya honorarium ASN (OB)	78	62.850.000	78	101.870.000	132	128.760.000	128	121.300.000	97	94	206	223.170.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Dokumen CALK yang Tersusun (Dok)	1	4.227.000	1	5.139.700	1	5.295.000	1	5.112.600	100	97	2	10.252.300			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	40.858.000		71.500.000	100	69.791.250	#DIV/0!	98	100	110.649.250			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya (2 Paket)			88	40.858.000	130	71.500.000	130	69.791.250	100	98	218	110.649.250			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,47	1.137.003.186	99	1.598.855.500	100	2.047.870.708	87	1.955.053.705	87	95	93	3.553.909.205			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Paket Kompenen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor			5	7.731.600	116	9.925.000	25	2.000.000	22	20	30	9.731.600			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersedianya alat tulis kantor,peralatan dan perlengkapan kantor (pcs)	2.540	40.483.000	2.525	88.885.050	1.792	318.744.708	1.751	303.246.990	98	95	4.276	392.132.040			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersediannya makan dan minum kantor (bungkus)	700	9.920.000	793	23.075.000	1.864	52.812.000	1.700	47.690.300	91	90	2.493	70.765.300			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (eksampler)	225.000	864.772.130	225.345	1.003.325.460	111.942	1.019.268.000	110.000	960.419.238	98	94	335.345	1.963.744.698			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	terlaksananya rapat rfapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (ok)	321	221.828.056	198	475.838.390	350	647.121.000	348	641.697.177	99	99	546	1.117.535.567			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98,42	495.221.809	100	531.736.780	100	619.437.500	98	589.800.244	98	95	99	1.121.537.024			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersedianya jasa surat menyurat, tersedianya mateai (buah)	800	8.000.000	1.000	10.000.000	1.422	14.907.500	750	7.500.000	53	50	1.750	17.500.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	terbayarnya tagihan air bersih (PDAM)kantor, terbayarnya tagihan rekening listrik kantor (kali)	36	19.221.809	36	20.736.780	48	39.030.000	48	26.800.244	100	69	84	47.537.024			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (OB)	610	468.000.000	612	501.000.000	696	565.500.000	690	555.500.000	99	98	1.302	1.056.500.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	65.432.800	48	197.252.336	100	253.710.000	99	240.221.268	99	95	74	437.473.604			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan/operasional dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat	91	65.432.800	90	90.272.336	91	180.210.000	90	169.430.980	99	94	180	259.703.316			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya (M Persegi)			500	106.980.000	500	73.500.000	500	70.790.288	100	96	1.000	177.770.288			
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		96,66	1.572.838.960	100	1.587.526.729	100	1.981.538.250	97	1.948.332.569	97	98	99	3.535.859.298			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		96,66	1.572.838.960	100	1.587.526.729	100	1.981.538.250	97	1.948.332.569	97	98	99	3.535.859.298			
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah					814	24.368.500	814	24.348.000	100	100	814	24.348.000			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terlaksanannya penyelenggaraan Penyiaran radio besemah FM, terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik'	100	69.548.960	100	3.626.261	105	349.421.750	105	346.438.061	100	99	205	350.064.322			
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Sumber Daya Komunikasi Publik (4 Orang)			32	70.456.868	272	37.418.000	272	37.076.508	100	99	304	107.533.376			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan KemitraanKomunitas(Dinas Komunikasi dan Informatika)	Terlaksananya publikasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (Jumlah dokumen kemitraan dengan media masyarakat dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan pemerintah Derah) 3 Dok	4.014	1.503.290.000	4.010	1.513.443.600	300	1.570.330.000	295	1.540.470.000	98	98	4.305	3.053.913.600			
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		39,23	730.985.645	100	156.407.050	100	2.681.394.800	6	2.562.723.489	6	96	53	2.719.130.539			
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		98,31	244.688.700	100	45.785.550	100	189.442.000	90	160.941.840	90	85	95	206.727.390			
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konten beritawebsite yang di tambahkan, jumlah koordinasi ke provinsi yang dilaksanakan, jumlah website domain yang dikelola, jumlah website sub domain yang	94	44.688.700	23	45.785.550	333	189.442.000	300	160.941.840	90	85	323	206.727.390			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	terintegrasi															
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2	200.000.000										-			
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		9,31	486.296.945	100	110.621.500	100	2.491.952.800	53	2.401.781.649	53	96	77	2.512.403.149			
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika)		140	24.000.000	150	33.826.500							150	33.826.500			
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1	21.938.800										-			
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah bandwidth internet statik ruang server dan CCTV online titik, jumla internet wifi.id titik	150	396.892.400	168	76.795.000	110	2.341.522.000	108	2.289.001.770	98	98	276	2.365.796.770			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(Dinas Komunikasi dan Informatika)																
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE (Dinas Komunikasi dan Informatika)	jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan SPBE	2	43.465.745			300	150.430.800	225	112.779.879	75	75	225	112.779.879			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		96	75.731.000	100	86.118.257	100	179.159.000	46	152.251.454	46	85	73	238.369.711			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		96	75.731.000	100	86.118.257	100	179.159.000	93	152.251.454	93	85	97	238.369.711			
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	tersediannya penyusunan dan pengumpulan data	430	48.750.000	430	86.118.257	449	82.607.000	448	82.333.550	100	100	878	168.451.807			
Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral	tersediannya penyusunan dan pengumpulan data	95	26.981.000			286	96.552.000	250	69.917.904	87	72	250	69.917.904			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100	9.052.000	81	11.666.450	100	40.390.820	139	39.332.997	139	97	110	50.999.447			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	9.052.000										-			
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		432	9.052.000										-			
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi				81	11.666.450	100	40.390.820	139	39.332.997	139	97	110	50.999.447			
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah laporan tatakelola informasi dan jaring komunikasi sandi yang disusun			350	11.666.450	573	40.390.820	560	39.332.997	98	97	910	50.999.447			
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		96,21	5.858.518.340	99	5.997.867.528	100	10.095.319.621	81	6.509.404.103	81	64	90	12.507.271.631			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.405.150	91	44.795.000	8	21.960.000	101	21.860.000	1.268	100	96	66.655.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	4.130.000	1	2.640.000	1	2.540.000	100	96	2	6.670.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2023 yang tersedia (dokumen)	1	4.413.000	1	7.600.000	1	3.445.000	1	3.445.000	100	100	2	11.045.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan TA 2023 (dokumen)	1	4.703.000	1	7.500.000	1	3.315.000	1	3.315.000	100	100	2	10.815.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA TA 2023 (dokumen)	1	4.709.000	1	5.150.000	1	2.915.000	1	2.915.000	100	100	2	8.065.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan Tahun 2023 (dokumen)	1	4.413.000	1	5.150.000	1	2.915.000	1	2.915.000	100	100	2	8.065.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Lkjip (dokumen)	2	6.294.650	1	9.150.000	1	3.775.000	1	3.775.000	100	100	2	12.925.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LPPD SKPD(dokumen)	1	4.872.500	1	6.115.000	1	2.955.000	2	2.955.000	200	100	3	9.070.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	4.946.388.728	100	5.119.463.150		6.239.851.389		5.739.691.157	#DIV/0!	92	100	10.859.154.307			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan yang dibayar dalam setahun	1.144	4.874.424.228	1.230	4.995.533.150	1.392	6.083.271.389	1.392	5.588.314.657	100	92	2.622	10.583.847.807			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium yang dibayar dalam setahun	59	67.930.000	135	123.930.000	173	152.580.000	159	151.376.500	92	99	294	275.306.500			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang dibuat (dokumen)	1	4.034.500	1	5.000.000	1	4.000.000	5	4.000.000	500	100	6	9.000.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60	35.000.000	60	22.500.000	60	22.477.500	100	100	60	57.477.500			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan(paket)			70	35.000.000	30	22.500.000	60	22.477.500	200	100	130	57.477.500			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		96	276.991.236	89	386.126.257		352.539.232	183	348.037.220	#DIV/0!	99	136	734.163.477			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						82	3.639.225	178	3.635.000	217	100	178	3.635.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	899	51.676.522	1.008	52.976.950	184	50.475.500	653	50.040.500	355	99	1.661	103.017.450			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (jenis)	17	7.155.000	179	6.902.230	141	4.082.800	318	4.082.500	226	100	497	10.984.730			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (lbr)	19.560	15.548.500	20.000	15.537.090	16.776	12.643.000	30.287	12.639.500	181	100	50.287	28.176.590			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	960	7.200.000	1.025	8.750.000	1.500	8.200.000	3.100	7.975.000	207	97	4.125	16.725.000			
Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/Material dalam 1 Tahun					31	7.556.707	86	7.555.776	277	100	86	7.555.776			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dalam 1 Tahun (Kali)	36	195.411.214	81	301.959.987	67	265.942.000	98	265.743.944	146	100	179	567.703.931			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	197.612.950	100	198.166.000	2	180.080.000	2	179.710.000	100	100	51	377.876.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			1	198.166.000	2	65.350.000	16	64.980.000	800	99	17	263.146.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	15	197.612.950			10	114.730.000	14	114.730.000	140	100	14	114.730.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	302.579.226	99	306.367.305		316.510.000		302.383.290	#DIV/0!	96	99	608.750.595			
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia															

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(buah)	500	5.000.000	788	4.620.000	250	2.500.000	280	2.500.000	112	100	1.068	7.120.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan internet yang dibayar (lembar tagihan)	24	21.367.226	24	23.707.305	24	37.440.000	24	23.313.290	100	62	48	47.020.595			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang terelihara (unit)	4	3.212.000	11	5.040.000	5	3.570.000	15	3.570.000	300	100	26	8.610.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor (org)	336	273.000.000	336	273.000.000	336	273.000.000	336	273.000.000	100	100	672	546.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93,86	303.154.000	97	106.115.816		82.480.000		74.954.936	#DIV/ 0!	91	97	181.070.752			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Laik jalan (unit)	17	79.343.000	35	73.763.334	38	59.310.000	90	58.650.000	237	99	125	132.413.334			
penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak (Unit)	63	24.994.000	73	19.602.482	82	23.170.000	110	16.304.936	134	70	183	35.907.418			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	198.817.000	1	12.750.000							1	12.750.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				46	163.464.800	1	55.042.000	2	55.000.000	200	100	24	218.464.800			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0	163.464.800	1	55.042.000	2	55.000.000	200	100	1	218.464.800			
Penyusunan Rencan Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Rencana Umum PM			0	163.464.800	1	55.042.000	2	55.000.000	200	100	2	218.464.800			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		100	151.858.250	67	105.202.074		250.000.000	4	237.968.000	#DIV/0!	95	35	343.170.074			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		100	151.858.250	67	105.202.074		150.000.000		137.968.000	#DIV/0!	92	67	243.170.074			
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal(dokumen)	1	151.858.250	2	105.202.074	2	150.000.000	2	137.968.000	100	92	4	243.170.074			
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan	Jumlah Dokumen StrategiPromosi Penanaman					1	100.000.000	2	100.000.000	200	100	2	100.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kab/Kota	Modal															
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				54	125.227.000	2	199.986.000	1	185.381.740	50	93	28	310.608.740			
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						1	99.986.000	2	98.375.740	200	98	2	98.375.740			
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					1	99.986.000	2	98.375.740	200	98	2	98.375.740			
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota				54	67.175.000							54	67.175.000			
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				1	67.175.000								67.175.000			
Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota				100	58.052.000	1	100.000.000	1	87.006.000	100	87	51	145.058.000			
Peningkatan Perlindungan danKompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya			1	58.052.000	1	100.000.000	1	87.006.000	100	87	2	145.058.000			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIALIS		100	16.090.000	100	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	51	100.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1(Satu) Kab/Kota		100	16.090.000	100	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100	100	51	100.000.000			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialis dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur skala upah, dan Bripartit) dan pekerja yang terdaftar sebagaipeserta Jamsostek serta pengupahan	1	16.090.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	50.000.000	300	100	4	100.000.000			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100	140.214.000	100	259.007.058	100	169.554.000	100	117.200.000	100	69	100	376.207.058			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		100	62.032.000	100	259.007.058	144	169.554.000		117.200.000	-	69	100	376.207.058			
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal		144	62.032.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPrizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha)	1	78.182.000	2	154.382.058	1	37.954.000			-	-	2	154.382.058			
Pemantauan,analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)			144	64.600.000	144	94.800.000	210	80.400.000	146	85	354	145.000.000			
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Mengikuti Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)			100	40.025.000	1	36.800.000	1	36.800.000	100	100	101	76.825.000			
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		71,51	253.463.800	158	158.204.712		381.740.000		307.961.014	#DIV/0!	81	158	466.165.726			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		71,51	253.463.800	69	158.204.712		381.740.000		307.961.014	#DIV/0!	81	69	466.165.726			
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PelakuUSaha)					12	38.640.700			-	-	-	-			
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PelakuUSaha)					12	264.345.518	9	231.145.232	75	87	9	231.145.232			
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)					80	78.753.782	110	76.815.782	138	98	110	76.815.782			
Koordinasi dan Sikronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		3	156.863.800	8	74.009.712							8	74.009.712			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		12	96.600.000	58	84.195.000							58	84.195.000			
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100	53.094.500	100	29.977.000	100	22.500.000	100	75	100	75.594.500			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota				100	53.094.500	1	29.977.000	1	22.500.000	100	75	51	75.594.500			
Pengelolaan,Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (dokumen)			1	53.094.500	1	29.977.000	1	22.500.000	100	75	2	75.594.500			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100	339.471.443	100	349.179.000							100	349.179.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100	339.471.443	100	349.179.000							100	349.179.000			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		1	339.471.443	1	349.179.000							1	349.179.000			
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		92,25	2.165.619.617	96	3.015.058.899	100	3.604.619.634	97	3.389.316.995	97	94	97	6.404.375.894			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	18.499.900	95	106.670.465	100	33.825.000	100	33.825.000	100	100	98	140.495.465			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja yang tersusun (Dokumen)	1	2.499.900	1	5.240.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.240.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	4.000.000	1	4.506.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.506.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (Dokumen)	1	4.000.000	1	4.531.500	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.531.500			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang tersusun (Dokumen)	1	1.000.000	1	1.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	6.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (Dokumen)	1	1.000.000	1	1.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	6.000.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (Dokumen)	1	6.000.000	10	90.392.965	1	8.825.000	1	8.825.000	100	100	11	99.217.965			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		92	1.408.537.607	95	1.708.030.202	100	2.099.161.684	96	2.021.502.588	96	96	95	3.729.532.790			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan, Beban Kerja ASN (OB)	230	1.293.677.807	417	1.540.592.202	442	1.928.001.684	425	1.853.942.588	96	96	842	3.394.534.790			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium ASN Per bulan	202	108.360.000	198	150.470.000	204	147.120.000	199	143.520.000	98	98	397	293.990.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun (Dokumen)	1	3.999.800	1	11.362.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	16.362.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terbayarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			12	2.184.000	12	14.040.000	12	14.040.000	100	100	24	16.224.000			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran yang Tersusun	12	2.500.000	6	3.422.000	12	5.000.000	12	5.000.000	100	100	18	8.422.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	293.084.912	100	462.378.714	100	553.290.150	100	553.055.519	100	100	100	1.015.434.233			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia (pcs)	52	39.262.300	60	74.647.000	1.638	76.576.650	1.638	76.576.650	100	100	1.698	151.223.650			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	31	19.009.250	35	26.935.000	621	30.434.000	621	30.434.000	100	100	656	57.369.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (pcs)	21.995	12.097.000	15.850	20.725.000	94	41.953.500	94	41.953.500	100	100	15.944	62.678.500			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia (Bulan)	12	39.975.000	16	38.100.000	40	42.300.000	40	42.300.000	100	100	56	80.400.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah, Forum Sekretaris Daerah (kali/orang)	35	182.741.362	6	301.971.714	136	362.026.000	136	361.791.369	100	100	142	663.763.083			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87	361.505.976	97	408.044.048	100	411.568.000	99	404.753.888	99	98	98	812.797.936			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	440	4.400.000	500	5.000.000	550	5.500.000	550	5.500.000	100	100	1.050	10.500.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan Internet yang dibayar (lembar tagihan)	26	30.105.976	8	23.544.048	12	28.068.000	10	22.003.888	83	78	18	45.547.936			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1	7.500.000							1	7.500.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS yang mendapat Honor Orang / Bulan	396	327.000.000	444	372.000.000	444	378.000.000	443	377.250.000	100	100	887	749.250.000			
Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	3.680.000	100	140.600.500	100	129.036.800	99	127.200.000	99	99	99	267.800.500			
Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari dan Kursih Manajer Yang dibeli			3	53.270.000	21	50.772.000	20	49.500.000	97	97	23	102.770.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop,Komputer, dan Printer Dinas yang Dibeli	1	3.680.000	6	87.330.500	10	78.264.800	10	77.700.000	99	99	16	165.030.500			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	80.311.222	100	189.334.970	100	377.738.000	100	376.180.000	100	100	100	565.514.970			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4	74.471.222	4	74.494.970	4	108.080.000	4	108.080.000	100	100	8	182.574.970			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	8	5.840.000	8	5.840.000	14	10.020.000	14	10.020.000	100	100	22	15.860.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	109.000.000	1	259.638.000	1	258.080.000	100	99	2	367.080.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		99,41	1.522.978.890	100	94.702.000	100	233.063.250	100	231.637.250	100	99	100	326.339.250			
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota,wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota		99,41	1.522.978.890	100	94.702.000	100	211.308.250	100	209.882.250	100	99	100	304.584.250			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	1	29.942.000	1	25.833.000	1	60.000.840	1	60.000.840	100	100	2	85.833.840			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang dikirim	1	39.271.500	1	50.641.000	1	111.257.410	1	109.831.410	100	99	2	160.472.410			
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan, Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Memperingati Hari Sumpah Pemuda	1	4.455.000	1	18.228.000	1	20.050.000	1	20.050.000	100	100	2	38.278.000			
Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasi	Terlaksananya Kegiatan Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasi	1	786.569.700			1	20.000.000	1	20.000.000	100	100	1	20.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan pasukan pengibar bendera		1	662.740.690										-			
Pemberdayaan dan pengembangan dan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten atau kota						100	21.755.000	100	21.755.000	100	100	100	21.755.000			
peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatanpeningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota					1	21.755.000	1	21.755.000	100	100	1	21.755.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		98	3.154.713.032	100	2.144.016.146	100	1.667.158.500	97	1.517.362.000	97	91	99	3.661.378.146			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		96	1.734.242.842	100	1.112.669.000	100	1.071.518.000	100	995.490.000	100	93	100	2.108.159.000			
Penyelenggaraan Kejuaraan pekan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Bola Volly, Sepak Bola, Bola Basket dan Bulutangkis	2	234.505.000	1	101.669.000	4	566.230.000	4	530.890.000	100	94	5	632.559.000			
Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Pembinaan Cabang Olahraga di Kota Pagar Alam	3	750.000.000	1	1.011.000.000	1	505.288.000	1	464.600.000	100	92	2	1.475.600.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi						100	93.943.500	49	45.870.000	49	49	49	45.870.000			
pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota					1	48.073.500	-	-	-	-	-	-			
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga					1	45.870.000	1	45.870.000	100	100	1	45.870.000			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		99,67	1.420.470.190	100	1.031.347.146	100	501.697.000	100	476.002.000	100	95	100	1.507.349.146			
Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Terlaksananya kegiatan senam massal dan Gerak Jalan	49	452.123.250	2	260.029.000	2	327.299.000	2	301.604.000	100	92	4	561.633.000			
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		12	968.346.940	16	771.318.146	129	174.398.000	129	174.398.000	100	100	145	945.716.146			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	500.000.000	100	510.575.000	100	417.219.000	100	416.800.000	100	100	100	927.375.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100	500.000.000	100	510.575.000	100	417.219.000	100	416.800.000	100	100	100	927.375.000			
Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	Jumlah kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	2	500.000.000	1	510.575.000	1	417.219.000	1	416.800.000	100	100	2	927.375.000			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIAPAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		91,91	2.616.995.324	100	2.906.206.507	100	3.087.895.570	100	2.961.517.673	100	96	100	5.867.724.180			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah		100	17.846.500	100	18.818.500	100	27.185.000	100	27.185.000	100	100	100	46.003.500			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Kerja	1	2.476.500	1	2.767.500	1	4.899.000	1	4.899.000	100	100	2	7.666.500			
Koordinasi dan Penyusunan Dokuman RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.953.000	1	2.580.000	1	4.025.000	1	4.025.000	100	100	2	6.605.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.987.000	1	5.051.000	1	5.051.000	1	5.051.000	100	100	2	10.102.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	1.652.000	1	1.760.000	1	3.185.000	1	3.185.000	100	100	2	4.945.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.150.000	1	2.420.000	1	4.025.000	1	4.025.000	100	100	2	6.445.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip yang tersusun (dokumen)	1	1.779.000	1	2.170.000	1	2.520.000	1	2.520.000	100	100	2	4.690.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LPPD yang tersusun (dokumen)	1	1.849.000	1	2.070.000	1	3.480.000	1	3.480.000	100	100	2	5.550.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		83,56	1.900.730.981	88	2.078.970.812	100	2.347.348.570	100	2.245.537.755	100	96	94	4.324.508.567			
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	328	1.859.733.981	360	1.950.020.812	12	2.190.873.570	12	2.089.062.755	100	95	372	4.039.083.567			
Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium ASN (OB)	33	38.910.000	8	126.310.000	7	152.280.000	7	152.280.000	100	100	15	278.590.000			
Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun (dokumen)	1	2.087.000	1	2.640.000	1	4.195.000	1	4.195.000	100	100	2	6.835.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	12.500.000	100	25.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	100	100	40.000.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakai yang tersedia (stel)	36	12.500.000	36	25.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	100	100	76	40.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		56,46	348.394.182	85	331.060.319	100	258.690.000	100	254.052.952	100	98	93	585.113.271			
Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	306	5.490.000	136	6.072.000	15	6.652.000	15	6.652.000	100	100	151	12.724.000			
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.001	27.010.500	1.335	21.719.400	39	19.696.000	39	18.090.800	100	92	1.374	39.810.200			
Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (pcs)	403	12.202.100	403	12.924.950	23	11.354.000	23	11.354.000	100	100	426	24.278.950			
Penyedian Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (lembar)	12.576	12.744.000	12.576	14.113.000	6	12.574.000	6	10.776.500	100	86	12.582	24.889.500			
Penyedian Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	504	7.428.000	1.008	8.700.000	1.008	6.300.000	1.008	6.300.000	100	100	2.016	15.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (orang)	10	248.473.582	50	218.601.969	21	171.380.000	21	170.979.652	100	100	71	389.581.621			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tersedianya Alat dan Bahan Kantor (unit)	0,33	35.046.000	1	48.929.000	6	30.734.000	6	29.900.000	100	97	7	78.829.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		75,27	238.596.528	100	259.249.876	100	259.718.000	100	241.959.091	100	93	100	501.208.967			
Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (Lembar)	255	2.700.000	255	3.840.000	350	3.500.000	350	3.500.000	100	100	605	7.340.000			
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening /tagihan Listrik, Air, dan Telp(Speedy) yang dibayar (Rekening tagihan)	36	24.396.528	48	24.409.876	36	43.218.000	36	25.459.091	100	59	84	49.868.967			
Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor dan jasa tenaga keamanan (OB)	189	211.500.000	252	231.000.000	23	213.000.000	23	213.000.000	100	100	275	444.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		51,47	98.927.133	100	193.107.000	100	179.954.000	100	177.782.875	100	99	100	370.889.875			
Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	4	96.007.133	7	92.959.000	7	79.370.000	7	78.098.875	100	98	14	171.057.875			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer dan laptop (unit)	4	2.920.000	4	2.920.000	4	2.920.000	4	2.920.000	100	100	8	5.840.000			
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Terpeliharanya komputer dan laptop (unit)			1	97.228.000	1	97.664.000	1	96.764.000	100	99	2	193.992.000			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		64,42	382.197.500	100	261.314.819	100	507.679.452	100	486.442.784	100	96	100	747.757.603			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	141.701.000	100	115.120.535	100	307.247.750	99	293.153.234	99	95	100	408.273.769			
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan Elektrnik yang Dikembangkan dengan Manejemen Layanan TIK yang Berbasis ISO2000	72	41.365.000	72	65.854.427	10	82.218.000	10	71.238.384	100	87	82	137.092.811			
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Satandar Nasional Perpustakaan	45	28.805.000	45	38.507.408	40	21.620.250	40	21.473.750	100	99	85	59.981.158			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerahn Kabupaten/Kota		50	30.697.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200	30.410.000			2	1.990.000	2	-	100	-	2	-			
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	450	10.424.000	450	10.758.700	200	10.099.500	200	9.841.100	100	97	650	20.599.800			
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19,97	240.496.500	22	146.194.284	100	200.431.702	100	193.289.550	100	96	61	339.483.834			
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1	139.951.500	2	112.684.335	100	42.536.802	100	41.867.000	100	98	102	154.551.335			
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota					12	82.794.000	12	82.794.000	100	100	12	82.794.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Sosial di Wilayah Kabuptaen/Kota yang Dikembangkan	20	100.545.000	40	33.509.949	40	75.100.900	40	68.628.550	100	91	80	102.138.499			
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN KUNO						100	35.788.250	100	35.604.550	100	99	100	35.604.550			
Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						100	35.788.250	100	35.604.550	100	99	100	35.604.550			
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmedian Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunkan					3	28.388.250	3	28.234.550	100	99	3	28.234.550			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tersedian Alat dan Bahan Kantor					1	7.400.000	1	7.370.000	100	100	1	7.370.000			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		70,27	174.490.150	86	252.905.620	100	297.259.000	100	271.126.154	100	91	93	524.031.774			
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	33,33	43.060.000	100	33.194.900	200	71.659.000	100	68.899.154	50	96	100	102.094.054			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Pembinaan arsip pada OPD dan jumlah pemilahan dan pengklasifikasi data arsip in aktif (OPD)	5	43.060.000	15	33.194.900	20	16.000.000	20	16.000.000	100	100	35	49.194.900			
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan arsip pada OPD dan jumlah pemilahan dan pengklasifikasi data arsip in aktif (OPD)					16	51.659.000	16	48.899.154	100	95	16	48.899.154			
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100	54.326.000			100	57.136.000	100	52.841.800	100	92	100	52.841.800			
Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Pembinaan arsip pada OPD dan jumlah pemilahan dan pengklasifikasi data arsip in aktif (OPD)	40	54.326.000			40	57.136.000	40	52.841.800	100	92	40	52.841.800			
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100	77.104.150	100	219.710.720	100	168.464.000	100	149.385.200	100	89	100	369.095.920			
Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Layanan Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	0,33	34.154.150	1	135.846.495	1	95.990.000	1	94.324.200	100	98	2	230.170.695			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15	42.950.000	15	47.064.225	17	72.474.000	17	55.061.000	100	76	32	102.125.225			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						100	47.201.000	100	43.553.464	100	92	100	43.553.464			
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun						100	47.201.000	100	43.553.464	100	92	100	43.553.464			
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terhapusnya Data Kearsipan					1	47.201.000	1	43.553.464	100	92	1	43.553.464			
DINAS PARIWISATA																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,08	5.040.183.842	99	5.871.571.739	100	5.813.258.171	93	5.576.179.172	93	96	96	11.447.750.911			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	379.513.600	100	154.805.200	100	83.560.000	100	83.560.000	100	100	100	238.365.200			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	285.805.800	4	29.555.500	2	12.000.000	2	12.000.000	100	100	6	41.555.500			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15.748.000	1	29.466.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	39.466.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	11.760.000	1	13.060.000	1	8.500.000	1	8.500.000	100	100	2	21.560.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15.468.000	1	10.425.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	20.425.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	16.680.000	1	15.512.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	25.512.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	15.551.800	3	12.090.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100	100	5	22.090.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	18.500.000	1	44.696.700	1	23.060.000	1	23.060.000	100	100	2	67.756.700			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.680.162.430	100	2.751.534.087	100	3.059.479.671	88	2.899.126.253	88	95	94	5.650.660.340			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	874	2.439.432.230	884	2.472.859.787	1.036	2.711.163.671	896	2.566.284.453	86	95	1.780	5.039.144.240			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN /Jumlah ASN yang menerima Honorarium	180	202.560.000	228	211.150.000	228	265.560.000	228	250.560.000	100	94	456	461.710.000			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	15.000.000	1	21.965.800	1	20.014.000	1	19.539.800	100	98	2	41.505.600			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	9.426.200	1	13.036.500	1	11.369.000	1	11.369.000	100	100	2	24.405.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10.000.000	1	26.960.000	1	25.309.000	1	25.309.000	100	100	2	52.269.000			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	3.744.000	1	5.562.000	1	12.354.000	1	12.354.000	100	100	2	17.916.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD					1	13.710.000	1	13.710.000	100	100	1	13.710.000			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Adminisitrasi Pendapatan	100	48.416.000	100	14.475.200	100	13.914.000	100	13.914.000	100	100	100	28.389.200			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		1	41.416.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelohan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah			1	10.487.200	1	7.440.000	1	7.440.000	100	100	2	17.927.200			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	7.000.000	1	3.988.000	1	6.474.000	1	6.474.000	100	100	2	10.462.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Adminisitrasi Kepegawaian Peranggkat	100	88.310.000	100	315.741.700	100	278.152.000	100	277.952.000	100	100	100	593.693.700			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	133	44.950.000	140	49.950.000	112	75.500.000	112	75.500.000	100	100	252	125.450.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	43.360.000	30	265.791.700	22	202.652.000	22	202.452.000	100	100	52	468.243.700			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.201.548.289	100	1.386.355.784	100	1.330.500.700	99	1.325.452.227	99	100	100	2.711.808.011			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	13.634.000	17	14.286.000	12	14.287.000	12	14.177.000	100	99	29	28.463.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.885	176.994.900	88	126.114.000	12	76.912.000	10	76.342.000	83	99	98	202.456.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	790	49.073.800	56	57.689.300	35	29.999.200	35	29.996.900	100	100	91	87.686.200			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50.160	46.401.000	20	37.930.000	12	21.087.000	12	20.348.000	100	96	32	58.278.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Setahunn	216	22.900.000	45	49.216.000	12	49.740.000	12	49.740.000	100	100	57	98.956.000			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia			12	264.791.500	12	215.987.500	12	212.510.000	100	98	24	477.301.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dalam setahun															
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206	892.544.589	307	836.328.984	247	922.488.000	247	922.338.327	100	100	554	1.758.667.311			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kantor			100	591.208.985	100	176.549.000	96	168.599.000	96	95	98	759.807.985			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BELANJA MODAL)				1	469.600.000								469.600.000			
Pengadaan Mebel (BELANJA MODAL)				66	50.099.985								50.099.985			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BELANJA MODAL)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			8	71.509.000	100	169.049.000	100	168.599.000	100	100	108	240.108.000			
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah peralatan Jaringan yang tersedia					1	7.500.000	-	-	-	-	-	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100	477.288.535	100	545.035.614	100	676.278.000	100	621.045.524	100	92	100	1.166.081.138			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000	12.000.000	1.200	12.000.000	12	14.400.000	12	14.400.000	100	100	1.212	26.400.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	33.288.535	12	38.035.614	12	49.878.000	12	33.895.524	100	68	24	71.931.138			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	576	432.000.000	612	495.000.000	792	612.000.000	792	572.750.000	100	94	1.404	1.067.750.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Pemerintah daerah Yang dipelihara (Aset)	78,64	164.944.988	60	112.415.169	100	194.824.800	100	186.530.168	100	96	80	298.945.337			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	135.522.688	9	95.195.169	18	180.224.800	18	172.243.576	100	96	27	267.438.745			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Yang diperbaiki dalam setahun (unit)	48	29.422.300	45	17.220.000	20	14.600.000	20	14.286.592	100	98	65	31.506.592			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100	1.953.582.000	100	1.051.280.288	100	3.358.930.866	100	3.286.849.780	100	98	100	4.338.130.068			
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						100	120.000.000	100	120.000.000	100	100	100	120.000.000			
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata					2	120.000.000	2	120.000.000	100	100	2	120.000.000			
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata Yang di kelola Pemerintah dan Masyarakat Yang Termasuk Di Dalam Kawasan strategis Pariwisata	100	234.754.000	100	901.280.288	100	2.404.745.500	100	2.333.277.000	100	97	100	3.234.557.288			
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		10	234.754.000	14	183.134.538								183.134.538			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dan dipelihara dalam pengelolaan kawasan strategis Pariwisata (Pembangunan Dempo Park DAK dan Pembangunan Villa Besemah APBD)			7	658.145.750	21	2.404.745.500	21	2.333.277.000	100	97	28	2.991.422.750			
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota				40	60.000.000								60.000.000			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100	1.187.306.000			100	555.323.942	100	554.974.380	100	100	100	554.974.380			
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pembangunan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi) 5 Lokasi : Rimau, Tangga 2002, Lapangan EX MTQ, Kampung 4, Tebat Gheban.	167	1.187.306.000			23	365.381.942	23	365.257.400	100	100	23	365.257.400			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten / kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota (Study Tiru)					1	189.942.000	1	189.716.980	100	100	1	189.716.980			
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	100	531.522.000	100	150.000.000	100	278.861.424	100	278.598.400	100	100	100	428.598.400			
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang dibina dan diawasi	16	371.461.000			30	81.145.424	30	81.002.000	100	100	30	81.002.000			
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota		30	100.000.000	30	150.000.000								150.000.000			
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat kab/kota					30	118.051.000	30	117.931.400	100	100	30	117.931.400			
Kesediaan Pelaku Usaha memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang bersedia memenuhi standar usaha pariwisata					30	79.665.000	30	79.665.000	100	100	30	79.665.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota		30	60.061.000										-			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100	2.353.691.000	100	2.448.348.058	100	2.029.381.000	100	1.941.280.873	100	96	100	4.389.628.931			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwista dalam dan Lauar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan strategis Yang di laksanakan	100	2.353.691.000	100	2.448.348.058	100	2.029.381.000	100	1.941.280.873	100	96	100	4.389.628.931			
Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Infromasi Pariwisata Kab / Kota baik dalam dan luar negeri (Booklet Leaflet)/pengelola website dan Belanja Modal peralatan studio Audio / Podcast pariwisata					6	306.156.000	6	305.976.000	100	100	6	305.976.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri (Festival Budaya dalam Provinsi, Festival Budaya Luar Provinsi, Besemah Expo, Event Offroad, Pameran Tingkat Nasional, PPS)	24	1.032.957.000	5	1.548.472.208	6	1.315.877.000	6	1.228.090.073	100	93	11	2.776.562.281			
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri (BGP)	9	1.320.734.000	6	899.875.850	1	407.348.000	1	407.214.800	100	100	7	1.307.090.650			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100	914.339.003	100	1.041.550.080	100	804.430.000	100	802.363.721	100	100	100	1.843.913.801			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Zona Kreatif / Ruang Kreatif / Kota Kreatif	100	199.429.303	100	274.398.900	100	198.646.000	100	197.770.000	100	100	100	472.168.900			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Pengadaan Alat Musik Modern)	2	199.429.303	10	274.398.900	33	198.646.000	33	197.770.000	100	100	43	472.168.900			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif			100	767.151.180	100	605.784.000	100	604.593.721	100	100	100	1.371.744.901			
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (sosialisasi)			3	692.106.680	1	130.253.000	1	129.210.387	100	99	4	821.317.067			
Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif / Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Festival Kopi			1	75.044.500	1	475.531.000	1	475.383.334	100	100	2	550.427.834			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			100	784.441.000	100	1.827.507.500	100	1.801.569.849	100	99	100	2.586.010.849			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif Yang Di Latih			100	784.441.000	100	1.827.507.500	100	1.801.569.849	100	99	100	2.586.010.849			
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif / Pelatihan Pemasaran Digital (DAK Non Fisik)	155	298.752.500	55	231.937.000	82	152.874.000	82	152.874.000	100	100	137	384.811.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh perberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata (Pelatihan peningkatan inovasi dan kuliner 72 org DAK, Pelatihan pemandu wisata theme park 82 org DAK, Pelatihan Arung Jeram 60 org DAK, Pelatihan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata 60 org DAK, Pelatihan Homestay 60 org DAK, Pelatihan Pengelolaan Toilet di disetinasi wisata 60 org DAK)					406	1.120.125.500	406	1.094.604.000	100	98	406	1.094.604.000			
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata (Sertifikasi perhotelan + sertifikasi Pemandu Gunung + Sertifikasi Barista)	60	88.553.000			72	554.508.000	72	554.091.849	100	100	72	554.091.849			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		70	97.610.600	60	329.153.000							60	329.153.000			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		60	91.350.000	50	223.351.000							50	223.351.000			
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		17	250.963.000										-			
DINAS PERTANIAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Layanan dan Kinerja Perangkat Daerah	100	7.611.571.377	100	8.431.708.826	100	10.443.195.305	98	8.956.575.839	98	86	99	17.388.284.665			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	35.000.000	100	63.430.670	100	110.018.645	12	109.275.879	12	99	56	172.706.549			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersedia	8	5.000.000	3	21.621.030	5	43.168.645	5	42.990.292	100	100	8	64.611.322			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	14.920.518	100	99	2	19.920.518			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	14.713.410	100	98	2	19.713.410			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	8.000.000	1	7.988.356	100	100	2	12.988.356			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	5.000.000	1	5.000.000	1	8.000.000	1	7.940.280	100	99	2	12.940.280			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersedia			1	4.825.000	1	8.000.000	1	7.949.605	100	99	2	12.774.605			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersedia	2	10.000.000	5	16.984.640	2	12.850.000	2	12.773.418	100	99	7	29.758.058			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.114.851.849	100	6.326.913.664	100	7.941.813.991	94	6.526.691.208	94	82	97	12.853.604.872			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN (OB)	14	5.959.821.849	14	6.138.593.664	86	7.734.483.991	81	6.319.395.968	94	82	95	12.457.989.632			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	150.030.000	48	183.320.000	1	202.330.000	1	202.330.000	100	100	49	385.650.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedia Dokumen Laporan Keuangan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.965.240	100	99	2	9.965.240			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					100	13.000.000	94	12.989.285	94	100	94	12.989.285			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedia Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					1	13.000.000	1	12.989.285	100	100	1	12.989.285			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	58.608.000	94	6.138.593.664	100	161.950.000	100	157.740.000	100	97	97	6.296.333.664			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pertanian)	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pertanian)	120	58.608.000	122	113.745.000	7	161.950.000	7	157.740.000	100	97	129	271.485.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	899.685.715	100	812.619.826	100	1.050.072.017	99	1.033.175.132	99	98	100	1.845.794.958			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1	45.156.630	1	44.909.000	100	99	1	44.909.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47	390.837.151	85	244.519.950	1	60.042.000	1	59.056.000	100	98	86	303.575.950			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga yang dibeli	38	118.285.680	2	20.863.500	3	18.824.387	3	16.815.400	100	89	5	37.678.900			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan tersedianya penggandaan dokumen	2	36.691.500	2	26.272.000	4	27.211.000	4	27.211.000	100	100	6	53.483.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	15.698.000	2	32.100.000	2	51.176.000	2	39.300.000	77	77	4	71.400.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	338.173.384	45	488.864.376	162	837.662.000	162	835.883.732	100	100	207	1.324.748.108			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	1	10.000.000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	488.864.376	100	464.293.052	100	454.044.570	100	98	100	942.908.946			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1	488.864.376							1	488.864.376			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					26	76.685.000	26	74.165.000	100	97	26	74.165.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					22	326.207.698	22	322.000.000	100	99	22	322.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4	61.400.354	4	57.879.570	100	94	4	57.879.570			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	437.234.638	100	419.076.541	100	444.647.600	100	420.881.909	100	95	100	839.958.450			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85	5.825.500	130	2.739.000	2	2.780.000	2	2.184.000	100	79	132	4.923.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12	47.459.138	12	24.887.541	3	56.367.600	3	33.947.909	100	60	15	58.835.450			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	46	383.950.000	51	391.450.000	1	385.500.000	1	384.750.000	100	100	52	776.200.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan															
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	66.191.175	90	140.558.525	100	257.400.000	100	241.777.856	100	94	95	382.336.381			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	60.511.175	25	133.288.525	16	246.450.000	16	230.827.856	100	94	41	364.116.381			
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	5.680.000	10	7.270.000	10	10.950.000	10	10.950.000	100	100	20	18.220.000			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	736	3.679.668.920	100	7.394.532.734	100	7.891.434.266	100	7.309.964.318	100	93	100	14.704.497.052			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	96	3.094.567.070	100	6.887.296.884	100	5.881.815.406	100	5.316.180.818	100	90	100	12.203.477.702			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	69.785.000	3	100.819.700	7	251.090.000	7	238.086.406	100	95	10	338.906.106			
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	77	3.024.782.070	13	6.786.477.184	24	5.630.725.406	24	5.078.094.412	100	90	37	11.864.571.596			
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	31.414.400	100	9.600.000	100	9.600.000	100	100	100	41.014.400			
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			4	31.414.400	1	9.600.000	1	9.600.000	100	100	5	41.014.400			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota		100	39.999.500										-			
Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	39.999.500										-			
Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan benih/bibit ternak	100	545.102.350	100	475.821.450	100	2.000.018.860	100	1.984.183.500	100	99	100	2.460.004.950			
Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	94	545.102.350	72	475.821.450	400	2.000.018.860	400	1.984.183.500	100	99	472	2.460.004.950			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100	11.578.858.180	97	11.525.687.408	100	18.199.317.398	99	17.869.822.338	99	98	98	29.395.509.746			
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian					100	156.638.000	100	107.844.787	100	69	100	107.844.787			
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					1	156.638.000	1	107.844.787	100	69	1	107.844.787			
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100	11.578.858.180	97	11.525.687.408	100	18.042.679.398	99	17.761.977.551	99	98	98	29.287.664.959			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55	9.070.606.000	53	10.597.391.610	84	15.543.076.254	83	15.439.045.551	99	99	136	26.036.437.161			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	399.006.000	7	766.908.000	6	999.975.116	6	993.624.000	100	99	13	1.760.532.000			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	1.117.646.400	1	161.387.798	1	500.149.000	1	490.100.000	100	98	2	651.487.798			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	991.599.780			3	786.481.701	3	628.207.000	100	80	3	628.207.000			
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi					1	212.997.327	1	211.001.000	100	99	1	211.001.000			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100	100	100	117.777.554	100	175.233.131	100	169.319.131	100	97	100	287.096.685			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100	100			100	41.997.945	100	41.997.945	100	100	100	41.997.945			
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		2	2										-			
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberantasan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					1	41.997.945	1	41.997.945	100	100	1	41.997.945			
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	10.002.250	100	57.778.554	100	46.963.786	100	46.963.786	100	100	100	104.742.340			
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	10.002.250	1	57.778.554	1	46.963.786	1	46.963.786	100	100	2	104.742.340			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	15.000.000	100	59.999.000	100	86.271.400	2	80.357.400	2	93	51	140.356.400			
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	15.000.000	1	30.000.000	1	62.253.000	1	56.445.000	100	91	2	86.445.000			
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			270	29.999.000	1	24.018.400	1	23.912.400	100	100	271	53.911.400			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		100	15.000.000	100	34.984.000	100	37.015.000	100	37.015.000	100	100	100	71.999.000			
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	15.000.000	100	34.984.000	100	37.015.000	1	37.015.000	1	100	51	71.999.000			
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	15.000.000	1	34.984.000	1	37.015.000	1	37.015.000	100	100	2	71.999.000			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100	141.385.650	100	378.837.774	100	533.201.227	100	516.626.072	100	97	100	895.463.846			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	141.385.650	100	378.837.774	100	533.201.227	100	516.626.072	100	97	100	895.463.846			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	50.430.150			5	86.464.000	5	84.974.050	100	98	5	84.974.050			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	90.955.500	3	378.837.774	215	188.403.250	215	182.251.300	100	97	218	561.089.074			
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					5	183.767.250	5	176.934.322	100	96	5	176.934.322			
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian					2	74.566.727	2	72.466.400	100	97	2	72.466.400			
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KOTA PAGAR ALAM																
Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		92,88	3.722.700.795	99	4.056.361.895	100	5.192.613.168	92	4.571.899.895	92	88	95	8.628.261.790			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.499.450	100	52.871.200	100	55.000.000	100	55.000.000	100	100	100	107.871.200			
Peyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	14.998.150	1	18.846.000	2	20.000.000	2	20.000.000	100	100	3	38.846.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersediannya Dokumen RKA (Dokumen)	1	2.308.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA (Dokumen)	1	2.499.950	1	4.690.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.690.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersediannya Dokumen DPA (Dokumen)	1	2.499.850	1	5.000.200	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.200			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)	1	2.304.500	1	4.632.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.632.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dokumen Laporan Capaian Kinerja (Laporan)			1	4.703.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	9.703.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya LAKIP & LKPD SKPD (Dokumen)	1	4.889.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	20.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95,01	2.631.806.049	100	2.812.288.261	100	3.583.468.953	84	2.999.538.932	84	84	92	5.811.827.193			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (Bln)	518	2.552.166.549	12	2.711.078.261	12	3.381.908.953	10	2.798.828.932	83	83	22	5.509.907.193			
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan (bln)	84	64.080.000	12	84.330.000	12	179.680.000	12	178.830.000	100	100	24	263.160.000			
Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Verifikator Keuangan (bln)	12	10.560.000	12	11.880.000	12	11.880.000	12	11.880.000	100	100	24	23.760.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	1	4.999.500	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)					18	5.000.000	18	5.000.000	100	100	18	5.000.000			
Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						100	8.000.000	100	7.940.000	100	99	100	7.940.000			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase capaian kegiata administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					2	8.000.000	2	7.940.000	100	99	2	7.940.000			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100	6.292.000	100	4.792.000	100	76	100	4.792.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)					1	6.292.000	1	4.792.000	100	76	1	4.792.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	38.500.000	100	46.250.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	100	100	163.250.000			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		80	38.500.000										-			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Hari - hari tertentu (Paket)			2	46.250.000	1	117.000.000	1	117.000.000	100	100	3	163.250.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		99	386.474.735	100	473.551.076	100	688.924.215	100	688.135.177	100	100	100	1.161.686.253			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik (pcs)	660	10.053.400	660	6.242.720	660	9.999.315	660	9.999.315	100	100	1.320	16.242.035			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor (pcs)	3.650	42.146.250	3.650	51.275.000	3.650	49.904.000	3.650	49.904.000	100	100	7.300	101.179.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya Peralatan Rumah Tangga (pcs)	1.100	11.164.700	1.100	11.622.100	1.100	11.995.900	1.100	11.815.900	100	98	2.200	23.438.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan (pcs)	12.000	39.720.450	12.000	30.822.500	2.190	45.809.000	2.190	45.808.500	100	100	14.190	76.631.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang (Dokemen)	6	6.840.000	1.095	7.665.000	2.190	10.065.000	2.190	10.065.000	100	100	3.285	17.730.000			
Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah fasilitasi makan minum tamu (Laporan)					1	11.985.000	1	11.985.000	100	100	1	11.985.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya Rapat - rapat Koordinasi (Kali)	278	276.549.935	350	365.923.756	350	549.166.000	350	548.557.462	100	100	700	914.481.218			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	9.940.000	100	154.281.871	100	159.579.000	100	-	100	-	100	154.281.871			
Pengadaan Mebel	jumlah Pengadaan Mebel (unit)					1	37.360.000	1	37.360.000	100	100	1	37.360.000			
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	jumlah unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (unit)	7	9.940.000	1	154.281.871	37	112.219.000	37	110.830.000	100	99	38	265.111.871			
Pengadaan Aset Tak berwujud	jumlah unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (unit)					18	10.000.000	18	10.000.000	100	100	18	10.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78,57	515.815.911	96	549.344.983	100	597.488.000	100	567.872.261	100	95	98	1.117.217.244			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat (Pos)	386	4.140.000	500	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000	100	100	1.000	10.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi Sumberdaya air listrik (Lembar Tagihan)	15	15.925.911	45	14.969.983	12	43.488.000	12	19.872.261	100	46	57	34.842.244			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (bln)	635	495.750.000	12	529.375.000	12	549.000.000	12	543.000.000	100	99	24	1.072.375.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98,42	110.664.650	92	122.056.375	100	136.440.000	100	131.621.525	100	96	96	253.677.900			
PenyediaanJasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)	3.800	110.664.650	10	109.236.375	9	114.910.000	9	110.781.525	100	96	19	220.017.900			
Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya (Unit)			17	12.820.000	20	14.930.000	20	14.240.000	100	95	37	27.060.000			
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya (Unit)					3	6.600.000	3	6.600.000	100	100	3	6.600.000			
Program Pendidikan dan latihan Perkoprasian		100	404.200.000			100	743.690.000	100	729.856.000	100	98	100	729.856.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah/kabupaten/kota		100	404.200.000			100	743.690.000	100	729.856.000	100	98	100	729.856.000			
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoprasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Kopesi Simpan Pinjam (Unit)	60	404.200.000			40	743.690.000	40	729.856.000	100	98	40	729.856.000			
Prog. Penilaian Kesehatan KSP/usp Koperasi				10	50.000.000							10	50.000.000			
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam (satu) daerah kabupaten/kota				10	50.000.000							10	50.000.000			
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota				4	50.000.000							4	50.000.000			
Progam Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah		100	120.000.000	100	1.651.622.486	100	540.000.000	37	533.864.770	37	99	69	2.185.487.256			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan		100	120.000.000	100	1.651.622.486	100	540.000.000	100	533.864.770	100	99	100	2.185.487.256			
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		10	41.000.000										-			
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengemangan Usaha Mikro		80	79.000.000										-			
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi			1	1.439.704.000	2	340.000.000	2	335.337.620	100	99	3	1.775.041.620			
Koordinasi dan Singkronisasi Dengan Para Pemangku Keentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				1	211.918.486							1	211.918.486			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi					1	50.000.000	1	49.907.200	100	100	1	49.907.200			
peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoprasian serta kapasitas dan kompetwnsi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewiraan					1	150.000.000	1	148.619.950	100	99	1	148.619.950			
Prog. Pengembangan UMKM		89	925.586.335	50	586.948.631							50	586.948.631			
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		89	925.586.335	50	586.948.631							50	586.948.631			
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi		250	925.586.335	6	586.948.631							6	586.948.631			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		100	734.980.702	86	50.940.000	100	245.430.000	19	233.867.982	19	95	52	284.807.982			
Pembinaan terhadap Pengelola Srana distribusi perdagangan Masyarakat diwilayah kerjanya		100	495.582.702	86	50.940.000	100	245.430.000	100	233.867.982	100	95	93	284.807.982			
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1	495.582.702										-			
Pembangunan dan Pengelolanan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan Menengah (dokumen)					1	200.000.000	1	188.437.982	100	94	1	188.437.982			
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan Menengah (dokumen)			335	50.940.000	1	45.430.000	1	45.430.000	100	100	336	96.370.000			
Prog. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		90,00	114.785.200	100	327.394.800	100	1.282.034.000	94	1.204.174.806	94	94	97	1.531.569.606			
Pengendaliaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		90,00	114.785.200	100	327.394.800	100	1.282.034.000	100	1.204.174.806	100	94	100	1.531.569.606			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemantauan Harga dan Stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Terpantaunya harga barang pokok dan strategis lainnya (Laporan)	1	114.785.200	5	327.394.800	1	75.000.000	1	75.000.000	100	100	6	402.394.800			
Pemantauan Harga dan Stok Barangkebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Terpantaunya harga barang pokok dan strategis lainnya (Laporan)					12	87.034.000	12	86.574.806	100	99	12	86.574.806			
Pelaksanaan operasi pasar Reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak 1 (satu) kabupaten/kota (Laporan)					1	1.120.000.000	1	1.042.600.000	100	93	1	1.042.600.000			
Prog. Pengembangan Ekspor		100	517.328.080	100	334.050.000	100	365.535.000	100	363.885.000	100	100	100	697.935.000			
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		100	517.328.080	100	334.050.000	100	365.535.000	100	363.885.000	100	100	100	697.935.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	145.858.080										-			
Pameran dagang Lokal	Tersediannya Pameran Dagang Nasional dan Besemah EXPO	1	371.470.000	1	334.050.000	1	365.535.000	1	363.885.000	100	100	2	697.935.000			
Prog. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		84	124.106.759			100	200.000.000	55	193.765.682	55	97	55	193.765.682			
Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan		84	124.106.759			100	200.000.000	55	193.765.682	55	97	55	193.765.682			
Pelaksanaan Metrologi legal,berupa tera,tera ulang	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa TeraUlang dan Pengawasan (Unit)	1	34.902.000			610	25.000.000	610	25.000.000	100	100	610	25.000.000			
Pengawasan/Penyuluh Metrologi Legal	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa TeraUlang dan Pengawasan (orang)	1	34.611.200			60	85.000.000	60	79.781.800	100	94	60	79.781.800			
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1	54.593.559			76	90.000.000	76	88.983.882	100	99	76	88.983.882			
Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri				100	2.354.167.747	100	333.101.000	100	317.324.682	100	95	100	2.671.492.429			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				100	2.354.167.747	100	333.101.000	100	317.324.682	100	95	100	2.671.492.429			
Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase tersusunya pelaksanaan pembangunan industri			1	2.354.167.747	1	333.101.000	1	317.324.682	100	95	2	2.671.492.429			
Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		100	691.217.820	81	305.377.958	100	66.904.000	100	66.854.598	100	100	90	372.232.556			
Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUL,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100	691.217.820	81	305.377.958	100	66.904.000	100	66.854.598	100	100	90	372.232.556			
Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data industri ,data kawasan indsutri serta data lain li ngkup Kabupaten /kota melalui	Dilaksanakannya Monitoring data Industri	1	408.351.000			1	66.904.000	1	66.854.598	100	100	1	66.854.598			
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1	282.866.820	1	262.303.535							1	262.303.535			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data ke SIINas				1	43.074.423							1	43.074.423			
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTA PAGAR ALAM																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	40.363.273.366	100	35.012.833.445	100	54.349.897.564	100	50.784.153.874	100	93	100	85.796.987.319			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	312.034.154	100	375.502.599	100	353.948.000	100	352.647.254	100	100	100	728.149.853			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perjanjian kinerja, renja, dan renstra tersusun (Dokumen)	3	33.589.650	3	42.101.000	3	41.769.000	3	41.769.000	100	100	6	83.870.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	25.106.600	1	20.457.500	1	45.711.000	1	45.661.000	100	100	2	66.118.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	20.078.700	1	30.442.900	1	42.146.500	1	42.115.000	100	100	2	72.557.900			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	23.344.900	1	23.615.866	1	34.148.500	1	34.075.000	100	100	2	57.690.866			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	18.363.700	1	26.971.233	1	34.980.000	1	34.869.000	100	100	2	61.840.233			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen LPPD (dokumen), ILPD (dokumen), LKJIP (dokumen), LKPJ (dokumen)	331	191.550.604	4	231.914.100	4	155.193.000	4	154.158.254	100	99	8	386.072.354			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	9.232.668.801	100	9.027.881.185	100	11.364.701.161	93	10.453.296.569	93	92	96	19.481.177.754			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN, TKD (OB)	2.065	8.297.941.279	1.200	8.004.651.907	1.500	10.088.942.661	1.420	9.367.154.369	95	93	2.620	17.371.806.276			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN selama 12 bulan	551	745.340.000	528	779.300.000	650	950.310.000	520	763.010.000	80	80	1.048	1.542.310.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Nota Pencairan Dana Kegiatan, penatausahaan pelaporan, Rekapitulasi SPP dan SPM, Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah (dokumen)	48	119.388.822	48	160.460.167	58	241.663.500	50	240.134.000	86	99	98	400.594.167			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun (dokumen)	1	36.824.700	1	44.203.545	1	44.383.000	1	44.041.200	100	99	2	88.244.745			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun (bulan)	12	33.174.000	12	39.265.566	12	39.402.000	12	38.957.000	100	99	24	78.222.566			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	655.043.650	100	585.096.873	100	629.630.453	100	618.080.695	100	98	100	1.203.177.568			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah gedung yang diasuransikan, Kendaraan roda dua,empat yang di asuransikan (unit)	182	655.043.650	182	585.096.873	182	629.630.453	182	618.080.695	100	98	364	1.203.177.568			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	3.251.441.800	100	196.290.600	100	308.900.000	100	306.641.680	100	99	100	502.932.280			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu, Pakaian Kerja Lapangan (stel)	291	3.251.441.800	291	196.290.600	402	308.900.000	402	306.641.680	100	99	693	502.932.280			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	4.790.849.427	99	4.433.788.407	100	6.042.810.694	100	6.031.755.558	100	100	100	10.465.543.965			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	3.564	205.734.000	3.500	412.382.500	3.564	355.535.500	3.564	354.836.200	100	100	7.064	767.218.700			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	13.010	592.775.000	13.000	595.855.850	16.411	511.800.000	16.411	509.504.810	100	100	29.411	1.105.360.660			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	7.390	428.071.000	7.300	529.426.730	11.250	1.031.894.194	11.250	1.027.583.859	100	100	18.550	1.557.010.589			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	162.670	402.506.800	160.000	661.740.250	162.688	598.365.000	162.688	597.754.800	100	100	322.688	1.259.495.050			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	129	154.500.000	129	153.300.000	129	165.000.000	129	164.900.000	100	100	258	318.200.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun (bulan)	12	3.007.262.627	12	2.081.083.077	17	3.380.216.000	17	3.377.175.889	100	100	29	5.458.258.966			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.213.333.050	100	2.263.150.000	100	15.047.436.492	100	13.854.285.535	100	92	100	16.117.435.535			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan/ Kendaraan Dinas Operasional (unit)	1	354.100.000	5	1.299.800.000	30	12.416.346.000	30	11.240.925.000	100	91	35	12.540.725.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Tersedia (unit)	58	805.002.450	1	640.940.000	36	1.323.507.000	36	1.319.699.594	100	100	37	1.960.639.594			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	Jumlah Pc dan printer yang tersedia (unit)	92	1.054.230.600	45	322.410.000	86	1.307.583.492	86	1.293.660.941	100	99	131	1.616.070.941			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	8.947.663.296	100	9.352.301.518	100	9.839.350.000	100	8.793.019.777	100	89	100	18.145.321.295			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	7.965	109.640.000	11.350	109.827.000	11.600	100.000.000	9.100	78.495.000	78	78	20.450	188.322.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan internet yang dibayar (lembar tagihan)	48	5.598.373.296	48	5.985.212.518	48	6.357.600.000	48	5.586.174.777	100	88	96	11.571.387.295			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyewaan electrik generating, mebel, peralatan studio, dan gedung (unit)	17.200	429.400.000	17.000	580.512.000	17.222	342.750.000	17.200	341.600.000	100	100	34.200	922.112.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium/ Gaji Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendukung Administrasi Perkantoran, terbayarnya jasa kebersihan kantor (OB)	3.300	2.810.250.000	3.300	2.676.750.000	3.324	3.039.000.000	3.320	2.786.750.000	100	92	6.620	5.463.500.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		99	5.493.029.223	100	4.065.084.982	100	5.821.398.600	96	5.609.048.383	96	96	98	9.674.133.365			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas KDH, WKDH, sekretariat yang tersedia (liter), Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas (uni), Jumlah pembayaran unit (unit)	9.900	2.756.618.973	9.900	2.655.896.027	11.800	3.357.464.600	11.000	3.149.247.971	93	94	20.900	5.805.143.998			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan PC, Printer, dan peralatan mesin lainnya (unit)	146	115.650.000	146	158.750.000	146	106.700.000	146	106.060.000	100	99	292	264.810.000			
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor (m2)	5.500	2.105.592.250	5.600	450.093.377	16.255	1.144.286.000	16.200	1.142.681.000	100	100	21.800	1.592.774.377			
Pemeliharaan/Rehabiitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah belanja pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor (m2)	4.800	515.168.000	4.820	800.345.578	20.678	1.212.948.000	20.600	1.211.059.412	100	100	25.420	2.011.404.990			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	613.004.068	93	547.017.366	100	630.241.664	100	608.954.838	100	97	97	1.155.972.204			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB) selama 14 bulan	24	167.004.068	24	117.892.370	24	98.741.668	24	78.842.842	100	80	48	196.735.212			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH yang tersedia (stel)	8	50.000.000	4	29.125.000	16	116.500.000	16	115.112.000	100	99	20	144.237.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Medichal Checkup Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya medichal checkup up kepala daerah dan wakil kepala daerah (kali)			-	-	2	15.000.000	2	15.000.000	100	100	2	15.000.000			
Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya dana penunjang operasional KDH dan WKDH (OB)	24	396.000.000	24	399.999.996	24	399.999.996	24	399.999.996	100	100	48	799.999.992			
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		99	2.257.184.000	100	2.204.963.100	100	2.082.894.000	99	1.972.813.600	99	95	100	4.177.776.700			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah makan minum natura, rapat, tamu untuk KDH (OB)	28.000	862.235.000	28.200	1.470.561.000	31.500	1.090.410.000	31.500	1.087.453.900	100	100	59.700	2.558.014.900			
Penyediaan Kubutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah makan minum natura, rapat, tamu untuk WKDH (OB)	26.500	776.325.000	-	-	-	-	-	-			-	-			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah makan minum rapat, tamu, aktifitas lapangan untuk setdako (OB)	18.200	618.624.000	18.300	734.402.100	28.477	992.484.000	28.000	885.359.700	98	89	46.300	1.619.761.800			
Penataan Organisasi		100	1.247.927.667	78	778.228.572	100	836.655.000	80	792.709.675	80	95	79	1.570.938.247			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen kelas jabatan, dokumen ANJAB dan ABK, kelembagaan dan analisis jabatan, (dokumen)	8	414.043.061	8	422.009.701	16	398.066.000	16	367.268.286	100	92	24	789.277.987			
Falisitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem informasi pelayanan publik, standar operasional, standar pelayanan (dokumen)	5	314.467.174	5	77.245.355	12	172.526.000	12	172.063.539	100	100	17	249.308.894			
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Roadmap grand reformasi, LKJIP (dokumen)	2	519.417.432	2	108.918.394	2	99.415.000	2	93.556.449	100	94	4	202.474.843			
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dokumen)			1	82.248.291	1	76.370.000	1	73.087.693	100	96	2	155.335.984			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (dokumen)			1	87.806.831	1	90.278.000	1	86.733.708	100	96	2	174.540.539			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	1.349.094.230	100	1.183.528.243	100	1.391.931.500	100	1.390.900.310	100	100	100	2.574.428.553			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bimtek / diklat keprotokolan, terlaksananya pelayanan administrasi keprotokolan, terlaksananya rapat koordinasi keprotokolan (OB)	920	1.059.966.440	920	921.229.773	2.122	1.271.826.000	2.120	1.271.603.110	100	100	3.040	2.192.832.883			
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya penyusunan pidato selama 12 bulan (bulan)	12	152.768.325	12	109.024.250	14	53.200.000	14	53.043.500	100	100	26	162.067.750			
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya pendokumentasian kegiatan KDH dan WKDH	12	136.359.465	12	153.274.220	12	66.905.500	12	66.253.700	100	99	24	219.527.920			
PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		98,24	5.098.484.668	99	4.604.138.961	100	3.619.045.520	100	3.557.864.672	100	98	100	8.162.003.633			
Administrasi Tata Pemerintahan		100	1.207.396.540	100	2.256.135.188	100	1.115.720.500	100	1.088.988.544	100	98	100	3.345.123.732			
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah buku jawaban walikota terhadap pandangan umum DPRD, monografi kota pagar alam, dan laporan kegiatan triwulan yang tersedia (buku)	440	101.647.800	444	102.689.512	777	130.850.000	777	130.740.875	100	100	2	233.430.387			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengeloaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen rupabumi dan toponimi yang tersedia (dokumen)	5	454.446.500	5	285.388.176	8	369.395.500	8	344.171.464	100	93	2	629.559.640			
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	tersedianya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (kali)	14	651.302.240	14	1.868.057.500	14	615.475.000	14	614.076.205	100	100	14	2.482.133.705			
Falitasi Kerjasama Daerah		100	5.000.350			100	8.733.500	100	8.675.895	100	99	100	8.675.895			
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tersedianya dokumen fasilitas kerjasama dalam negeri	5	5.000.350			1	8.733.500	1	8.675.895	100	99	2	8.675.895			
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100	3.241.007.244	92	1.726.261.900	100	1.622.096.520	64	1.614.805.370	64	100	78	3.341.067.270			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan Ceramah Memperingati Isra'Mi'raj Nabi Muhammad SAW, memperingati Nuzul Qur'an, ceramah tahun baru islam, STQ Tingkat kota dan provinsi, Pemberangkatan CAlon Jama'ah Haji, Kegiatan Jama'ah Umroh, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sholat Idul Fitri & Idul adha	10	3.241.007.244	10	1.589.949.900	14	1.042.223.520	14	1.036.302.910	100	99	2	2.626.252.810			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(kegiatan)															
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (dokumen)			10	38.075.000	10	12.948.000	10	11.927.160	100	92	2	50.002.160			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (dokumen)			1	98.237.000	1	566.925.000	1	566.575.300	100	100	2	664.812.300			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		90	645.080.534	100	621.741.873	100	872.495.000	100	845.394.863	100	97	100	1.467.136.736			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)	240	260.712.669	320	227.320.447	450	253.013.000	450	252.979.275	100	100	2	480.299.722			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Lingkungan Pemerinah Kota Pagar Alam (perkara)	8	290.630.365	8	220.660.226	10	503.980.000	10	478.068.049	100	95	2	698.728.275			
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun (buku)	70	69.504.000	70	147.113.000	70	115.502.000	70	114.347.539	100	99	2	261.460.539			
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		1	24.233.500	1	26.648.200							2	26.648.200			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	1.579.039.671	96	2.261.985.084	100	2.531.805.000	100	2.486.990.398	100	98	98	4.748.975.482			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100	136.528.683	68	258.817.579	100	244.748.500	75	238.555.294	75	97	72	497.372.873			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (dokumen)			1	69.867.994	3	83.190.000	3	82.795.400	100	100	2	152.663.394			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pengendalian dan distribusi Perekonomian (dokumen)	40	102.115.883	38	105.580.630	55	99.975.000	55	94.306.744	100	94	2	199.887.374			
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang di buat (dokumen)	20	34.412.800	30	83.368.955	48	61.583.500	48	61.453.150	100	100	2	144.822.105			
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100	166.094.850	66	270.607.565	100	271.853.000	73	271.199.029	73	100	69	541.806.594			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (dokumen)			1	64.191.439	1	74.331.000	1	74.327.000	100	100	2	138.518.439			
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan yang dibuat (dokumen)	45	95.498.400	41	124.096.484	60	110.525.000	60	110.204.900	100	100	2	234.301.384			
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang dibuat (dokumen)	35	70.596.450	30	82.319.642	52	86.997.000	52	86.667.129	100	100	2	168.986.771			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				51	187.940.889	100	136.804.000	93	136.744.499	93	100	72	324.685.388			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (dokumen)			1	85.780.500	1	70.922.500	1	70.906.386	100	100	2	156.686.886			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (dokumen)			1	102.160.389	1	65.881.500	1	65.838.113	100	100	2	167.998.502			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100	1.276.416.138	96	1.544.619.051	100	1.878.399.500	100	1.840.491.576	100	98	98	3.385.110.627			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang/ jasa yang akuntable (paket)	55	951.999.148	52	777.316.782	145	804.544.500	145	779.174.911	100	97	2	1.556.491.693			
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Frekuensi pemeliharaan jaringan sistem pengadaan barang dan jasa (paket)	1	240.238.450	1	439.614.934	1	767.510.000	1	765.192.462	100	100	2	1.204.807.396			
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis dan konsultasi pengadaan barang/jasa (orang)	155	84.178.540	145	327.687.335	355	306.345.000	355	296.124.203	100	97	2	623.811.538			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DEWAN KOTA KOTA PAGAR ALAM																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	99	33.268.631.894	97	30.502.105.446	100	40.669.835.748	99	32.269.099.329	99	79	98	62.771.204.775			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	40.000.000	100	39.998.000	100	40.000.000	100	33.272.600	100	83	100	73.270.600			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3	5.000.000	3	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100	100	5	10.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.635.000	100	93	2	9.635.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	3.935.000	100	79	2	8.935.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	4.999.900	100	100	2	9.999.900			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	10.000.000	2	9.998.000	3	10.000.000	3	4.702.700	100	47	5	14.700.700			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.293.979.875	100	4.607.748.743	100	5.709.994.546	100	5.225.220.899	100	92	100	9.832.969.642			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560	3.647.024.966	560	3.978.042.743	574	5.166.758.596	574	4.739.807.899	100	92	1.134	8.717.850.642			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Jumlah orang yang menerima honor KPA, PPTK, PPK, PP, Bendahara)	156	326.880.000	168	324.840.000	168	367.560.000	168	367.560.000	100	100	336	692.400.000			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan DPRD	1	294.604.909	1	279.396.000	1	150.200.950	1	110.338.100	100	73	2	389.734.100			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	25.470.000	1	25.470.000	1	25.475.000	1	7.514.900	100	29	2	32.984.900			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100	183.583.000	100	197.662.727	100	220.537.613	100	208.981.800	100	95	100	406.644.527			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27	183.583.000	1	197.662.727	1	215.537.613	1	203.981.800	100	95	2	401.644.527			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	1	5.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70	433.780.150	52	285.815.000	100	421.008.000	40	167.255.000	40	40	46	453.070.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	374.530.150	1	280.815.000	2	169.250.000	2	167.255.000	100	99	3	448.070.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	59.250.000	1	5.000.000	18	251.758.000	-	-	-	-	1	5.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	99,31	6.148.553.526	97	5.176.970.184	100	4.894.049.280	98	4.714.340.193	98	96	98	9.891.310.377			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.508	149.281.000	3	119.811.400	3	119.811.400	3	116.800.000	100	97	6	236.611.400			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.556	298.025.875	64	241.073.600	1.048	299.683.000	1.042	283.012.600	99	94	1.106	524.086.200			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.258	476.255.970	63	236.897.778	4.760	280.284.880	4.120	214.592.630	87	77	4.183	451.490.408			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20.454	426.622.050	16.090	285.873.000	11.220	263.670.000	10.924	235.621.000	97	89	27.014	521.494.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	69.120	251.952.700	15	181.067.500	65.744	282.264.000	65.312	277.269.500	99	98	65.327	458.337.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	65.122	615.926.000	114	600.805.000	63.749	600.805.000	63.740	600.745.000	100	100	63.854	1.201.550.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187	3.930.489.931	57	3.511.441.906	204	2.986.013.000	204	2.963.969.463	100	99	261	6.475.411.369			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1	19.990.000	-	-	-	-	-	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.188.577.500	96	1.790.395.000	100	5.015.708.890	53	2.399.250.000	53	48	74	4.189.645.000			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			1	469.600.000	3	2.639.739.000	3	2.399.250.000	100	91	4	2.868.850.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	23	1.004.022.500	185	406.980.000	53	1.396.092.000	53	1.366.100.000	100	98	238	1.773.080.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	52	793.998.000	6	282.715.000	32	557.906.110	32	533.145.000	100	96	38	815.860.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	390.557.000			1	199.571.040	1	197.560.000	100	99	1	197.560.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			3	631.100.000	1	199.600.740	1	197.650.000	100	99	4	828.750.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,74	1.408.280.653	89	1.506.838.822	100	1.646.342.000	99	1.460.951.226	99	89	94	2.967.790.048			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Jumlah materai yang dibeli)	1.260	12.600.000	1.200	12.000.000	6.200	62.000.000	4.500	40.950.000	73	66	5.700	52.950.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	314.930.653	21	398.088.822	36	397.692.000	36	330.751.226	100	83	57	728.840.048			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Jumlah tenaga administrasi, Cleaning service, Pol PP, Sopir)	1.262	1.080.750.000	1.296	1.096.750.000	1.308	1.186.650.000	1.308	1.089.250.000	100	92	2.604	2.186.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.361.734.676	80	1.368.591.741	100	2.428.204.300	100	1.917.738.806	100	79	90	3.286.330.547			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	507.913.976	4	623.012.191	24	1.104.700.000	24	610.995.081	100	55	28	1.234.007.272			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	326.656.450	19	326.819.550	20	330.660.000	20	326.733.725	100	99	39	653.553.275			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	58	99.655.250	54	92.460.000	58	106.540.000	58	101.960.000	100	96	112	194.420.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saranan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	147.980.000	1	31.900.000	1	199.284.300	1	197.400.000	100	99	2	229.300.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	279.529.000	4	294.400.000	4	687.020.000	4	680.650.000	100	99	8	975.050.000			
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	15.176.736.264	95	13.103.371.229	100	16.837.326.119	95	13.174.451.890	95	78	95	26.277.823.119			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	300	14.813.123.264	350	12.157.093.968	350	15.239.479.119	350	12.040.911.423	100	79	700	24.198.005.391			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	130	363.613.000	4	389.932.400	5	764.000.000	5	741.850.000	100	97	9	1.131.782.400			
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD			26	556.344.861	26	833.847.000	26	391.690.467	100	47	52	948.035.328			
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100	2.033.406.250	100	2.424.714.000	100	3.456.665.000	100	2.967.636.915	100	86	100	5.392.350.915			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14	533.406.250	2	924.714.000	14	1.950.465.000	14	1.647.986.840	100	84	16	2.572.700.840			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	36	1.500.000.000	36	1.500.000.000	36	1.500.000.000	36	1.319.650.075	100	88	72	2.819.650.075			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17,92	23.777.025.547	85	23.113.525.752	100	36.685.361.151	88	22.030.476.096	88	60	87	45.144.001.848			
Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peratuan DPRD	36,12	4.497.529.248	25	4.887.111.856	100	7.198.365.651	25	3.808.130.117	25	53	25	8.695.241.973			
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1.656.249.605	1	1.671.703.392	1	1.800.010.000	1	817.861.292	100	45	2	2.489.564.684			
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2	2.841.279.643	1	3.215.408.464	2	3.600.300.000	1	1.588.013.152	50	44	2	4.803.421.616			
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun			-	-	1	1.798.055.651	1	1.402.255.673	100	78	1	1.402.255.673			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	6.696.387.245	100	6.940.790.679	100	8.916.377.500	100	4.701.585.778	100	53	100	11.642.376.457			
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1.339.968.668	1	1.391.270.582	1	1.800.050.000	1	906.662.659	100	50	2	2.297.933.241			
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1.355.150.713	1	1.439.418.563	1	1.800.069.500	1	839.104.389	100	47	2	2.278.522.952			
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1	1.447.731.044	1	1.382.772.890	1	1.800.195.000	1	310.748.265	100	17	2	1.693.521.155			
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1.281.871.050	1	1.351.885.537	1	1.800.143.000	1	1.022.214.455	100	57	2	2.374.099.992			
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1.271.665.770	1	1.375.443.107	1	1.715.920.000	1	1.622.856.010	100	95	2	2.998.299.117			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	951.286.264	100	1.484.217.657	100	1.715.401.000	100	1.483.091.224	100	86	100	2.967.308.881			
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1	951.286.264	1	1.484.217.657	1	1.715.401.000	1	1.483.091.224	100	86	2	2.967.308.881			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kepala Daerah															
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	96,03	2.677.475.039	95	3.677.707.292	100	4.911.229.000	50	3.912.149.089	50	80	73	7.589.856.381			
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					1	475.273.000	1	282.877.400	100	60	1	282.877.400			
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	1	813.883.559	1	1.452.779.906	2	1.654.818.000	1	1.262.263.895	50	76	2	2.715.043.801			
Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	-	-	9	54.000.000	36	267.000.000	36	57.800.000	100	22	45	111.800.000			
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1.198.891.480	1	1.509.301.986	1	1.711.058.000	1	1.571.957.794	100	92	2	3.081.259.780			
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200	664.700.000	188	661.625.400	206	803.080.000	206	737.250.000	100	92	394	1.398.875.400			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	679.985.630	100	433.918.009	100	252.706.000	100	226.190.826	100	90	100	660.108.835			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	679.985.630	2	433.918.009	1	252.706.000	1	226.190.826	100	90	3	660.108.835			
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitas tugas DPRD	100	8.274.362.121	71	5.689.780.259	100	13.691.282.000	100	7.899.329.062	100	58	85	13.589.109.321			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	110	8.274.362.121	48	5.689.780.259	68	13.691.282.000	68	7.899.329.062	100	58	116	13.589.109.321			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	6.744.626.886	100	7.228.891.862	100	9.962.593.920	100	9.522.900.419	100	96	100	16.751.792.281			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	90.000.000	100	99.660.300	100	190.000.000	100	184.346.850	100	97	100	284.007.150			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja dan perubahan renja, perjanjian kinerja BAPPEDA dan perubahan perjanjian kinerja Bappeda, rencana kinerja tahunan dan perubahan rencana kinerja tahunan tersusun (Dokumen)	6	35.000.000	6	34.918.700	6	70.000.000	6	69.778.250	100	100	12	104.696.950			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.917.500	1	15.000.000	1	14.510.500	100	97	2	20.428.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.390.000	1	15.000.000	1	12.967.200	100	86	2	18.357.200			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	6.050.000	1	15.000.000	1	14.477.900	100	97	2	20.527.900			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.935.500	1	15.000.000	1	12.980.000	100	87	2	18.915.500			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD dan maturitas SPIP yang tersusun (dokumen)	2	20.000.000	2	23.396.250	2	35.000.000	2	34.761.000	100	99	4	58.157.250			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP yang tersusun (dokumen) dan terlaksananya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)	2	15.000.000	2	18.052.350	2	25.000.000	2	24.872.000	100	99	4	42.924.350			
Administrasi Keungan Perangkat Daerah		100	4.962.072.284	100	5.091.123.907	100	7.050.927.151	100	6.745.722.933	100	96	100	11.836.846.840			
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.144	4.727.204.284	1.144	4.876.276.607	1.066	6.737.855.151	1.066	6.449.754.180	100	96	2.210	11.326.030.787			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN (OB)	128	179.560.000	128	176.400.000	128	221.880.000	128	214.680.000	100	97	256	391.080.000			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Berkas Pertanggung jawaban yang telah diverifikasi (Berkas)	50	17.005.000	1	14.828.000	1	63.330.000	1	54.202.053	100	86	2	69.030.053			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen administrasi Keuangan sesuai standar akuntansi (Dokumen)	15	24.034.000	15	9.871.800	15	10.304.000	15	9.627.500	100	93	30	19.499.300			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun SKPD (Dokumen)	1	8.999.000	1	8.829.250	1	11.058.000	1	11.014.700	100	100	2	19.843.950			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya tanggapan Hasil Pemeriksaan (Dokumen)	3	5.270.000	3	4.918.250	3	6.500.000	3	6.444.500	100	99	6	11.362.750			
Administrasi Barang Milik Daerah SKPD				100	12.903.500	100	13.397.000	100	13.387.800	100	100	100	26.291.300			
Pengamanan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Asuransi kendaraan/mobil dinas			2	12.903.500	2	13.397.000	2	13.387.800	100	100	4	26.291.300			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	203.485.506	100	409.630.113	100	688.846.000	100	654.520.811	100	95	100	1.064.150.924			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian olah raga (Stel)	90	49.500.000	90	45.000.000	90	67.500.000	90	67.500.000	100	100	180	112.500.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peserta BIMTEK (Orang)	20	153.985.506	20	364.630.113	20	621.346.000	20	587.020.811	100	94	40	951.650.924			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	739.040.761	100	722.349.992	100	715.777.569	100	697.406.630	100	97	100	1.419.756.622			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	445	18.869.400	445	15.798.450	445	16.075.950	445	16.075.950	100	100	890	31.874.400			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.797	81.334.300	1.797	67.361.900	1.797	68.750.000	1.797	68.334.200	100	99	3.594	135.696.100			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor dan Gas terpenuhi (pcs)	928	27.108.570	928	23.106.200	928	23.747.100	928	23.398.700	100	99	1.856	46.504.900			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum Tersedia (porsi)	2.239	44.875.000	2.239	45.443.750	2.239	44.800.000	2.239	43.957.000	100	98	4.478	89.400.750			
Penyediann Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	37.814	66.583.500	37.814	53.562.000	37.814	48.242.000	37.814	40.190.000	100	83	75.628	93.752.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia (eksemplar)	3.624	61.680.000	3.624	67.500.000	3.624	65.680.000	3.624	65.680.000	100	100	7.248	133.180.000			
Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya ketersediaan Bahan/Material (Kali)	2	18.875.240	2	16.741.800	2	15.672.519	2	15.559.000	100	99	4	32.300.800			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Forum Sekretaris Daerah (kali)	78	419.714.751	78	432.835.892	78	432.810.000	78	424.211.780	100	98	156	857.047.672			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	29.796.840			100	534.630.000	100	508.124.000	100	95	100	508.124.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan						1	329.730.000	1	304.100.000	100	92	1	304.100.000			
Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Kerja					7	6.400.000	7	6.400.000	100	100	7	6.400.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop dan Komputer (Unit)					10	198.500.000	10	197.624.000	100	100	10	197.624.000			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					1	4.750.000	1	4.750.000	100	100	1	4.750.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		4	29.796.840										-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	349.802.849	100	350.929.524	100	375.298.000	100	337.281.934	100	90	100	688.211.458			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	250	2.500.000	250	2.500.000	250	10.000.000	250	10.000.000	100	100	500	12.500.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan Jaringan Komunikasi	48	35.302.849	48	36.429.524	48	53.298.000	48	37.281.934	100	70	96	73.711.458			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya belanja jasa pelayanan umum (ob)	384	312.000.000	384	312.000.000	384	312.000.000	384	290.000.000	100	93	768	602.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	370.428.646	100	542.294.526	100	393.718.200	100	382.109.461	100	97	100	924.403.987			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas (kali)	120	248.782.646	120	223.323.526	120	185.491.200	120	174.836.461	100	94	240	398.159.987			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (unit)	17	13.500.000	17	8.095.000	17	8.103.000	17	8.100.000	100	100	34	16.195.000			
Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor (meter)	206	108.146.000	206	64.691.000	206	200.124.000	206	199.173.000	100	100	413	263.864.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	246.185.000							1	246.185.000			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100	1.616.491.104	91	1.735.183.159	100	1.729.239.500	99	1.704.655.994	99	99	95	3.439.839.153			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100	713.199.902	100	949.478.628	100	1.151.299.500	100	1.132.535.451	100	98	100	2.082.014.079			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Tresedianya dokumen perubahan RPJMD dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	9	240.104.287	9	251.636.989	9	414.590.000	9	409.969.771	99	99	18	661.606.760			
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersedianya dokumen hasil forum SKPD	1	39.234.800	1	38.280.000	1	47.295.000	1	46.555.000	100	98	2	84.835.000			
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Adanya Berita Acara Kesepakatan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	63.448.450	1	73.360.601	1	83.832.000	1	82.613.098	100	99	2	155.973.699			
Pelaksanaan Musrenmbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Musrembang Kabupaten/Kota dan Tersedianya Laporan Hasil Musrenbang dan Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi	19	125.630.610	19	119.237.331	19	308.020.000	19	300.107.098	100	97	38	419.344.429			
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Bahan Koordinasi untuk Pelaksanaan Musrenbang di Lima Kecamatan (berita acara)	1	30.000.000	1	22.261.700	1	30.000.000	1	29.535.000	100	98	2	51.796.700			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen Perubahan RKPD, Rancangan RKPD, RKPD,Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan, Prejanjian Kinerja Kota,Perbahan RPJMD) dan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	20	214.781.755	20	444.702.007	19	267.562.500	19	263.755.484	100	99	39	708.457.491			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100	392.418.800	100	363.867.090	100	163.038.000	100	161.206.944	100	99	100	525.074.034			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Tersedianya Pelaporan SIPD	20	95.499.000	20	90.038.500	20	66.005.000	20	64.874.500	100	98	40	154.913.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya Dokumen Analisis Indikator Mikro, Pendoman Peny. Rancangan Awal Renja. RKT, RKT Perubahan, Pelaporan SIPD dan terlaksananya rapat Forum satu data	5	165.532.500	5	157.104.090	5	97.033.000	5	96.332.444	100	99	10	253.436.534			
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		1	131.387.300	1	116.724.500							1	116.724.500			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100	510.872.402	100	394.709.841		401.947.000		399.098.099	#DIV/0!	99	100	793.807.940			
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam.	2	149.231.500	2	100.000.000	2	116.680.000	2	114.135.750	100	98	4	214.135.750			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi	17	361.640.902	17	294.709.841	17	285.267.000	17	284.962.349	100	100	34	579.672.190			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			100	27.127.600	100	12.955.000	100	11.815.500	100	91	100	38.943.100			
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terkelolanya Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1	27.127.600	1	12.955.000	1	11.815.500	100	91	2	38.943.100			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Frekuensi Koordinasi Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Bidang Pembangunan Manusia	100	1.495.337.455	100	1.661.338.575	53	1.283.808.430	53	1.253.011.392	100	98	77	2.914.349.967			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan LP2KD dan RAT (dokumen)	100	928.152.724	100	896.009.349	100	580.424.430	100	563.600.946	100	97	100	1.459.610.295			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Kedalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia (dokumen pertriwulan)	53	274.158.582	4	237.107.952	4	225.266.770	4	220.861.388	100	98	8	457.969.340			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya Laporan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (dokumen)	2	86.828.410	60	62.808.934	60	35.159.100	60	34.620.212	100	98	120	97.429.146			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Frekuensi Koordinasi Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Bidang Pembangunan Manusia	4	23.886.600	8	25.856.000	8	27.411.370	8	25.226.000	100	92	16	51.082.000			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				4	29.488.800							4	29.488.800			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersidianya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60	305.240.898	5	325.089.955	5	225.450.890	5	218.116.800	100	97	10	543.206.755			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Perencanaan Bidang Perekonomian	8	214.724.184	15	76.136.910	15	40.055.830	15	38.768.746	100	97	30	114.905.656			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersedia Dokumen Usulan Perncanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Terlaksananya rapat Asistensi	4	23.314.050	13	24.430.000	13	27.080.470	13	26.007.800	100	96	26	50.437.800			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				5	115.090.798							5	115.090.798			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomoan dan SDA (Sumber Daya Alam)		100	177.588.300	100	377.086.168	100	345.426.500	100	338.058.947	100	98	100	715.145.115			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Frekuensi Koordnasi dan Konsultasi Mengenai Perencanaan Bidang Infrastruktur	15	97.609.900	55	241.442.741	55	173.355.000	55	169.613.672	100	98	110	411.056.413			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (dokumen), Terlaksananya rapat asistensi dan terbuatnya video profil	13	54.978.400	14	69.116.817	14	68.412.000	14	66.373.789	100	97	28	135.490.606			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 3 SKPD	5	25.000.000	3	66.526.610	3	103.659.500	3	102.071.486	100	98	6	168.598.096			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	389.596.431	100	388.243.058	100	357.957.500	100	351.351.499	100	98	100	739.594.557			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	267.987.941	1	319.703.315	1	206.554.000	1	202.556.243	100	98	2	522.259.558			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Frekuensi rapat koordinasi dan Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Tersusun (dokumen)	14	121.608.490	14	68.539.743	14	151.403.500	14	148.795.256	100	98	28	217.334.999			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100	1.471.900.536	100	911.714.831	100	894.892.500	100	890.597.495	100	100	100	1.802.312.326			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	tersusunnya dokumen pengembangan koperasi dan UMKM dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	310.289.150	100	238.041.232	100	425.148.500	100	423.979.025	100	100	100	662.020.257			
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	14	138.958.900	5	159.466.889	5	197.751.500	5	197.132.846	100	100	10	356.599.735			
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersedinya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Lingkungan	16	171.330.250	1	78.574.343	1	227.397.000	1	226.846.179	100	100	2	305.420.522			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100	548.185.600	62	375.367.462	100	100.000.000	100	98.925.250	100	99	81	474.292.712			
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	tersusunnya dokumen pengembangan koperasi dan UMKM dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12	97.918.600										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersedianya dokumen kajian pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan dan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	5	94.511.000										-			
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Lingkungan	1	355.756.000										-			
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya perkembangan Wisata			1	141.071.262	1	100.000.000	1	98.925.250	100	99	2	239.996.512			
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				35	118.669.250							35	118.669.250			
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				79	115.626.950							79	115.626.950			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100	613.425.786	100	298.306.137	100	369.744.000	100	367.693.220	100	99	100	665.999.357			
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, dalam dan luar kota dalam provinsi	35	337.303.679	11	236.507.833	11	251.138.000	11	250.497.182	100	100	22	487.005.015			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Terlaksanana kegiatan TTG, tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.	79	276.122.107	3	61.798.304	3	118.606.000	3	117.196.038	100	99	6	178.994.342			
													-			
BADAN KEUANGAN DAERAH													-			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94,41	23.519.620.532	98	21.976.062.247	100	31.329.352.325	92	23.835.608.427	92	76	95	45.811.670.674			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	73.879.866	100	49.345.760	100	350.000.000	14	49.472.866	14	14	57	98.818.626			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	9.999.000	7	9.897.202	7	10.000.000	7	9.981.442	100	100	14	19.878.644			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	9.996.800	1	9.789.009	1	10.000.000	1	9.756.576	100	98	2	19.545.585			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	22.131.329	1	9.877.162	1	10.000.000	1	9.820.297	100	98	2	19.697.459			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	9.995.700	1	9.814.595	1	10.000.000	1	9.948.920	100	99	2	19.763.515			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	21.757.037	1	9.967.792	1	10.000.000	1	9.965.631	100	100	2	19.933.423			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	300.000.000		-	-	-	-	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90,90	18.469.126.458	96	18.568.974.781	100	26.909.506.955	94	20.355.684.070	94	76	95	38.924.658.851			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.052	18.124.629.223	1.034	18.228.753.525	1.078	26.543.826.955	1.012	20.009.092.358	94	75	2.046	38.237.845.883			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	143	319.800.000	11	315.400.000	1	340.680.000	1	321.720.000	90	94	12	637.120.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Tugas ASN															
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifiaksi Keuangan SKPD	82	24.697.235	1	24.821.256	1	25.000.000	1	24.871.712	100	99	2	49.692.968			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100	619.046.950	100	310.218.500	100	549.170.500	58	323.670.500	58	59	79	633.889.000			
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan data Retribusi Daerah	11	619.046.950	9	310.218.500	9	549.170.500	5	323.670.500	58	59	14	633.889.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	1.013.126.670	98	290.173.873	100	388.014.000	85	325.566.881	85	84	92	615.740.754			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dnas Beserta Atribut Kelengkapan	164	89.380.000	1	89.918.919	1	99.000.000	1	92.346.000	100	93	2	182.264.919			
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	524.103.630	98	125.474.954	75	50.000.000	75	49.981.081	100	100	173	175.456.035			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bImbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	399.643.040	72	74.780.000	75	239.014.000	57	183.239.800	76	77	129	258.019.800			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	2.320.425.051	83	1.745.292.085	100	1.857.081.270	95	1.763.634.848	95	95	89	3.508.926.933			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	264.623.047	12	148.717.079	12	100.123.800	12	100.121.976	100	100	24	248.839.055			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12	403.574.543	11	365.508.458	12	330.326.000	12	330.224.006	100	100	23	695.732.464			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga			1	47.027.594	12	83.112.000	12	79.999.037	97	96	13	127.026.631			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaaan yang disediakan	12	393.566.312	7	226.741.350	12	199.280.000	12	199.233.001	100	100	19	425.974.351			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaaan yang disediakan	12	97.306.075	12	90.735.026	12	124.530.000	12	124.496.582	100	100	24	215.231.608			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	240.000.000	12	240.000.000	12	291.300.000	12	291.300.000	100	100	24	531.300.000			
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan					2	30.035.220	2	30.014.220	100	100	2	30.014.220			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	921.355.074	11	626.562.578	12	698.374.250	11	608.246.026	88	87	22	1.234.808.604			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		97,19	527.086.000	44	1.489.270.000	100	464.833.150	48	312.660.000	48	67	46	1.801.930.000			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2	793.000.000							2	793.000.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	29	186.370.000	130	181.350.000	39	140.692.500		-	-	-	130	181.350.000			
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	22	340.716.000	25	514.920.000	26	324.140.650	18	312.660.000	69	96	43	827.580.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85,75	548.712.756	91	725.098.226	100	1.000.579.600	78	782.104.173	78	78	84	1.507.202.399			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19.919.907	12	20.155.946	12	12.000.000	12	12.000.000	100	100	24	32.155.946			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	89.262.605	28	88.986.482	12	115.278.000	9	89.334.453	78	77	37	178.320.935			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	84.030.244	12	103.371.798	12	38.500.000	12	38.485.320	100	100	24	141.857.118			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	355.500.000	11	512.584.000	12	834.801.600	9	642.284.400	77	77	20	1.154.868.400			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	475.302.781	100	286.959.022	100	275.000.000	85	235.475.089	85	86	93	522.434.111			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44	104.812.000	45	70.820.000	44	135.160.000	31	95.703.828	70	71	76	166.523.828			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	69.708.000	2	63.540.000	2	63.540.000	2	63.540.000	100	100	4	127.080.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	2	300.782.781	2	152.599.022	2	76.300.000	2	76.231.261	100	100	4	228.830.283			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		88,92	11.631.125.495	79	7.977.222.943	100	6.924.052.500	94	6.657.542.291	94	96	87	14.634.765.234			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		98,27	3.872.208.750	89	3.332.880.856	100	3.351.499.000	93	3.194.495.531	93	95	91	6.527.376.387			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	420.100.250	2	371.008.500	2	365.384.000	2	339.999.116	90	93	4	711.007.616			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	361.080.950	2	424.604.288	2	366.473.500	2	360.683.135	95	98	4	785.287.423			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang terverifikasi	32	350.346.655	32	170.430.200	32	198.210.500	28	175.679.849	89	89	60	346.110.049			
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang terverifikasi	32	351.905.625	32	181.373.100	32	171.836.500	31	164.145.111	96	96	63	345.518.211			
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang terverifikasi	1	163.143.750	32	221.386.000	1	221.354.500	1	220.781.674	100	100	33	442.167.674			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang terverifikasi	1	123.608.700	32	184.667.000	32	170.521.000	32	170.521.000	100	100	64	355.188.000			
Koordinasi dan Penysunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	611.089.500	2	431.497.600	2	502.642.000	2	492.794.558	95	98	4	924.292.158			
Koordinasi dan Penysunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	597.340.800	2	445.153.100	2	371.690.000	2	360.653.738	95	97	4	805.806.838			
Koordinasi dan Penysunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah DokumenRegulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	160.906.000	1	197.446.058	1	266.736.000	1	247.351.647	90	93	2	444.797.705			
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan			1	151.433.120	1	164.105.000	1	150.720.188	80	92	2	302.153.308			
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	366.269.120	32	173.086.100	1	120.719.000	1	108.002.138	80	89	33	281.088.238			
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan			1	160.109.450	1	168.409.000	1	162.006.677	100	96	2	322.116.127			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	27	366.417.400	10	220.686.340	100	263.418.000	91	241.156.700	91	92	100	461.843.040			
Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		97,54	2.392.571.175	95	2.305.574.487	100	1.926.086.500	98	1.888.232.452	98	98	97	4.193.806.939			
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	293.495.795	32	247.163.252	1	257.237.500	1	256.561.231	100	100	33	503.724.483			
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	29	439.033.500	112	409.587.590	1	439.595.000	1	403.924.682	90	92	113	813.512.272			
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	279.410.950	1	325.161.900	1	293.401.500	1	293.229.345	100	100	2	618.391.245			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	324.547.700	1	356.623.115	1	236.065.000	1	236.065.000	100	100	2	592.688.115			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	32	276.653.850	1	325.228.000	1	290.472.500	1	289.930.330	100	100	2	615.158.330			
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	32	350.062.930	2	341.134.248	1	256.562.000	1	256.215.064	100	100	3	597.349.312			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12	429.366.450	1	300.676.382	12	152.753.000	12	152.306.800	100	100	13	452.983.182			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100	3.056.773.600	86	2.239.767.600	100	1.646.467.000	93	1.574.814.308	93	96	90	3.814.581.908			
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	32	413.455.200	30	249.601.000	32	224.625.000	31	219.797.307	98	98	61	469.398.307			
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan/LO dan Beban	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4	473.852.950	8	315.552.000	32	285.958.000	28	248.768.989	87	87	36	564.320.989			
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	520.691.700	18	354.556.000	19	346.489.000	16	319.455.048	82	92	33	674.011.048			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24	499.553.050	1	418.322.500	2	304.795.000	2	304.795.000	100	100	3	723.117.500			
Koordinasi dan Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	351.512.600	2	299.627.000	2	169.526.000	2	169.076.397	100	100	4	468.703.397			
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	381.521.400	1	280.436.500	32	123.741.000	32	123.741.000	100	100	33	404.177.500			
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Permerintah Kabupaten /Kota	32	416.186.700	53	321.672.600	24	191.333.000	24	189.180.567	99	99	76	510.853.167			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		67	2.309.571.970	50	99.000.000	100	4.078.222.474	-	-	-	-	25	99.000.000			
Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1	99.000.000							1	99.000.000			
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8	2.309.571.970			1	4.078.222.474		-	-	-	-	-			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		89,90	2.959.348.310	92	2.252.456.845	100	2.191.751.500	74	1.638.244.624	74	75	83	3.890.701.469			
Pengelolaan Barang Milik Daerah		89,90	2.959.348.310	92	2.252.456.845	100	2.191.751.500	74	1.638.244.624	74	75	83	3.890.701.469			
Penyusunan Standar Harga		3	384.896.770	1	325.228.500	1	309.482.500	1	263.790.862	80	85	2	589.019.362			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	144.593.050	1	49.724.100	1	33.255.000	1	21.679.180	60	65	2	71.403.280			
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	19	300.980.200	31	231.657.410	32	426.042.500	18	242.262.460	56	57	49	473.919.870			
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	342.223.650	29	305.652.580	32	269.110.000	24	197.096.420	73	73	53	502.749.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1	332.728.670	17	148.752.505	20	206.311.000	7	74.672.140	37	36	24	223.424.645			
Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	434.481.670	9	338.309.600	10	331.875.000	9	312.212.720	94	94	18	650.522.320			
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	418.781.200	1	293.842.600	1	224.803.000	1	208.269.100	90	93	2	502.111.700			
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	394.522.850	30	264.857.560	32	206.820.500	26	169.442.220	81	82	56	434.299.780			
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	206.140.250	32	294.431.990	32	184.052.000	26	148.819.522	81	81	57	443.251.512			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		98,57	5.585.676.544	92	4.772.968.070	100	4.067.054.500	100	3.979.282.820	100	98	96	8.752.250.890			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pendapatan Daerah		98,57	5.585.676.544	92	4.772.968.070	100	4.067.054.500	100	3.979.282.820	100	98	96	8.752.250.890			
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana [Pengelolaan Pajak Daerah	11	245.397.150	1	366.690.700	1	278.671.000	1	278.671.000	100	100	2	645.361.700			
Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	384.486.700	1	265.159.000	1	110.594.000	1	110.594.000	100	100	2	375.753.000			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	46.041	364.998.650	2	503.107.610	2	407.530.500	2	407.530.500	100	100	4	910.638.110			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	409.848.000	42	372.181.847	7	249.882.000	7	249.882.000	100	100	49	622.063.847			
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	11	604.242.500	9	329.465.000	9	348.215.000	9	341.551.120	99	98	17	671.016.120			
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak ang disesuaikan NJOP nya	1	394.999.400	54.000	309.213.000	54.000	259.274.000	54.000	259.274.000	100	100	108.000	568.487.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen kenetapan Wajib Pajak Daerah	7	394.025.100	1	245.085.000	1	245.085.000	1	245.085.000	100	100	2	490.170.000			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48	491.805.844	4	269.195.598	5	341.424.000	5	339.254.000	100	99	9	608.449.598			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	64	411.135.200	1	429.191.691	1	279.450.000	1	279.450.000	100	100	2	708.641.691			
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	31	348.565.500	3	473.444.000	3	537.172.000	3	469.821.000	100	87	6	943.265.000			
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	535.772.550	4	456.126.220	5	298.684.000	5	298.684.000	100	100	9	754.810.220			
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian an Pengawasan Pajak Daerah	12	392.278.950	2	351.136.404	2	258.101.000	2	249.172.800	95	97	4	600.309.204			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	608.121.000	1	402.972.000	1	452.972.000	1	450.313.400	100	99	2	853.285.400			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95,54	8.390.309.021	94	6.945.386.545	100	9.154.381.921	100	8.556.129.685	100	93	97	15.501.516.230			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	26.884.000	100	26.884.000	100	41.071.000	100	41.071.000	100	100	100	67.955.000			
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.471.000	1	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	2	15.671.000			
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.471.000	1	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	2	15.671.000			
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJIP yang telah tersusun	1	5.471.000	1	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	2	15.671.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah	Dokumen Evaluasi SKPD yang tersedia	2	10.471.000	2	10.471.000	2	10.471.000	2	10.471.000	100	100	4	20.942.000			
Administrasi Keuangan Perangkat																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah		100	4.200.748.156	93	4.236.414.245	458	5.913.680.979	458	5.397.823.935	100	91	276	9.634.238.180			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	988	3.874.387.156	936	3.911.203.245	456	5.570.960.979	456	5.055.823.935	100	91	1.392	8.967.027.180			
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	229	320.890.000	171	319.740.000	1	332.520.000	1	331.800.000	100	100	172	651.540.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun	1	5.471.000	-	5.471.000	1	10.200.000	1	10.200.000	100	100	1	15.671.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	473.197.700	89	566.886.900	155	812.721.000	155	807.905.000	100	99	122	1.374.791.900			
Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang di Buat	55	36.300.000	66	33.000.000	60	52.500.000	60	52.150.000	100	99	126	85.150.000			
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	SK pensiun yang telah di terbitkan	89	97.500.300	44	148.330.700	65	140.384.000	65	139.726.100	100	100	109	288.056.800			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40	339.397.400	38	385.556.200	30	619.837.000	30	616.028.900	100	99	68	1.001.585.100			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,15	714.206.600	96	865.926.700	1.427	957.583.550	1.427	933.874.750	100	98	762	1.799.801.450			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis dan komponen intalasi listrik	70	5.465.900	9	5.030.000	22	15.704.550	22	12.707.200	100	81	31	17.737.200			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pcs ATK yang tersedia	2.548	111.669.700	55	180.263.000	57	156.141.000	57	147.016.400	100	94	112	327.279.400			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan pembersih rumah tangga.	168	9.437.400	15	9.623.900	37	20.500.000	37	15.259.500	100	74	52	24.883.400			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia dan dokumen yang digandakan	162.922	101.229.000	9	146.661.000	7	166.506.000	7	165.418.500	100	99	16	312.079.500			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang tersedia	2.904	38.750.000	20	38.850.000	1.224	60.410.000	1.224	55.350.000	100	92	1.244	94.200.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi yang dilaksanankan	130	447.654.600	132	485.498.800	80	538.322.000	80	538.123.150	100	100	212	1.023.621.950			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		92,28	348.650.930	100	745.649.000	85	740.332.192	85	725.980.000	100	98	93	1.471.629.000			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	163.000.000	1	412.900.000							1	412.900.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang															

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	disediakan	2	64.618.750	1	24.800.000	56	178.348.000	56	176.600.000	100	99	57	201.400.000			
Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	155	108.896.550			28	164.727.300	28	153.590.000	100	93	28	153.590.000			
Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya					1	397.256.892	1	395.790.000	100	100	1	395.790.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		7	12.135.630	8	307.949.000							8	307.949.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	227.962.550	100	253.750.000	38	281.282.000	38	249.557.550	100	89	69	503.307.550			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Surat menyurat	300	3.900.000	24	3.400.500	1	6.004.000	1	2.200.000	100	37	25	5.600.500			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penyediaan telpon, air, listrik, dan internet yang dibayarkan	36	22.062.550	12	25.349.500	36	47.278.000	36	25.357.550	100	54	48	50.707.050			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12	202.000.000	264	225.000.000	1	228.000.000	1	222.000.000	100	97	265	447.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	251.712.100	79	249.875.700	70	407.711.200	70	399.917.450	100	98	74	649.793.150			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ayau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan yang dibayarkan dan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan layak	48	172.846.750	60	180.125.700	60	241.552.800	60	238.817.450	100	99	120	418.943.150			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana Kantor yang terpelihara	27	16.390.000	120	14.000.000	10	16.390.000	10	12.410.000	100	76	130	26.410.000			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor yang terpelihara			1	55.750.000	1	55.436.400	1	54.700.000	100	99	2	110.450.000			
Pemeliharaan/ RehabilitasiSarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1	62.475.350			1	94.332.000	1	93.990.000	100	100	1	93.990.000			
Program Kepegawaian Daerah				95	2.052.969.791		2.612.825.000		2.539.297.350	#DIV/0!	97	95	4.592.267.141			
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		99,43	1.196.755.885	100	977.075.850	906	1.216.623.000	906	1.195.388.900	100	98	503	2.172.464.750			
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	152	781.898.200	70	718.315.950	900	726.952.000	900	707.848.300	100	97	970	1.426.164.250			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan PNS dan PPPK															
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Hibah Korpri Yang telah diserahkan	1	329.313.285	1	102.760.000	1	280.000.000	1	280.000.000	100	100	2	382.760.000			
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terupdate di Aplikasi Kepegawaian	2.745	66.662.600	1	100.678.100	1	150.784.000	1	149.978.700	100	99	2	250.656.800			
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan gaji berkala pegawai yang telah dibuat	832	18.881.800	4	55.321.800	4	58.887.000	4	57.561.900	100	98	8	112.883.700			
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		66,35	620.390.500	100	572.595.250	4	725.687.000	4	681.503.000	100	94	52	1.254.098.250			
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi yang telah di terbitkan	301	39.459.000	2	80.286.000	2	84.281.000	2	80.715.800	100	96	4	161.001.800			
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	561	160.719.100	2	234.775.950	1	294.283.000	1	293.648.100	100	100	3	528.424.050			
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaaan promosi	208	420.212.400	1	257.533.300	1	347.123.000	1	307.139.100	100	88	2	564.672.400			
Kegiatan Pengembangan Kompetensi				100	113.547.341		284.887.000		281.747.950	#DIV/0!	99	100	395.295.291			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendiddikan lanjutan			2	113.547.341	4	284.887.000	4	281.747.950	100	99	6	395.295.291			
Kegiatan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur		59,27	329.800.600	100	389.751.350	377	385.628.000	377	380.657.500	100	99	239	770.408.850			
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penilaian kinerja ASN yang telah di input	1	114.005.000	1	146.543.900	1	143.618.000	1	142.687.300	100	99	2	289.231.200			
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN Yang Menerima Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	101	25.483.000	200	32.908.200	200	33.453.000	200	33.239.600	100	99	400	66.147.800			
Pembinaan Disiplin ASN	jumlah pejabat daerah yang telah lapor LHKPN	175	25.317.600	235	45.521.450	175	66.520.000	175	66.148.800	100	99	410	111.670.250			
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan hasil PengelolaaN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	164.995.000	20	164.777.800	1	142.037.000	1	138.581.800	100	98	21	303.359.600			
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		77,29	3.906.711.350	95	3.249.558.690		3.607.143.880		3.512.933.150	#DIV/ 0!	97	95	6.762.491.840			
Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Funsional		77,29	3.906.711.350	95	3.249.558.690	295	3.607.143.880	295	3.512.933.150	100	97	195	6.762.491.840			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Fasilitasi kerjasama kerjasaama antar lembaga pada ASN	143	291.135.000	1	91.463.800	3	71.404.000	3	69.876.400	100	98	4	161.340.200			
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dasar dan, pelatihan kepemimpinan pengawas dan seleksi jabatan tinggi pratama	69	2.245.909.950	40	2.140.489.750	55	2.185.946.000	55	2.097.023.800	100	96	95	4.237.513.550			
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan dan prajab	56	1.369.666.400	22	1.017.605.140	237	1.349.793.880	237	1.346.032.950	100	100	259	2.363.638.090			
INSPEKTORAT DAERAH																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		99,94	6.239.254.151	89	6.452.513.088	100	9.140.630.199	88	7.715.259.930	88	84	88	14.167.773.018			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	27.879.000	100	38.912.000	100	72.312.000	100	71.168.663	100	98	100	110.080.663			
kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renja tersusun (Dokumen)	1	3.981.000	1	8.900.000	3	18.985.000	3	18.726.500	100	99	4	27.626.500			
kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.983.500	1	5.000.000	1	5.365.000	1	5.282.840	100	98	2	10.282.840			
kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.983.000	1	5.000.000	111	8.355.000	111	8.241.000	100	99	112	13.241.000			
kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.974.500	1	5.000.000	1	5.225.000	1	5.163.000	100	99	2	10.163.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dana	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.994.000	1	5.012.000	99	8.000.000	99	7.715.800	100	96	100	12.727.800			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (dokumen)	1	3.997.500	1	5.000.000	8.654	20.727.000	8.600	20.521.023	99	99	8.601	25.521.023			
kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen evaluasi kinerja	1	3.965.500	1	5.000.000	1	5.655.000	1	5.518.500	100	98	2	10.518.500			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	5.469.333.639	85	5.547.129.617	100	7.722.137.564	92	6.528.260.330	92	85	89	12.075.389.947			
Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.152	5.329.027.639	559	5.358.397.617	554	7.519.139.564	480	6.329.648.330	87	84	1.039	11.688.045.947			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Inspektorat Kota PGA	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	66	136.320.000	156	180.000.000	168	184.440.000	167	180.400.000	99	98	323	360.400.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen)	1	3.986.000	1	8.732.000	1	5.838.000	1	5.768.000	100	99	2	14.500.000			
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya laoprankeuangan/bulanan/Triwulan/Semester					8.043	12.720.000	7.820	12.444.000	97	98	7.820	12.444.000			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	13.750.000	100	31.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	100	100	76.000.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapnnya	Tersedianya Seragam Olahraga Pegawai (stel)	25	13.750.000	62	31.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	100	100	63	76.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	385.980.341	100	497.314.375	100	628.940.095	96	579.856.212	96	92	98	1.077.170.587			
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banunan Lkantor	Tersedianya Komponen Alat Listrik Bangunan					18	2.704.900	18	2.704.900	100	100	18	2.704.900			
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK (pcs)	659	44.936.000	11.600	40.076.500	20.398	40.850.000	13.000	26.054.550	64	64	24.600	66.131.050			
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga (pcs)	233	5.492.500	23	35.480.000	112	22.878.000	112	22.878.000	100	100	135	58.358.000			
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersdsedianya makan dan minum rapat (orang)	1.440	28.771.600	1.560	37.118.700	1.020	23.840.000	950	21.509.500	93	90	2.510	58.628.200			
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	9.000	19.980.000	1.228	7.350.000	565	4.800.000	150	1.100.000	27	23	1.378	8.450.000			
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan	Tersediannya bahan bacaan (examplar)	1.328	5.300.000	200	5.350.000	48	4.080.000	47	3.950.000	98	97	247	9.300.000			
Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersediannya bahan kontruksi					18	4.663.195	18	4.560.000	100	98	18	4.560.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksannanya kegiatan dinas luar daerah (orang)	1.200	281.500.241	65	407.419.175	50	525.124.000	50	522.682.162	100	100	115	930.101.337			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100	29.271.000	100	69.009.000	100	156.607.240	89	16.804.200	89	11	95	85.813.200			
Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler Kantor			2	17.760.000	5	41.850.000	5	41.850.000	100	100	7	59.610.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor	2	29.271.000	5	51.249.000	12	97.953.040	12	97.352.000	100	99	17	148.601.000			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Darah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	98,28	190.725.444	100	201.475.714	100	202.428.000	98	198.274.886	98	98	99	399.750.600			
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pranko dan pengeriminan surat (pcs/kali)	1.052	11.345.000	615	6.589.000	270	3.600.000	200	2.600.000	74	72	815	9.189.000			
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening air dan listrik (rekening)	24	9.380.444	36	20.886.714	36	24.828.000	35	22.674.886	97	91	71	43.561.600			
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarnya honor jasa pelayanan umum kantor (orang)	200	170.000.000	204	174.000.000	204	174.000.000	202	173.000.000	99	99	406	347.000.000			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	122.314.727	95	136.681.382	100	313.205.300	68	275.895.639	68	88	82	412.577.021			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa servis, pajak kendaraan dan BBM Pejabat			345	97.457.442	2.611	79.370.500	2.180	65.169.980	83	82	2.525	162.627.422			
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa servis, pajak kendaraan dan BBM	4.018	114.114.727			127	72.341.600	90	49.254.010	71	68	90	49.254.010			
Kegiatan Pemeliharaan Peralartan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	5	3.650.000	13	9.445.000	14	10.220.000	14	10.200.000	100	100	27	19.645.000			
Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersediannya pemeliharaan gedung kantor	70	4.550.000	411	29.778.940	33	151.273.200	33	151.271.649	100	100	444	181.050.589			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100	716.974.000	100	674.031.370	100	1.202.305.000	95	1.136.008.033	95	94	98	1.810.039.403			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	460.766.000	99	421.653.200	100	693.160.000	95	656.635.088	95	95	97	1.078.288.288			
Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianaya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	7.301	290.470.000	151	187.761.900	1.102	375.425.000	1.100	374.038.500	100	100	1.251	561.800.400			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	daerah															
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			4	18.164.500	49	21.870.000	9	2.400.000	18	11	13	20.564.500			
Kegiatan Reviu Laporan kinerja	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			4	93.867.400	29	46.515.000	28	43.492.700	97	94	32	137.360.100			
Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Keuangan	752	103.076.000	3	7.336.000	27	6.350.000	7	1.391.500	26	22	10	8.727.500			
Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk			1	19.999.000	104	55.860.000	93	50.141.314	89	90	94	70.140.314			
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK RI dan tindaklanjuk hasil pemeriksaan APIP	2.142	67.220.000	1	94.524.400	37	187.140.000	36	185.171.074	97	99	37	279.695.474			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	256.208.000	100	252.378.170	100	509.145.000	96	479.372.945	96	94	98	731.751.115			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terselesainya laporan hasil TGR (laporan)	392	147.388.000	1	141.246.520	267	375.550.000	260	356.441.945	97	95	261	497.688.465			
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	terselesainya laporan pemeriksaan khusus	125	108.820.000	1	111.131.650	1.564	133.595.000	1.455	122.931.000	93	92	1.456	234.062.650			
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASESTENSI		99,94	628.473.025	54	720.331.603	100	1.308.773.000	58	1.293.301.160	58	99	56	2.013.632.763			
Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				100	324.421.920	100	544.190.000	99	534.681.678	99	98	99	859.103.598			
Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	tersedianya dokumen rekomensi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun			1	17.575.400	23	20.772.000	23	20.730.300	100	100	24	38.305.700			
Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Fasilitas Pengawasan	tersedianya dokumen rekomensi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun			1	306.846.520	354	523.418.000	350	513.951.378	99	98	351	820.797.898			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		99,94	628.473.025	99	395.909.683	100	764.583.000	100	758.619.482	100	99	99	1.154.529.165			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya rapat sosialisasi saber pungli	633	242.104.859	269	257.805.806	399	338.839.000	399	338.769.242	100	100	668	596.575.048			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendapatan																
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya kegiatan MPAn RB	77	55.673.466	32	19.978.000	92	118.605.000	91	116.250.161	99	98	123	136.228.161			
Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	tersedianya dokumen penilaian SPIP	3.273	239.190.400	1	65.117.925	2.165	153.505.000	2.150	151.333.936	99	99	2.151	216.451.861			
Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan veripikasi penegakan integritas	Terlaksnanya kegiatan Saber Pungli	99	91.504.300	31	53.007.952	959	153.634.000	955	152.266.143	100	99	986	205.274.095			
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		94,72	5.902.345.824	90	6.812.449.829	100	6.430.825.817	100	6.227.702.766	100	97	95	13.040.152.595			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	40.932.000	100	20.420.000	100	49.256.000	86	42.505.000	86	86	93	62.925.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	4.951.000	1	2.000.000	1	6.751.000	1	6.751.000	100	100	2	8.751.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.990.000	1	3.195.000	1	5.985.000	1	5.985.000	100	100	2	9.180.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.806.000	1	3.225.000	1	6.135.000	1	6.135.000	100	100	2	9.360.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.835.000	1	3.160.000	1	6.490.000	1	6.490.000	100	100	2	9.650.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.500.000	1	3.000.000	1	6.595.000	1	6.595.000	100	100	2	9.595.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Lancarnya Proses Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	9.000.000	1	2.020.000	1	6.190.000	1	6.190.000	100	100	2	8.210.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya Proses Penyusunan LPPD SKPD	1	8.850.000	1	3.820.000	1	11.110.000	1	11.110.000	100	100	2	14.930.000			
Administrasi Perangkat Daerah		94	4.893.217.644	88	5.352.257.979	100	5.871.234.498	100	5.613.712.841	100	96	94	10.965.970.820			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.108	4.861.208.144	950	5.211.150.979	3.500	5.756.644.498	3.500	5.499.122.841	100	96	4.450	10.710.273.820			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pelaksana Tugas	36	27.000.000	120	137.690.000	120	109.920.000	120	109.920.000	100	100	240	247.610.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen)	1	5.009.500	1	3.417.000	1	4.670.000	1	4.670.000	100	100	2	8.087.000			
Administrasi Perangkat Kepegawaian Daerah		100	40.000.000	100	37.500.000	100	54.000.000	100	-	100	-	100	37.500.000			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas	80	40.000.000	72	37.500.000	72	54.000.000	72	54.000.000	100	100	144	91.500.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		97	160.711.280	95	181.067.250	100	233.348.425	93	233.375.425	93	100	94	414.442.675			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penggantian Peralatan Listrik Kantor	64	6.255.000	64	6.056.000	67	15.477.800	67	15.477.800	100	100	131	21.533.800			
Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor (Alat Tulis Kantor)	tersedianya ATK (PCS)	703	63.021.000	703	40.987.000	962	56.190.000	962	56.190.000	100	100	1.665	97.177.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	545	29.073.210	467	14.217.000	359	11.629.600	359	11.629.600	100	100	826	25.846.600			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan logistik Kantor	854	21.809.500	856	55.140.750	1.680	63.030.000	1.680	63.030.000	100	100	2.536	118.170.750			
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan (lembar)	13.900	20.634.070	13.920	10.490.500	42.310	42.569.025	42.310	42.596.025	100	100	56.230	53.086.525			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (EKS)	120	10.200.000	120	10.200.000	120	10.200.000	120	10.200.000	100	100	240	20.400.000			
Penyediaan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	terlaksananya korrdinasi dan konsultasi (OK)	13	9.718.500	13	43.976.000	48	34.252.000	48	34.252.000	100	100	61	78.228.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	128.210.000	100	118.320.000	100	153.450.000	100	153.450.000	100	100	100	271.770.000			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi 10.000 (lembar) dan Buku Cek Giro	525	5.450.000	525	2.370.000	231	10.500.000	231	10.500.000	100	100	756	12.870.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya instalsi listrik dan SDA (Slip)	24	10.760.000	24	7.950.000	24	7.950.000	24	7.950.000	100	100	48	15.900.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor TKS, Penjaga Kantor, CS (OB)	132	112.000.000	132	108.000.000	168	135.000.000	168	135.000.000	100	100	300	243.000.000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dareah				100	120.683.000							100	120.683.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan				1	28.975.000							1	28.975.000			
Pengadaan Mebel				100	42.200.000							100	42.200.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya				8	49.508.000							8	49.508.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	40.044.980	98	227.660.000	100	69.536.894	92	64.194.000	92	92	95	291.854.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	terlaksananya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	20.084.980	7	38.650.000	7	50.360.000	7	50.360.000	100	100	14	89.010.000			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terservisnya peralatan dan mesin (unit)	14	19.960.000	5	15.820.000	70	13.830.400	70	13.834.000	100	100	75	29.654.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terservisnya peralatan dan mesin (unit)			3	173.190.000	1	5.346.494	1	5.346.494	100	100	4	178.536.494			
Penataan Organisasi		96	599.229.920	96	792.041.600							96	792.041.600			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		96	599.229.920	96	792.041.600							96	792.041.600			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	28.198.000	100	28.167.000	100	12.655.000	57	12.655.000	57	100	79	40.822.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	28.198.000	100	28.167.000	100	12.655.000	57	12.655.000	57	100	79	40.822.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terakait Dengan Pelayanan Pizinan Non Usaha	tersedianya layanan perinjinan non usaha (paten)	72	28.198.000	72	28.167.000	57	12.655.000	57	12.655.000	100	100	129	40.822.000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	228.149.000	100	673.029.000	100	1.720.465.500	3	120.465.500	3	7	52	793.494.500			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	88.870.000	100	101.029.000	100	1.451.365.500	3	120.465.500	3	8	52	221.494.500			
Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	telaksananya musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan	9	43.870.000	9	32.150.000	9	48.825.000	9	48.825.000	100	100	18	80.975.000			
Pembangunan Sarana dan prasaran kelurahan (dau)	Tersedian Sarana dan Prasaran di kelurahan					63	1.330.900.000	-	-	-	-	-	-			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan TP-PKK Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	9	45.000.000	3	68.879.000	3	71.640.500	3	71.640.500	100	100	6	140.519.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga Tinggakt Kecamatan Dan Kelurahan		100	139.279.000	100	572.000.000	100	269.100.000			-	-	100	572.000.000			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		187	139.279.000										-			
Pembentukan dan penumbuhan kerakter melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara				8	190.666.675							8	190.666.675			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kealuarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			8	190.666.675	8	269.100.000	-	-	-	-	8	190.666.675			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penumbuhan kesadran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya				8	190.666.650							8	190.666.650			
Pembangunan Sarana dan prasaran kelurahan (dau)				63	1.025.750.000							63	1.025.750.000			
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						-	-	-	-			-	-			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100	1.112.200.000	100	1.112.200.000	100	1.923.966.000	40	1.731.000.000	40	90	70	2.843.200.000			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100	1.112.200.000	100	1.112.200.000	100	1.923.966.000	40	1.731.000.000	40	90	70	2.843.200.000			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemrintahan Desa	tersedianya insentif ketua RW dan RT se kecamatan Pagar Alam Selatan	2.431	1.112.200.000	2.431	1.112.200.000	2.431	1.117.566.000	2.431	924.600.000	100	83	4.862	2.036.800.000			
Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	tersedianya operasional kelurahan					96	806.400.000	96	806.400.000	100	100	96	806.400.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		98,76	6.394.201.598	91	6.906.285.074	100	7.719.869.581	97	6.951.217.575	97	90	94	13.857.502.649			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	53.878.000	100	45.288.000	100	38.197.779	100	38.197.779	100	100	100	83.485.779			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya dokumen Renstara dan renja yang tersusun (Dokumen)	2	11.854.000	2	6.067.000	2	10.518.779	2	10.518.779	100	100	4	16.585.779			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	5.998.500	1	9.000.000	1	9.914.500	1	9.914.500	100	100	2	18.914.500			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	6.025.500	1	5.000.000	1	5.985.000	1	5.985.000	100	100	2	10.985.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.000.000	1	2.510.000	1	4.999.500	1	4.999.500	100	100	2	7.509.500			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.000.000	1	2.510.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	100	2	5.010.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanaya dokumen LPPD, LKJIP,LKPJ dan RB yang tersusun (dokumen)	4	22.000.000	4	20.201.000	4	4.280.000	4	4.280.000	100	100	8	24.481.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	5.921.119.871	90	6.448.345.109	100	7.168.586.302	98	6.725.521.747	98	94	94	13.173.866.856			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	1.800	5.864.979.871	2.057	6.344.885.109	2.210	7.056.686.302	2.210	6.616.341.747	100	94	4.267	12.961.226.856			
Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya tunjangan	24	46.140.000	78	98.460.000	78	101.900.000	78	99.180.000	100	97	156	197.640.000			
Kordinasi dan penyusunan laporan keungan akhir tahun SKPD	Adanya dokumen laporan akhir tahun	1	10.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100	2	15.000.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	25.000.000	100	36.000.000	100	86.700.000	75	86.700.000	75	100	88	122.700.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu, Pakaian Kerja Lapangan (stel)	90	25.000.000	90	36.000.000	120	86.700.000	90	86.700.000	75	100	180	122.700.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		99	156.479.875	100	79.695.438	100	117.735.500	97	64.364.532	97	55	98	144.059.970			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia (pcs)	30	9.353.000	30	6.229.000	30	6.690.000	30	6.565.000	100	98	60	12.794.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.029	70.881.000	1.029	78.360.000	1.029	55.436.000	1.010	54.745.000	98	99	2.039	133.105.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	128	8.392.600	128	17.423.100	128	12.478.000	128	11.750.000	100	94	256	29.173.100			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	30.000	17.531.275	30.000	13.508.500	30.000	15.649.500	25.000	10.075.000	83	64	55.000	23.583.500			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, (kali)	5	50.322.000	5	25.111.738	5	27.482.000	5	24.224.532	100	88	10	49.336.270			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50,00	7.804.500	100	26.150.450	100	21.470.000	895	21.470.000	895	100	498	47.620.450			
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainya	Adanya Laptop Dan Printer	1	7.804.500	3	26.150.450	2	21.470.000	2	21.470.000	100	100	5	47.620.450			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97,87	167.784.152	98	231.405.000	100	238.940.000	100		100	-	99	231.405.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	135	5.000.000	225	2.250.000	500	5.000.000	450	4.500.000	90	90	675	6.750.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telkom, PLN, PDAM, dan internet yang dibayar (lembar tagihan)	12	7.534.152	20	7.155.000	24	11.940.000	24	8.475.616	100	71	44	15.630.616			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium/ Gaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendukung Administrasi Perkantoran, terbayarnya jasa kebersihan kantor (OB)	186	155.250.000	276	222.000.000	288	222.000.000	228	222.000.000	79	100	504	444.000.000			
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah		19	62.135.200	100	39.401.077	100	48.240.000	100	36.433.517	100	76	100	75.834.594			
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizina kendaraan dinas operasionl atau lapangan	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas,(liter) jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan (unit)	613	39.215.200	3	37.211.077	3	44.590.000	3	33.433.517	100	75	6	70.644.594			
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	tersedianya jasa servis komputer dan leptop (Kali)	4	2.920.000	8	2.190.000	8	3.650.000	8	3.000.000	100	82	16	5.190.000			
Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau		1	20.000.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
bangunan lainnya																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	21.995.000	100	29.594.000	100	16.695.000	100	16.695.000	100	100	100	46.289.000			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	6.995.000	100	10.985.000	100	16.695.000	100	16.695.000	100	100	100	27.680.000			
Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksanaya musrenbang dikecamatan (dokumen)	1	6.995.000	1	10.985.000	1	16.695.000	1	16.695.000	100	100	2	27.680.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	15.000.000	100	18.609.000							100	18.609.000			
Pelakasanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		80	15.000.000	1	18.609.000							1	18.609.000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	309.576.000	24	2.182.334.000	100	2.173.200.000	8	172.150.000	8	8	16	2.354.484.000			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	174.766.000	7	1.736.094.500	100	1.574.200.000	11	172.150.000	11	11	9	1.908.244.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyaarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	terlaksanaya musrenbang kelurahan (Kegiatan)	10	27.000.000	10	31.550.000	10	25.000.000	10	25.000.000	100	100	20	56.550.000			
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kelurahan			73	1.631.687.000	73	1.401.000.000			-	-	73	1.631.687.000			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksanya STQ tingkat kecamatan hut kota ,pkk (Kegiatan)	13	147.766.000	11	72.857.500	13	148.200.000	13	147.150.000	100	99	24	220.007.500			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn Tingkat Kecamatan		100	134.810.000	92	311.361.500							92	311.361.500			
Penyedian Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		181	134.810.000	181	135.659.500							181	135.659.500			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10	175.702.000							10	175.702.000			
Pemberdayaan Dan Kesejateraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				84	134.878.000	100	599.000.000		-	-	-	84	134.878.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Adanay Sosialisasi Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat			10	112.900.000	10	258.520.000			-	-	10	112.900.000			
Penumbuh Dan Peningkatan KesadaranKeluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Adanay Sosialisasi Peningkatan KesadaranKeluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			1	21.978.000	1	340.480.000			-	-	1	21.978.000			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	23.801.000	33	24.775.000	100	16.800.000	100	16.800.000	100	100	67	41.575.000			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterama dan ketertiban umum		100	23.801.000	33	24.775.000	100	16.800.000	100	16.800.000	100	100	67	41.575.000			
Harmonisasi hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	terlaksanaya desiminasi / sosialisasi dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat (Kegiatan)	2	23.801.000	1	24.775.000	1	16.800.000	1	16.800.000	100	100	2	41.575.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	1.701.452.000	100	1.958.157.000	100	1.998.658.000	96	1.789.009.531	96	90	98	3.747.166.531			
Fesilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	1.701.452.000	100	1.958.157.000	100	1.998.658.000	96	1.789.009.531	96	90	98	3.747.166.531			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbayarnya gaji RT dan RW (OB)	2.353	1.077.400.000	2.353	1.077.400.000	2.353	1.080.658.000	2.172	899.658.000	92	83	4.525	1.977.058.000			
Fasilitasi Pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	adanya oprasional kelurahan (dokumen)	120	624.052.000	120	880.757.000	120	918.000.000	120	889.351.531	100	97	240	1.770.108.531			
KECAMATAN DEMPO UTARA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	5.505.769.997	67	5.631.410.234	100	5.778.933.085	98	5.688.305.815	98	98	82	11.319.716.049			
Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi		100	16.394.000	100	23.239.000	100	20.250.500	100	20.250.500	100	100	100	43.489.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengangkat Daerah	dokumen renja tersusun (Dokumen)	1	4.270.000	1	5.000.000	1	3.903.000	1	3.903.000	100	100	2	8.903.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.506.000	1	3.485.000	1	4.343.500	1	4.343.500	100	100	2	7.828.500			
Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.668.000	1	3.520.000	1	3.209.000	1	3.209.000	100	100	2	6.729.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)			1	3.050.000	1	2.715.000	1	2.715.000	100	100	2	5.765.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)			1	5.184.000	1	2.300.000	1	2.300.000	100	100	2	7.484.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Laporan Keuangan yang tersusun (dokumen)	1	4.950.000	1	3.000.000	1	3.780.000	1	3.780.000	100	100	2	6.780.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3.763.496.057	76	4.508.240.233	100	4.699.896.915	100	4.699.896.915	100	100	88	9.208.137.148			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, dan tunjangan,ASN (OB)	1.254	3.678.502.807	1.142	4.348.867.233	1.540	4.481.531.915	1.540	4.481.531.915	100	100	2.682	8.830.399.148			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan khir Tahun	Terbayarnya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20	5.613.250	24	23.023.000	1	5.585.000	1	5.585.000	100	100	25	28.608.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honor Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji	1	79.380.000	78	136.350.000	156	212.780.000	156	212.780.000	100	100	234	349.130.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	33.000.000	100	35.500.000	100	38.250.000	100	38.250.000	100	100	100	73.750.000			
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terbayarnya Belanja Pakaian olahraga dan pakaian Dinas lapangan	12	33.000.000	68	35.500.000	30	38.250.000	30	38.250.000	100	100	98	73.750.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	159.263.620	82	204.624.000	100	158.460.000	23	86.296.400	23	54	53	290.920.400			
Penyediaan Komponen instalasi Listrik penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen alat listrik	12	8.163.520	953	10.196.000	36	5.603.000	18	2.500.000	50	45	971	12.696.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat Tulis kantor (Pcs)	1.365	34.853.300	1.986	38.000.000	1.403	43.381.000	150	19.090.000	11	44	2.136	57.090.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan kantor (PCS)	595	12.916.800	64	31.970.000	762	26.250.000	365	13.062.000	48	50	429	45.032.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor'	Tersedianya dan terlaksanaya makan dam minum Rapat Rutin dan makan mimnum Tamu	450	39.100.000	500	40.250.000	550	25.600.000	250	10.673.000	45	42	750	50.923.000			
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dan terlaksanya bahan cetakan dan Penggandaan	7.750	8.800.000	10.500	19.240.000	10.50	10.980.000	2.500	14.480.000	24	132	13.000	33.720.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(lbr)					0										
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terdesianya bahan bacaan	96	9.000.000	1.000	15.300.000	15	7.140.000	5	7.140.000	33	100	1.005	22.440.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah (oH)	8	46.430.000	9	49.668.000	8	39.506.000	-	21.851.400	-	55	9	71.519.400			
Pengadaan barang milik Daearah Penunjang urusan Kepemerintahan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	100	27.000.000	100	34.136.300	100	39.459.570	62	183.933.570	62	466	81	218.069.870			
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Materai 1000 (lbr)	32	27.000.000	2	20.996.300	403	39.459.570	250	39.459.570	62	100	252	60.455.870			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya				1	13.140.000							1	13.140.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	100	147.158.000	32	137.825.000	100	150.474.000	40	144.474.000	40	96	36	282.299.000			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 1000 (lbr)	403	5.000.000	403	6.000.000	600	6.000.000	400	6.000.000	67	100	803	12.000.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Internit	Tersedianya Materai 1000 (lbr)	24	7.158.000	60	5.825.000	24	18.474.000	11	18.474.000	46	100	71	24.299.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Terbayarnya Honorariun Tenaga Kerja Tidak Tetap (Ok)	156	135.000.000	40	126.000.000	104	126.000.000	39	126.000.000	38	100	79	252.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Punjang Urusan Pemerintah Daerah		480	45.854.000	50	123.812.000	100	63.280.000	65	63.280.000	65	100	58	187.092.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Liter,kali,pajak)	480	22.184.000	1.188	67.072.000	246	33.580.000	84	32.020.500	34	95	1.272	99.092.500			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya		8	11.680.000	1.188	13.140.000							1.188	13.140.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor		1	11.990.000	1.188	43.600.000							1.188	43.600.000			
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasanana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Liter,kali,pajak)					4	29.700.000	4	29.240.000	100	98	4	29.240.000			
koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi Perizinan Non Usaha					100	635.858.000	79	635.858.000	79	100	79	635.858.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana (Opersional Kelurahan)	Tersedianya Operasional Kelurahan dalam Wilayah Kec.Dempo Utara					84	635.858.000	66	635.858.000	79	100	66	635.858.000			
koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Operasional Kelurahan dalam Wilayah Kec.Dempo Utara							-	-			-	-			
Penataan Organisasi		100	461.496.000	100	633.670.001							100	633.670.001			
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana (Opersional Kelurahan)		84	461.496.000	42	630.000.001							42	630.000.001			
koordinasi dan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah				84	3.670.000							84	3.670.000			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100	31.074.320	98	61.692.000	100	42.756.500	100	42.331.000	100	99	99	104.023.000			
Koordinasi Penyelanggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu	156	31.074.320	100	47.462.000	100	15.760.500	100	15.335.000	100	97	100	62.797.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan KegiatanPerangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait Musrenbang TK.Kecamatan)	Musrenbang TK Kecamatan					1	10.651.500	1	10.226.000	100	96	1	10.226.000			
koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan KegiatanPerangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait Musrenbang TK.Kecamatan)	Desminasi			1	15.037.000	1	5.109.000	1	5.109.000	100	100	2	20.146.000			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1	32.425.000							1	32.425.000			
Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		156	31.074.320										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perengkata daerah yanga dikecamatan				100	14.230.000							100	14.230.000			
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada masyarakat Dikecamatan				1	14.230.000							1	14.230.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya pelayanan administrasi Perizinan Non Usaha	100	14.596.000	95	46.440.000	20	26.996.000	156	26.996.000	780	100	126	73.436.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				95	46.440.000	156	26.996.000	156	26.996.000	100	100	251	73.436.000			
koordinasi/Sinergi Perencanaan danPelaksanaan KegiatanPerangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait		156	14.596.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.163.149.940			96	1.288.528.780	100	419.410.500	80	158.360.500	80	38	88	1.446.889.280			
Pemberdayaan kelurahan	Terlaksananya pelayanan administrasi Perizinan Non Usaha			93	-	20	419.410.500		158.360.500	-	38	93	158.360.500			
Penyediaan sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Musrenbang TK Kelurahan,stq,HUT kota,HUT RI,PKK			1	20.608.000	6	68.360.500	6	68.360.500	100	100	7	88.968.500			
Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan				42	-			-				42	-			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			39	75.827.900	156	351.050.000	-	90.000.000	-	26	39	165.827.900			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7	19.243.000										-			
Pemberdayaan di Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan (PKK kelurah Dan PKK Kecamatan)		8	50.495.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk.Kecamatan dan Kelurahan				100	596.046.440	100						100	596.046.440			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk mewujudkan Sumber daya manuasia yang berkwalitas dan berdaya saing				1	37.300.000	1						1	37.300.000			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Derajat Kesehatan keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat				156	183.274.440	156						156	183.274.440			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Kwalitas kelestarian Lingkungan Hidup				156	187.736.000	156						156	187.736.000			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Kwalitas Kelestarian Lingkungan Hidup				156	187.736.000	156						156	187.736.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100	82.500.000									#DIV/0!	-			
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		110	82.500.000										-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100	179.677.725							100	179.677.725			
Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Umum sesuai Penugasan kepala daerah				20								20	-			
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosilaisasi konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				156	157.602.725							156	157.602.725			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionalisme dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila				156	22.075.000							156	22.075.000			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	654.200.000	63	824.187.835	100	656.180.000	80	544.200.000	80	83	72	1.368.387.835			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terbayarnya Insentif Ketua Rt dan RW			770	654.200.000	5	656.180.000	4	544.200.000	80	83	774	1.198.400.000			
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum				4	169.987.835							4	169.987.835			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Insentif RT,RW)		4	654.200.000										-			
KECAMATAN DEMPO TENGAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		83,86	3.961.974.800	89	4.030.732.515	100	4.291.512.814	100	3.771.414.687	100	88	95	7.802.147.202			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	27.000.000	73	21.142.000	100	35.206.000	100	35.206.000	100	100	86	56.348.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya dokumen Renstara dan renja yang tersusun (Dokumen)	2	12.000.000	2	5.169.000	2	5.231.000	2	5.231.000	100	100	4	10.400.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000	1	2.585.000	1	5.330.000	1	5.330.000	100	100	2	7.915.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000		2.696.000	1	6.550.000	1	6.550.000	100	100	1	9.246.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000	1	2.540.000	1	6.575.000	1	6.575.000	100	100	2	9.115.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	2.500.000		3.090.000	1	6.515.000	1	6.515.000	100	100	1	9.605.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanaya dokumen LPPD, LKJIP,LKPJ dan RB yang tersusun (dokumen)	4	5.000.000	4	5.062.000	3	5.005.000	3	5.005.000	100	100	7	10.067.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2.385.899.000	70	3.125.243.421	100	3.747.363.672	100	3.251.077.496	100	87	85	6.376.320.917			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	455	2.385.899.000	455	2.878.893.421	738	3.536.563.672	738	3.068.937.496	100	87	1.193	5.947.830.917			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium			12	246.350.000	35	210.800.000	35	182.140.000	100	86	47	428.490.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	67.790.000	100	86.250.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	100	100	162.250.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	90	67.790.000	90	86.250.000	90	76.000.000	90	76.000.000	100	100	180	162.250.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	33.122.711	50	42.903.051	100	148.402.982	100	143.181.000	100	96	75	186.084.051			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30	7.698.000	4	5.807.300	100	6.860.000	100	6.860.000	100	100	104	12.667.300			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (pcs)	1.029	10.962.000	550	90.899.251	30	49.409.982	30	49.409.000	100	100	580	140.308.251			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor, KDH, WKDH yang tersedia (pcs)	21	7.700.000	21	12.454.000	20	21.120.000	20	21.120.000	100	100	41	33.574.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.363.000										-			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (pcs)	1.632	8.324.000	1.632	9.185.000	31.750	18.215.000	31.750	18.215.000	100	100	33.382	27.400.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang tersedia (eksemplar)	48	20.400.000	15	33.600.000	5	17.000.000	5	17.000.000	100	100	20	50.600.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, (kali)	5	41.597.000	2	33.110.027	10	35.798.000	10	30.577.000	100	85	12	63.687.027			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	junlah barang yang dibeli	100	68.500.000	100	53.400.000	100	26.171.160	100	26.000.000	100	99	100	79.400.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah barang yang dibeli	1	68.500.000	6	53.400.000	10	26.171.160	10	26.000.000	100	99	16	79.400.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	126.000.000	46	141.175.043	100	168.682.000	91	159.020.691	91	94	68	300.195.734			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (pcs)	500	3.000.000	90	4.000.000	400	4.000.000	25	4.000.000	6	100	115	8.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah yang dibayarkan	12	123.000.000	5	132.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	100	100	17	282.000.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah yang dibayarkan			12	5.175.043	12	14.682.000	3	5.020.691	25	34	15	10.195.734			
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah		100	107.834.000	81	113.609.000	100	89.687.000	99	80.929.500	99	90	90	194.538.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas,(liter) jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan (unit)	2.921	34.334.000	613	33.660.000	1.030	39.560.000	1.000	35.929.500	97	91	1.613	69.589.500			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Bahan Bahan Bangunan	8	73.500.000	8	79.949.000	2	50.127.000	2	45.000.000	100	90	10	124.949.000			
Penataan Organisasi		100	313.489.000	15	447.010.000							15	447.010.000			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2.921	313.489.000	613	447.010.000								447.010.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	90.703.000	100	32.175.500	100	35.521.237	100	35.521.000	100	100	100	67.696.500			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	60.691.380	100	8.482.500	100	9.080.000	100	9.080.000	100	100	100	17.562.500			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksananya musrenbang kecamatan	1	60.691.630	1	8.482.500	1	9.080.000	1	9.080.000	100	100	2	17.562.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	30.011.620	100	23.693.000	100	26.441.237	100	26.441.000	100	100	100	50.134.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	terlaksanya pelayanan terpadu di kantor camat dempo tengah (pcs)	80	30.011.620	80	23.693.000	6	26.441.237	6	26.441.000	100	100	86	50.134.000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	79.215.800	100	942.685.750	100	1.085.100.000	8	85.100.000	8	8	54	1.027.785.750			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	79.215.800	100	942.685.750	100	985.100.000	9	85.100.000	9	9	54	1.027.785.750			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksananya musrenbang 5 kelurahan di kecamatan dempo tengah	10	7.832.800	10	18.050.000	5	18.000.000	5	18.000.000	100	100	15	36.050.000			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananta pembangunan di sarana dan prasarana 5 kelurahan			1	860.776.000	60	900.000.000			-	-	1	860.776.000			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3	71.383.000	1	63.859.750	5	67.100.000	5	67.100.000	100	100	6	130.959.750			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			61.500.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan kecamatan			61.500.000										-			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100	30.398.680	100	20.920.000	100	20.848.000	100	100	100	51.246.680			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100	30.398.680	100	20.920.000	100	20.848.000	100	100	100	51.246.680			
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4	30.398.680	2	20.920.000	2	20.848.000	100	100	6	51.246.680			
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						5	100.000.000			-	-		-			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat	terlaksananya sosialisasi di 5 kelurahan					5	100.000.000			-	-	-	-			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	487.000.000	58	487.000.000	100	938.476.000	99	856.399.000	99	91		1.343.399.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fesilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	487.000.000	58	487.000.000	100	938.476.000	99	856.399.000	99	91		1.343.399.000			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbayarnya gaji RT dan RW (OB)	2.353	487.000.000	724	487.000.000	82	488.476.000	80	406.476.000	98	83	804	893.476.000			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	terbayarnya operasional kelurahan					2.353	450.000.000	2.353	449.923.000	100	100	2.353	449.923.000			
KECAMATAN DEMPO SELATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	3.215.710.371	99	4.011.549.146	100	3.927.081.318	98	3.769.106.554	98	96	99	7.780.655.700			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	29.325.500	100	53.985.500	100	53.053.500	100	52.022.000	100	98	100	106.007.500			
Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Adanya dokumen Renstara dan renja yang tersusun (Dokumen)	1	4.670.000	2	6.000.000	2	6.768.000	2	6.768.000	100	100	4	12.768.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	4.141.500	1	5.000.000	1	6.461.000	1	6.461.000	100	100	2	11.461.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	4.085.000	1	5.005.000	1	5.029.000	1	5.029.000	100	100	2	10.034.000			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD yang tersusun (dokumen)	1	3.552.000	1	5.080.000	1	6.050.000	1	6.050.000	100	100	2	11.130.000			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	3.567.000	1	5.010.000	1	6.224.000	1	6.224.000	100	100	2	11.234.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanaya dokumen LPPD, LKJIP,LKPJ dan RB yang tersusun (dokumen)	1	9.310.000	2	6.000.000	4	6.340.000	4	6.340.000	100	100	6	12.340.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun			4	21.890.500	1	16.181.500	1	15.150.000	100	94	5	37.040.500			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		98	2.434.798.671	99	2.873.425.295	100	3.258.772.418	100	3.145.959.404	100	97	100	6.019.384.699			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	14	2.434.798.671	14	2.794.715.295	648	3.143.260.418	648	3.032.067.404	100	96	662	5.826.782.699			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium	39	39.430.000	12	69.710.000	12	110.480.000	12	108.860.000	100	99	24	178.570.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Adanya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	5.000.000	1	9.000.000	1	5.032.000	1	5.032.000	100	100	2	14.032.000			
koordinasi dan Penyusunanan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1	10.027.000								10.027.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	28.138.500	100	29.950.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	100	100	53.950.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya Pakaian Dianas Beserta Atributnya	64	28.138.500	64	29.950.000	3	24.000.000	3	24.000.000	100	100	67	53.950.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		97	144.026.100	98	273.420.800	100	347.255.400	89	322.148.188	89	93	93	595.568.988			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya Biaya Komponen instalasi Listrik Untuk Keperluan Kantor dari Bulan Januari s/d Desember	40	9.500.000	40	26.705.000	12	14.560.000	12	14.360.000	99	99	52	41.065.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari bulan Januari s/d Desembar	500	61.092.000	500	64.199.000	12	70.822.000	9	63.583.000	77	90	509	127.782.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah Tangga Untuk Keperluan kantor Selama Satu Tahun	70	7.601.600	70	43.002.800	20	14.604.400	6	9.080.000	30	62	76	52.082.800			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan Minum Kantor Selama Satu tahun	488	24.000.000	488	32.300.000	31.750	56.400.000	31.750	55.965.000	100	99	32.238	88.265.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Biaya Cetak dan Penggandaan Untuk Keperluan Kantor Selama Satu Tahun	9.499	12.800.500	9.499	36.400.000	31.750	27.085.000	18.871	16.100.000	59	59	28.370	52.500.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exs)	210	6.224.000	210	7.520.000	12	6.250.000	11	5.750.000	92	92	221	13.270.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi (OK)	6	22.808.000	18	63.294.000	10	73.472.000	10	73.370.188	100	100	28	136.664.188			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya					3	84.062.000	3	83.940.000	100	100	3	83.940.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	148.000.000	100	150.996.000	100	167.980.000	100	153.621.962	100	91	100	304.617.962			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 10.000															

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(lembar)	500	10.000.000	500	19.996.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	100	100	1.500	29.996.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianyan instalasi listrik dan SDA (slip)	12	3.000.000	12	3.000.000	12	4.980.000	12	2.621.962	100	53	24	5.621.962			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium selama satu Tahun	64	135.000.000	64	128.000.000	12	153.000.000	12	141.000.000	100	92	76	269.000.000			
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah		88,67	119.401.600	100	182.049.551	100	76.020.000	100	71.355.000	100	94	100	253.404.551			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya kendaraan dinas kantor guna kelancaran operasinal perjalanan selama satu tahun	38	64.961.600	48	47.803.551	12	46.740.000	12	43.325.000	100	93	60	91.128.551			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya kendaraan dinas kantor guna kelancaran operasinal perjalanan selama satu tahun	2	8.560.000	2	9.900.000	12	8.520.000	12	8.030.000	100	94	14	17.930.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya perawatan gedung kantor dan lingkungan gedung kantor	162	45.880.000	162	124.346.000	2	20.760.000	2	20.000.000	100	96	164	144.346.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penataan Organisasi		96,00	312.020.000	100	447.722.000							100	447.722.000			
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		96	312.020.000	12	447.722.000								447.722.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	4.616.000	98	22.546.600	100	18.353.000	100	18.353.000	100	100	99	40.899.600			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	4.616.000	100	8.325.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	100	100	19.325.000			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tercapainya Musyawara dengan rt, rw dan masyarakat Kelurahan di Tingkat Kecamatan	1	4.616.000	1	8.325.000	1	11.000.000	1	11.000.000	100	100	2	19.325.000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat		100	25.233.000	96	14.221.600	100	7.353.000	100	7.353.000	100	100	98	21.574.600			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	terlaksanya pelayanan terpadu di kantor camat pagar alam utara (pcs)	27	25.233.000	26	14.221.600	6	7.353.000	6	7.353.000	100	100	32	21.574.600			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	77.702.400	93	921.208.500	100	998.752.900	6,22	62.110.000	6,22	6	49	983.318.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	77.702.400	100	921.208.500	100	881.502.900	7,05	62.110.000	7,05	7	54	983.318.500			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tercapainya Musyawara dengan rt, rw dan masyarakat di tingkat tingkat Kelurahan	5	10.940.000	5	11.007.500	5	10.810.000	5	10.810.000	100	100	10	21.817.500			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7	840.000.000	60	816.500.000			-	-	7	840.000.000			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tecapainya pengiriman peserta didalam partisipasi kegiatan kota	2	66.762.400	3	70.201.000	3	54.192.900	3	51.300.000	95	95	6	121.501.000			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoprasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.						5	117.250.000			-	-		-			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoprasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.												-	-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.						5	117.250.000			-	-	-	-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM						100	66.250.000			-	-		-			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						100	66.250.000			-	-		-			
Pembinaan Kerukunan Antara Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan sosialisasi					2	66.250.000			-	-	-	-			
Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum		100	100	100	94.197.000							100	94.197.000			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum		100	100	100	94.197.000							100	94.197.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat		2	51.100.000	3	94.197.000								94.197.000			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	452.800.000	100	451.800.000	100	900.226.000	100	790.645.426	100	88	100	1.242.445.426			
Fesilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	452.800.000	100	451.800.000	100	900.226.000	100	790.645.426	100	88	100	1.242.445.426			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terbayarnya gaji RT dan RW (OB)	912	452.800.000	912	451.800.000	988	454.168.000	988	378.113.997	100	83	1.900	829.913.997			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	terbayarnya operasional kelurahan					2.353	446.058.000	2.353	412.531.429	100	92	2.353	412.531.429			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		89,82	2.716.600.688	89	3.416.666.128	100	3.576.682.984	98	3.316.799.915	98	93	93	6.733.466.043			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	45.978.000	100	45.978.500	100	35.752.000	100	35.752.000	100	100	100	81.730.500			
Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	dokumen renja tersusun (Dokumen)	2	5.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	15.000.000			
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000			
Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyususnan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	100	100	2	11.000.000			
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	10.000.000			
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD perubahan yang tersusun (dokumen)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.970.000	1	5.970.000	100	100	2	10.970.000			
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	dokumen LPPD, ILPD, LKJIP, Perjanjian Kinerja, LKPJ, dan SPM yang tersusun (dokumen)	4	20.978.000	6	15.978.500	6	8.782.000	6	8.782.000	100	100	12	24.760.500			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Daerah		100	1.799.317.774	83	1.828.080.858	100	2.096.336.484	100	1.980.538.585	100	94	92	3.808.619.443			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan, beban kerja ASN (OB)	440	1.742.427.774	377	1.756.550.858	412	1.983.476.484	412	1.871.083.585	100	94	789	3.627.634.443			
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminiministrasi pelaksanaan tugas ASN	9	51.890.000	12	65.530.000	1	107.860.000	1	104.455.000	100	97	13	169.985.000			
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan keuangan akhir tahun yang SKPD	1	5.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100	100	2	11.000.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	19.800.000	100	210.464.268	100	208.164.000	100	208.029.419	100	100	100	418.493.687			
Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapnnya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	36	19.800.000	1	48.243.288	1	25.500.000	1	25.492.792	100	100	2	73.736.080			
Pendidikan dan Pelatihan Peagawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tusi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan			16	162.220.980	16	182.664.000	16	182.536.627	100	100	32	344.757.607			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	419.868.519	94	793.231.163	100	569.758.500	100	542.870.700	100	95	97	1.336.101.863			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan yang tersedia	10	15.026.386	10	26.038.500	12	8.000.000	12	7.933.000	100	99	22	33.971.500			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.600	59.992.000	45	114.913.000	12	98.000.000	12	97.917.600	100	100	57	212.830.600			
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan kebersihan kantor, yang tersedia	1.015	28.614.600	108	145.705.300	12	35.000.000	12	34.780.000	100	99	120	180.485.300			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12.369	20.881.893	4	76.326.500	12	37.376.500	12	27.440.100	100	73	16	103.766.600			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan yang tersedia	21	3.020.000	24	10.400.000	12	21.004.000	12	4.800.000	100	23	36	15.200.000			
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	119	292.333.640	62	419.847.863	12	370.378.000	12	370.000.000	100	100	74	789.847.863			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	70.800.000	100	57.763.900	100	129.240.000	94	115.781.310	94	90	97	173.545.210			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	8	70.800.000	7	57.763.900	17	129.240.000	16	115.781.310	94	90	23	173.545.210			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	222.459.670	100	234.322.168	100	319.392.000	81	229.909.946	81	72	91	464.232.114			
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200	2.000.000	1	5.475.000	1	5.000.000	1	4.974.000	100	99	2	10.449.000			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37	16.459.670	1	13.597.168	12	20.392.000	12	17.185.946	100	84	13	30.783.114			
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	21	204.000.000	252	215.250.000	252	294.000.000	200	207.750.000	79	71	452	423.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	138.376.725	90	304.589.171	100	218.040.000	100	203.917.955	100	94	95	508.507.126			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak danperizinannya	1	78.531.725	27	179.515.980	35	148.040.000	35	135.049.830	100	91	62	314.565.810			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	59.845.000	20	125.073.191	12	70.000.000	12	68.868.125	100	98	32	193.941.316			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	258.759.300	96	1.267.707.497	100	1.925.945.720	100	1.916.847.015	100	100	98	3.184.554.512			
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	258.759.300	96	1.267.707.497	100	1.925.945.720	100	1.916.847.015	100	100	98	3.184.554.512			
Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yg disusun	1	119.384.300	2	15.000.000	2	98.074.000	2	98.074.000	100	100	4	113.074.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pancasila dan Karakter Kebangsaan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yg disusun	40	30.565.000	1	8.000.000	1	16.527.000	1	16.527.000	100	100	2	24.527.000			
Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yg mengikuti kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan			100	466.239.497	100	607.666.000	100	607.082.687	100	100	200	1.073.322.184			
Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yg mengikuti kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (GNRM)	6	108.810.000	140	778.468.000	150	1.193.298.720	150	1.188.283.328	100	100	290	1.966.751.328			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah orang yg mengikuti kebijakan teknis di bi Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (PASKIBRA)											-	-			
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalam Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat					2	10.380.000	2	6.880.000	100	66	2	6.880.000			
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		100	1.577.238.848	100	12.474.757.174	100	28.936.132.148	100	28.900.259.869	100	100	100	41.375.017.043			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilahan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		100	1.577.238.848	100	12.474.757.174	100	28.936.132.148	100	28.900.259.869	100	100	100	41.375.017.043			
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jjumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	17	20.565.500			1	22.051.000	1	19.818.700	100	90	1	19.818.700			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	12	771.429.424	50	11.688.157.250	100	28.039.663.032	100	28.039.142.108	100	100	150	39.727.299.358			
Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Etika BudayaPolitik, peningkatan demokrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	12	771.429.424	20	776.862.724	100	778.570.116	100	745.742.661	100	96	120	1.522.605.385			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang politik, pendididikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemeilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	jumlah lap hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang politik, pendididikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemeilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4	13.814.500	1	9.737.200	2	95.848.000	2	95.556.400	100	100	3	105.293.600			
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100,00	14.083.000	100	110.000.000	100	806.000.000	100	801.470.000	100	99	100	911.470.000			
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100,00	14.083.000	100	110.000.000	100	806.000.000	100	801.470.000	100	99	100	911.470.000			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah			70	110.000.000	35	790.000.000	35	790.000.000	100	100	105	900.000.000			
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika (P4GN)					1	16.000.000	1	11.470.000	100	72	1	11.470.000			
Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		13	5.243.000										-			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		13	8.840.000										-			
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	169.650.500	78	56.991.600	100	110.000.000	100	106.625.813	100	97	89	163.617.413			
Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100	169.650.500	78	56.991.600	100	110.000.000	100	106.625.813	100	97	89	163.617.413			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang memgikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi sosial budaya dan fasiltasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	4	56.430.000	30	49.991.600	900	100.000.000	900	99.875.813	100	100	930	149.867.413			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi i di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	40	105.907.000	60	7.000.000	5	10.000.000	5	6.750.000	100	68	65	13.750.000			
Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pemcegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		40	7.313.500										-			
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik		100	46.489.200	88	844.697.164	100	394.298.000	100	386.173.716	100	98	94	1.230.870.880			
Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penaganan konflik sosial		100	46.489.200	88	844.697.164	100	394.298.000	100	386.173.716	100	98	94	1.230.870.880			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	40	13.349.200	125	646.495.564	150	10.000.000	150	10.000.000	100	100	275	656.495.564			
Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yg mengikuti Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	50	8.140.000	60	5.000.000	100	55.800.000	100	55.273.200	100	99	160	60.273.200			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja pada Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8 = 4 + 6		9=8/3x100%		10
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah lap hasil monitoring Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1	25.000.000	2	7.139.000	4	20.000.000	4	19.862.100	100	99	6	27.001.100			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota					12	308.498.000	12	301.038.416	100	98	12	301.038.416			

Tabel 2.125 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Pendidikan				
1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	53,77	95,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12	91,86	99,62	Dinas Pendidikan dan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			Kebudayaan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat				
1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,36	98,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat				
1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	80,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1				
Urusan Kesehatan				
Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,09	1,119	Dinas Kesehatan
Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,22	93,42	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,20	98,53	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,29	99,23	Dinas Kesehatan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,80	96,14	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,41	98,32	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,02	85,35	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,03	95,28	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,81	82,96	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,77	81,38	Dinas Kesehatan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76,11	84,30	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	38,32	44,76	Dinas Kesehatan
1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	55,84	83,92	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	0	di Kota Pagar Alam tidak ada Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS karena pada peta rawan bencana daerah rawan banjir bukan merupakan kawasan pemukiman penduduk dan tidak ada infrastruktur pengendalian daerah rawan banjir hal ini

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota				karena sungai yang g
1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	Di Kota Pagar Alam tidak adanya kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan di WS karna Kota Pagar Alam merupakan daerah pegunung dan sesuai dengan Peta Rawan Bencana dan Kawasan Kota Pagar Alam tidak ada pantai dan Kawas

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	71,34	71,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	69,31	71,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,75	72,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				
1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat				
1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	62,19	66,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis 12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konst ruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	Tidak ada bencana alam yang menyebabkan kerusakan rumah di kota Pagar Alam Tahun 2024

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	Tidak ada relokasi karena tidak adanya kejadian bencana alam di kota Pagar Alam Tahun 2024
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	10,76	13,14	Dinas PERKIMTAN

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,67	3,77	Dinas PERKIMTAN
1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	6,59	7,16	Dinas PERKIMTAN

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100	SAT POL PP
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	100	SAT POL PP
1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	90,00	100	BPBD

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	300,73	1,09	BPBD
1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100	BPBD
1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	1285,71	BPBD

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,00	12,85	Jarak Tempuh dari Posko ke Lokasi yang masih menjadi kendala, karena di Kota Pagar Alam belum adanya Mobil Damkar disetiap Kecamatan
Urusan Sosial				
1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	0,00	100	Dinas Sosial

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah yang disediakan				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial 15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar 19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100	Dinas Sosial
Urusan Tenaga Kerja				
1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	DPMPTSPTK
1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikatkompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	66,67	72,73	DPMPTSPTK

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)				
1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3135681726,03	271003975,93	DPMPTSPTK
1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	21,15	20	DPMPTSPTK

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan kepentingan 10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan11. Jumlah perselisihan PHK12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial				
1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	38,36	51,5151515	DPMPTSPTK

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang terdata 11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan 12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya 14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	23,09	36,89	Dinas KBPP
1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100,00	100	Dinas KBPP

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	236,25	18,70	Dinas KBPP
4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi 7. Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Pangan				
1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	230,40	82,84	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Pertanahan				
1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	0	Dinas PERKIMTAN
1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	100	Dinas PERKIMTAN

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	0	Dinas PERKIMTAN
1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	Tidak adanya tanah yang didistribusikan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	Dinas PERKIMTAN
1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	70,58	100	Dinas PERKIMTAN
Urusan Lingkungan Hidup				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan(IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	74,02	72,17	Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	85,42	54,46	Dinas Lingkungan Hidup
1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58,33	73,33	Dinas Lingkungan Hidup

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.				
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	96,58	99,12	Dinas CAPIL
1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	59,99	71,16	Dinas CAPIL
1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran	97,42	98,33	Dinas CAPIL

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Jumlah Perangkat Daerahyang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	57,14	23,53	Dinas CAPIL
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0	

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	2,3	0	
Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,3	Dinas KBPP

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,02	76,93	Dinas KBPP
1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,39	6,74	
Urusan Perhubungan				
1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota	50	0,4	Dinas Perhubungan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,32	0,33	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika				
1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	6,25	DISKOMINFO

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	53,13	77,42	DISKOMINFO

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 11. Persentase data yang dapat berbagi pakai 12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	91,84	24,62	DISKOMINFO

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah				
1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	5,67	38,30	DISPERINDAG dan UKM

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,52	5,72	DISPERINDAG dan UKM
Urusan Penanaman Modal				
1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-60,41	-24,84	DPMPTSPTK

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota				
Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan				
1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,07	DISPORA
1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	31,44	2,36	kurang aktifnya organisasi pemuda

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Peningkatan prestasi olahraga	2,00	0	belum adanya perolehan medali tingkat nasional di tahun 2024
Urusan Statistik				
1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	45	DISKOMINFO
1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	45	DISKOMINFO
Urusan Persandian				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	53,18	DISKOMINFO
3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				
Urusan Kebudayaan				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran 7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	61,6667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14. Pembentukan tim ahli cagar budata kab/kota 15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya 16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyara				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Perpustakaan				
1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,01	66,34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	81,74	94,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan				
1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	32,88	54,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1,33	33,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Kelautan dan Perikanan				
1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	93,46	96,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Pariwisata				
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	157,14	5,56	Dinas Pariwisata

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	11,12	5,70	Dinas Pariwisata

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tingkat hunian akomodasi	12,89	14,00	Dinas Pariwisata

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,62	6,90	Dinas Pariwisata

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,17	3,51	Dinas Pariwisata

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				
Urusan Pertanian				
1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	612,07	624,96	Dinas Pertanian
1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-15,34	-8,7923729	Dinas Pertanian
Urusan Kehutanan				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			100	sudah menjadi wewenang provinsi
Urusan Perdagangan				
1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	DISPERINDAG dan UKM
5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu				

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	19,10	0,05	DISPERINDAG dan UKM
1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	22,85	99,48	DISPERINDAG dan UKM
Urusan Perindustrian				
1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		-89,03	DISPERINDAG dan UKM

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	33,903	37,32	DISPERINDAG dan UKM
1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	DISPERINDAG dan UKM
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	DISPERINDAG dan UKM

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	0	DISPERINDAG dan UKM
1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3	125	DISPERINDAG dan UKM
Urusan Perencanaan dan Keuangan				
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,01	3,10	BKD
	Rasio PAD	2,28	10,21	BKD
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	2,881	INSPEKTORAT

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,00	3	INSPEKTORAT
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	64,18	69,24	BKD
	Opini Laporan Keuangan	8	9	INSPEKTORAT
Urusan Pengadaan				
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	SETDAKO
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	48,59	48,78	SETDAKO
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	4,86	73,11	SETDAKO

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	46,71	88,90	SETDAKO
Urusan Kepegawaian				
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,85	88,03	BKPSDM
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,49	16,77	BKPSDM
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34,40	23,79	BKPSDM

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Manajemen Keuangan				
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	13,22	15,40	BKD
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	90,27	53,57	BKD
	Manajemen Aset	2	2	BKD
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	19,11	12,66	BKD

IKK Output	IKK Outcome	Capaian		OPD Penanggung Jawab
		2023	2024	
Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik				
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100,27	99,82	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	91,67	100	BKD

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Pagar Alam

Berdasarkan gambaran umum, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 serta tahun berjalan di tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut:

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan harapan (gap expectation) antara perencanaan yang disusun dengan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kekuatan (strength) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weakness) yang belum teratasi, peluang (opportunity) yang belum dimaksimalkan, serta ancaman (threat) yangbelum diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dalam menentukan permasalahan pembangunan yang ada di Kota Pagar Alam dilakukan melalui penelaahan terhadap kinerja pemerintah yang belum tercapai pada periode sebelumnya yang disesuaikan menurut bidang dan urusan yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.

Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja 2024		Permasalahan Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Rumusan Isu Strategis
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Angka Rata Rata Lama Sekolah	9,69	9,42	Rata - Rata Lama Sekolah Kota Pagar Alam masih belum mencapai target	Belum Optimalnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kapasitas Daya Saing SDM belum Optimal
		Harapan Lama Sekolah	13,3	13,5			
2	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	Indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan	41,6	28,8	Daya Saing Kepemudaan Masih Rendah, dan Masing Kurangnya Fasilitas Keolahragaan		
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	67,5	73,88			
4	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Katagori Nilai SAKIP	BB	B	Nilai SAKIP Kota Pagar Alam MasihBelum Maksimal	Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tata Kelola menuju Good Governance
		Nilai	70,01	63,68			
		Indeks Profesionalitas ASN	51	46,9			
		Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP			
		Persentase IKM OPD dalam Kategori Baik	100	79,82	Kualitas Pelayanan Publik di Kota Pagar Alam masih belum maksimal		
		Indeks SPBE	3	2,54	Indeks SPBE Kota Pagar Alam Masih Rendah		
5	Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Bermasyarakat yang kondusif	Indeks Demokrasi	100	63,47	Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat		Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal
		Indeks Rasa Aman	95,47	88,5	Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan		
6	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Investasi	34,9	75,16			
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,58	2,34			
		Angka Kemiskinan	7,7	8,18			
7	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Terhadap PDRB.	4,84	3,10	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Industri Pengolahan) masih minim	Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Unggulan dan Perekonomian Daerah	1. Pengelolaan Potensi Unggulanl Daerah belum Optimal; 2. Pengeloaan Potensi Pariwisata belum Optimal
		Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,08	6,98			
		Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	4,36	2,94			
8	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11,43	17,14			
9	Meningkatnya Pengembangan Wisata dan Budaya Daerah	Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional	11	11			
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	6,8	6,8			
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,64	72,17	Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) belum optimal		Infrastruktur Dasar Belum Optimal
11	Meningkatnya pembangunan dan pelayanan infrastruktur	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	65,36	66,29		Belum Optimalnya Akses terhadap layanan Dasar	
		Persentase akses penduduk terhadap sanitasi layak	69,3	70,65			
		Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak	75,08	71,89	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak belum Optimal		
		Persentase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	0,74	0,35	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh belum optimal		
		Indeks Konektivitas	1	1			
12	Meningkatnya Ketanguhan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	126,4	126,4			

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPD dan RKPD Kota Pagar Alam maka permasalahan pembangunan di Kota Pagar Alam berdasarkan urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.127 Resume Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
Pendidikan		
	a	Angka Rata-Rata Lama Sekolah belum tercapai
		- Pada tahun 2024, angka harapan lama sekolah Kota Pagar Alam sebesar 9,42 belum tercapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan masih di bawah capaian nasional sebesar 13,10.
	b	Masih rendah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP
		- Pada tahun 2024 APM SD/SMP di Kota Pagar Alam mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
Kesehatan		
	a	Angka Kematian Ibu masih tinggi sebesar 110,09
	b	Angka stunting pada balita masih tinggi sebesar 23,13%. (2023)
	c	Tingginya Kematian bayi; 4,24 (2024)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	a	Sampai dengan tahun 2024 proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 66,29% dari 548.25 km jalan di Kota Pagar Alam. terdapat jalan sepanjang 333.85 km dalam kondisi mantap, sepanjang 248.65 km jalan baik, dan sepanjang 45.30 km jalan rusak serta sepanjang 169.10 km jalan rusak berat.
	b	Sampai dengan tahun 2024 proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 71,54% dari dari 5025 Ha kawasan irigasi, 3568 Ha dalam kondisi baik.
	c	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
	d	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak masih dibawah target
	e	Persentase Akses Penduduk terhadap Sanitasi Layak masih dibawah target
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	a	Tahun 2024, Persentase lingkungan kawasan pemukiman kumuh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	a	Masih terdapat lokasi rawan bencana terkait banjir, kebakaran, dan tanah longsor
Sosial		
	a	Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Sosial;

URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
	b	Banyaknya bantuan sosial belum tepat sasaran antara lain disebabkan karena Basis Data Terpadu (BDT) belum terupdate secara berkelanjutan.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja		
	a	Serapan tenaga kerja masih banyak pada sektor pertanian perkebunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	a	Masih terdapat kasus KDRT dan masih terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Pangan		
	a	Masih impor daging, susu dan telur dari daerah lain
Pertanahan		
	a	Tahun 2024, Persentase Luas Lahan Bersertifikat sebesar 99,68. Masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar
Lingkungan Hidup		
	a	Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) belum optimal
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	a	Persentase penerbitan e-KTP di kabupaten/kota belum 100%.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	a	Pembinaan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan PKK belum optimal
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	a	Capaian Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan kontrasepsi KB belum masksimal dilihat dari rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB aktif
Perhubungan		
	a	Belum optimalnya fasilitas terminal nendagung
Komunikasi dan Informasi		
	a	Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di PemerintahKota Pagar Alam sampai ke wilayah blankspot;
	b	Kurangnya dukungan SDM IT
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	a	Rendahnya pertumbuhan modal koperas, diakibatkan rendahnya Persentase Koperasi Aktif
Penanaman Modal		
	a	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum tersusun.
	b	Pelayanan PTSP belum optimal
Kepemudaan dan Olahraga		
	a	Peringkat Sumsel pada PON 2016 berada di posisi 21.
	b	Jumlah pelatih yang bersertifikat masih rendah.
	c	Masih kurangnya atlit berprestasi
	d	Persentase organisasi pemuda yang aktif masih rendah dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
Statistik		
	a	Belum optimalnya pemanfaatan data statistic sebagai sumber dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan
	b	Kurangnya SDM dibidang statistik

URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
Persandian		
	a	Kurangnya SDM dibidang Persandian
	b	Belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai
Kebudayaan		
	a	Jumlah kawasan Situs Budaya yang terdata masih rendah.
		Persentase Kawasan Situs/Cagar budaya dikaji masih rendah
		Persentase Kawasan situs/ cagar budaya yang dipublikasikan masih rendah
Perpustakaan		
	a	Kurangnya minat pengunjung perpustakaan
	b	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah masih minim
Kearsipan		
	a	Gedung tempat penyimpanan arsip yang belum memadai
	b	Minimnya tenaga SDM kearsipan yang terlatih dalam pengelolaan arsip;
	c	Kurangnya sarana dan prasaranpengamanan arsip.
Urusan Pemerintah Pilihan		
Kelautan dan Perikanan		
	a	Masih rendahnya konsumsi ikan /perkapita/tahun
Pariwisata		
	a	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata
Pertanian		
	a	banyak terdapat alih fungsi lahan dari komoditi tanaman pangan ke non pertanian;
	b	Sering terjadi fluktuasi harga komoditi tanaman hortikultura
Perdagangan		
	a	Masih rendahnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Perindustrian		
	a	Masih rendahnya kontribusi sektor Industrin terhadap PDRB
Urusan Penunjang Pemerintahan		
Perencanaan Pembangunan		
	a	Belum optimalnya penggunaan aplikasi sistem perencanaan dengan sistem penganggaran.
	b	Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provins) dan non pemerintah (CSR, dll).
Keuangan		
	a	Nilai kemandirian keuangan daerah masih bertumpu pada pemerintah Provinsi dan Pusat
	b	Belum optimalnya penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		
	a	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan pelatihan serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional masih rendah
Pengawasan		
	a	Masih rendahnya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Pagar Alam yaitu masih berpredikat B.
Penelitian dan Pengembangan		
	a	Hasil Penelitian masih belum dimanfaatkan dengan optimal;
	b	Masih kurangnya SDM dibidang Penelitian dan Pengembangan

2.4.3 Isu Strategis

Penetapan isu strategis didasarkan pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024, Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka Isu strategis Kota Pagar Alam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a) Kapasitas Daya Saing SDM belum Optimal
b) Pengelolaan Potensi Unggul Daerah belum Optimal
c) Pengeloaan Potensi Pariwisata belum Optimal
d) Industri Pengolahan belum Optimal
e) Infrastruktur Dasar Belum Optimal
f) Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal
g) Tata Kelola menuju Good Governance

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Pagar Alam serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Pagar Alam. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026.

3.1.1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang

mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi market intelligence, business matching dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Comprehensive Eonomic Partnership Agreement (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e- commerce bagi pelaku UMKM, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Tabel 3.1 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026
Sisi Pengeluaran (persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Sasaran 2026
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53–5,83
2	Konsumsi Pemerintah	6,85–6,96
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17–7,18
4	Ekspor Barang dan Jasa	7,05–7,17
5	Impor Barang dan Jasa	7,34–7,50
Pertumbuhan PDB		**5,80–6,30**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah)

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor Industrial Process and Production Use (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor demand side pun diprakirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor- Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia;
(ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0).

Tabel 3.2 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026
Sisi Lapangan Usaha (persen)

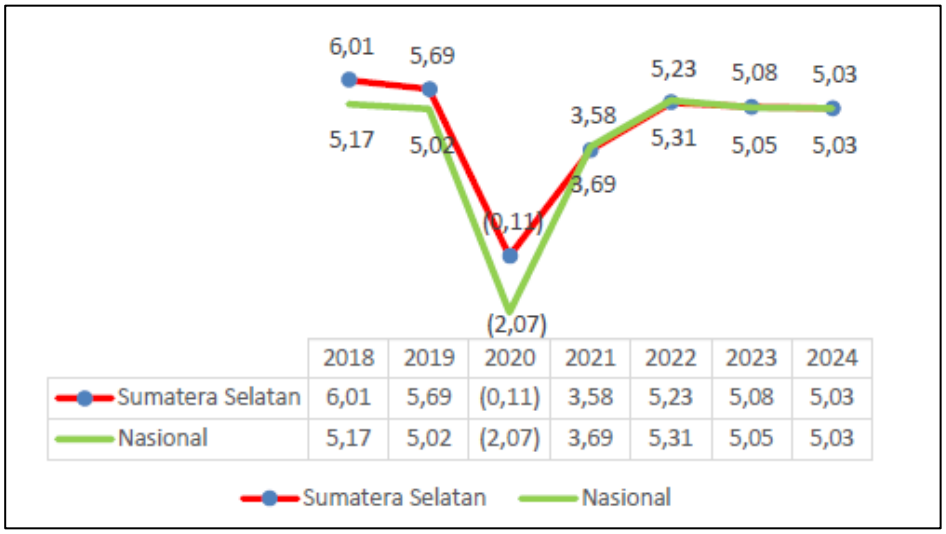
No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Sasaran 2026
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
2	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
3	Industri Pengolahan	5,85–6,38
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,68–6,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
6	Konstruksi	7,80–7,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
8	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
10	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
12	Real Estate	2,78–2,98
13	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
15	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
17	Jasa lainnya	7,24–7,76
Pertumbuhan PDB		**5,80–6,30**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah)

3.1.2. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbur sebesar 5,08 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas yang signifikan pada tahun 2023 setelah kondisi pandemic COVID-19 mulai terkendali. Pertumbuhan tahun 2024 ini berada sama dengan capaian nasional yang juga sebesar 5,03 persen.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024



Sumber: BPS Tahun 2025

Terlihat hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan sektoral tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 9,39 persen walaupun secara umum mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,14 persen. Kategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral adalah kategori jasa Kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi -0,02 persen pada tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 ini bertumbuh positif menjadi sebesar 7.34 persen.

Pada kategori yang mendominasi perekonomian sebesar 24,6 persen yakni kategori pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,33 persen yang turun dari tahun 2024 sebesar 7,89 persen. Pada kategori sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang kontribusi ekonomi daerah terbesar kedua yaitu 13,85 persen, memiliki pertumbuhan ekonomi yang relative stabil diangka 7.42 persen, naik 0,14 persen dari tahun 2024 yang sebesar 7,28 persen.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Lapangan usaha	Pertumbuhan							Distribusi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	2.33	3.34	1.75	2.91	3.82	2.16	2.59	14.84	14.48	15.17	14.71	13.08	13.1	13.56
B. Pertambangan dan Penggalian	9.09	8.11	−4.08	5.47	6.28	7.89	3.33	20.17	20.33	18.32	21.03	27.71	26.6	24.6
c. Industri Pengolahan	5.4	4.82	0.72	2.18	4.52	3.91	4.39	19.51	19.37	19.73	19.09	17.51	17.91	18.27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.85	10.29	14.67	5.76	1.46	4.4	8.48	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.96	7.46	4.83	−4.69	0.66	0.33	2.66	0.12	0.12	0.13	0.12	0.1	0.1	0.1
F. Konstruksi	5.59	3.34	−0.01	−0.02	1.27	3.55	5.89	12.99	12.55	12.53	11.92	10.67	10.69	10.8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.09	8.22	−1.34	5.79	10.27	7.28	7.42	12.95	13.54	13.71	13.47	12.97	13.4	13.85
h. Transportasi dan Pergudangan	7.36	8.3	−5.91	−2.2	11.63	7.49	3.44	2.37	2.48	2.35	2.12	2.21	2.46	2.5
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	13.15	15.34	−7.21	4.43	14.67	13.14	9.39	1.76	1.97	1.87	1.81	1.77	1.91	2.01
J. Informasi dan Komunikasi	7.73	8.15	12.79	6.04	8.12	6.35	8.84	2.85	2.91	3.29	3.21	2.91	2.9	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.78	−1.44	1.64	4.19	−0.6	4.6	7.09	2.54	2.36	2.39	2.38	2.08	2.07	2.13
L. Real Estate	7.95	8.03	2.24	5.81	5.23	4.28	8.17	3.08	3.19	3.34	3.24	2.9	2.87	2.94
M,N. Jasa Perusahaan	9.51	9.57	−2.08	0.6	2.9	2.03	5.18	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.7	1.09	4.17	3.88	3.7	3.73	9.35	2.85	2.67	2.9	2.77	2.45	2.42	2.51
P. Jasa Pendidikan	2.72	4.73	−1.5	6.57	2.24	2.23	6.76	2.36	2.35	2.4	2.37	2.06	2.03	2.15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.56	9.57	10.14	5.63	4.15	−0.02	7.34	0.59	0.62	0.72	0.7	0.63	0.6	0.63
R,S,T,u. Jasa lainnya	9.06	7.77	5.23	0.93	2.05	1.95	4.12	0.76	0.79	0.86	0.8	0.71	0.69	0.7
PRoDuK DoMESTIK REGIoNAL BRuTo	6.01	5.69	-0.11	3.58	5.24	5.08	5.03	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Pada tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,6 persen;
2) Industri Pengolahan sebesar 18.27 persen;
3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,85 persen
4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,56 persen; dan
5) Konstruksi sebesar 10,8 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2024

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2024						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Pertambangan dan Penggalian (20,17%)	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)	Pertambangan dan Penggalian (24,6 %)
II	Industri Pengolahan (19,51%)	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)	Industri Pengolahan (18.27 %)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,84%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,85%)
IV	Konstruksi (12,99%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,56%)
V	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)	Konstruksi (10,8%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha Tahun 2018-2024, dimana dari tahun 2018 sampai dengan 2019 posisi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian dan sempat tergantikan menjadi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 yang dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi COVID-19. Adapun pada tahun 2021-2024, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan tetapi di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan samapi menjadi sebesar 24,6 persen pada tahun 2024.

Tabel 3.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65661.8	68961.2	72602.3	77172.25	82399.82	90046.53
B. Pertambangan dan Penggalian	92166.1	83283	103810.2	163520.9	167372.9	163335
C. Industri Pengolahan	87834.5	89705.8	94212.9	103317.4	112694.8	121330.2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575.1	673	727.7	751.15	800.02	876.5
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	558	606	595	604.09	614.14	640.95
F. Konstruksi	56906.6	56977.9	58864.4	62954.78	67278.81	71717.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61412.8	62324.5	66480.8	76530.69	84297.46	91958.7
H. Transportasi dan Pergudangan	11223.4	10668.9	10471.9	13043.41	15483.89	16579.86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8937.5	8519.4	8933.4	10470.48	12044.55	13370.89
J. Informasi dan Komunikasi	13177.4	14936.5	15852.3	17142.47	18257.14	19905.37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10716	10878.3	11728.2	12283.33	13028.56	14166.1
L. Real Estat	14462.1	15202.6	15984.2	17127.44	18072.53	19502.51
M,N. Jasa Perusahaan	615.1	616.5	623.1	663.62	698.52	747.94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12100.9	13181.3	13653.4	14473.67	15216.34	16669.52
P. Jasa Pendidikan	10636.7	10928.2	11676.2	12164.87	12746.35	14304.86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2820.4	3254.9	3473.5	3691.86	3799.28	4154.71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3598.1	3889.3	3947.4	4166.98	4363.52	4654.93
Produk Domestik Regional Bruto	453402.7	454607.4	493636.9	590079.4	629168.7	663961.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2024, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi Miliar 663.961,7 Rupiah tahun 2024.

Tabel 3.6 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran dengan rincian Net Ekspor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277771	296905	295605	308635	347794	381441	410002
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6358.15	7240.99	6748.58	7130.46	8067.44	8983.35	10660.6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32460.3	36686.9	31995	34055.6	34163.9	37333.9	40973
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157635	160153	162651	165436	182083	191037	205916
5. Perubahan Inventori	-972.55	-731.37	-1972.3	380.65	-6.06	3.76	7.56
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-53859	-46851	-40420	-22001	17976.7	10369.8	-3597.6
Produk Domestik Regional Bruto	419392	453403	454607	493637	590079	629169	663962

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 410.002 miliar rupiah.

Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 205.916 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.7 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183421	190641.5	186943.1	190560.7	201978.4	212618.5	222564.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4563.1	5009.23	4710.91	4806.55	5067.13	5419.47	6261.17

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21604.63	22801.46	19869.06	20444.95	20691.85	21900.25	23736.29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111301.2	113186.3	114605.2	111007.1	108306.9	110986.6	115876
5. Perubahan Inventori	-227.6	-319.38	-1331.43	54.85	-2.07	1.88	3.75
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-22178.2	-15854.4	-9667.59	-468.99	7461.35	10040.73	10678.19
Produk Domestik Regional Bruto	298484.1	315464.8	315129.2	326405.2	343503.6	360967.4	379119.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 222.564,2 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 115.876 miliar rupiah

Perkiraan Makro Ekonomi Sumsel 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 dengan fokus pada pemantapan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Tema pembangunan tahun 2026 adalah "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan".

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur unggulan, termasuk proyek strategis seperti New Palembang Port Tanjung Carat. Pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi logistik di Sumatera Selatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, upaya sinkronisasi program dan kegiatan di bidang kebinamargaan dan tata ruang juga menjadi fokus. Rapat teknis yang diselenggarakan bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar

kabupaten/kota, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan Sumatera Selatan tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

3.1.3. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pagar Alam

Pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,88%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,62%.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan / Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pagar Alam Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	5,96	4,13	3,07	3,1
B. Pertambangan dan Penggalian	-4,41	2,67	2,59	2,67	4,11
C. Industri Pengolahan	0,4	2,41	4,23	4,44	2,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,15	8,83	5,46	2,22	7,8
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,63	0,08	3,63	-0,18	5,56
F. Konstruksi	0,01	0,76	4,04	3,33	4,6
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,11	6,64	6,9	6,91	6,98
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,29	1,75	5,52	6,2	7,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,2	8,91	10,78	9,72	9,88
J. Informasi dan Komunikasi	10,01	7,34	8,17	6,38	8,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,8	2,68	0,01	4,62	6,7
L. Real Estat	1,09	2,59	4,57	4,11	6,23
M,N. Jasa Perusahaan	-2,01	2,24	2,87	2,01	5,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,89	1,16	2,14	3,12	6,88
P. Jasa Pendidikan	-1,12	5,8	5,46	3,81	3,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,33	4,11	3,89	0,01	0,62
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,43	1,56	3,63	2,36	4,83
Produk Domestik Regional Bruto	**0,02**	**4,39**	**4,86**	**4,35**	**5,05**

Sumber : pagaralamkota.bps.go.id (BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025)

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Pagar Alam pada tahun 2024, yaitu sebesar 23,84% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,1%. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil memberikan sumbangan sebesar 20,61% dengan laju pertumbuhan 6,98%, dan sektor konstruksi memberikan sumbangan sebesar 15,33% dengan laju pertumbuhan 4,6%.

Tabel 3.9 Distribusi PDRB Kota Pagar Alam Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,69	23,24	23,1	23,21	23,84
B. Pertambangan dan Penggalian	2,54	2,46	2,35	2,31	2,25
C. Industri Pengolahan	1,89	1,89	1,89	1,91	1,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
F. Konstruksi	16,61	16,25	16,09	15,89	15,33
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,46	19,81	20,41	20,76	20,61
H. Transportasi dan Pergudangan	3,16	3,04	3,12	3,2	3,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,73	3,85	4,03	4,18	4,27
J. Informasi dan Komunikasi	1,63	1,66	1,67	1,66	1,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	3,98	3,79	3,75	3,69
L. Real Estat	5,74	5,55	5,53	5,45	5,38
M,N. Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	3,33	3,19	3,11	3,02
P. Jasa Pendidikan	10,03	10,05	10,01	9,91	10,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,18	2,16	2,11	2,02	2,00
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,6	2,51	2,49	2,44	2,63
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : pagaralamkota.bps.go.id (BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025)

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Pagar Alam, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Pagar Alam tahun 2026 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi lokal – kerakyatan, pariwisata, investasi serta pengembangan infratruktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Pagar Alam juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta revitalisasi dan penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Pagar Alam.

Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi lokal-kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Pagar Alam.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2024, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam tahun 2025, maka perekonomian Kota Pagar Alam Tahun 2026 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Pagar Alam dapat digambarkan capaian pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Target 2026 sebagaimana tertuang pada berikut.

Tabel 3.10 Capaian Perkembangan Ekonomi Kota Pagar Alam
Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2026

No	Indikator	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	0,02	4,39	4,86	4,35	5,05	5,75
2	PDRB Per Kapita (juta)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25,6
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,50	1,64	3,62	2,71	2,34	1,88
4	Angka Kemiskinan	9,07	9,40	8,47	8,88	8,18	7,23
5	Indeks Pembangunan Manusia	71,10	71,47	72,40	73,25	74,00	75,11
6	Gini Ratio	0,385	0,381	0,381	0,388	0,283	0,274

Sumber : pagaralamkota.bps.go.id (BPS Kota Pagar Alam Tahun 2025) dan Ranwal RPJMD 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut :

a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu :

a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil danlatau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bankeu Provinsi.
c) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Pagar Alam, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain :

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi;
2) Implementasi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

3) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
6) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.

Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Tahun 2023-2024, Target Pendapatan Tahun 2025 serta Proyeksi Pendapatan Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	TAHUN 2025	PROYEKSI / TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**920.405.185.954**	**993.613.781.569**	**879.573.559.595**	**856.141.528.779**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**79.497.702.647**	**101.409.433.608**	**92.603.834.000**	86.578.197.537
4.1.01	Pajak Daerah	12.242.883.489	11.761.235.732	19.902.697.843	19.894.899.843
4.1.02	Retribusi Daerah	3.980.967.723	3.739.737.848	4.389.793.625	3.490.173.625
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.409.581.303	8.202.963.821	9.409.581.303	9.409.581.303
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.864.270.131	77.705.496.206	58.901.761.229	53.783.542.766
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**835.786.670.991**	**885.279.154.782**	**781.176.797.139**	**763.770.402.786**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	714.634.750.330	779.967.332.246	725.032.921.000	707.626.526.647
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.151.920.661	99.077.346.536	56.143.876.139	56.143.876.139
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.120.812.316**	**6.925.193.179**	**5.792.928.456**	**5.792.928.456**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.120.812.316	6.925.193.179	5.792.928.456	5.792.928.456

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 (diolah) ,dan https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

1) Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%);
2) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3) Pemenuhan program prioritas Wali kota dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
4) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
5) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
b) Prioritas
c) Tolok Ukur dan target Kinerja
d) Optimalisasi Belanja Modal
e) Transparan dan Akuntabel
f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan
g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

3.2.2.1 Belanja Operasi

3.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja opersai adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, adapun kebijakannya adalah :

1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2026;
3) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4) Belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan paling tinggi 30% dari total APBD, jika telah melebihi 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2027; dan
5) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

3.2.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat

3.2.2.1.5 Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

3.2.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu kali periode akutansi,

digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

3.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

3.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat Mandatory Spending, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), Belanja Pegawai termasuk didalamnya PPPK disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Tahun 2023-2024, Target Belanja Tahun 2025 serta Proyeksi Belanja Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	TAHUN 2025	PROYEKSI / TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**BELANJA**	**961.504.848.517**	**1.012.171.591.977**	**906.573.559.595**	**881.141.528.779**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**640.318.861.645**	**743.610.899.427**	**739.242.088.698**	**751.304.134.865**
5.1.01	Belanja Pegawai	302.930.549.939	339.655.751.533	397.081.187.054	410.761.229.136
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.205.842.782	361.218.004.314	318.407.721.983	326.199.521.136
5.1.04	Belanja Subsidi	1.426.948.631	970.000.000	0	5.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	21.352.130.693	39.099.243.579,50	9.031.700.000	8.694.584.232
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	403.389.600	2.667.900.000	2.029.350.000	378.800.000
5,2	**BELANJA MODAL**	**321.185.986.872**	**268.560.692.550**	**165.331.470.896**	**128.107.393.913**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.064.864.372	61.150.477.857	23.707.762.811	12.645.111.130
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.666.828.642	54.928.383.040	27.469.129.104	41.789.082.783
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.318.430.640	149.829.144.033	111.310.496.480	72.895.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.040.693.218	2.592.387.620	2.794.082.500	769.200.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.170.000	60.300.000	50.000.000	0,00
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 (diolah) ,dan https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Tahun 2023-2024, Target Pembiayaan Tahun 2025 serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			
		REALISASI APBD TAHUN 2023	REALISASI APBD TAHUN 2024	TAHUN 2025	PROYEKSI / TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	**PEMBIAYAAN**				
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**169.165.384.529**	**128.065.721.966**	**27.000.000.000**	**25.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.165.384.529	128.065.721.966	27.000.000.000	25.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**169.165.384.529**	**128.065.721.966**	**27.000.000.000**	**25.000.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**169.165.384.529**	**128.065.721.966**	**27.000.000.000**	**25.000.000.000**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 (diolah) ,dan https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan Sasaran Pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Pagar Alam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Pagar Alam. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029; (2) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan (4) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Sumatera Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 direpresentasikan dengan tema pembangunan ***"Pemerataan Infrastruktur Strategis Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan".*** Tema Pembangunan ini fokus pada revitalisasi infrastruktur layanan dasar terutama Pendidikan dan Kesehatan serta revitalisasi infrastruktur pendukung investasi, ekonomi local, pertanian, pariwisata, UMKM dan konektivitas antar wilayah. Revitalisasi infrastruktur untuk kelancaran arus orang dan barang lintas wilayah, pembentukan titik pertumbuhan ekonomi baru (*Growth Pole*) guna menekan kesenjangan pendapatan secara bertahap.

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke-2 (kedua) RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Pagar Alam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1 Tema, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi

publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



*Keterangan: *) Lima Direktif Presiden*
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia**

   Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

   1) Indeks Demokrasi Indonesia

2. **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

   Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan

negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Asia Power Index (Military Capability)
2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)
3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
4) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
5) Indeks Ketahanan Energi
6) Kapasitas tampungan air (m3/kapita)
7) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
8) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
9) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
10) Indeks Ekonomi Hijau
11) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
12) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
13) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
15) Persentase Penurunan Emisi GRK
    - Tahunan (%)
    - Kumulatif (%)

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

1) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
2) Rasio Kewirausahaan (%)
3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)

4) Rasio PDB Pariwisata (%)
5) Devisa Pariwisata (miliar USD)
6) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
7) Aset Perbankan/PDB (%)
8) Aset Dana Pensiun/PDB (%)
9) Aset Asuransi/PDB (%)
10) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)
11) Total Kredit/PDB (%)
12) Inklusi Keuangan (%)

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut.

1) Hasil Pembelajaran:
   a. Rata-rata nilai PISA i.Membaca ii.Matematika iii.Sains
   b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
   c. Harapan lama sekolah (tahun)
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
3) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
4) Tingkat Penguasaan Iptek:
   a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
   b. Peringkat Indeks Inovasi Global
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
6) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
7) Usia Harapan Hidup (tahun)
8) Kesehatan Ibu dan Anak
9) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
10) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

11) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
12) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Untuk mengawal keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
4) Biaya Logistik (% PDB)

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)
2) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
3) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)
4) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)
5) Persentase desa mandiri (%)
6) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

1) Return on Asset (ROA) BUMN (%)
2) Indeks Integritas Nasional
3) Indeks Materi Hukum

4) Indeks Pelayanan Publik
5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6) Indeks Persepsi Korupsi
7) Indeks Pembangunan Hukum
8) Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)
9) Tingkat Inflasi (%)

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
3) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Disamping itu, berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ, Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

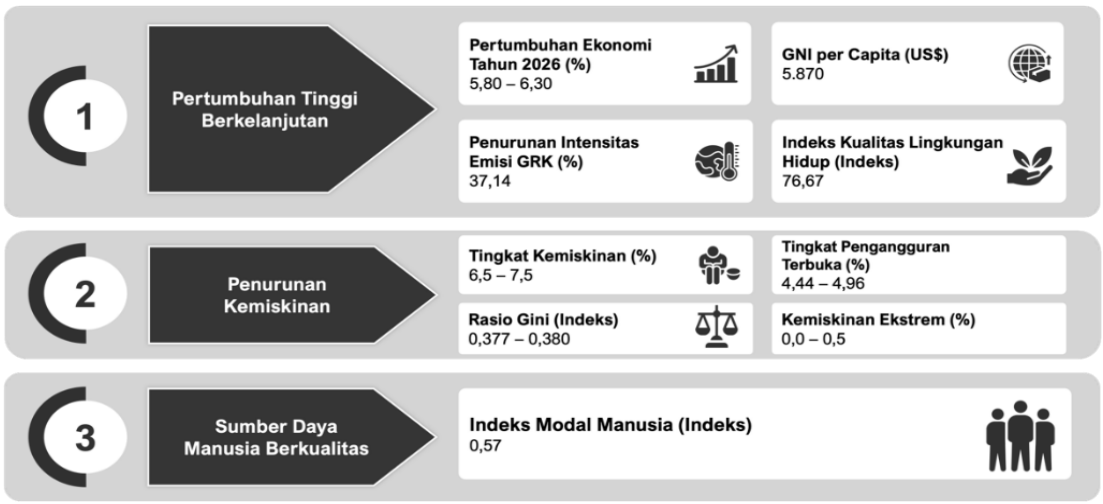
Untuk memastikan pembangunan daerah telah selaras dengan sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu adanya pembinaan dan pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung keberhasilan pencapaian target program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan Program Strategis Nasional yang meliputi:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan :
   1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
   2) Sekolah Rakyat; dan
   3) Pembangunan 3 juta Rumah

b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan :
   1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
   2) Makan Bergizi Gratis.
d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Menengah.
e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan :
   1) Pengendalian Inflasi;
   2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   3) Kemudahan perizinan di daerah.
f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada Gambar 4.2 sebagai berikut.

Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 diarahkan pada tema **"Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan"** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2026 sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas;
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru;
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfataan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas;
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), 5,8-63
2. PDRB per Kapita (ADHB)(Rp.Juta), 92,14
3. Tingkat Kemiskinan (%), 9,07-10,07
4. Rasio Gini (poin), 0,312-0,316
5. Indeks Modal Manusia (poin), 0,55
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%), 65,48-68,68
7. IKLH Daerah (poin), 68,44
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%), 3,75-3,85

Tabel 4.1 Prioritas Nasional dan Highlight Indikasi Intervensi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

NO / KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Provinsi Sumatera Selatan	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan *output:* · Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan;	Kota Pagar Alam	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**
				Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
		Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan *output:* · Bantuan PBI JKN;		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		· Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**
				Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu
C2	Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu	· Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Kelingi Tugumulyo, D. I. Air Lakitan, D. I. Air Keruh, D. I. Lintang Kanan, D. I. Lintang Kiri, **D. I. Muara Riben**	Kota Pagar Alam	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
	· Kab. Musi Rawas	· Kawasan Aneka Cabai		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	· Kab. Musi Rawas Utara	· Layanan Optimalisasi Reproduksi		Sub Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
	· Kab. Empat Lawang	· Layanan Kesehatan Hewan		Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	· Kab. Lahat			
	· Kab. Muara Enim			

NO / KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	· Kota Pagar Alam			
	Provinsi Sumatera Selatan	· Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;	Kota Pagar Alam	**PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN**
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		· Pendayagunaan Dokter Spesialis;		**ROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		· Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
				Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		· Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan;		**PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN**
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		· Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan;		**PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN**
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

NO / KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		· Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta;		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis
		· Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat;		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis
		· Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan;		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Pelayanan Kesehatan
		· Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		· Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis;		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi KesehatanSecara Terintegrasi
				Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		· Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis;		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

NO / KODE	RKP 2026		RKPD 2026	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Sub kegiatan Pembinaan Pengawasan Sumber daya manusia kesehatan
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten Kota
				Sub kegiatan Pengembangan mutu dan penigkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota
		· Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**
				Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota
				Sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan uapaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)
		· Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis;		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**
				Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota
				Sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan uapaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)
		· Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D;		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		· Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan;		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
				Kegiatan Penerbitan Izin rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pagar Alam tahun 2026 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 ditujukan untuk ***"Pemerataan Infrastruktur Strategis Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan".*** Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, maka pada tahun 2026 Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam diprioritaskan pada :

1. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul
2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
3. Peningkatan Infrastruktur Yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Lestari Untuk Memenuhi Layanan Dasar Kepada Masyarakat
4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Transparan

Sasaran pembangunan pada tahun 2026 berdasarkan Dokumen RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 serta kesepakatan hasil forum lintas perangkat daerah 17 kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), 5,75
2. PDRB per Kapita (Rp. Juta) 25,6
3. Angka Kemiskinan(%), 7,23
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%), 1,88
5. Indeks Pembangunan Manusia (poin), 75,11
6. Gini Rasio (poin), 0,274
7. Penurunan emisi GRK (Ton CO2 eq), 56.982,06
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 72,27

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Isu Strategis dan Prioritas Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026

ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH RKPD KOTA PAGAR ALAM 2026
Kapasitas Daya Saing SDM belum Optimal	PD1. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul
Pengelolaan Potensi Unggul Daerah belum Optimal	PD2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pengeloaan Potensi Pariwisata belum Optimal	
Industri Pengolahan belum Optimal	
Infrastruktur Dasar Belum Optimal	PD3. Peningkatan Infrastruktur Yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Lestari Untuk Memenuhi Layanan Dasar Kepada Masyarakat
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal	PD4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas
Tata Kelola menuju Good Governance	PD5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Transparan

Gambar 4.3 Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Selatan, dan RKPD Kota Pagar Alam

TEMA RKP 2026 :
"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"

TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026 :
"Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan"

TEMA RKPD KOTA PAGAR ALAM 2026 :
"Pemerataan Infrastruktur Strategis Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan"

Adapun sasaran dan indikator pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026 dan pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Keselarasan Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Sumatera Selatan dengan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RKP NASIONAL TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET KOTA PAGAR ALAM PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80 - 6,30	5,8-63	5,0-5,2	5,75
2	GNI per Capita (US$) / PDRB Per Kapita (juta)	5.870	92,14	32,15	25,6
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	9,07-10,07	6,5-7,0	7,23
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96	3,75-3,85	2,60	1,88
5	Rasio Gini	0,377-0,380	0,312-0,316	0,296-0,300	0,274
6	Indeks Modal Manusia (IMM) / IPM	0,57	0,55	72,33	75,11
7	Penurunan emisi GRK (Ton CO2 eq)	37,14	65,48-68,68	56.982,06	56.982,06
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,67	68,44	72,27	72,27

Target sasaran makro pada RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 secara umum telah selaras dan masuk dalam range target sasaran makro untuk Kota Pagar Alam pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. untuk target laju pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan rasio gini yang ditetapkan di RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 lebih optimis dari target yang ditetapkan Provinsi Sumatera Selatan.

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP, Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan Prioritas Daerah RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Nasional RKP, Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan RKPD, dengan Prioritas Daerah RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD KOTA PAGAR ALAM 2026
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfataan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas	PD5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Transparan
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PD2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
	PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	PD3. Peningkatan Infrastruktur Yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Lestari Untuk Memenuhi Layanan Dasar Kepada Masyarakat
	PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal	PD4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PD2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	PD3. Peningkatan Infrastruktur Yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Lestari Untuk Memenuhi Layanan Dasar Kepada Masyarakat
	PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	PD4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD KOTA PAGAR ALAM 2026
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas	PD1. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul
	PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	PD4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas
	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfataan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas	PD5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Transparan
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PD2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
	PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PD2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	PD3. Peningkatan Infrastruktur Yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Lestari Untuk Memenuhi Layanan Dasar Kepada Masyarakat
	PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	PD4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas
	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfataan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas	PD5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Transparan

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD KOTA PAGAR ALAM 2026
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PD2. Penguatan Potensi Sektor Pertanian, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfataan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas	PD5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif dan Transparan
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	PD3. Peningkatan Infrastruktur Yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Lestari Untuk Memenuhi Layanan Dasar Kepada Masyarakat
	PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal	PD4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana Dan Trantibumlinmas

Selanjutnya, selain mendukung Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional, seluruh program daerah di dalam RKPD Tahun 2026 yang berkontribusi dalam mendukung Program Prioritas Nasional. Adapun sandingan keterkaitan Program Prioritas Nasional pada RKP dengan Program Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional RKP 2026

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		
PPN 1.1. : Memperkokoh Ideologi Pancasila		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PPN 1.2. : Penguatan Demokrasi		
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
PPN 1.3. : Penegakan Hak Asasi Manusia		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan
Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
PPN 2.1. : Penguatan Sistem Keamanan Negara		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
	Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
PPN 2.2. : Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal		
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
PPN 2.3. : Diplomasi Ekonnomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional		
PPN 2.4. : Swasembada Pangan		
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian
Program penyuluhan pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Program penanganan kerawanan pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
Program pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Program penyuluhan pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan
Program pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Program pengelolaan perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)
PPN 2.5. : Swasembada Energi		
N/A	N/A	N/A
PPN 2.6. : Swasembada Air		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas
PPN 2.7. : Ekonomi Syariah		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
		Pertumbuhan Wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
PPN 2.8. : Ekonomi Digital		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
		Pertumbuhan Wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
PPN 2.9. : Ekonomi Hijau		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
PPN 2.10. : Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Penhela Pertumbuhan		
Ekonomi (Prime Mover) dan Sumber Pertumbuhan Baru		
N/A	N/A	N/A
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi		
melalui peran aktif koperasi		
PPN 3.1. : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur		
Program Penyelenggaraan Jalan		Rasio Kemantapan Jalan
PPN 3.2. : Mendorong Kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja		
seluas-luasnya		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
		Pertumbuhan Wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
PPN 3.3. : Mengembangkan Industri Kreatif		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwista	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
PPN 3.4. : Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi		
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatnya Kinerja pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Meningkatnya Kualitas layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
PPN 3.5. : Pendalaman Sektor Keuangan		

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi		
Z), dan Penyandang Disabilitas		
PPN 4.1. : Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Program pengelolaan pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Program pengendalian perizinan pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui
Program pengembangan bahasa dan sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra
Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan peningkatan layanan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
PPN 4.2. : Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Program penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah
	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
PPN 4.3. : Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
PPN 4.4. : Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai
		Pembangunan Kualitas Ketahanan Keluarga
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
PPN 4.5. : Meningkatkan Prestasi Olahraga		
Program pengembangan daya saing keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber		
Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
PPN 5.1. : Pengembangan Hilirisasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru		
N/A	N/A	N/A
PPN 5.2. : Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, dan		
Industri Strategis Nasional		

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
PPN 5.3. : Keberlanjutan Hilirisasi dan Industrialisasi		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
Program Pengendalian izin usaha industri	Meningkatnya Kualitas Periziznan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatnya Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
PPN 5.4. : Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Program pengembangan ekspor	Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		
PPN 6.1. : Membangun Desa dan Membangun dari Desa		
N/A	N/A	N/A
PPN 6.2. : Pemerataan Ekonomi		
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Forma
		Pertumbuhan Wirausaha
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
PPN 6.3. : Memberantas Kemiskinan		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
		Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
		Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan		
Penyelundupan		
PPN 7.1. : Reformasi Politik		
Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
PPN 7.2. : Reformasi Hukum		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
PPN 7.3. : Reformasi Tata Kelola Pemerintahan		
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Program Penataan Organisasi	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi
PPN 7.4. : Pemberantasan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
N/A	N/A	N/A
PN 8: Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat		
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
PPN 8.1. : Masyarakat Adil, Makmur, dan Harmonis		
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi
PPN 8.2. : Melestarikan Budaya		
Program pengembangan kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan
PPN 8.3. : Penanganan Bencana		
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/Program Daerah RKPD Tahun 2026	Outcome	Indikator Outcome
Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

4.2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari penyelenggaraan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 yang diarahkan untuk mewujudkan Visi Misi Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 yaitu **"Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera".** Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera								
VISI / MISI	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET TAHUN**					
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
(01)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
MISI 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government	**Tujuan 1.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif dalam mendukung Daya Saing Daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**67.85**	**70.05**	**73.12**	**76.25**	**79.85**	**82.35**
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Nilai Sakip (Nilai)	B	B	B	BB	BB	BB
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	78	80	82	84	86
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3.06	3.13	3.20	3.26	3.33	3.40
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera								
VISI / MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Fasilitas Pendidikan Yang Berkualitas	**Tujuan 2.1 : Terwujudnya Kualitas SDM Melalui Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Kesetaraan dalam Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**74.51**	**75.11**	**75.69**	**76.24**	**76.78**	**77.31**
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Indeks)	0.693	0.695	0.697	0.699	0.700	0.702
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	0.834	0.839	0.844	0.849	0.854	0.859
MISI 3. Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat	**Tujuan 3.1 :Terwujudnya Jaminan Pelayanan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib dan Tentram**	**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**
	Meningkatnya Cakupan Jaminan Sosial bagi Masyarakat	Tingkat Kemiskinan ((%))	7.60	7.23	6.86	6.49	6.12	5.75
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam Masyarakat yang Harmonis	Indeks Ketertiban dan Keamanan (Angka)	100	100	100	100	100	100
MISI 4. Meningkatkan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan umkm yang unggul	**Tujuan 4.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan**	**Indeks Infrastruktur (Angka)**	**55.74**	**56.85**	**58.00**	**59.30**	**59.70**	**60.75**
	Meningkatnya Cakupan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Sektor Strategis Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	61.40	64.04	67.62	68.96	69.89	70.96
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	72.02	72.27	72.52	72.78	73.03	73.28
	Tujuan 4.2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**5.50**	**5.75**	**6.01**	**6.26**	**6.52**	**6.77**

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera									
VISI / MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	
	Inklusif	**Rasio Gini (Indeks)**	**0.278**	**0.274**	**0.271**	**0.267**	**0.264**	**0.260**	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**2.00**	**1.88**	**1.76**	**1.66**	**1.57**	**1.48**	
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, UMKM, Perdagangan, Industri, Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Investasi	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	24.01	24.10	24.20	24.30	24.40	24.50	
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	20.61	20.62	20.63	20.64	20.65	20.66	
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	2.060	2.082	2.104	2.126	2.148	2.170	
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	2.060	2.082	2.104	2.126	2.148	2.170	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.86	2.87	2.88	2.90	3.10	3.30	
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	32.5	32.5	37.5	37.5	40	40	
MISI 5. Membangun sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas dengan pelayanan prima sesuai dengan ciri khas pagar alam	**Tujuan 5.1 : Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata**	**Rasio Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Rasio)**	**4.28**	**4.32**	**4.37**	**4.41**	**4.46**	**4.50**	
		Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional (Kawasan)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	
	Meningkatnya Kontribusi Kepariwisataan terhadap PAD	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)	1.58	1.68	1.70	1.71	1.72	1.73	
	Meningkatnya Pengelolaan Seni dan Budaya Lokal	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)	5.88	8.82	11.76	14.71	17.65	20.59	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera								
VISI / MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)	18.18	27.27	36.36	45.45	54.55	63.64

Sumber : RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, diolah

4.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pagar Alam

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam tentu perlu dijabarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan Kota Pagar Alam, adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pagar Alam mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026, sebagai berikut.

Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pagar Alam

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
MISI 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government							
1.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih dan Pelayanan Publik dalam mendukung Daya Saing Daerah	1.1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.1.1.1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik guna mendukung daya saing daerah	1.1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas Aparatur daerah
						1.1.1.1.2	Membangun desiplin dan etos kerja
						1.1.1.1.3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan umum
						1.1.1.1.4	Pengembangan sistem karir dan promosi berdasarkan kompetensi

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
						1.1.1.1.5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik sesuai SOP dan SPP yang Transparan, Efisien, Efektif, Akuntable dan Inovatif
						1.1.1.1.6	Meningkatkan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
						1.1.1.1.7	Kemudahan akses pelayanan perizinan dan penanaman modal
						1.1.1.1.8	Implementasi hasil riset dalam kebijakan pembangunan daerah
						1.1.1.1.9	Menjalin kerja sama dalam peningkatan riset dan inovasi daerah
MISI 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang berkualitas							
2.1	Mewujudkan Kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta kesetaraan dalam Masyarakat	2.1.1	Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan dan kesehatan Masyarakat	2.1.1.1	Peningatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan dan berkelanjutan.	2.1.1.1.1	Bea Siswa bagi siswa berprestasi dan Bea Siswa untuk keluarga berpenghasilan rendah
						2.1.1.1.2	Pengadaan perlengkapan peserta didik
						2.1.1.1.3	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap
						2.1.1.1.4	Mengintegrasikan pendidikan karakter dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
						2.1.1.1.5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
						2.1.1.1.6	Mengembangkan jiwa kewirausahaan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal
						2.1.1.1.7	Penguatan Pendidikan Vokasi
						2.1.1.1.8	Memperluas kesempatan belajar melalaui pendidikan formal dan non formal
						2.1.1.1.9	Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Perpustakaan
						2.1.1.1.10	Bebas Biaya Berobat bagi Masyarakat Miskin
						2.1.1.1.11	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit
						2.1.1.1.12	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
							Peningkatan mutu pelayanan puskesmas pembantu, puskesmas maupun rumah sakit.
						2.1.1.1.13	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Kesehatan beserta sarana dan prasarana layanan Kesehatan.
						2.1.1.1.14	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau.
		2.1.2	Meningkatnya kesetaraan dan peran pemuda serta olahraga dalam pembangunan	2.1.2.1	Pengarusutamaan gender, keluarga yang berkualitas, peran aktif pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi dibidang keolahragaan	2.1.2.1.1	Meningkatkan kapasitas pelayanan kelembagaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
						2.1.2.1.2	Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing pada semua strata termasuk bidang politik.
						2.1.2.1.3	Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda
						2.1.2.1.4	Bea Siswa Pemuda Berprestasi
						2.1.2.1.5	Meningkatkan sarana prasarana olah raga
MISI 3. Meningkatkan pelayanan untuk masyarakat							
3.1	Mewujudkan jaminan pelayanan social dalam kehidupan Masyarakat yang harmonis, tertib dan tentram.	3.1.1	Meningkatnya cakupan jaminan social bagi Masyarakat.	3.1.1.1	Peningkatan jaminan perlindungan sosial dan daya saing ketenagakerjaan	3.1.1.1.1	Peningkatan Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat
						3.1.1.1.2	Memberi bantuan kepada KK miskin
						3.1.1.1.3	Bekerja sama dengan investor guna membuka lapangan kerja baru
						3.1.1.1.4	Meningkatkan mutu dan layanan Balai Latihan Kerja (BLK)
						3.1.1.1.5	Pelatihan dan Pemagangan serta pelibatan swasta dan pihak lainnya
		3.1.2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam masyarakat yang harmonis	3.1.2.1	Peningkatan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, partai politik dalam menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, iklim	3.1.2.1.1	Peningkatan peran tokoh agama dalam moderasi beragama
						3.1.2.1.2	Peningkatan pembinaan kelembagaan umat beragama/lintas umat beragama, lembaga adat istiadat dan budaya.

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
					demokrasi yang kondusif serta peningkatan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.	3.1.2.1.3	Perwujudan kerukunan sosial masyarakat dalam rangka peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
						3.1.2.1.4	Pembangunan Kawasan Peribadatan Terpadu
						3.1.2.1.5	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi sosial kemasyarakatan serta Partai Politik
						3.1.2.1.6	Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kebhinekaan terutama bagi generasi muda
						3.1.2.1.7	Pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya trantibunlinmas.
						3.1.2.1.8	Membentuk Satlinmas guna peningkatan trantibunlinmas
						3.1.2.1.9	Penegakan Perda dalam penanganan gangguan trantibunlinmas
						3.1.2.1.10	Peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, sistem peringatan dini, respon cepat dan koordinasi bantuan dalam menghadapi bencana beserta penyediaan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan.
						3.1.2.1.11	Pengintegrasian rencana penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah.
						3.1.2.1.12	Pembangunan sistem distribusi logistik untuk kebutuhan tanggap darurat.
						3.1.2.1.13	Pemanfaatan teknologi dan data untuk manajemen bencana
						3.1.2.1.14	Edukasi dan peningkatan kesadaran, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
MISI 4. Meningkatkan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan umkm yang unggul							

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
4.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung sektor strategis dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	4.1.1	Meningkatnya cakupan penyediaan infrastruktur pendukung sektor strategis daerah.	4.1.1.1	Optimalisasi pembangunan dan pelayanan infrastruktur yang seimbang dan berkelanjutan	4.1.1.1.1	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan sanitasi, penyediaan fasilitas air minum serta penuntasan penataan kawasan permukiman kumuh dan ruang terbuka hijau
						4.1.1.1.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan pertanian, wisata, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi
						4.1.1.1.3	Pembangunan sarana dan prasarana irigasi
						4.1.1.1.4	Bantuan layanan alat berat gratis
						4.1.1.1.5	Penegakan implementasi tata ruang atau RTRW yang telah dibuat dan ditetapkan
						4.1.1.1.6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi.
		4.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.1.2.1	Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	4.1.2.1.1	Pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
						4.1.2.1.2	Meningkatkan persentase luas tutupan lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						4.1.2.1.3	Meningkatkan pengelolaan Sampah secara sirkular
						4.1.2.1.4	Peningkatan tata kelola TPA
4.2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif	4.2.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor strategis daerah	4.2.1.1	Optimalisasi Sektor Pertanian, perindustrian, perdagangan dan UMKM	4.2.1.1.1	Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan tata Kelola pengairan
						4.2.1.1.2	Hilirisasi komoditi unggulan sektor pertanian
						4.2.1.1.3	Pengembangan pola pergiliran tanaman
						4.2.1.1.4	Pengembangan teknologi pertanian anjuran spesifik lokasi
						4.2.1.1.5	Penyediaan bibit unggul dan suplay pupuk serta alsintan bagi petani
						4.2.1.1.6	Perbaikan dan pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
						4.2.1.1.7	Meningkatkan Kompetensi penyuluh pertanian dan kelembagaan petani
						4.2.1.1.8	Penumbuhkembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian dan non pertanian
						4.2.1.1.9	Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktivitas kerja
						4.2.1.1.10	Memfasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah
						4.2.1.1.11	Membangun pusat-pusat perdagangan di Kelurahan, Kecamatan maupun Kota
						4.2.1.1.12	Pemanfaatan Sistem Resi Gudang
						4.2.1.1.13	Pembangunan serta penataan Pasar Tradisonal.
		4.2.2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	4.2.2.1	Menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, kualitas konsumsi pangan dan suplay pangan	4.2.2.1.1	Pembangunan sarana dan prasarana kemandirian dan kedaulatan pangan;
						4.2.2.1.2	Penyediaan cadangan pangan pemerintah;
						4.2.2.1.3	Diversifikasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
						4.2.2.1.4	Makan bergizi gratis bagi anak sekolah
						4.2.2.1.5	Pemantauan harga, stok, pasokan dan suplay serta stabilisasi harga pangan
MISI 5. Membangun sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas dengan pelayanan prima sesuai dengan ciri khas pagar alam							
5.1	Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap Pembangunan dan berkembangnya nilai budaya lokal daerah	5.1.1	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PAD	5.1.1.1	Optimalisasi Sektor Pariwisata	5.1.1.1.1	Pengembangan dan pembangunan pusat-pusat wisata unggulan
						5.1.1.1.2	Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis
						5.1.1.1.3	Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengusaha wisata dalam bidang promosi wisata dan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional
						5.1.1.1.4	Memperbanyak rest area (akomodasi) untuk menarik wisatawan asing maupun lokal

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera							
NO	**Tujuan**	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
						5.1.1.1.5	Fasilitasi dan pengembangan Ekonomi Kreatif
						5.1.1.1.6	Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif
						5.1.1.1.7	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Ekonomi Kreatif
		5.1.2	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya local.	5.1.2.1	Optimalisasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	5.1.2.1.1	Optimalisasi Pengelolaan cagar budaya/warisan budaya
						5.1.2.1.2	Peningkatan tata kelola lembaga dan pranata di bidang kebudayaan

Sumber : RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, diolah

Tabel 4.8 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Pagar Alam 2025-2029 dalam Prioritas Daerah RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif dan transparan	**Tujuan 1.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif dalam mendukung Daya Saing Daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**				**70.05**
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Nilai Sakip (Nilai)				B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)				Wajar Tanpa Pengecualian
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)				78
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				3.13
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)				3.00

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Kegiatan)	65.5
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	63
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	63
			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100
			2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	20
			2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	62
			6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ()	3.200
			6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ()	Terintegrasi (Integrated)
			5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	94
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100
			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	88
			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	92
			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100
			5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100
			5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100
			4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi ()	30
			4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100
			4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	98
			4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ()	82
			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100
			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40
			5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100
			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	100
			5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100
			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningktanya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3.00
			6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 ()	100
			4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan ()	95
			4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan ()	95
			4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Tingkat Kematangan UKPBJ ()	80
			4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan ()	100
			4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Efektivitas Kerja Sama Daerah ()	100

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ()	100
			4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ()	95
			2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.6
1. Peningkatan kapasitas daya saing sumber daya manusia yang unggul	**Tujuan 2.1 : Terwujudnya Kualitas SDM Melalui Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Kesetaraan dalam Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**				**75.11**
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Indeks)				0.695
			2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda ()	100
			1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	20
			2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan ()	100
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	18:18
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	103
			1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	37.80

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	100
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	100
			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas ()	100
			1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)				0.839
			1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	92
			2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	98.15
			2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	58.49
			2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	98
			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	98
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat		
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	88
			2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	98
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	86
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	100
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7.2
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	98
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	98
			2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	33.33
			2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	33.33
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	98
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	85
			2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	27.8-

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	100
4. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana dan trantibumlinmas	**Tujuan 3.1 :Terwujudnya Jaminan Pelayanan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib dan Tentram**	**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**				**65**
	Meningkatnya Cakupan Jaminan Sosial bagi Masyarakat	Tingkat Kemiskinan ((%))				7.23
			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	96
			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	80
			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	70
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	92
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	60
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	300

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	90
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	70
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	70
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	57
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	57
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	57
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	60
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam Masyarakat yang Harmonis	Indeks Ketertiban dan Keamanan (Angka)				100
			8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik ()	100
			8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi ()	100

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif ()	100
			8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan ()	100
			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100
			4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ()	100
			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100
			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100
			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	70
3. Peningkatan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup yang lestari untuk memenuhi layanan dasar kepada masyarakat	**Tujuan 4.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan**	**Indeks Infrastruktur (Angka)**				**56.85**
	Meningkatnya Cakupan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Sektor Strategis Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)				64.04
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	70.64
			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	79.08
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	100
			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	100

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	100
			2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (Persentase)	81
			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	60.59
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)				72.27
			2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	
			2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	
2. Penguatan potensi sektor pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	**Tujuan 4.2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**				**5.75**
		Rasio Gini (Indeks)				**0.274**
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				**1.88**
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian, UMKM, Perdagangan, Industri, Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Investasi	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)				24.10
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)				20.62
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)				2.082
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)				2.082
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)				2.87
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)				32.5

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B ()	1422,87
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor ()	93
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal ()	93
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Pertumbuhan Wirausaha ()	93
			3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan stabilitas harga barang Kabutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting ()	83
			2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	28.47
			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas Periziznan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan ()	93
			3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya ()	93
			2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	100
			2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100
			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ()	2138.470
			3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri ()	88

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	100
			2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100
			2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	90
	Tujuan 5.1 : Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	**Rasio Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Rasio)**				**4.32**
		Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional (Kawasan)				**2**
	Meningkatnya Kontribusi Kepariwisataan terhadap PAD	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)				1.68
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwista	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata ()	12
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi ()	70
			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ()	6.20
			3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi ()	70
	Meningkatnya Pengelolaan Seni dan Budaya Lokal	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)				8.82
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)				27.27

Visi : Sejuk Kotanya, Ramah Penduduknya, Amanah dan Merakyat Pemimpinnya Menuju Pagar Alam Sejahtera						
PRIORITAS PEMBANGUNAN	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**TARGET KINERJA 2026**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	220
			2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	1200 Partisipasi Budaya
			2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	25
			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	25
			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	1

4.2.6 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026 untuk mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Pagar Alam tahun 2026 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal'S (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.6.1 Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahahan dalam upaya penurunan stunting

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2026 dan 5% di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi :

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota melakukan :

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2026, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kota Pagar Alam menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian target tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.9 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Penurunan Stunting Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD 2026	OPD
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000	DPPKBP3A
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi sewrta pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	518.300.000	DPPKBP3A
		Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	21.150.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PelaksanaanPembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	79.800.000	DPPKBP3A
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesshatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	960.468.008	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	105.290.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.700.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	288.950.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	19.999.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.440.628.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	453.294.303	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	118.752.600	Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD 2026	OPD
1	2	3	4	5
		Operasional Pelayanan Puskesmas	1.345.418.438	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	264.892.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	290.106.097	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan kesehatan Masyarakat	21.920.677.545	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.634.603.892	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.415.000.000	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.000.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kab/Kota	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM)	103.039.562	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, presentif tingkat daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	20.000.000	Dinas Kesehatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kab/ Kota	Peningkatan Upaya promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	900.000.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUM	Penerbitan sertifikat laik Higine sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan / restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertipikat laik higine sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan / restoran dan Depot Air minum (DAM)	15.000.000	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemeriksaan Post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	238.426.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	86.514.000	Dinas Sosial

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD 2026	OPD
1	2	3	4	5
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	70.110.000	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/kota	Penyediaan Makanan	41.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	52.052.000	DKPP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	61.508.000	DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.784.943	DKPP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.900.000	DKPP
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyususunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	28.251.000	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.002.000	BAPPEDA
		Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyususunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	27.519.001	BAPPEDA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	82.627.500	BAPPEDA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60.530.000	BAPPEDA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	320.660.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	1.050.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Bimbingan teknis pelatihan dan atau magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150.928.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	APBD 2026	OPD
1	2	3	4	5
PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	52.232.950	Dinas Perkim
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	851.407.250	Dinas Perkim
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	40.878.500.000	Dinas Perkim
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	101.315.505	Dinas Perkim
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Pambangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan	3.150.000.000	Dinas PUPR
		Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	850.000.000	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat di Kawasan Strategis	721.793.660	Dinas PUPR
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	43.542.000	KOMINFO
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	300.000.000	PERINDAGKOP
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	143.634.000	PERINDAGKOP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	38.864.000	PERIZINAN
		JUMLAH	**83.893.171.254**	

4.2.6.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka pada tahun 2026 Kota Pagar Alam tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2026 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis

dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2026 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Pagar Alam sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, innformasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Secara rinci, Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator SPM dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.10 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
1	**PENDIDIKAN DASAR**			
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.062.854.990
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.171.410.020
2	**PENDIDIKAN KESETARAAN**			
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.318.330.000
3	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**			
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.038.153.811
			TOTAL	**44.590.748.821**

Tabel 5.11 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
1	**PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL**			
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	960.468.008
2	**PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**			
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.290.000
3	**PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.700.000
4	**PELAYANAN KESEHATAN BALITA**			
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.290.000
5	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**			
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	288.950.000
6	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**			
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.000
7	**PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**			

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.800.000
8	**PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI**			
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.120.000
9	**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA *DIABETES MELITUS***			
	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.675.000
10	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT**			
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.862.500
11	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB**			
	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.600.000
12	**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)***			
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.020.000
			TOTAL	**1.813.774.508**

Tabel 5.12 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung
Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
1	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI**			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000.000
2	**PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK**			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			TOTAL	**4.000.000.000**

Tabel 5.13 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung
Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
1	**PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM.**			
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
2	**FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.**			
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alam yang	Program kawasan permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	120.038.350

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	851.407.250
			TOTAL	**971.445.600**

Tabel 5.14 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
1	**PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	326.391.000
2	**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA**			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
3	**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
4	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	358.644.000
5	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN**			

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			TOTAL	**685.035.000**

Tabel 5.15 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
1	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI**	program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	335.204.000
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
2	**REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI**			
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti			
3	**REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI**			
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
4	**REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI**			
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
5	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP & PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM**			
	Jumlah Warga Negara korban bencana di Kota Pagar Alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	41.000.000
		program penanganan bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			TOTAL	**376.204.000**

4.2.6.3 Dukungan terhadap penurunan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu kebijakan pusat yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Kota Pagar Alam, dalam mendukung kebijakan tersebut dengan menerapkan strategi nasional penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Pemerintah Kota Pagar Alam menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut :

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui :
   a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
   b. Peningkatan konekfitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Adapun program kegiatan dan subkegiatan beserta anggaran yang mendukung penurunan kemiskinan di Kota Pagar Alam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Penurunan Kemiskinan Tahun 2026

No	PROGRAM	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Total Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	748.792.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	9500 Paket	9.278.877.390
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	462.718.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	276.400.280
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6500 Peserta Didik	7.681.500.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8222 Paket	4.188.811.440
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2962 Peserta Didik	1.555.650.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	13 Ruang	200.032.300
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	320 Peserta Didik	616.000.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	310 Peserta Didik	113.005.000
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60 Peserta Didik	12.132.585.000
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2855 Orang	960.468.008
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2767 Orang	105.290.000
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2495 Orang	100.700.000
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10284 Orang	105.290.000

No	PROGRAM	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Total Anggaran
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8216 Orang	288.950.000
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang	19.999.000
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45084 Orang	17.800.000
19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang	45.120.000
20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	525 Orang	24.675.000
21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	353.810.400
22	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2889 Orang	329.275.057
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1200 Orang	41.366.000
24	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	15.000.000
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	10.000.000
26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	1.440.628.000
27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	118.752.600
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	595 Orang	80.862.500

No	PROGRAM	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Total Anggaran
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 Orang	26.503.000
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	453.294.303
31	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen	21.920.677.545
32	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	17 KM	7.450.000.000
33	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	8 KM	870.000.000
34	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1500 Liter/Detik	1.650.000.000
35	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	6.865.910
36	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	310.433.125
37	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1 Rumah Tangga	52.232.950
38	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	35 Unit Rumah	851.407.250
39	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	62.569.100
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	164.703.000

No	PROGRAM	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Total Anggaran
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	135.000.000
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	164.703.000
45	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	50.000.000
46	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26.000.000
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	24.000.000
48	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	81.325.000
49	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	200 Orang	86.514.000
50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	200 Orang	86.514.000
51	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	41.000.000
52	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	107.789.500
53	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	52.052.000

No	PROGRAM	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Total Anggaran
54	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokume	15.103.000
55	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	18 Kelompok	37.800.000
56	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.38 Ton	67.900.000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	152.784.943
58	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	36 Orang	275.343.000
59	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	83.301.000
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	340.000.000
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	32.490.000
62	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.190.258.775
63	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	41 Unit	8.755.000.000
64	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	231.252.700
65	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15 Ha	49.180.031
66	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Unit	714.959.000

No	PROGRAM	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Total Anggaran
67	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRAIL	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	50.000.000.000
	TOTAL				**137.931.314.107**

4.2.6.4 Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evalusi capaian SDG's tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (goal) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TPB.

Tabel 4.17 Penyandingan Tujuan dan Sasaran terhadap Indikator SDG's

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kode Indikator	INDIKATOR SDG's
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*
Tujuan 1.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif dalam mendukung Daya Saing Daerah	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Nilai Sakip (Nilai)	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B
		16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kode Indikator	INDIKATOR SDG's
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
		16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.
		16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif
		17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)
		17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
Tujuan 2.1 : Terwujudnya Kualitas SDM Melalui Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Kesetaraan dalam Masyarakat	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Indeks)	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.
		4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
		4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita
		3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI)
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kode Indikator	INDIKATOR SDG's
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*
		3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.1*	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
		3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
		3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi
		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Tujuan 3.1 :Terwujudnya Jaminan Pelayanan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib dan Tentram	**Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)**		
Meningkatnya Cakupan Jaminan Sosial bagi Masyarakat	Tingkat Kemiskinan ((%))	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim
		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
		1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
		1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
		1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
		10.1.1*	Rasio Gini

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kode Indikator	INDIKATOR SDG's
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban serta demokrasi yang berkualitas dalam Masyarakat yang Harmonis	Indeks Ketertiban dan Keamanan (Angka)	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
		16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
		16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
		16.10.1.(C)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
Tujuan 4.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	**Indeks Infrastruktur (Angka)**		
Meningkatnya Cakupan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Sektor Strategis Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
		6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
		6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3
		9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional
		11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
		11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal
		17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku
		6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku
		6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Tujuan 4.2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**		
	Rasio Gini (Indeks)	10.1.1*	Rasio Gini

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kode Indikator	INDIKATOR SDG's
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
Meningkatnya Produktivitas Pertanian, UMKM, Perdagangan, Industri, Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Investasi	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya
	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin
		8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
		8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
		8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Tujuan 5.1 : Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	**Rasio Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Rasio)**		
	Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional (Kawasan)		
Meningkatnya Kontribusi Kepariwisataan terhadap PAD	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
		12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development
Meningkatnya Pengelolaan Seni dan Budaya Lokal	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)	11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)
	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)		

4.2.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pagar Alam, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Pagar Alam.

Pokok-pokok pikiran DPRD Pagar Alam tahun 2026 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Pagar Alam, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 3 daerah pemilihan yang meliputi 5 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Pagar Alam lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2026, KUA-PPAS dan APBD tahun 2026.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

Tabel 4.18 Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2026

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
1	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase Lingkungan	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Uaha Tani	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
4	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Saluran Irigasi	Talang Kemiling RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
5	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Drainase	RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
6	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Air Laga RT. 06 RW. 03 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Saluran Irigasi	RT. 0 RW. 01 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
8	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Lingkungan	Diprtlukan Pembangunan Jembatan Lingkungan	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
9	Tembok Penahan Sungai	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Ataran Sawah	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
10	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Makam dan Plat Deker	RT. 03 RW. 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
11	Pembangunan GOR Lapangan Volly	Diperlukan Pembangunan Lapangan Bola Volly	RT. 03 RW. 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pemuda dan Olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
12	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Plat Deker	RW. 01 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
13	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Gang Perkotaan	Dusun Tanjung Aro RT. 08 RW. 01 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
14	Drainase Jalan Perkotaan	Dipeerlukan Pembangunan Drainase Jalan Perkotaan	Jalan Mangga Raje RT. 01 RW. 01 Kelurhan Bangun Rejo kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
15	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
16	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Talang Kelapa RT. 15 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
17	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT. 18 RW. 04 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
18	Penyediaan Saluran Air Minum Untuk Rumah Tangga (SR)	Diperlukan Pembangunan Jaringan Air Bersih Rumah Tangga	Kampung Kenangan RT. 04 RW. 02 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
19	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Bedeng Munir RT. 01 RW. 01 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
20	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Gang Masjid I Dan II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
21	Alat Mesin Pertanian Lainnya	Diperlukan Peralatan Mesin Pertanian	Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Kampung Jakarta RT. 10 RW. 03 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
23	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkunga	Gang Warna Agung RT. 14 RW. 03 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
24	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT. 13 RW. 05 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
25	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Gang Kenanga 03 dan Gang Kenanga 04 TR. 06 RW. 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
26	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
27	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RW. 08 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
28	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan lingkungan	Keban Agung RT. 15 RW. 02 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
29	Bak / Kotak Sampah	tidak ada kotak sampah di lingkungan	tebat baru ilir rt 1 rt 2 rt 3 rt 4 rt 5 rw 1 kelurahan tebat giri indah, Kota Pagar Alam	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
30	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Sarana Ibadah (ambal) Masjid sudah tidak layak pakai	Masjid Al Hadist RT. 05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
31	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Rehab Masjid	Masjid Al- Hadist RT.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. PAgar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
32	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Sarana Ibadah (ambal) sudah tidak layak pakai	Masjid Al-Hadist Rt. 05 Rw.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
33	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	jalan indragiri rt 01 rw 03 kelurahan tebat giri indah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
34	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	rehab jalan karna jalan sudah rusak	jalan air perikan gang dempo raya rt 17 rw 9 kelurahn nendagung, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
35	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	jalan air perikan gang dempo raya rt 17 rw 9 kel nendagung, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
36	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	jalan gang sahun/ rusdalela Rt 4 rw 2 kelurahan nendagung, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
37	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	rt 18 rw 9 kelurahan nendagung kec pagaralam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
38	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	kampung melati rt 08 rw 03 kel besemah serasan kec pagaralam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
39	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	tebat baru ilir rt 5 rw 01 gang masjid alhadis kel tebat giri indah kec pagaralam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
40	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum ada lampu jalan	jalan indragiri rt 01 rw 03 kelurahan tebat giri indah kec pagaralam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
41	Perlengkapan Prasmanan	dibutuhkan prasmanan	tebat baru ilir rt 1,rt 2, rt, 3 rt 4, rt 5, rw 01 kel tebat giri indah kecamatan pagaralam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
42	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum adanya lampu jalan	rt.13, rt 14 rw. 07 kel nendagung kec. pagar alam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
43	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	kurangnya ambal	masjid nurul falah rt 4 rw 01 kel tebat giri indah kec pagaralam selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
44	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	belum adanya lampu jalan	Tinggi hari sampur alam kompleks KUD Rt. 03 Rw. 02 Kel Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
45	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	jalan rusak	Jalan Tinggi hari Sampur Alam Kompleks KUD RT. 03 RW. 02 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
46	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum adanya lampu jalan	Simpang Padang Karet Gang Ciken Rt. 15 RW. 02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
47	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Jalan Rusak	Simpang Padang Karet RT. 15 RW. 02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
48	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum adanya lampu jalan	Kelurahan Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
49	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum adanya lampu jalan	Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah , Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
50	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum adanya lampu jalan	Kelurahan Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
51	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum adanya lampu jalan	Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
52	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Pembangunan masjid	Aur Duri RT. 01 Rw. 01 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
53	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	drainase sudah rusak dan tidak baik	Desa Selebang Rt. 01 Rw. 03 Kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
54	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Tembok Penahan dan Siring rusak	TL. Sawah Rt. 14, 15 Rw. 05 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
55	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Drainase sudah rusak	Cawang Baru Rt. 02 Rw. 01 Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
56	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Merehab Masjid karena sudah rusak	Gn. Mesir Rt. 04 Rw. 02 Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
57	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Jalan sudah rusak	Desa Rempasai Rt. 11 Rw. 04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
58	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Pembangunan jalan karena sudah rusak	Talang Remayah Rt. 04 Rw.02 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
59	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	jalan di atas spal sudah rusak	Pagardin Rt. 08 Rw. 03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
60	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Belum adanya menara masjid	Kel. Muara Siban Rt. 04 Rw. 02 Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
61	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	drainase sudah rusak/tidak baik	simpang Mbacang Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
62	Tembok Penahan Pemukiman	Tembok penahan sudah rusak	Rt. 04 Rw. 01 Kel Jokoh Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
63	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	drainase sudah rusak dan aliran air tidak jalan	Lembah Serunting Rt. 10 Rw. 04 Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
64	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	jalan produksi sudah rusak	Talang Keluk Rt. 14 Rw. 03 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
65	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan irigasi yang sudah rusak	Desa Suka Cinta Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
66	Drainase Perkotaan	belum tersedianya saluran drainase	Suka Rukun RT 03 Kel. Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
67	Drainase Perkotaan	Belum tersedianya Saluran Drainase	Talang Jeruk RT. 06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
68	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum tersedianya lampu penerangan jalan	Talang Jeruk RT. 06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
69	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid AL. Hidayah	Suka Makmur RT. 09 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
70	Penyediaan Saluran Air Minum Untuk Rumah Tangga (SR)	Di perlukan penyediaan air bersih	Suka Jaya RT. 11 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
71	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Belum tersedianya lampu penerangan jalan	Indra Giri Raya / Taman Siswa RW. 06 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
72	Tembok Penahan Pemukiman	diperlukan tembok penahan masjid AL. Muhajirin	Prumnas Griya Abdi Negara Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
73	Drainase Jalan Perkotaan	diperlukan pembangunan saluran drainase	Perumnas Griya Abdi Negara RW. 01 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
74	Pembangunan Tembok/Pagar Sekolah	Diperlukan Pembanguna Pagar SDN. 47	Dusun Pagardin Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
75	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Kota	Diperlukan Pembanguna Jalan Permukiman	Dusun Pagardin RT.09 RW.03 Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
76	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Permukiman	Dusun Pagardin RT.08 RW. 03 Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara , Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
77	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Permukiman	Dusun Muara Siban RT. 09 RW. 03 Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
78	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Talang Darat Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
79	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid	Dusun Tanjung Taring Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
80	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	Dusun Pagardin RT09 RW. 03 Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utata, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
81	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Ujan Mas Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
82	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Diperlukan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Dusun Talang Tinggi RT.03 RW.02 Kelurahan Muaran Siban Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
83	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	Dusun Cawang Baru Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
84	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	Dusun Muaran Tenang RT.08 RW.03 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
85	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	Dusun Talang Darat RT.01 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
86	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Simpang Tanjung Keling Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
87	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Pemakaman	Dusun Cawang Baru Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
88	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Permukiman	Dusun Muara Tenang RT.08 RW. 03 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
89	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	Dusun Dempo Rejo RT.09 RW. 03 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
90	Rehab Gedung Kantor	Diperlukan Rehab Kantor Kelurahan Bangun Jaya	KelurahanBangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
91	Pembangunan/ Rehab tempat sumber air baku/ embung/ kolam retensi	Diperlukan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kantor Kelurahan	RT.01 RW.01 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
92	Pembangunan Jembatan	Diperlukan Pembangunan Jembatan Masjid Istiqomah	Dusun Dempo Rejo RT.07 RW.03 Kelurahan Dempo Makmur, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan
93	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Tempat Parkir Masjid Istiqomah	Dusun Dempo Rejo RT.07 RW. 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
94	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperukan Pembangunan Tembok Penahan	Dusun Dempo Rejo RT.09 RW.03 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
95	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT.01 RW. 01 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
96	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
97	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid Jami' AL Huda	RW. 02 Desa Tanjung Keling Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
98	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Permukiman	RW. 02 Desa Tanjung Keling Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
99	Pembangunan Tembok/Pagar Sekolah	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan dan Pagar SD 45	SD Negeri 45 Desa Tanjung Keling Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT.03 RW.01 Desa Tanjung Kerinjing Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
101	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkar	RT.08 RW.02 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
102	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Desa Tanjung Keling Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
103	Drainase Jalan Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.01 RW.01 Desa Talang Darat Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
104	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RW.01 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
105	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.02 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
106	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW. 03 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
107	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RT.01 RW.01 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
108	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Permukiman	RT.09 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
109	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Permukiman	RT.13 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
110	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RT.02 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
111	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
112	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Bukit Kayu Manis Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
113	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Ataran Cecuwir	Desa Pagardin Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
114	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Perbaikan Saluran Air Limbah Masjid Takwa	RT.05 RW.02 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
115	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid AL Iklas	RT.18 RW.06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
116	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RT.18 RW.06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
117	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	Mekar Alam RT.10 RW.06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
118	Penyediaan Saluran Air Minum Untuk Rumah Tangga (SR)	Diperlukan Pembangunan Saluran Air Bersih	Kampung Bayu Urip RT.01 RW.01 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
119	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Lahan Parkir Masjid Taqwa	RW.02 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
120	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tebat Baru Ulu RT.01 RW.02 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
121	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan	Tebat Baru Ulu RT.05 RW. 02 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
122	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tebat Baru Ulu RT.03 RW, 02 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
123	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Permukiman	Kamp Nusa Indah 3 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tegat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan , Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
124	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase Perkotaan	Kamp Nusa Indah RT. 04 RW.04 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
125	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase Perkotaan	Tebat Baru Ilir RT.05 RW. 01 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
126	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tebat Baru Ilir RT. 05 RW. 01 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
127	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Berat Masjid	RT. 16 RW. 05 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
128	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Jalan Kota Aspal	Diperlukan Pengaspalan Jalan Perkotaan	RT. 16 RW. 05 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
129	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RT. 16 RW. 05 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
130	Alat-alat Seni dan Budaya	Diperlukan Pengadaan Peralatan Musik dan Penunjang Lainnya	Tebat Baru Ulu RT.01 RW.02 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
131	Alat-alat Seni dan Budaya	Diperlukan Pengadaan Peralatan Musik Dan Penunjang Lainnya	Kamp Nusa Indah RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
132	Alat-alat Seni dan Budaya	Diperlukan Pengadaan Peralatan Musik Dan Penunjang Lainnya	Gang Jelita RT. 16 RW. 05 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
133	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW. 08 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
134	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.07 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
135	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan PemasanganLampu Penerangan Jalan	RW.02 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
136	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	DiperlukanPemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.04 Kelurahann Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
137	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.02 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
138	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.01 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
139	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	RW.05 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
140	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Pagar Masjid AL Kasidah	RW.08 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
141	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	RW.01 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
142	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	RW.07 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
143	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RW.07 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
144	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RW.03 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
145	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RT.13 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
146	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RW.03 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
147	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RW.01 Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
148	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.01 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
149	Penyediaan Saluran Air Minum Untuk Rumah Tangga (SR)	Diperlukan Pembangunan Sumur Bor Air Bersih	RW.01 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
150	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Cawang Lama RW.04 Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
151	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Tegur Wangi Lama Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
152	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	Dusun Tegur Wangi Lama Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
153	Pembangunan Tembok/Pagar Sekolah	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Sekolah SDN 49	Tanjung Keling Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
154	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Tanjung Keling RW.02 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
155	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Diperlukan Pembangunan Jalan Produksi	Dusun Tanjung Keling RW.02 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
156	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Tanjung Taring RW.03 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
157	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Kertadewa RW.03 Kel. Padang Temu Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
158	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Karang Anyar Talang Pering RW.02 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
159	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Talang Darat RW.01 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
160	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	Dusun Karang Anyar RW.02 Kel. Kance Diwe Kec. Depo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
161	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Permukiman	Dusun Tanjung Keling RW.02 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
162	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	RW.05 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
163	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.05 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
164	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	RW.05 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
165	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid Radatul Janah	RW.05 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
166	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkar Masjid	RW.06 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
167	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Permukiman	RW.06 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
168	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid AL Hidayah	RW.05 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
169	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dipeerlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RW.01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
170	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Rehab Masjid Tawakka	RW.01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
171	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RW.04 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
172	Pembangunan Jembatan	Diperlukan Pembangunan Jembatan	RW.04 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan
173	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RW.01 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
174	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	RW.02 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
175	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase Permukiman	RW.05 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
176	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.05 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
177	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	RW.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
178	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	RT.01,02 RW.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
179	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.02 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
180	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.03 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
181	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.03 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
182	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Permukiman	RW. 03 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
183	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	RW.06 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
184	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.06 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
185	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	RW.05 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
186	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RW.02 Kel. Bangun Rejo kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
187	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Irigasi	RW.01 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
188	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Irigasi	RW.02 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
189	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.02 Kel Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
190	Pemeliharaan Bahu Jalan (Tebas Bayang), Pemeliharaan Jembatan dan Median jalan, Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan	Diperlukan Pelebaran Bahu Jalan Talang Camay	Jalan Talang Camay Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
191	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Irigasi	RW.02 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
192	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	Desa Dempo Rejo RT.09 RW.03 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
193	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid Nurul Iman	Desa Rejo Sari RW.04 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
194	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid AT Taqwa	Desa Talang Tinggi RT.01 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
195	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid Nurul Huda	Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
196	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	Desa Dempo Rejo RT.01 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
197	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	Desa Dempo Rejo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
198	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	Desa Sukananti RW.02 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
199	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	Desa Dempo Rejo Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
200	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	Desa Dempo Rejo RW.03 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
201	Penyediaan Saluran Air Minum Untuk Rumah Tangga (SR)	Diperlukan Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih	Desa Rejo Sari RW.04 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
202	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
203	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
204	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Menara Masjid AL Hikmah	Demporeokan RT.08 RW.02 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
205	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid Tawakal	Desa Alun Dua Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
206	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Alun Dua RT.01 RW.01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
207	Rehabilitasi Gedung/ Balai/ Ruang Pertemuan	Balai Desa sudah rusak	Rw. 02 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
208	Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Kuburan	Pagar Kuburan sudah rusak	Rw. 02 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
209	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Siring belum ada dan perulu siring untuk air mengalir	Siring Air Salak Rw. 02 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
210	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani belum ada	Rw. 02 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
211	Pembangunan Tembok/Pagar Sekolah	Pagar Sekolah sudah rusak	SD 36 Rw. 02 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
212	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Jalan sudah Rusak	Rw. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
213	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkar	RW.01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	-	-
214	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Jalan sudah rusak	Rw. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
215	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	RW.01 Kel.Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	-	-
216	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Jalan perkebunan belum ada	Rw. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
217	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Diperlukan Pembangunan Jalan Produksi	RW.01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	-	-
218	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Lampu jalan belum ada	Rw. 01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
219	Pembangunan Pagar dan Gapura Situs Purbakala	Diperlukan Pembangunan Gapura Permukiman	RW.01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
220	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	RW.01 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
221	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Masjid	RW.05 Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
222	Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Kuburan	pagar TPU sudah rusak	Rw. 05 Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
223	Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Kuburan	Diperlukan Pembangunan Pagar Makam	RW.05 Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
224	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Spal sudah Rusak	Rw. 05 Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah , Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
225	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jaringan SPAL	RW.05 Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
226	Tembok Penahan Pemukiman	Tembok Penahan Mushola rusak	Rw. 05 Kel. Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
227	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Jalan sudah rusak	Rw. 03 kel. Jokoh Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
228	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Drainase sudah rusak	Rw. 04 kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
229	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Saluran Irigasi	Desa Pematang Bango Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
230	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Pagar Masjid Qodim	RT.03 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
231	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
232	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	RT.10 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
233	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Masjid Prumnas Griya Embun 2	Kelurahan Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
234	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Lampu belum ada	Rw. 01 Kel. Sukajadi Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
235	Pembangunan Jembatan	Diperlukan Pembangunan Jembatan	RT.14 RW.05 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan
236	Pembangunan Tembok/Pagar Sekolah	Diperlukan Pembuatan Pagar Gerbang SDN 33	Desa Pematang Bango Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
237	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RT.01 RW.01 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
238	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Gang Cor Beton	RT.22 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
239	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Siring Ataran Sawah Ismak	Kelurahan Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
240	Drainase Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.10 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
241	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Siring	RT.08 RW.03 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
242	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RT.10 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar AlamUtara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
243	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Gang Cor Beton	RW.01 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
244	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
245	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan Conblok	Tebat Baru Ulu RW.02 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
246	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembanguan Jalan Usaha Tani	RT.01 RW.01 Kel. Jangar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
247	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	RT.01 RW.01 Kel, Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
248	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	RT.01 RW.01 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
249	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusus Air Salak RT.02 RW.01 Kel. Jangkar Maas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
250	Drainase Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Drainase	Dusun Air Salak RT.02 RW.01 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
251	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Jambat Akar RT.03 RW.02 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
252	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Jambat Akar RT.03 RW.02 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
253	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Jambat Akar RT.07 RW.02 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
254	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Ujan Mas RW.03 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
255	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Drainase	Dusun Jambat Akar RT.04 RW.02 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
256	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
257	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Pagar Din RW.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
258	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Pagardin RW.03 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
259	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Bumi Agung Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
260	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigaasi	Dusun Gunung Agung Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
261	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Muara Siban Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
262	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Cawang Baru Kel. Rebah Tinggi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
263	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Jangga Kel. Padang Temu Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
264	Rehab Gedung Kantor	Diperlukan Rehan Gedung Balai Dusun	RT.01 RW.01 Dusun Jangkar Mas Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
265	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Gunung Agung Lama Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
266	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	Dusun Gunung Agung Tengah Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
267	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun Padang Babat RT.07 RW.02 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
268	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Bandar RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
269	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Bandar RT.01 RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
270	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pebuatan Tempat Parkir Masjid	Bandar RW.02 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
271	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Bandar RT.02.RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
272	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	Bandar RT.02 RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
273	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Bandar RT.03 RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
274	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Bandar RT.03 RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
275	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Siring Ataran Tengah	Bandar RT.03 RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
276	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Talang Surabaya RT.04 RW.01 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
277	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	Karng Anyar RT.05 RW.02 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
278	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.07, 08 RW.03 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
279	Tembok Penahan Sungai	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Irigasi	RT.07,08 RW.03 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
280	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RT.09 RW.04 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
281	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Diperlukan Pembangunan Jalan Produksi Pertanian	Danau RT.04 RW.01 Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
282	Penyediaan Saluran Air Minum Untuk Rumah Tangga (SR)	Diperlukan Pembangunan Saluran Air Bersih	Talang Sari RT.03 RW.02 Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
283	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Tanjung Menang RT.04 RW.02 Kel. Perahu Dipo Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
284	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RT.07 RW.03 Kel. Perahu Dipo Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
285	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Talang Berangin RT.03 RW.01 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
286	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RW.01 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan , Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
287	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Rempasai RT.04 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
288	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tebat Benawa RW.03 Kel. Penjalang Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
289	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	Talang Pasai RT.13 RW.14 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
290	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RT.14 RW.05 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
291	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT.13 RW.05 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
292	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	Talang Pasai RT.13 RW.14 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
293	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Sarana Air Limbah	Talang Pasai RT.13 RW.14 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
294	Tembok Penahan Sungai	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Sungai	Demporeokan RT.08 RW.02 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
295	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah	Pagar Gading RW.03 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
296	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah	Kampung Purwosari RT.06 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
297	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	Mekar Alam RT.16 RW.06 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
298	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Jalan Kota Aspal	Diperlukan Pengaspalan Jalan Lingkungan	Talang Pasai RT.13 RW.14 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
299	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Kelurahan Penjalan Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
300	Pembangunan/ Rehabilitasi prasarana utilitas umum (PSU) di perumahan	Diperlukan Tempat Pemandian Umum	Talang Berangin RT.03 RW.01 Kel. Penjalan Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
301	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Mencegah Terjadinya Banjir Vol 500 Meter	Talang Tinggi RT.01 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
302	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Memperlancar Pembuangan Air Vol 200 Meter	Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
303	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Untuk Penerangan Jalan	Sukananti RT.03 RW.02 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
304	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Untuk Penerangan Jalan	Sukananti RT.04 RW.02 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
305	Tembok Penahan Pemukiman	Untuk Mencegah Terjadinya Longsor Vol 100 Meter	Sukananti RT.04 RW.02 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
306	Tembok Penahan Pemukiman	Mencegah Terjadinya Longsor Vol 300 Meter	Sukananti RT.05 RW.02 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
307	Tembok Penahan Pemukiman	Tembok Penahan Balai Desa Mencegah Longsor Vol 2M x 15M	Dempo Rejo RT.07 RW.02 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
308	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Untuk Penerangan Jalan	Rejosari RT.10 RW.04 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
309	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Saluran Pembuangan Air Jalan dan Rumah Tangga Jalan Sapu Jagat Vol 250 M x 50 CM x 50 CM	Prumnas Abdi Negara RT.03 RW.01 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
310	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Sudah Rusak dan Mati	RT.04 RW.02 Kel. BangunJaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
311	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Rehab SPAL ukuran lebar 50 CM x tinggi x 30 CM x panjang 400 M	Desa Pengandonan RT.09 RW.04 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
312	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Sudah Rusak dan Mati	RT.04 RW.02 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
313	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Masih Minim Penerangan Perlu Penambahan 4 titik	Desa Pengandonan RT.09 RW.04 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
314	Irigasi	Pembangunan Irigasi Panjang 150 M x Tinggi 1 M x Lebar 1 M	Desa Selibar RT.13 RW.05 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
315	Tembok Penahan Pemukiman	Pembangunan tembok penahan sepanjang 200 M x 1,5 M x 30 CM	Desa Pengandonan RT.16 RW.06 Kel. Selibar Kec. Pagar Allam Utara , Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
316	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Penambahan Lampu Jalan	Desa Pengandonan RT.16 RW.06 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
317	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Pengrehapan Drainase yang sudah ada sepanjang 200 M	Desa Pengandonan RT.16 RW.06 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
318	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Kota	Diperlukan plat deker ukuran 10 M x 2 M	Simpang empat SMP 2 RT.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
319	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan tembok penahan ukuran panjang 150 M	Prumnas Guppi RT.07 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
320	Pembangunan IPAL Komunal/SPAL/Tanki Septic	Diperlukan spal panjang 150 M	Gang Setia 2 RT.08 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
321	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Karena belum adanya jaringan irigasi diataran sawah air betung dengan vol 1M x 500 M	Desa Pematang Bango RT.01 RW.01 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
322	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Jaringan spal ukuran 150 M	Gang Cemara 1 RT.01 RW.01 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
323	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	diperlukan drainase siring tertutup ukuran 150 M	Jalan jati alam RT.09 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
324	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan lampu jalan 10 titik	Griya bangun sejahtera RT.13 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
325	Tembok Penahan Sungai	Untuk menjaga rawan longsor di alliran sungai	Jalan S. Parman RT.11 RW.05 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
326	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Perlunya penerangan lampu dengan 6 titik	Jalan S. Parman RT.11 RW.05 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
327	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Perlunya pembangunan jalan untuk memudahkan aktifitas warga setempat vol 200M x 60 CM x 30 CM	Dusun Alun dua RT.01 RW.01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
328	Tembok Penahan Pemukiman	Rawan Longsor sehingga perlu membangun tembok penehan vol P 300 M x L 4 M x T 3 M	Dusun Alun Dua RT.02 RW.01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
329	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	perlunya di bangunsaluran pembuangan air limbah P 70M x L 40CM x 40 CM	Gunung Sari RT.05 RW.01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
330	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Kurang memadai akses warga beraktifitas perlunya pelebaran jalan P 200m x L 2 M x 20 CM	Gunung Gendang RT.06 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
331	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Kurang sehatnya lingkungan warga P 350M x L 40 M x T 40 CM	Dusun Petani RT.03 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
332	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan di permukiman	Dusun Baru RT.04 RW.02 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
333	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Belum adanya Saluran Pembuangan Air Limbah	RT.04 RW.02 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
334	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Belum adanya saluran pembuangan air limbah	RT.07 RW.02 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
335	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	masih jalan tanah	RT.03 RW.01 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
336	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Belum adanya saluran pembuang air limbah	RT.18 RW.06 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
337	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Belum adanya saluran pembuangan air limbah	RT.08 RW.03 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
338	Irigasi	perlunya irigasi untuk mencegah air keluar dan masuk ke jalan	Tanjung Aro RT.02 RW.01 Kel. Kuripan babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
339	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha tani ataran sepit	Tanjung Aro RT.04 RW.01 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
340	Tembok Penahan Sungai	Diperlukan pembangunan tembok penahan ayek kundur panjang 50M tinggi 2,5 M	Pagar Gading RT.06 RW03 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
341	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan JalanUsaha Tani ataran banding conblok	Tanjung Aro RW.01 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
342	Tembok Penahan Pemukiman	Pembangunan tembok penahan siring belakang sukimi	Pagar Gading RT.07 RW.03 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
343	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan irigasi mencegah banjir dekat masjid Jami'	Tanjung Aro RT.08 RW.01 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
344	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	RT.05 RW.02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
345	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Keban Agung Baru RW.02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
346	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.01 Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
347	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	RT.05 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan
348	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT.03 RW.01 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
349	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	Gang Melati RT.03 RW.01 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
350	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Nusa Indah 2 RT.02 RW.04 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
351	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Desa Jambat Bale RT.10 RW.04 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
352	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan	RT.06 Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
353	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton	RT.06 Keban Agung Baru Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
354	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	RT.06 Keban Agung Baru Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
355	Pembangunan/ Rehab Jalan Kota Cor Beton	Diperlukan Pembangunan Jalan Cor Beton Setapak	Keban Agung Baru RT.07 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
356	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid/ Musalah AL-AMANAH	RT.07 RW.04 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
357	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RW.04 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
358	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RT.02 RW.01 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
359	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	RT.02 RW.01 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
360	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Gang Sido Rukun RT.04 RW.02 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
361	Pembangunan Gedung Kantor	Diperlukan Pembangunan Balai Desa	RT.18 RW.09 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
362	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT.20 RW.10 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
363	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Lampu Penerangan di Sekitar GOR Badminton Keban Agung	Keban Agung Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
364	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembangunan Rehab Masjid Nurul Falah	Tebat Baru Ilir RT.04 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
365	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Keban Agung Baru RT.15 RW.02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
366	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	Keban Agung RT.04 RW.02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
367	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Tembusan Perumahan	Keban Agung Baru RT.04, 15 RW.02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
368	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Keban Agung Baru RT.07 RW.05 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
369	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RT.04 RW.02 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
370	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Saluran Irigasi	RT.04 RW.02 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
371	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RT.02 RW.01 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
372	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	RT.02 RW.01 Kel Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
373	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Tanjung Payang Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
374	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkungan	RT.03 RW.03 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
375	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Jalan 5 titik	Gang Pelita dan Geng Taqwa Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
376	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan lampu jalan minim penerangan	Gang Sentosa 6 RT.08 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
377	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu jalan dengan tiang sebanyak 10 Unit	Wilayah RT.16 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
378	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 10 Unit	Gang Cemara 1 RT.16 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
379	Tembok Penahan Sungai	pembangunan tembok penahan ayek kundur guna mencegah kebanjiran di kala musim cuaca ekstrim dengan volume panjang 50m tinggi2,5m	Pagar Gading RT.006 RW.003, Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
380	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan pembangunan menara masjid Al-hidayah	Pagar Gading RT.006 RW.003, Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
381	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	perlunya penerrangan lampu jalan warga demi kelancaran aktifvitas di malam hari 10 titik	Pagar Gading RT.007 RW.003, Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
382	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Wilayah Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
383	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid Nurul Marifah	Kelurahan Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
384	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RT.21 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
385	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Permukiman	RW.02 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
386	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase Saluran Pembuangan Sir Limbah	RT.22 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
387	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RT.20 RW.10 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
388	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Air Limbah	RW.01 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
389	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.31 RW.01 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
390	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	Karang Dapo RT.05 RW.01 Kel. Tubak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	-	-
391	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RW.01 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
392	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	Jambat Balo RW.04 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
393	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RW.02 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
394	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RT.15 RW.02 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
395	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	Taman Marisi RW.01 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
396	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Pagar Banyu Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
397	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Jalan Tinggi 3M dengan Panjang 300M	Desa Sukananti Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
398	Drainase Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Drainase sepanjang 300M	Desa Sukananti Kel. Dempo Makmur kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
399	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	KelurahahnDempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
400	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Masjid AL Muttaqin	Kelurahan Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
401	Tembok Penahan Sungai	DiperlukanPembangunan Tembok Penahan Sungai	Dusun Petani Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
402	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Kelurahan Bangun Rejo Kec, Pagar AlamUtara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
403	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Prumnas Guppi	Perumnas Guppi Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
404	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Kota	Diperlukan Rehab Pembangunan Plat Deker dan Jalan	Kelurahan Beringin Jaya Kec Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan
405	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembanguan Saluran Pembuangan Air Limbah	Dusun Alun Dua Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
406	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Rehab Jalan Lingkungan	Dusun Alun Dua Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
407	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Rehab Jalan Gang Gedong	Gang Gedong Kelurahan Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
408	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Kelurahanan Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
409	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	RT.05 Kel. Pagar AlamKec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
410	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DiperlukanPembangunan Jaringan Irigasi Dusun Pagar Gading	Dusun Pagar Gading Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
411	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tanjung Aro Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
412	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Kelurahan Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
413	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	Talang Pasai Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
414	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diprlukan Rehab Jalan Setapak	Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
415	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Kelurahan Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
416	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL Griya Bangun Sejahreta	Griya Bangun Sejahtera Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
417	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembanguan Tembok Penahan	Griya Bangun Sejahtera Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
418	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Kelurahan Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
419	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
420	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
421	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Permukiman	RT.11 RW.06 Prumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
422	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Lingkar Prumnas	RT.05, 06 RW.03 Prumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
423	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	RT.05,06 RW.03 Prumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
424	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Drainase Siring Payang	RT.16 RW.08 Tanjung Cermin Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
425	Drainase Perkotaan	Diperlukan Pembangunan Drainase Tertutup Air Perikan	RT.17 RW.09 Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
426	Pembangunan Jembatan	Diperlukan Pembangunan Jembatan Permukiman	RT.18 RW.09 Air Perikan Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan
427	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembanguan Jariang Irigasi	Kamp Nusa Indah RT.01 RW.04 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
428	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalas Setapak Kampung Dua	Kampung Dua RT.08,09 RW.01 Kel. Gunung Dempo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
429	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak Karang Dapo	Karang Dapo RT.03 RW.01 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
430	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Wilayah Belumai	RT.09 RW.03 Belumai Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
431	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerngan Tenaga Surya	RW.05 Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
432	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Rehab Tempat Wudhu dan Kamar Mandi Masjid AR-ROYAN	Jln. Kenari RT.06 RW.03 Prumnas Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
433	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Gang Bima RT.20 RW.06 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
434	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi	RT.09 RW.03 Belumai Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
435	Pembangunan IPAL Komunal/SPAL/Tanki Septic	Diperlukan Saluran Pembuangan Air Limbah Sepanjang 150M	Gang Setia 2 RT.08 Kel. Bngun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
436	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Drainase Siring Tertutup Ukuran 150 M	Jalan Jati Alam RT.09 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
437	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Kampung	Kampung Bandung RT.02 RW.01 Kel. Kerinjing Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
438	Rehab Gedung Kantor	Diperlukan Rehab Balai Desa Muara Siban	RT.04 RW.02 Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
439	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembanguna Tembok Penahan	Tegur Wangi Baru RT.01 RW.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
440	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Plat Deker	Dusun Tegur Wangi Baru RT.01 RW.01 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
441	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Tenaga Surya	Dusun Tegur Wangi Baru Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
442	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Tegur Wangi Lama RT.05 RW.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
443	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT.14 RW.04 Gunung Agung Ilir Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
444	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RT.13 RW.04 Gunung Agung Ilir kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
445	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RT.01 RW.01 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
446	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.01 RW.01 Cawang Baru Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
447	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Cawang Baru Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
448	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi Ujan Mas	Dusun Ujan Mas RT.07 RW.03 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
449	Tembok Penahan Kuburan	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman	Tempat Pemakaman Umum Pagardin Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	-	-
450	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usah Tani	RT.02 RW.03 Sumber Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	-	-
451	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.01 RW.02 Sumber Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	-	-
452	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembanguna Jalan	Kampung Bandung RT.02 RW.01 Kel. Kerinjing Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
453	Rehabilitasi Gedung/ Balai/ Ruang Pertemuan	Diperlukan Rehab Balai Desa Muara Siban	RT.04 RW.02 Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
454	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembanguna Tembok Penahan	Tegur Wangi Baru RT.01 RW.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
455	Pembangunan/ Rehab Plat Deker Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Plat Deker	Dusun Tegur Wangi Baru RT.01 RW.01 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
456	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Tenaga Surya	Dusun Tegur Wangi Baru Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
457	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Tegur Wangi Lama RT.05 RW.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
458	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT.14 RW.04 Gunung Agung Ilir Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
459	Tembok Penahan Pemukiman	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan	RT.13 RW.04 Gunung Agung Ilir kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
460	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RT.01 RW.01 Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
461	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.01 RW.01 Cawang Baru Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
462	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Cawang Baru Kel. Muara Siban Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
463	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Jaringan Irigasi Ujan Mas	Dusun Ujan Mas RT.07 RW.03 Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
464	Tembok Penahan Kuburan	Diperlukan Pembangunan Tembok Penahan Pemakaman	Tempat Pemakaman Umum Pagardin Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
465	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RT.02 RW.03 Sumber Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
466	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Drainase	RT.01 RW.02 Sumber Kel. Candi Jaya Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
467	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembanguna Jalan Usaha Tani	Ataran Keraduk Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
468	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembanguna Jalan Usaha Tani	Dusun Suka Mulia Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
469	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembanguna Jalan Usaha Tani	Talang Lanang Kel. Kerinjing Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
470	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembanguna Jalan Usaha Tani	Dusun Talang Lanang Lime Kel. Kerinjing Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
471	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan JalanUsaha Tani	Kelurahan Pagar Wangi Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
472	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RW.03 Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
473	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan Pembangunan Jalan Usaha Tani	RW.02 Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
474	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu PeneranganJalan	Kelurahan Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
475	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kel. Lubuk Buntak Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
476	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	DiperlukanPemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
477	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	Dusun Suka Cinta Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
478	Pembangunan Tembok Penahan Drainase Siring Perkotaan	Diperlukan Rehab Siring Padang Pangkul	RW.03 Tebat Benawa Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
479	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Diperlukan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
480	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Diperlukan Pembangunan Irigasi Talang Babat	Talang babat Kelurahan Jangkar Mas Kec. Dempo Utara , Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
481	Rehab Rumah Ibadah dan Sarana Penunjang Tempat Ibadah lainnya	Diperlukan Pembanguna Rehab Masjid AL-MUSLIKIN	Talang Kromo Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	SUB KEGIATAN
482	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan SPAL	RW.01 Kel. Kerinjing Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
483	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Jalan Setapak	RW.02 Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
484	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Sudah rusak mati	Rt. 014 Rw. 06 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
485	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Pengrehapan Spal dengan ukuran lebar 50 cm x 30 cm dan panjang 400 m	Desa Pengandonan Rt. 05 Rw. 02 Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
486	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Di perlukan jaringan spal ukuran 150 m	Gang Cemara 1 Rt. 16 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
487	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Perlunya Pembangunan Spal untuk memudahkan aktivitas Volume 200 x 3 m	Jambat Beringin Rt. 010 Rw. 05 Kel. Beringin JAya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
488	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Perlunya Penerangan Lampu Jalan untuk menjaga keamanan lingkungan	Jambat Beringin Rt. 10 Rw. 03 Kel Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
489	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Perlunya Pembangunan Spal di Dusun Alun Dua Volume P= 200m L=60cm T=30cm	Dusun Alun Dua Rt. 01 Rw. 01 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
490	Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Pemasalahan Kurangnya Penerangan dipermukiman warga Perlu pengadaan lampu jalan	Dusun Baru Rt. 04 Rw. 01 Kel. Alun dua kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
491	Pembangunan SPAL Domestik di Lingkungan	Diperlukan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	RW.03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	-	-
492	Pembangunan/ Rehab Drainase di Lingkungan	Diperlukan pembangunan drainase lingkungan	RT. 01 RW. 01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-
493	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Diperlukan pembangunan jalan usaha tani	RT. 01 RW. 01 Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian	-

4.2.8 Arahan Kebijakan Pembangunan Kota Pagar Alam Berdasarkan Kebijakan Kewilayahan dalam RTRW Kota Pagar Alam

4.2.8.1 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Prioritas pembangunan kewilayahan mengacu pada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032, yaitu :

Sebagai tindak lanjut penetapan arah kebijakan pembangunan wilayah, maka ditetapkan kawasan strategis Kota Pagar Alam, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Pagar Alam terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis tersebut terdiri dari:

4.2.8.1.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dengan kriteria diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. Kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi kota;
c. Kawasan yang memilki potensi ekspor;
d. Kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal kota;
f. Kriteria lainnya pada aspek ekonomi yang dapat ditentukan oleh Kota sesuai dengan karateristik dan kepentingan pembangunan kota

Dari kriteria tersebut maka ditetapkan beberapa kawasan strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam, diantaranya :

a. Kawasan sekitar bandara yang berlokasi di Kecamatan Dempo Selatan, Kelurahan Atung Bungsu, Dusun Mingkik, Dusun Benua Keling, Dusun Tanah Pilih, dan Dusun Suka Cinta, dengan luas pengembangan kawasan sebesar 500Ha.
b. Kawasan perdagangan dan jasa yang berada di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Nendagung, dengan luas pengembangan kawasan sebesar 100 Ha.
c. Kawasan perkebunan teh yang berada di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kelurahan Gunung Dempo dan Kawasan perkebunan kopi yang berada di

Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Utara, dengan luas pengembangan kawasan sebesar 8825 Ha.

d. Koridor Jalan Arteri Sekunder yang berada di Pusat Kota (Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan), dengan total panjang jalan sebesar 21.766 m.

4.2.8.1.2 Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kota Pagar Alam meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya kota dengan kriteria sebagai berikut :

a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya setempat.
b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri kota
c. Merupakan aset kota yang harus dilindungi dan dilestarikan
d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota
e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya

Dari kriteria tersebut makan ditetapkan kawasan strategs berdasarkan kepentingan sosial budaya, diantaranya adalah :

a. Situs purbakala Megalith; berada di Dusun Tanjung Aro, Dusun Tegur Wangi, Talang Tinggi dan Tanjung Aro, Dusun Nading, Dusun Keban Agung, Dusun Tebing Tinggi, dan Dusun Belumai.
b. Telaga Alam yang disebut "tebat", merupakan hasil bentukan alamiah yang juga berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan.

4.2.8.1.3 Kawasan Strategis Pada Aspek Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kota Pagar Alam meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis Kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, dengan kriteria :

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati
b. Merupakan aset Kota berupa kawasan lindung Kota yang ditetapkan bagi perlindiungan ekosistem, flora/fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi atau dilestarikan

c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian bagi kota
d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota
e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
f. Rawan bencana alam skala kuota
g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan

Dari kriteria tersebut ditetapkan kawasan strategis berdasarkan kepentingan aspek lingkungan hidup, diantaranya adalah :

a. Kawasan hutan lindung Kota Pagar Alam, yang terletak di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Selatan. Dengan luas kawasan sebesar 28,740 Ha.
b. Kawasan perlindungan setempat, dengan spesifikasi jenis adalah sempadan sungai, diantaranya adalah sungai selangis (Kecamatan Pagar Alam Utara dan Selatan) dan Sungai Lematang (Kecamatan Dempo Tengah) sejauh 100 meter kanan kiri, yang diidentifikasi sebagai sungai besar, dan sungai endikat kanan dan kiri, sungai kera, sungai putih, sungai cawang, dan sungai selangis besar, beserta dengan anak sungai yang lain diidentifikasi sebagai sungai kecil sejauh 50 meter kanan dan kirinya.
c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, terutama disekitar aliran sungai yang bagian hulunya berada di Gunung Dempo. Pada radius 15 Km dari kawah termuda.

Tabel 4.19 Program Pendukung Percepatan Kawasan Strategis Kota Pagar Alam

No	Kawasan Strategis	Kecamatan / Kelurahan	Program Pendukung	Keterangan
1	2	3	4	5
1	**Pertumbuhan Ekonomi**			
	Kawasan Sekitar Bandara	Dempo Selatan / Kelurahan Atung Bungsu	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	pengembangan kawasan sebesar 500 Ha

No	Kawasan Strategis	Kecamatan / Kelurahan	Program Pendukung	Keterangan
1	2	3	4	5
			Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pagar Alam Selatan / Kelurahan Nendagung	Program efesiensi perdagangan dalam negeri	pengembangan kawasan sebesar 100 Ha.
	Kawasan perkebunan kopi	5 Kecamatan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	pengembangan kawasan sebesar 8825 Ha
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	
	Koridor Jalan Arteri Sekunder	Pusat Kota (Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan)	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	total panjang jalan sebesar 21.766 m
			Program Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan Dan Jembatan	
2	**Sosial Budaya**			
	Situs purbakala Megalith	Dusun Tanjung Aro, Dusun Tegur Wangi, Talang Tinggi dan Tanjung Aro, Dusun Nading, Dusun Keban Agung, Dusun Tebing Tinggi, dan Dusun Belumai	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya & Program Pengembangan Nilai Budaya	
	Telaga Alam	Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Dempo Tengah		
3	**Lingkungan Hidup**			
	Kawasan hutan lindung	5 Kecamatan	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	luas kawasan sebesar 28,740 Ha
			Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	

No	Kawasan Strategis	Kecamatan / Kelurahan	Program Pendukung	Keterangan
1	2	3	4	5
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
	Kawasan perlindungan setempat	Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Kecamatan Dempo Tengah	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Spesifikasi jenis adalah sempadan sungai, diantaranya adalah sungai selangis dan Sungai Lematang sejauh 100 meter kanan kiri, yang diidentifikasi sebagai sungai besar, dan sungai endikat kanan dan kiri, sungai kera, sungai putih, sungai cawang, dan sungai selangis besar, beserta dengan anak sungai yang lain diidentifikasi sebagai sungai kecil sejauh 50 meter kanan dan kirinya.
	Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi	Dempo Utara, Pagar Alam Utara, PagarAlam Selatan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Pada radius 15 Km dari kawah termuda.

4.2.8.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

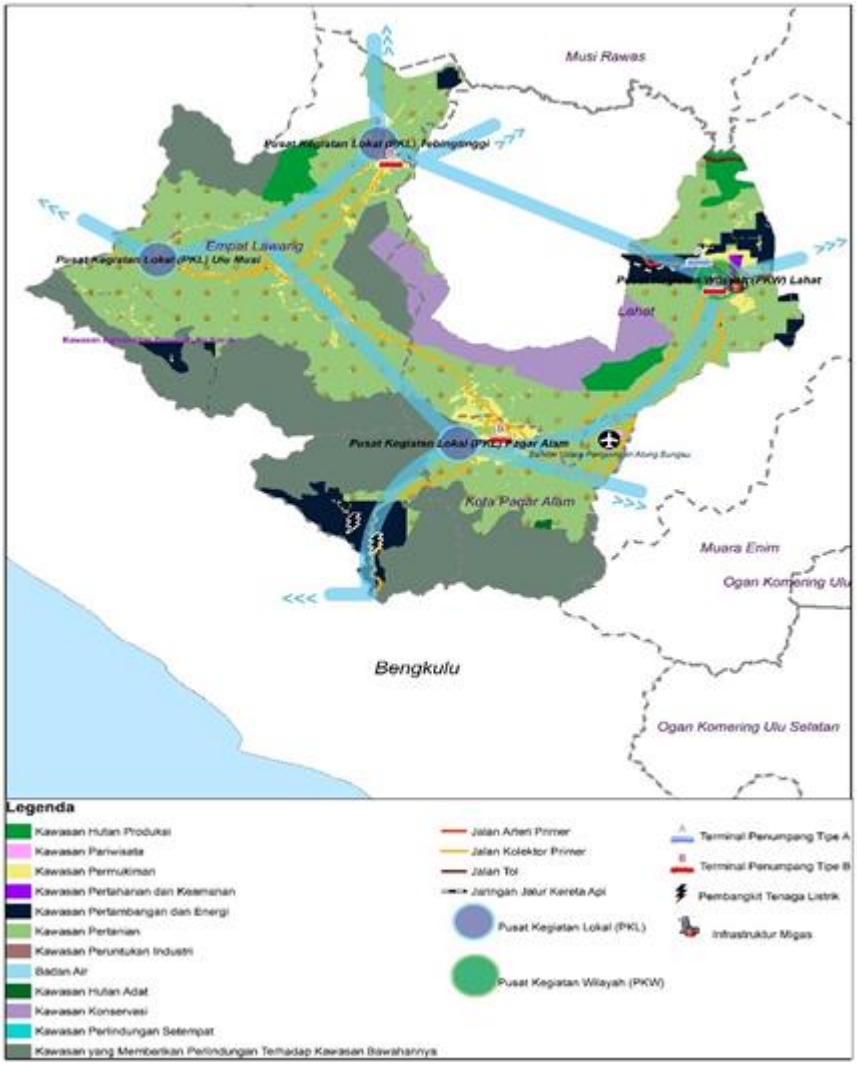
A. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan

3. Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Gambar 4.4 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
b. Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
c. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
d. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
f. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
g. menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Rencana Program Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	170.971.281.918
2	Dinas Kesehatan	85.610.599.450
3	UPTD. Rumah Sakit Daerah Besemah	91.031.339.208
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.900.600.928
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.327.465.968

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.233.139.274
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.514.733.713
8	Dinas Sosial	4.709.700.319
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.456.769.450
10	Dinas Lingkungan Hidup	12.463.626.059
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.639.815.634
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.833.025.659
13	Dinas Perhubungan	28.184.296.354
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.883.220.866
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.072.867.709
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.251.107.517
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.404.306.478
18	Dinas Pariwisata	12.921.793.155
19	Dinas Pertanian	23.753.164.272
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.563.608.795
21	Sekretariat Daerah	42.642.196.107
22	Sekretariat DPRD	56.726.653.014
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.409.237.499
24	Badan Keuangan Daerah	44.352.184.634
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.564.256.429
26	Inspektorat Daerah	9.633.273.236
27	Kecamatan Pagar Alam Utara	13.378.917.539
28	Kecamatan Pagar Alam Selatan	11.617.747.861
29	Kecamatan Dempo Utara	9.177.912.552
30	Kecamatan Dempo Tengah	8.040.517.574
31	Kecamatan Dempo Selatan	7.201.543.394
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.670.626.214
	TOTAL	**881.141.528.779**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala Perangkat Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, Indikator Utama Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,05	
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,11	
3.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	65	
4.	Indeks Infrastruktur	Angka	56,85	
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,75	
6.	Rasio Gini	Indeks	0,274	
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,88	
8.	Rasio Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman	Rasio	4,32	
9.	Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional	Kawasan	2	
10.	Kategori Nilai Sakip	Nilai	B	
11.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	
12.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78	
13.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,13	
14.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3	
15.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,695	
16.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,839	
17.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,23	
18.	Indeks Ketertiban dan Keamanan	Angka	100	
19.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	64,04	
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	72,27	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
21.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	24,1	
22.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	20,62	
23.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	2,082	
24.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	2,082	
25.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	2,87	
26.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	32,5	
27.	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,68	
28.	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	8,82	
29.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	27,27	

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang meliputi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Pagar Alam terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pagar Alam, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	72.27	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	61.20	
3	Indeks Risiko Bencana	Indeks	100	
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6.40	
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.27	
6	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100.00	
7	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	0.263	
8	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	
9	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	99.00	
10	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11.43	
11	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	
12	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	
13	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	5	
14	Luasan Kawasan Konservasi	KmÂ²	0.525	
15	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	81	
16	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	
17	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	
18	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.24	
19	Indeks Kualitas Udara	Indeks	63.59	
20	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	74.64	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Orang	100	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.11	
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	65	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.75	
4	Rasio Gini	Indeks	0.274	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.88	
6	Indeks Pendidikan	Indeks	0.695	
7	Indeks Kesehatan	Indeks	0.839	
8	Tingkat Kemiskinan	(%)	7.23	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.50	
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	70,23-70,54:70,23-70,54	
11	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		82	
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74	
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.60	
14	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks	36.8	
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12	
16	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,415	
17	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,212	
18	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67.55	
19	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	56.31	
20	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	64.08-64.08	
21	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62.51	
22	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	26.76	
23	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	103	
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,63	
25	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	33	
26	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Persentase	100	
27	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	605	
28	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	99	
29	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
30	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	4.1	
31	Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	%	100	
32	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	
33	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi dibidang Perpustakaan	Persentase	15.5	
34	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	16	
35	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	
36	Persentase PMKS yang ditangani	%	96	
37	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
38	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	60	
39	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	67.3	
40	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	Angka	89.40	
41	Guru SMP/MTS yang memenuhi Kualifikasi S1/D IV	Angka	100	
42	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100	
43	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	25	
44	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	1	
45	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	59.76	
46	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi)	%	61.58	
47	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	73.62	
48	Iklim Keamanan SD	Nilai	77.93	
49	cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	Persentase	54	
50	cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase	16.87	
51	cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Persentase	90	
52	persentase kelurahan layak anak	Persentase	100	
53	proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persentase	16	
54	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	11.4	
55	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	20	
56	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	6	
57	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat perlindungan	Persentase	0.1	
58	persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persentase	96.5	
59	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69.76	
60	Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-50	Persentase	75.2	
61	Jumlah Warga Negara korban bencana di Kota Pagar Alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Orang	20	
62	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	76.09	
63	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	95	
64	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	11.44	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
65	cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) Ber-KB	Persentase	90	
66	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	65.25	
67	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	100	
68	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	62.16	
69	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	40	
70	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70.96	
71	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	Orang	30	
72	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	90	
73	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Persentase	27	
74	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	30	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Indeks Infrastruktur	Angka	56.85	
2	Rasio Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman	Rasio	4.32	
3	Kategori Nilai Sakip	Nilai	B	
4	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	64.04	
6	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	24.10	
7	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	20.62	
8	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	2.082	
9	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	2.082	
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	2.87	
11	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	32.5	
12	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1.68	
13	Nilai Tukar Petani (NTP)		111,23	
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	96.96	
15	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persentase	81	
16	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	75	
17	Angka Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	28.22	
18	Jumlah Produksi Padi	Ton	33.275,00	
19	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		93	
20	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	37.5	
21	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		82,59	
22	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	93	
23	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	0.68	
24	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	9.24	
25	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	88	
26	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana dalam Keadaan baik	Persentase	75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
27	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi		83	
28	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	100	
29	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri		88	
30	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan		93	
31	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		83	
32	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	635,00	
33	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
34	Opini Laporan Keuangan	%	100	
35	Jumlah Produksi Jagung	Ton	2.208,00	
36	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	93	
37	Nilai Ekspor Barang		93	
38	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	1100,00	
39	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	28.47	
40	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	1.93	
41	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	93	
42	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	19279,34	
43	Produktivitas Lahan Perikanan	Ton/Ha	24	
44	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	93	
45	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	2330	
46	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan		93	
47	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	93	
48	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	93	
49	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase	83	
50	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		6.20	
51	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji	Persentase	25	
52	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	
53	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	33.5	
54	Total Kredit/PDRB	(%)	41.00	
55	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.484	
56	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	50	
57	Persentase Pekerja Formal	%	22	
58	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota	Angka	1.884	
59	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	
60	Indeks Entropy Theil	Indeks	0.530	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.05	
2	Budaya Lokal yang diangkat menjadi Warisan Budaya Nasional	Kawasan	2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78	
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3.13	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.00	
6	Indeks Ketertiban dan Keamanan	Angka	100	
7	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	8.82	
8	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	27.27	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		92	
10	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	100	
11	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		90.71	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	70	
13	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	47.10	
14	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		58.33	
15	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	85	
16	Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak	%	79.08	
17	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	92	
18	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	29.03	
19	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	55	
20	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	94	
21	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	93	
22	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	86	
23	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	86	
24	Persentase Irigasi dalam kondisi baik	%	60.59	
25	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	92	
26	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100	
27	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	
28	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		45	
29	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	8	
30	Indeks Kematangan Organisasi		30	
31	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi layak	%	62.60	
32	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		100	
33	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		100	
34	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	
35	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
36	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	48.38	
37	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Persentase	100	
38	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		19	
39	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		100	
40	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	Indeks	2	
41	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	
42	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	40	
43	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	
44	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	83	
45	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		95	
46	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Persentase	12.5	
47	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan		100	
48	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pemanfaatan Ruang	Persentase	65	
49	persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase	100	
50	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		33.33	
51	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		95	
52	Persentase Penyelesaian Konflik	Persentase	100	
53	Tingkat Kematangan UKPBJ		80	
54	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		95	
55	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	Persentase	100	
56	persentase layanan kedinasan yang dilaksanakan	%	100	
57	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		1.5	
58	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	92	
59	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Kegiatan	100	
60	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	47	
61	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	92	
62	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	88	
63	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	33	
64	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	
65	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	
66	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100	
67	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
68	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	
69	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		100	
70	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50	
71	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Angka	80.69	
72	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	59.10	
73	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	80	
74	Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	%	100	
75	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	
76	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	
77	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	100	
78	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	
79	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	48	
80	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa berikutnya. ditandatangani pada kuartal pertama	%	100	
81	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	100	
82	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	591.95	
83	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	100	
84	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	100	
85	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jiwa	117868	
86	Persentase partisipasi Pemillih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	%	100	
87	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.7	
88	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jiwa	116812	
89	Kapasitas air baku (m3/detik)	m3/detik	219.65	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 13 - 15 Tahun	Angka	99.42	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7 - 12 Tahun	Angka	100	
3	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79.08	
4	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	32.57	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	1.11	
2	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	
3	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100	
4	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	
13	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	70.64	
2	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	70.64	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	60.59	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	62.50	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	62.31	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0.64	
2	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13.13	
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	7.58	
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	
5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	10	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	50	
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota	%	50	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	100	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	0.3:0.3	
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9.14	
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	105	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			
1	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	60	
2	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	66.10	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	40.63	
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3	Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	77	
4	Perekaman KTP elektronik	%	99.16	
AM	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,8	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	75,2	
3	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2.2	
4	Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6.8	
5	Terbentuknya Kampung KB Di Kelurahan	%	100	
6	Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20.4	
AN	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.43	
2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0.20	
AO	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	9.38	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	83	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	28	
AP	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	6.5	
2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	1.5	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	90	
AQ	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	0.24	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	4	
3	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	27.77	
AR	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	
AS	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	55	
AT	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	62.28	
AU	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	94.5	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61	
AV	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	37.82	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	29.03	
AW	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		377.377	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		2138.470	
AX	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	6.91	
2	Tingkat hunian akomodasi	%	13.10	
3	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	%	5.6	
4	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	5.6	
AY	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6.27	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	8.80	
AZ	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	4.5	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	90	
BA	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	93	
2	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi	%	11	
3	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP	%	36	
4	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	0.4	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	
BB	**5.02 - KEUANGAN**			
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	30:40	
2	Manajemen Aset	Kategori	100	
3	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	65.00	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	15.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN2026	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	10.00	
6	Rasio PAD	%	971293490349:9 1420171078	
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	50.00	
BC	**5.03 - KEPEGAWAIAN**			
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24.48	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23.70	
3	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	89.66	
BD	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**			
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.2	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	

6.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan Kota Pagar Alam sebagaimana yang tertuang didalam RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 merujuk kepada 45 (empat puluh lima) indikator untuk pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan juga diselaraskan dengan indikator utama RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk mengambarkan pencapaian sasaran dan berjalannya arah kebijakan RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045 secara efektif.

Indikator-indikator utama ini dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Pagar Alam Tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 6.3 Target Indikator Utama Pembangunan Tahun 2026

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
MISI 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkeadilan Sosial				
IE1	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Kesehatan untuk Semua**		
1			Usia Harapan Hidup (tahun)	74,22
2			Kesehatan Ibu dan Anak:	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
2. a			Jumlah Kematian Ibu*	3
2. b			Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21
3			Penanganan Tuberkulosis:	
3. a			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)*	90
3. b			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)*	95
4			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99
IE2	**Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata**	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**		
5			Hasil pembelajaran:	
5. b			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:	
			i. Literasi Membaca	74,11
			ii. Numerasi	67,55
5. c			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,50
5. d			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,60
6			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	11,42
IE3	**Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial**	**Perlindungan sosial yang adaptif**	**Perlindungan sosial yang adaptif**	
8			Tingkat Kemiskinan (%)	7,23
9			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	20
MISI 2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui transformasi ekonomi secara berkelanjutan				
IE4	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**		
11			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,93
12			Pengembangan Pariwisata:	
12. a			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,32
12. b			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	250
14			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:	
14. a.i			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%)	21,4
14. a.ii			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	0,72
14. b			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,02

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
14. d			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,07
15			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	
15. a			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,88
15.b			Persentase Pekerja Formal (%)	32,44
16			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,98
17			Tingkat penguasaan IPTEK:	
17. a			Indeks Inovasi Daerah	50
IE6	**Transformasi Digital**	**Transformasi Digital**		
19			Indeks Masyarakat Digital*	55
IE7	**Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Regional**	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**		
21			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,2
22			Nilai Net Ekspor	-6,8
IE8	**Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan**	**Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan**		
23			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:	
23. b			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	96,96
MISI 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
IE9	**Terwujudnya Tata Kelola yang baik, inovatif, bersih melayani serta kemudahan investasi**	**Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif**		
24			Indeks Reformasi Hukum	79,72
25			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2
26			Indeks Pelayanan Publik	3,13
27.a			Survey Penilaian Integritas (SPI)	80,69
MISI 4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah				
IE10	**Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah dalam iklim demokrasi yang kondusif**	**Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi**		
28			a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	100
			b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	87,73
29			Angka Kriminalitas	
30			1. Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	100
			2. Persentase partisipasi Pemillih dalam PEMILU terakhir (5 Tahunan)	91,32
IE11	**Stabilitas Ekonomi Makro**	**Stabilitas Ekonomi Makro**		
31			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB (%)	0,0048
33			Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan:	
33 a.			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	32,97
33 d.			Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	1.684.368,21
33 e.			Total Kredit/PDRB (%)	37,00
IE12	**Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah**	**Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah**	**Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah**	
35			Indeks Entropy Theil*	0,544

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET
36			Indeks Daya Saing Daerah*	2,5
MISI 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya yang Bersendikan Nilai Luhur Kearifan Lokal Serta Ekologi secara berkelanjutan				
IE13	**Meningkatnya kerukunan umat beragama dan berbudaya maju**	**Beragama dan Berkebudayaan Maju**		
37			1. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	8,28
37			2. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	7,27
38			Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (%)	100
IE14	**Meningkatnya kualitas keluarga, Kesetaraan Gender dan Masyarakat inklusif**	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**		
39			Indeks Pembangunan Keluarga	70,23-71,36
40			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,42
IE15	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan**	**Lingkungan Hidup Berkualitas**		
42			Kualitas Lingkungan Hidup:	
42. a			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,27
42. b			Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	62,60
42. c			Pengelolaan Sampah:	
			Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	20
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	87
IE16	**Optimalisasi Pengelolaan SDA Guna Pemenuhan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**	**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**		
43			Ketahanan energi, air, dan pangan:	
43. a			Ketahanan Energi:	
			Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1200
43. b			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	6,77
43. c			Ketahanan Air:	
			Kapasitas air baku (m^3/detik)	219,65
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	57,11
IE17	**Terwujudnya masyarakat yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim**	**Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**	**Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**	
44			Indeks Risiko Bencana (IRB)*	125,5
45			Penurunan Emisi GRK (Ton CO^2 Ekuivalen)	
45. a			- Kumulatif	4,39

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai wujud pelaksanaan Tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2045. Dokumen ini sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 telah dipadukan juga dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dan RKP Tahun 2026.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

RKPD Kota Pagar Alam tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2026 yang mengacu pada isu- isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal- hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2026 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan, perumusan

prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2026 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini.

Pagar Alam, 2025
WALIKOTA PAGAR ALAM,

Dto.

LUDI OLIANSYAH